



# ***LAPORAN***

## **KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan tuntunan - Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2016 telah disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 sebagai laporan Walikota Dumai kepada DPRD Kota Dumai, menyangkut pelaksanaan tugas - tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kita merasakan bersama bahwa pembangunan Kota Dumai yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2016 terdapat kemajuan dan keberhasilan dalam rangka memenuhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kita terus berharap dan berdoa kepada Allah SWT, pelaksanaan program pembangunan selanjutnya pada masa tahun 2016 – 2021 semakin lebih baik dan lebih mensejahterahkan menuju masyarakat Dumai yang makmur dan madani.

Dumai, Maret 2017

WALIKOTA DUMAI

  
Drs. H. ZULKIFLI, AS, M. Si

## DAFTAR ISI

DAFTAR PEGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>
	A. Dasar Hukum ..... I-1
	B. Gambaran Umum Daerah ..... I-2
	1. Kondisi Geografis ..... I-2
	2. Gambaran Umum Demografis ..... I-4
	3. Potensi Unggulan Daerah ..... I-4
	4. Kondisi Ekonomi ..... I-6
<b>BAB II</b>	<b>KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>
	A. Visi dan Misi Pembangunan ..... II-1
	B. Misi Pembangunan Kota Dumai ..... II-1
	C. Arah Kebijakan Pembangunan ..... II-2
	D. Prioritas Belanja Daerah ..... II-8
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN</b>
	<b>KEUANGAN DAERAH .....</b>
	A. Pengelolaan Pendapatan Daerah ..... III-1
	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan ..... III-2
	2. Target dan Realisasi Pendapatan ..... III-2
	3. Permasalahan dan Solusi ..... III-13
	B. Pengelolaan Belanja Daerah ..... III-15
<b>BAB IV</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN</b>
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>
	A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan ..... IV-3
	1. Urusan Wajib Pendidikan.
	Dinas Pendidikan ..... IV-3
	2. Urusan Wajib Kesehatan.
	a. Dinas Kesehatan ..... IV-17
	b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ..... IV-42
	3. Dinas Pekerjaan Umum.
	Dinas Pekerjaan Umum ..... IV-48

4. Urusan Wajib Perhubungan.	
Dinas Perhubungan .....	IV-61
5. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.	
Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan .....	IV-67
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, Lingkungan hidup, Perumahan Rakyat dan Pemberdayaan masyarakat dan desa.	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) .....	IV-71
7. Urusan Wajib Lingkungan Hidup.	
Kantor Lingkungan Hidup .....	IV-91
8. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.	
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	IV- 98
9. Urusan Wajib Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan.	
Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB, PP & PA) .....	IV-101
10. Urusan Wajib Sosial.	
Dinas Sosial .....	IV-106
11. Urusan Wajib Tenaga Kerja.	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	IV-112
12. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	
Dinas Koperasi, UKM Dan Pemberdayaan Masyarakat .....	IV-120
13. UrusanWajib Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.	
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga .....	IV-125
14. UrusanWajib Pemerintahan Umum.	
a. Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal .....	IV-129
b. Sekretariat DPRD .....	IV-132
c. Dinas Pendapatan Daerah .....	IV-136
d. Inspektorat .....	IV-146
e. Badan Kepegawaian dan Diklat .....	IV-151
15. UrusanWajibKesatuanBangsa Dan PolitikDalamNegeri.	
a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat .....	IV-156
b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) .....	IV-158
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	IV-160
16. UrusanWajib Kearsipan, Komunikasi Dan Informatika.	
Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Data Elektronik .....	IV-162

	17. Urusan Wajib Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	
	a. Sekretariat Daerah .....	IV-167
	b. Kecamatan Dumai Timur .....	IV-189
	c. Kecamatan Dumai Selatan .....	IV-195
	d. Kecamatan Dumai Kota .....	IV-203
	e. Kecamatan Dumai Barat .....	IV-219
	f. Kecamatan Medang Kampai .....	IV-222
	g. Kecamatan Bukit Kapur .....	IV-229
	h. Kecamatan Sungai Sembilan .....	IV-238
	<b>B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan .....</b>	<b>IV-245</b>
	1. Urusan Pilihan Pertanian Dan Kehutanan.	
	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan .....	IV-245
	2. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan, Pertanian.	
	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan .....	V-253
	3. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan.	
	a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	IV-265
	b. Kantor Pelayanan Pasar .....	IV-269
	4. Urusan Pilihan Pariwisata.	
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga .....	IV-271
	5. Urusan Pilihan Energi dan sumberdaya Mineral.	
	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan .....	IV-273
<b>BAB V</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM</b>	
	<b>PEMERINTAHAN .....</b>	<b>VI-1</b>
	A. Kerjasama Antar Daerah .....	VI-1
	B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga .....	VI-7
	C. Kerjasama Dengan Luar Negeri .....	VI-20
	D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah .....	VI-20
	E. Pembinaan Batas Wilayah .....	VI-24
	F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana .....	VI-30
	G. Pengelolaan Kawasan Khusus .....	VI-31
	H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum .....	VI-31
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VII-1</b>



# **LKPJ 2016**

## **BAB 1**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2017

## BAB I

### PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan suatu laporan atas penyelenggaraan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka LKPJ akhir tahun anggaran kepala daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ akhir tahun anggaran Kepala Daerah disusun berdasarkan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LKPJ akhir tahun anggaran Kepala Daerah mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. LKPJ yang disampaikan oleh pemerintah kota Dumai pada saat ini adalah LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2016.

#### A. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016.
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016.
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 .

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Kondisi Geografis**

#### **a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau, terbentuk pada tanggal

20 April 1999 yang semula merupakan kota Administratif disinkronisasikan berdasarkan tata ruang Kota Dumai dengan luas wilayah 2.046,75 Km<sup>2</sup> dan wilayah perairan seluas 71.393 ha.

Pembentukan Kota Dumai ini ditetapkan dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50. Kota Dumai yang sebelumnya hanya 5 kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 telah terbagi menjadi 7 kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Dumai Timur
- 2) Kecamatan Dumai Barat
- 3) Kecamatan Bukit Kapur
- 4) Kecamatan Dumai Selatan
- 5) Kecamatan Dumai Kota
- 6) Kecamatan Sungai Sembilan
- 7) Kecamatan Medang Kampai

Secara geogafis, Kota Dumai berada pada koordinat 101<sup>o</sup> 23'37' - 101<sup>o</sup> 28' 13" Bujur Timur dan 1<sup>o</sup> 23' - 1<sup>o</sup> 24-23 Lintang Utara. Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar 1.727,38 km<sup>2</sup> dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa - rawa atau tanah basah. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0 - 0,5 m dan ketinggian rata - rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Diwilayah Kota Dumai terdapat 15 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh kedaerah hulu sungai. Sungai Bulu Hala, Sungai Senepis, Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

#### b. Iklim dan Curah Hujan

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan curah

hujan tahunan berkisar antara 1828 - 2473 mm per tahun dan rata-rata curah hujan bulanan 254,8 mm per bulan, panjang hari hujan rata-rata 280 hh/tahun. Rata-rata periode musim hujan terjadi pada bulan September – Mei, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Juni-Agustus.

Berdasarkan klasifikasi tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson (1951) yang didasarkan atas keadaan banyaknya bulan basah (>100 mm/bulan) dan bulan kering (< 60 mm/bulan), tipe curah hujan di wilayah Dumai digolongkan kedalam tipe curah B (basah), yaitu memiliki 8 bulan basah dan 2 bulan kering. Kota Dumai mempunyai iklim tropis dengan kelembaban udara rata-rata 84,74 %, rata-rata suhu adalah 28°C (suhu maksimum 34°C dan suhu minimum 21,5°C), rata-rata bulanan penyinaran matahari 44,4 %. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau antara bulan Maret s/d Agustus dan musim hujan bulan September s/d Februari dengan suhu udara rata-rata 24° – 33°C (Sumber: Draft RTRW Kota Dumai Tahun 2014-2034).

## 2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik data publikasi tahun 2015 adalah sebanyak 285.967 jiwa. Jumlah penduduk laki - laki sebanyak 146.792 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 139.175 jiwa. Dengan kepadatan penduduk sebanyak 165 jiwa per km<sup>2</sup>.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Dumai Kota dengan jumlah penduduk 61.625 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 11.470 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran penduduk di Kota Dumai Tahun 2014 sebagaimana tergambar pada *Tabel 1.1* berikut ini :

*Tabel 1.1*  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Kota Dumai Tahun 2013 - 2015

No	Kecamatan	2013	2014	2015
1.	Bukit Kapur	45.933	42.399	43.403
2.	Medang Kampai	11.235	11.240	11.470
3.	Sungai Sembilan	32.065	30.475	31.158
4.	Dumai Barat	38.062	39.688	40.572
5.	Dumai Timur	50.429	50.593	51.616
6.	Dumai Kota	60.482	60.450	61.685
7.	Dumai Selatan	41.815	45.264	46.063
	<b>Jumlah</b>	<b>280.027</b>	<b>280.109</b>	<b>285.967</b>

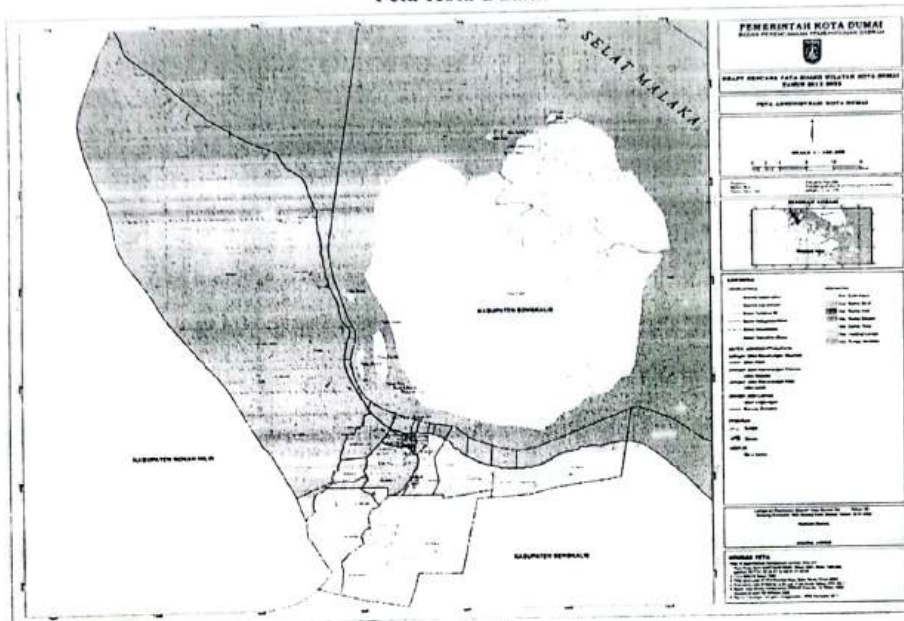
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai

## 3. Potensi Unggulan Daerah

Kota Dumai yang berhadapan langsung dengan Selat Rupa dan Selat Selat Malaka, berada pada jalur perhubungan laut terpadat sehingga Kota Dumai menjadi salah satu pelabuhan Samudra yang paling strategis dan potensial untuk kegiatan *eksport* dan *import*. Terletak di tengah - tengah intensitas jalur penghubung darat, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi

Sumatera Barat serta penghubung untuk daerah Riau Daratan dan Kota Dumai sebagai penghubung laut yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia khususnya Malaka, Negeri Sembilan dan Singapura, maka Kota Dumai sangat layak menjadi Pusat Perdagangan. Dumai dicanangkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*).

Gambar 1.1  
Peta Kota Dumai



Sumber : Dokumen Ranperda RTRW Kota Dumai

Sebagai sebuah kota yang berkembang pesat, Dumai telah dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik seperti sarana transportasi (jalan raya, pelabuhan dan bandar udara), listrik, perbankan, layanan telekomunikasi canggih (termasuk telepon seluler dan jaringan internet).

Kota Dumai dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 298.189 jiwa merupakan salah satu Kota Pelabuhan International paling strategis di Provinsi Riau. Sebagai pintu gerbang di pantai timur Sumatera, pelabuhan Dumai berperan penting dalam melayani aktifitas *eksport - import* barang dan penumpang domestik maupun manca negara seperti Malaka - Malaysia. Seiring dengan perkembangan globalisasi, kota Dumai menjadi pelabuhan tersibuk pintu gerbang utama Provinsi Riau. Dengan total area  $\pm$  1.000 ha, Kota Dumai mampu menarik investor dari segala belahan dunia dengan persimpangan selat Malaka.

Hal ini disebabkan oleh beberapa lokasi industri Kota Dumai yang kaya akan potensi seperti Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri ini memiliki beberapa keunggulan sekaligus potensi penarik investasi diantaranya disisi pertanian, perkebunan, kelautan, budaya, pariwisata dan keamanan. Kesemuanya melibatkan masyarakat Dumai sebagai sumber daya yang mampu menaikkan nilai ekonomi Kota Dumai itu sendiri.

Secara geografis Pelabuhan Dumai merupakan pelabuhan samudera, terletak pada koordinat 01o - 41' - 14" LU dan 101o - 27' - 42" BT, terlindungi oleh Pulau Rupaat sehingga terbebas dari gelombang dan badai, kondisi pasang surut tertinggi  $\pm$  346 cm dan terendah  $\pm$  36 cm. Pelabuhan Dumai berada di Provinsi Riau - Indonesia, dibangun tahun 1957 dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah wilayah kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

Pelabuhan Dumai mempunyai peran yang penting sebagai pintu gerbang perekonomian nasional Indonesia khususnya Provinsi Riau dan Provinsi lainnya di sekitarnya. Hal ini didukung oleh lokasinya yang strategis berada di Selat Malaka dan memiliki potensi *hinterland* pertanian, perkebunan sawit yang luas, pertambangan minyak bumi dan industri. Pelabuhan Dumai memiliki alur pelayaran sepanjang 55 mil terdiri dari 22 mil melalui Selat Bengkalis dan 33 mil melalui Selat Rupaat, kelebaran alur minimum 255 meter dan maksimum 1,7 km dengan kedalaman rata - rata 16 meter, dapat dikunjungi oleh kapal - kapal samudera dan antar pulau dengan ukuran maksimum LOA 255 m, 30.000 Grt, 47.000 DWT dengan draft 10,5 m. Pelabuhan Dumai memiliki area seluas 785.161 M<sub>2</sub>, dimanfaatkan untuk fasilitas kepelabuhanan (dermaga, perkantoran, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang dll) juga mempunyai area yang disewakan. Umumnya area yang disewakan dibangun Industri, gudang dan tangki penimbunan CPO. Komoditi dominan melalui Pelabuhan Dumai adalah CPO (*Crude Palm Oil*) dan turunannya serta komoditi curah kering yaitu PKE (*Palm Kernel Ekspeller*), PKS (*Palm Kernel Shell*) serta pupuk.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Pengukuran keberhasilan kinerja selama Tahun 2015 secara keseluruhan menggunakan indikator kinerja makro yang merupakan indikator kinerja yang merepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Dumai sebagai hasil kontribusi implementasi program dan kegiatan Tahun 2015 dari seluruh unit kerja. Indikator kinerja makro yang digunakan adalah indikator kinerja makro ekonomi dan indikator kinerja makro sosial.

##### a. Perkembangan PDRB

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2010-2014, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, PDRB Kota Dumai dengan migas ADHK adalah sebesar 20 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB adalah sebesar 23 triliun rupiah (tabel 1.2 dan tabel 1.3 Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai.

**Tabel 1.2**  
**PDRB Kota Dumai 2011-2015 Dasar Harga Konstan 2010**

No	Kategori	PDRB ADHK 2010				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.132.320,30	1.131.619,70	1.119.969,8	1.138.071,4	1.139.967,3
B.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	85.549,70	86.416,20	86.479,50	87.258,60	87.421,2
C.	INDUSTRI PENGOLAHAN	9.771.772,20	10.035.476,90	10.414.550,8	11.088.754,3	11.116.755,8
D.	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS.	9.861,80	10.521,20	11.612,1	12.897,0	13.733,6
E.	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	3.313,20	3.341,90	3.363,40	3.429,0	3.523,7
F.	BANGUNAN	2.041.231,40	2.117.406,70	2.181.412,10	2.011.314,50	2.119.777,3
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASIMOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3.543.891,10	3.652.938,20	3.735.616,9	3.884.270,3	3.946.043,6
H.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	453.613,60	503.239,10	537.461,4	591.001,2	602.252,4
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	107.986,80	123.319,20	134.378,8	146.744,7	150.191,3
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	144.674,60	170.547,10	206.134,10	229.294,90	245.697,4
K.	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	292.164,60	397.959,40	471.332,9	285.154,2	265.536,8
L.	REAL ESTATE	81.753,50	83.055,80	86.988,10	90.248,60	94.773,1
M, N	JASA PERUSAHAAN	772,40	831,70	883,50	958,60	1.032,2
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIALWAJIB	402.020,00	412.484,00	419.717,30	421.465,80	429.988,8
P.	JASA PENDIDIKAN	74.949,80	78.210,70	82.520,20	89.917,60	94.631,4
Q.	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	24.430,20	26.531,20	28.650,40	29.384,70	32.305,6
R, S, T, U	JASA LAINNYA	71.957,60	75.946,70	83.596,50	94.630,5	102.020,1
<b>PDRB</b>		<b>18.242.262,3</b>	<b>18.909.845,7</b>	<b>19.605.667,9</b>	<b>20.204.795,7</b>	<b>20.445.651,5</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2016

Tabel 1.3  
PDRB Kota Dumai 2011-2015 Dasar Harga Berlaku

No	Kategori	PDRB ADHB 2010				
		2011	2012	2013	201	2015
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.195.515,00	1.247.513,80	1.290.663,20	1.437.574,70	1.547.478,3
B.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	87.981,00	90.719,40	93.219,00	108.904,90	120.471,7
C.	INDUSTRI PENGOLAHAN	9.468.326,00	9.345.365,10	10.909.915,8	12.468.900,4	13.160.756
D.	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS.	8.604,20	7.674,20	7.555,6	10.894,1	15.716,2
E.	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	3.374,30	3.520,40	3.454,50	3.653,90	4.044,6
F.	BANGUNAN	2.230.760,60	2.337.085,10	2.556.624,7	2.512.176,40	2.819.884,0
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASIMOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3.681.731,10	3.861.649,40	4.014.813,20	4.789.145,7	5.026.523,3
H.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	477.523,60	551.241,30	615.012,00	727.106,60	807.615,8
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	113.141,90	126.321,90	162.081,9	220.381,6	235.071,2
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	145.290,00	173.009,50	198.535,20	234.989,00	270.710,4
K.	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	308.613,80	462.454,80	578.397,50	366.129,1	355.025,1
L.	REAL ESTATE	87.925,60	92.715,10	100.011,60	113.119,60	127.215,1
M, N	JASA PERUSAHAAN	808,60	965,10	1.070,50	1.233,70	1.419,1
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	407.170,50	453.573,60	474.552,00	494.473,40	524.615,7
P.	JASA PENDIDIKAN	84.449,20	89.696,00	96.837,50	122.921,40	142.978,7
Q.	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	25.735,60	29.852,50	33.349,60	37.775,20	46.880,4
R, S, T, U	JASA LAINNYA	79.469,70	83.006,20	95.672,3	117.702,1	142.498,9
<b>PDRB</b>		<b>18.406.420,8</b>	<b>18.956.363,5</b>	<b>21.231.766,2</b>	<b>23.767.071,9</b>	<b>25.348.904,6</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2016

Adapun Struktur ekonomi kota Dumai Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi Sektoral PDRB 2011-2015**

No	Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	6,50	6,58	6,08	6,05	6,10
B.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,48	0,48	0,44	0,46	0,48
C.	INDUSTRI PENGOLAHAN	51,44	49,30	51,38	52,46	51,92
D.	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS.	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06
E.	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	BANGUNAN	12,12	12,33	12,04	10,57	11,12
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASIMOBIL DAN SEPEDA MOTOR	20,00	20,37	18,91	20,15	19,83
H.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	2,59	2,91	2,90	3,08	3,19
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	0,61	0,67	0,76	0,93	0,93
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0,79	0,91	0,94	0,99	1,07
K.	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	1,68	2,44	2,72	1,54	1,40
L.	REAL ESTATE	0,48	0,49	0,47	0,48	0,50
M, N	JASA PERUSAHAAN	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIALWAJIB	2,21	2,39	2,24	2,08	2,07
P.	JASA PENDIDIKAN	0,46	0,47	0,46	0,52	0,56
Q.	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	0,14	0,16	0,16	0,16	0,18
R, S, T, U	JASA LAINNYA	0,43	0,44	0,45	0,50	0,56
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2016

#### b. Pertumbuhan PDRB

Besaran PDRB Kota Dumai terus meningkat dari tahun ke tahun, namun begitu pertumbuhan ekonomi Kota Dumai selalu belfluktuasi selama lima tahun terakhir, tabel berikut menyajikan pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2011-2015 atas dasar harga konstan 2010.

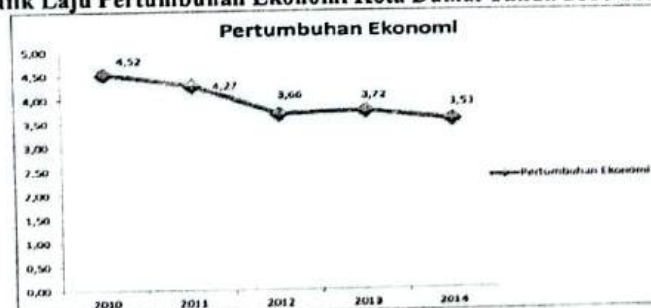
**Tabel 1.5**  
**Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010**

No	Kategori	Pertumbuhan(%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,93	(0,06)	(1,03)	1,62	0,17
B.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,49	1,01	0,07	0,90	0,19
C.	INDUSTRI PENGOLAHAN	5,90	2,70	3,78	6,47	0,25
D.	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS.	8,65	6,69	10,37	11,06	6,49

No	Kategori	Pertumbuhan(%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
E.	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	1,21	0,87	0,64	1,95	2,76
F.	BANGUNAN	(1,12)	3,73	3,02	7,80	5,39
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASIMOBIL DAN SEPEDA MOTOR	4,45	3,08	2,26	3,98	1,59
H.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	5,70	10,94	6,80	9,96	1,90
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9,03	14,20	8,97	9,20	2,35
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	13,92	17,88	20,87	11,24	7,15
K.	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	(9,52)	36,21	18,44	(39,50)	(6,88)
L.	REAL ESTATE	4,66	1,59	4,73	3,75	5,01
M, N	JASA PERUSAHAAN	8,76	7,68	6,23	8,50	7,67
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIALWAJIB	3,34	2,60	1,75	0,42	2,02
P.	JASA PENDIDIKAN	10,46	4,35	5,51	8,96	5,24
Q.	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	3,55	8,60	7,99	2,56	9,94
R, S, T, U	JASA LAINNYA	10,28	5,54	11,39	11,86	7,81
Pertumbuhan ekonomi		4,52	3,66	3,68	3,06	1,19

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2016

Grafik 1.1  
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2010-2014



Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 kota Dumai selama kurun waktu 2010-2014 cenderung melambat. Pada Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Dumai adalah sebesar 4,52%, tahun 2011 melambat menjadi 4,27% dan tahun 2012 menjadi 3,66%. Pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi membaik menjadi 3,72% namun pada tahun 2014 kembali melambat menjadi 3,53%. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengambilan strategi dan kebijakan terkait perkembangan ekonomi kota Dumai kedepannya.

Berdasarkan hasil perhitungan sektor basis pada sektor PDRB kota Dumai, maka sektor-sektor PDRB kota Dumai tahun 2014 dapat ditipologikan pada:

1. Sektor basis dan unggulan yaitu Industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib; jasa lainnya
2. Sektor non basis prospektif jasa pendidikan
3. Sektor non basis, non prospektif Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan & penggalian; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan analisa shift share dengan metode klasik didapatkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah sektor pengadaan listrik dan gas ; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan
2. Sektor Yang Berkembang Adalah Sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan; Bangunan; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasimobil Dan Sepeda Motor; Transportasi Dan Pergudangan; Jasa Keuangan Dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya
3. Sektor yang cenderung berpotensi adalah sektor pertambangan & penggalian

Sektor yang tidak mampu berkembang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib

#### c. Pendapatan per Kapita

Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Selama kurun waktu 2010-2014 peningkatan kemajuan ekonomi Kota Dumai telah meningkatkan pendapatan penduduknya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 3,53% menghasilkan pendapatan perkapita sebesar 84,23 juta Rupiah . Sedangkan pada tahun 2010-2013 berturut-turut adalah 69,103 juta, 69,992 juta, 68,815 juta dan 75,541 juta.

**Tabel 1.6**  
Pendapatan per Kapita Kota Dumai tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
PDRB perkapita	69.103.447,38	69.992.777,67	69.815.202,45	75.541.838,82	84.236.307,29
Pertumbuhan ekonomi	4,52	4,27	3,66	3,72	3,53

Sumber: BPS, 2015, data diolah Bappeda

Grafik 1.2  
Perkembangan Tingkat Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Tahun 2010-2014



Pada terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pendapatan perkapita pada tahun 2010-2014, jika diambil selisih antara tahun 2010 dan tahun 2014, maka kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat kota Dumai berdasarkan PDRB tahun 2010-2014 adalah sebesar 15,132 juta Rupiah.

#### d. Kemiskinan

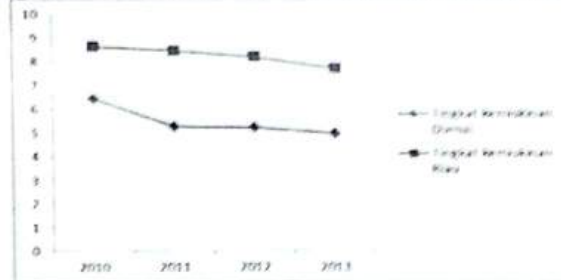
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2010-2014 cenderung menurun. Pada Tahun 2009 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 6,08 persen dengan jumlah penduduk miskin lebih kurang 15.700 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp.261.859,00/kapita/bulan. Pada tahun 2014, persentase kemiskinan kota Dumai turun menjadi 4,83% dengan jumlah penduduk miskin lebih kurang 13.600 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp 341.525,00/kapita/bulan. Dta tersebut sampai saat ini masih ada sekita 13.600 orang penduduk kota yang hidup dengan pendapatan di bawah angka tersebut. Adapun rincian Data dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7  
Penduduk Miskin di Kota Dumai Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah penduduk miskin (000)	15,70	16,50	13,97	14,30	13,70
Persentase penduduk miskin	6,08	6,45	5,27	5,23	4,98
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	261.859	287.975	298.127.00	311.891.00	328.158.00

Sumber: TNP2K, 2016

**Grafik 1.3**  
**Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2010-2013**



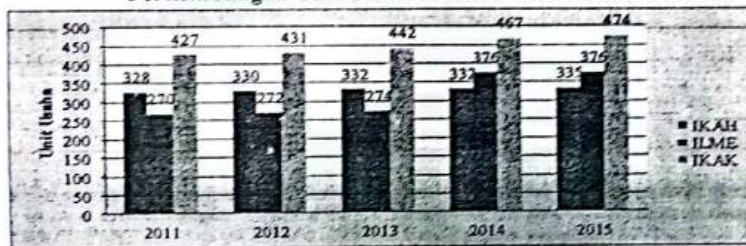
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, BPS

5. Perkembangan Investasi

a. Industri

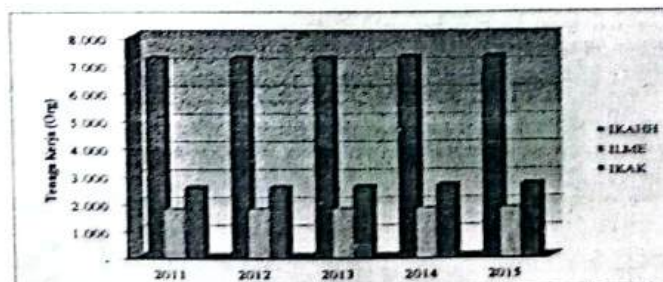
Dari rangkaian Program/ Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2011 - 2014, tujuannya selain menumbuhkan dan mengembangkan industri kecil, juga meningkatkan produktifitas dan daya saing industri kecil itu sendiri melalui peningkatan kualitas serta diversifikasi produk dengan menggunakan teknologi madya sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan mampu bersaing dipasaran.

**Grafik 1.4**  
**Perkembangan Unit Usaha Industri Tahun 2011 s/d 2015**



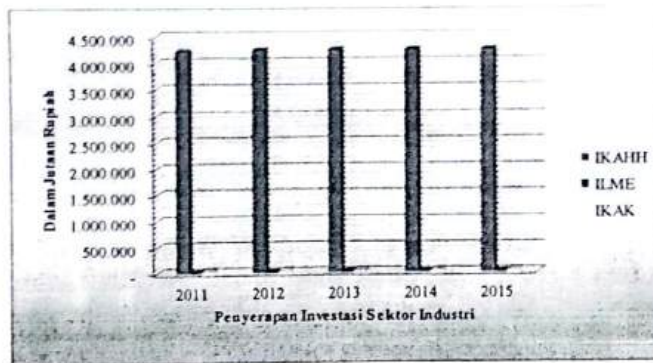
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

**Grafik 1.5**  
**Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Tahun 2011 s/d 2015**



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

**Grafik 1. 6**  
**Penyerapan Investasi Sektor Industri**  
**2011 s/ d 2015 Kota Dumai**



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

Untuk lebih jelasnya perkembangan sektor industri dirinci menurut Unit Usaha, Nilai Investasi dan penyerapan tenaga kerja sampai dengan akhir tahun 2015 di Kota Dumai dapat dilihat seperti **Tabel 1. 8** berikut ini :

**Tabel 1. 8**  
**Perkembangan Industri berdasarkan Unit Usaha, Nilai Investasi**  
**dan Tenaga Kerja Kota Dumai sampai dengan Tahun 2015**

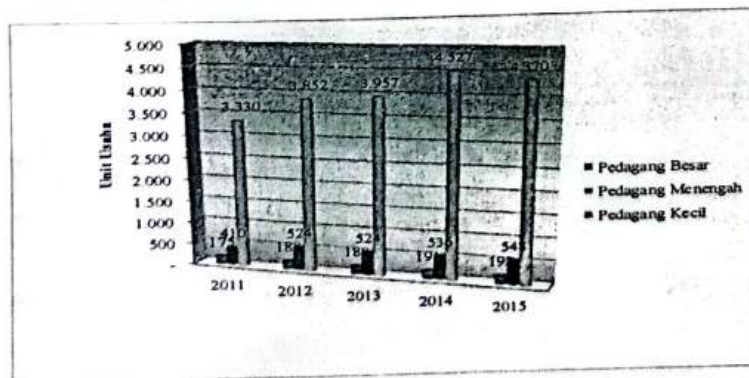
Uraian	Unit Usaha	Nilai Investasi (Jutaan Rp)	Tenaga Kerja (Orang)
Ind. Kimia, Agro dan Hasil Hutan	335	4.248.378	7.259
Ind. Logam, Mesin dan Elektronika	376	26.215	1.771
Ind. Kecil Aneka dan Kerajinan	474	50.601	2.650
<b>Total</b>	<b>1.185</b>	<b>4.325.194</b>	<b>7.071</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

**b. Perdagangan**

Dari rangkaian program/ kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 - 2015 disektor Perdagangan cukup memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan usaha di Sektor perdagangan di Kota Dumai.

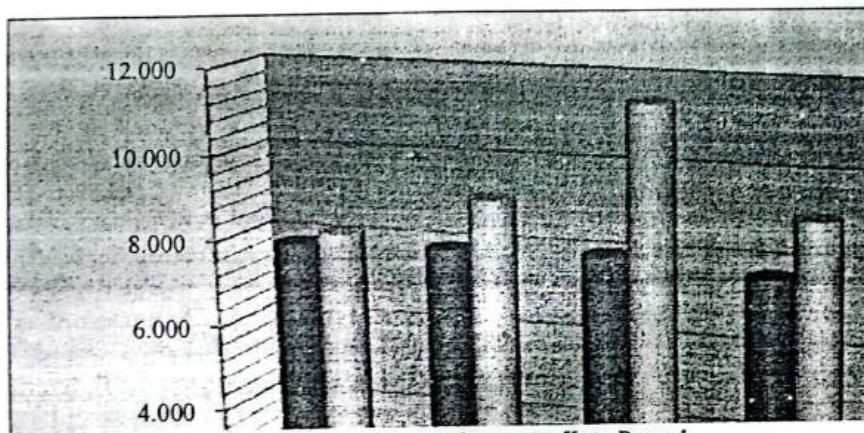
**Grafik 1. 7**  
**Perkembangan Unit Usaha Sektor Perdagangan**  
**Berdasarkan Kelompok Usaha Kota Dumai Tahun 2011 - 2015**



Sejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2015 terjadi peningkatan unit usaha perdagangan dari 3.915 unit usaha pada tahun 2011 meningkat menjadi 55.110 unit usaha pada akhir tahun 2015 atau terjadi peningkatan usaha sebanyak 1195 Unit Usaha (30,52%). Jika dilihat dari kelompok usaha, maka 85,22% adalah kelompok Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM).

Selanjutnya melihat kinerja *eksport* Kota Dumai selama tahun 2011 - 2013 trendnya terus meningkat, namun pada tahun 2014 - 2015 menurun bila dilihat dari volume dan nilai *eksport*. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pajak *eksport* serta menurunnya permintaan luar negeri, untuk gambaran kinerja *eksport* kota Dumai dapat dilihat pada **Grafik 1. 8** berikut :

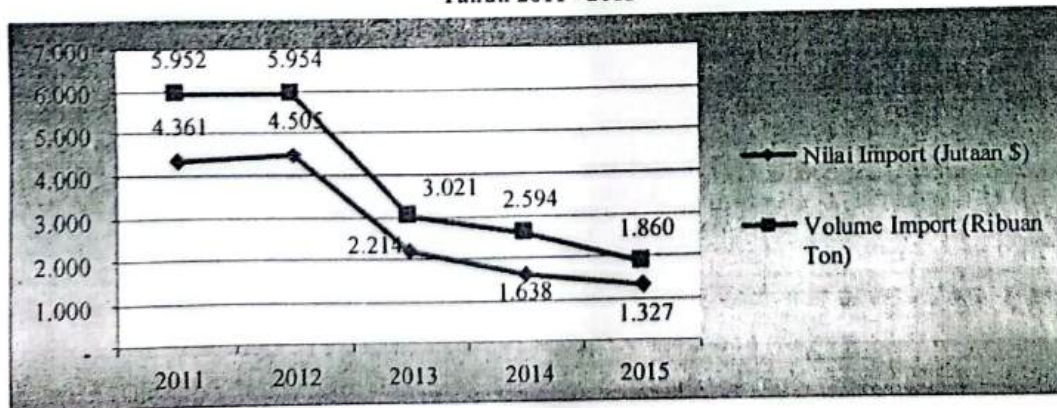
**Grafik 1. 8**  
Realisasi Ekspor Non Migas Kota Dumai  
Tahun 2011 - 2015



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

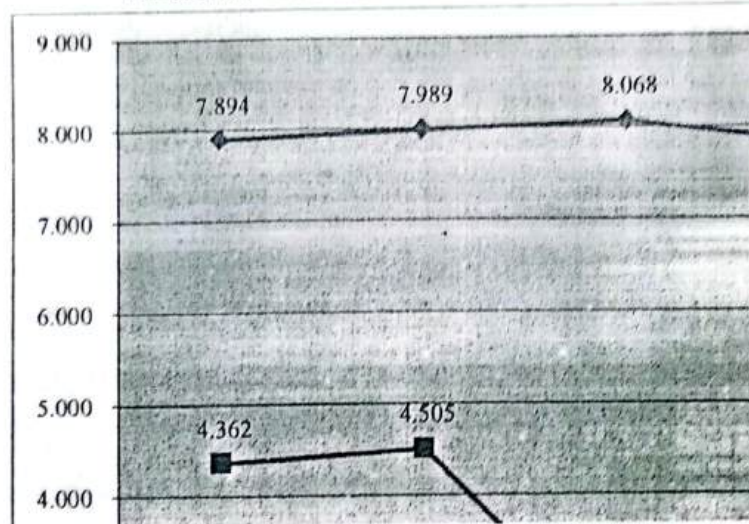
Demikian pula dengan *Import*, dari tahun 2011 samapai dengan akhir tahun 2015 cenderung menurun baik dari segi nilai maupun volume, dan sebagian besar barang *import* di Kota Dumai merupakan barang - barang modal. Untuk mendapat gambaran perkembangan *import* sebagaimana **Grafik 1. 9** berikut :

**Grafik 1. 9**  
Realisasi Import Kota Dumai  
Tahun 2011 - 2015



Bila diambil perbandingan antara nilai *eksport* dengan nilai *import* dari tahun 2011 sampai akhir 2015, maka *eksport* bersih Kota Dumai (Nilai *eksport* dikurangi nilai *Import*) rata - rata setiap tahunnya terjadi surplus, dan sebagai gambaran dapat dilihat *Grafik 1. 10* berikut :

**Grafik 1. 10**  
**Perbandingan Nilai Eksport dan Import (Jutaan US \$)**  
**Tahun 2011 – 2015 Kota Dumai**



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

6. Bidang Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 14 tahun yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2010 angka melek huruf sebesar 99,31%, dan pada tahun-tahun berikutnya, selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Angka melek huruf pada tahun 2013-2015 konstan pada angka 99,43%, hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai.

**Tabel 1.9**  
**Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melek Huruf	99.31	99.35	99.40	99.43	99.43	99.43

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Grafik 1.11  
Grafik Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2010-2015



b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:

a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang maka Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

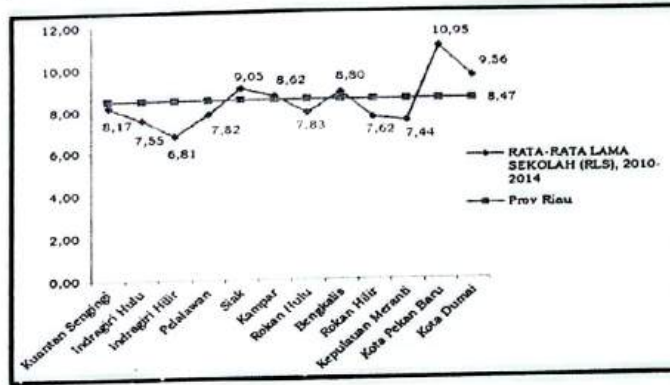
**Tabel 1.10**  
**Angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai dibandingkan**  
**Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau Tahun 2010-2014**

Prov/Kab/Kota	Angka rata-rata Lama Sekolah				
	2010	2011	2012	2013	2014
RIAU	8,25	8,29	8,34	8,38	8,47
Kuantan Sengingi	7,19	7,46	7,68	7,70	8,17
Indragiri Hulu	7,20	7,31	7,38	7,46	7,55
Indragiri Hilir	6,54	6,66	6,70	6,74	6,81
Pelalawan	6,94	7,20	7,41	7,74	7,82
Siak	8,60	8,72	8,77	8,81	9,05
Kampar	8,08	8,56	8,59	8,62	8,62
Rokan Hulu	7,18	7,24	7,31	7,38	7,83
Bengkalis	8,14	8,34	8,64	8,76	8,80
Rokan Hilir	7,24	7,30	7,36	7,42	7,62
Kepulauan Meranti		6,27	6,80	7,33	7,44
Kota Pekanbaru	10,67	10,84	10,88	10,93	10,95
Kota Dumai	9,36	9,42	9,48	9,54	9,56

Sumber : BPS, 2015

Jika dilihat pada tabel diatas, maka angka rata-rata lama sekolah masyarakat kota Dumai selama kurun waktu 2010-2014 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Dumai terus meningkat dalam membiayai pendidikan mereka. Untuk Tingkat provinsi riau, angka rata-rata lama sekolah kota Dumai nomor 2 setelah kota Pekanbaru.

**Grafik 1.12**  
**Perbandingan Angka Rata-rata lama Sekolah di Provinsi Riau Tahun 2010-2014**



**c. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK**

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

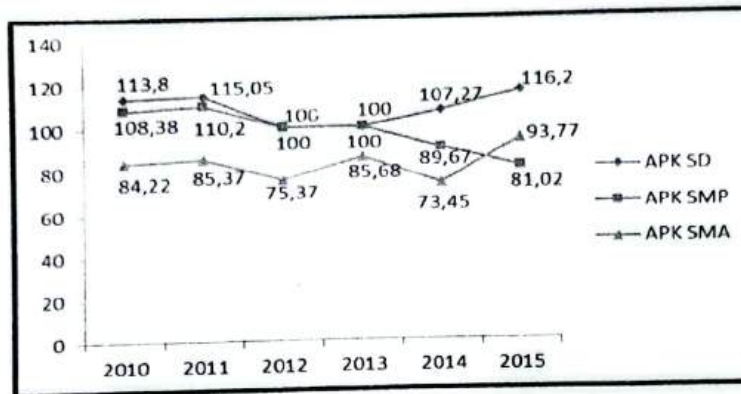
**Tabel 1.11**  
**Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK**  
**Kota Dumai Tahun 2010-2015**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
APK SD	113,80	115,05	>100	>100	107,27	116,20
APK SMP	108,38	110,20	>100	>100	89,67	81,02
APK SMA	84,22	85,37	75,37	85,68	73,45	93,77

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2010 hingga tahun 2015 pada jenjang SD menunjukkan tren perkembangan yang sedikit fluktuatif. Pada tahun 2010 nilai APK SD sebesar 113,80 dan pada tahun 2015 turun menjadi 116,20. Sedangkan pada jenjang SMP, nilai APK dari tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan tren yang menurun, pada tahun 2010 sebesar 108,38 turun menjadi 81,02 pada tahun 2015. Pada jenjang SMA sederajat, nilai APK mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2010 nilai APK adalah sebesar 84,22 pada tahun 2015 naik menjadi 93,77.

**Grafik I.13**  
**Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK**  
**Kota Dumai Tahun 2010-2015**



d. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam persentase. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu misalnya perguruan tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

**Tabel 1.12**  
**Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan**  
**Di Kota Dumai Tahun 2010-2015**

NO	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tdk/ Belum Pernah Sekolah	NA	28,10%	NA	NA	32,10%	34,30%
2	Tidak/Belum tamat SD		12,10%			11,00%	10,30%
3	SD/MI/Sederajat		17,80%			16,80%	16,20%
4	SLPT/MTs		13,00%			12,20%	12,00%
5	SMA/SMK		23,20%			22,40%	21,90%
7	D I/II		0,70%			0,60%	0,60%
8	AKADEMI/D III		1,80%			1,80%	1,70%
9	S1/Sarjana		3,10%			3,00%	2,90%
10	S2/S3/Pasca Sarjana		0,10%			0,10%	0,10%

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Berdasarkan tabel diatas, persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SMA/SMK sebesar 21,90% pada tahun 2015, kemudian disusul oleh SD/MI/Sederajat dengan nilai 16,20% kemudian SLTP/MTs yaitu sebanyak 12,00%. Sedangkan jenjang pendidikan tertinggi yang memiliki persentase paling kecil adalah tingkat s2/s3/Pasca Sarjana dengan nilai 0,10%. Selama 6 tahun, mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2015, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah daerah, antara lain dengan program pendidikan gratis juga mampu mendorong hal ini.

Namun yang patut menjadi perhatian dari pemerintah kota Dumai adalah, masih adanya masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar, juga masih banyak masyarakat yang belum lulus jenjang pendidikan SD. Tren perkembangan dari tahun 2011 hingga 2015, menunjukkan angka yang relatif meningkat. Pada tahun 2011 persentase masyarakat yang tidak bersekolah adalah 28,10%, sedangkan pada tahun 2015 angka tersebut malah meningkat menjadi 34,30%. Peningkatan ini bisa dipengaruhi oleh angka kelahiran bayi setiap tahunnya, namun begitu pemerintah kota Dumai terus berusaha mengentaskan masyarakat yang pada usia sekolah tapi tidak mengenyam pendidikan.

#### e. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

**Tabel 1.13**  
Angka Partisipasi Murni  
di Kota Dumai Tahun 2010-2015

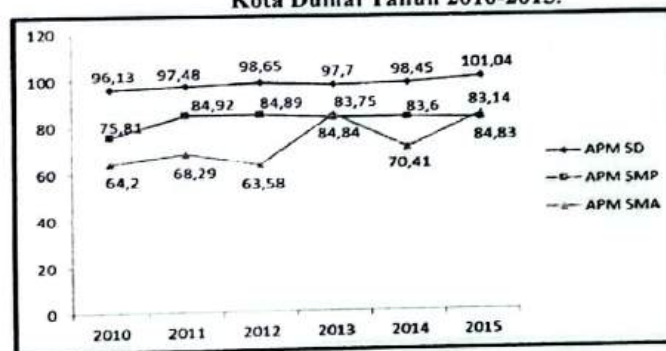
No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	APM SD	96,13	97,48	98,65	97,70	98,45	101,04
2	APM SMP	75,81	84,92	84,89	83,75	83,60	83,14
3	APM SMA	64,20	68,29	63,58	84,84	70,41	84,83

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Berdasarkan tabel, tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2010, nilai APM untuk SD adalah sebesar 96,13, selama 6 tahun hingga tahun 2015 angka tersebut menunjukkan perkembangan meningkat,

hingga pada tahun 2015 naik menjadi 101,04. Sedangkan untuk APM jenjang SMP, dari tahun 2010 hingga tahun 2015, cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun lebih cenderung meningkat. Pada tahun 2010, nilai APM adalah 75,81, dan pada tahun 2014 naik menjadi 83,14. Sedangkan untuk jenjang SMA sederajat, tren perkembangan nilai APM cenderung fluktuatif. Nilai APM pada tahun 2010 adalah sebesar, 64,20 naik menjadi 84,83 pada tahun 2015. Berfluktuatifnya nilai APM pada kedua jenjang tersebut, terutama untuk jenjang SMA sederajat, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, fasilitas pendidikan yang kemungkinan hanya ada di kota Dumai, dan sangat sedikit jumlahnya untuk di luar Kota Dumai, sehingga membuat orang tua kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Berfluktuatifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh pemerintah Dumai dan Dinas pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.

Grafik 1.14  
Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK  
Kota Dumai Tahun 2010-2015.



## 7. Bidang Kesehatan

### a. Hasil Pelaksanaan Prioritas Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Pelaksanaan program di bidang kesehatan selama tahun 2015 dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut :

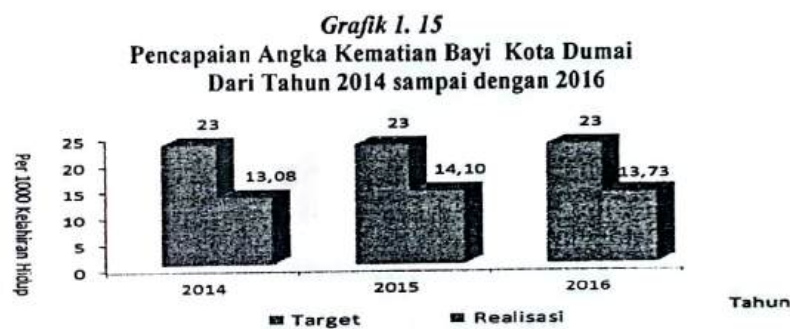
Tabel 1.14  
Sasaran 1 : Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian) Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 23	14,10	100%
2.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 32	16,88	100%
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	125	109,32	100%
4.	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70,06	70,25	100%

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 1 yakni menurunnya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2016 adalah sebesar 100% karena ada 1 indikator kinerja yakni Angka Kematian Ibu yang pencapaiannya rendah (melebihi target).

#### 1) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 113 kasus dari 8.233 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 13,73 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 dimana angka kematian bayi sebesar 14,10 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2016 yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2014 sampai dengan 2016 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 1.15 berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 26 kasus, disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 20 kasus, seperti terlihat pada grafik 1.16 berikut ini :



Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia

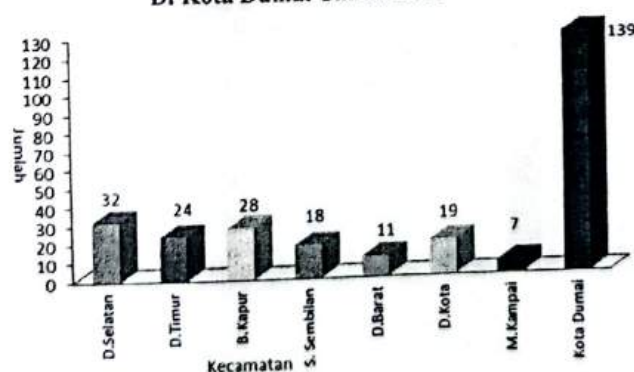
## 2) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 139 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2016 di Kota Dumai sebesar 16,88 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 dimana angka kematian bayi sebesar 16,64 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2016 yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2014 sampai dengan 2016 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 1.17 berikut ini :



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 32 kasus, disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 28 kasus, seperti terlihat pada grafik 1.18 berikut ini :

**Grafik 1.18**  
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan  
Di Kota Dumai Tahun 2016

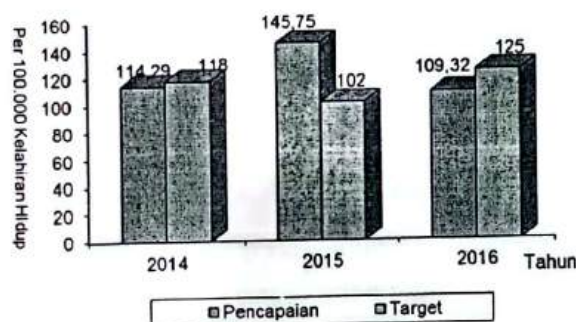


Penyebab kematian balita masih didominasi oleh kasus kejang demam, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia

### 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 9 kasus dari 8.233 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2016 di Kota Dumai sebesar 109,32 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015, di mana angka kematian ibu sebesar 145,75 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada sedikit penurunan angka kematian ibu pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2016 yakni 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini masih dibawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2014 sampai dengan 2016 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 1.19 berikut ini :

**Grafik 1.19**  
Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai  
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2016



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 5 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.6 berikut ini :

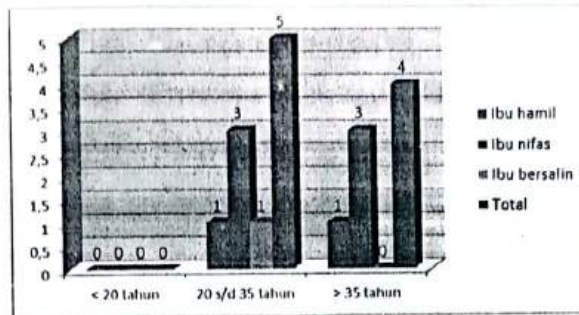
**Grafik 1.20**  
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan  
Di Kota Dumai Tahun 2016



Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena perdarahan sebanyak 4 kasus disusul dengan pre eklmiasi berat sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak

terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 5 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terbanyak pada kelompok ibu nifas sebanyak 6 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 1.21**  
**Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu Dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2016**

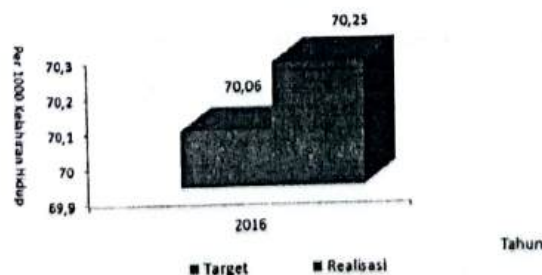


4) Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Mulai tahun 2016 karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan menggunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2016 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 70,25 tahun (diasumsikan sama dengan tahun 2015 karena data terbaru dari BPS belum ada). Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 yakni sebesar 70,05 tahun terlihat ada sedikit peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2016 dapat di lihat pada grafik 1.22 berikut ini :

**Grafik 1.22**  
**Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai Tahun 2016**



**Tabel 1.15**  
**Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru**  
**Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai**  
**Dari Tahun 2014 sampai dengan 2015**

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2010	69,81	70,15	69,93
2.	2011	70,01	70,32	69,95
3.	2012	70,20	70,49	70,02
4.	2013	70,40	70,67	70,04
5.	2014	70,59	70,76	70,05
6.	2015	70,70*	70,93	70,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2016

\* UN, World Population Prospects the 2012 revision

**Tabel 1.16**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	1	0,06	100%
2.	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	88,38	100%
3.	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0,72	100%
4.	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	60	91,58	47,37%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 2 yakni menurunnya Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2016 adalah sebesar 86,84%.

#### 5) Angka Kesakitan Malaria

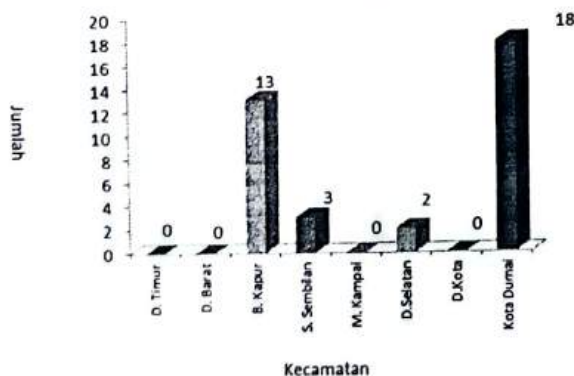
Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 2.906 kasus malaria klinis. Dari 2.906 kasus yang ada terdapat 18 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,06 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,06 per 1.000 penduduk, terlihat pencapaiannya statis. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2016 yakni 1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (AMI) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari grafik 1.23 dibawah ini:

Grafik 1.23  
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria  
Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2016



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terbanyak ditemukan di Kecamatan Bukit Kapur yakni sebanyak 13 kasus (65%). Hal tersebut disebabkan tingginya mobilitas penduduk baik warga lokal maupun warga pendatang dari luar Kota Dumai dan pembukaan lahan perkebunan yang berpotensi berkembangnya nyamuk malaria. Hal ini cukup mengejutkan mengingat daerah yang selama ini dikenal dengan daerah high endemis Malaria adalah Kecamatan Sungai Sembilan. Dengan faktor resiko tersebut maka satu wilayah Kecamatan Bukit Kapur menjadi daerah high endemis Malaria. Kecamatan Sungai Sembilan merupakan kecamatan terbanyak kedua ditemukannya kasus Malaria positif yakni sebanyak 3 kasus, seperti terlihat pada grafik 1.24 berikut ini :

Grafik 1.24  
Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan  
Di Kota Dumai Tahun 2016

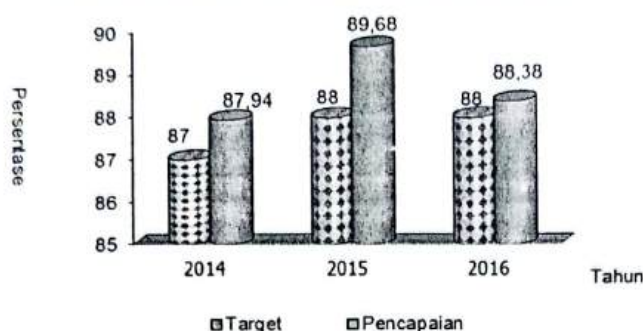


#### 6) Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2016 dari total 284 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 251 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 88,38%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 sebesar 89,68%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan

penderita TB Paru BTA + tahun 2016 sudah mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan dapat dilihat dari grafik 1.25 berikut ini :

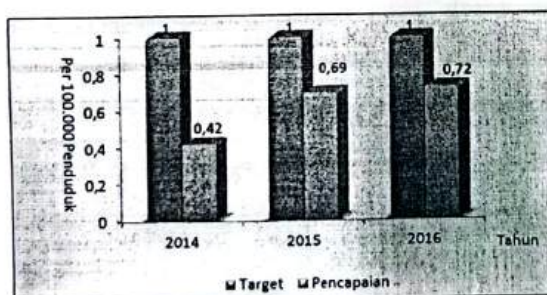
**Grafik 1.25**  
**Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2016**



7) Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 341 kasus yang terdiri dari 305 kasus lama dan 36 kasus baru yang ditemukan tahun 2016. Dari 341 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 107 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 234 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2016 adalah sebesar 0,72% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 32.719 orang).

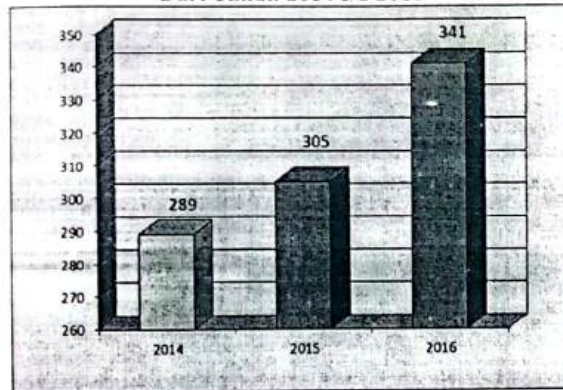
**Grafik 1.26**  
**Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2016**



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0,69%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2016 sebesar < 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka

prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

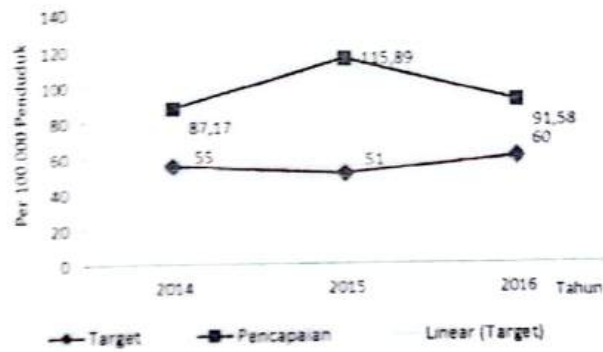
Grafik 1.27  
Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai  
Dari Tahun 2014 s/d 2016



#### 8) Angka Kesakitan Demam Berdarah *Dengue* (DBD)

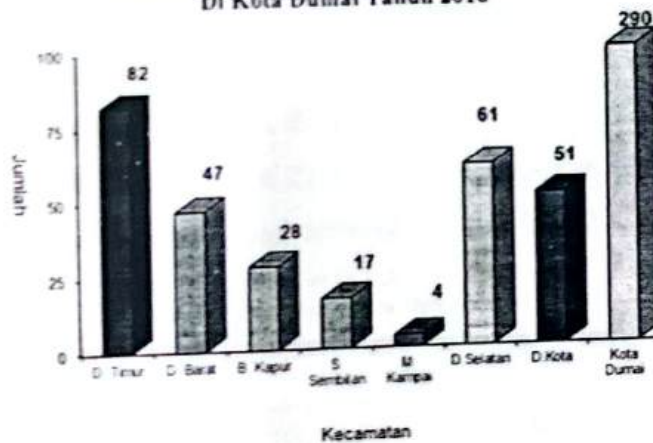
Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2016 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 290 kasus atau IR = 91,58 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 2 orang atau CFR = 0,69%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 367 kasus atau IR = 115,89 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 1 kasus atau CFR = 0,54%, maka ada sedikit penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 60 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut melebihi target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang baik). Untuk itu masih diperlukan kerja keras dalam upaya menurunkan angka kesakitan DBD di Kota Dumai pada tahun mendatang. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti  $\pm$  80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

**Grafik 1.28**  
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2016



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 82 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 61 kasus, seperti terlihat pada grafik 1.29 berikut ini :

**Grafik 1.29**  
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2016

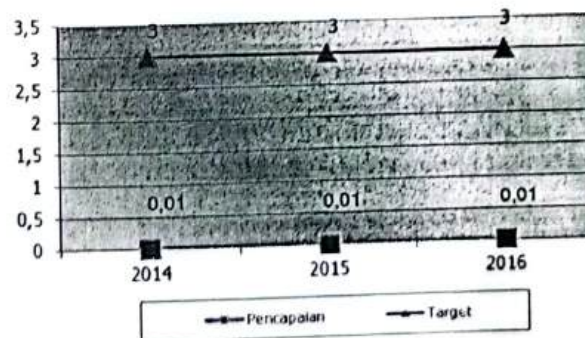


Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 100 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

### 9) Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)  $\leq$  3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2013 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2015, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2015, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2016 ditemukan 3 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2016 adalah 0,01%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 5 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2016 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 1.30  
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk  
Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2016

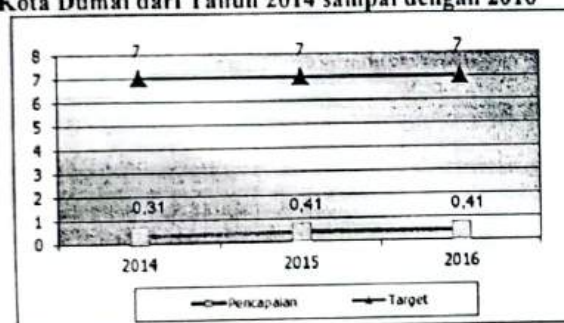


Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

## 10) Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Selama tahun 2016 kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 152 kasus dari 37.247 balita yang ditimbang, sehingga persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 0,41%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 126 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,41%, terlihat ada peningkatan kasus balita dengan gizi kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2016 yakni sebesar 7%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

**Grafik 1.31**  
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2016



Melalui pelaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yakni pelacakan kasus balita dengan gizi kurang selama tahun 2016 ditemukan 207 kasus balita gizi kurang dan balita BGM. Setelah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu yaitu sebanyak 80 gram selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pada akhir tahun 2016 jumlah kasus balita gizi kurang dan balita BGM berkurang menjadi 38 kasus balita gizi kurang. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi



# **LKPJ 2016**

## **BAB 2**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2017

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Rencana strategis pembangunan Kota Dumai disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 telah dilegalitaskan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2016. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima Tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.

Di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 dijabarkan pernyataan visi, misi, dan program Kepala Daerah serta memuat strategi pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadi pedoman bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra - SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra - SKPD dan mengacu pada RKPD, selanjutnya setiap SKPD menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.

#### A. Visi Pembangunan Kota Dumai 2016-2021

Visi Pembangunan Kota Dumai tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai periode 2016 - 2021 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”***

#### B. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Misi Pertama :

***” Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar”***

2. Misi Kedua :

***” Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing”***

3. Misi Ketiga :

*" Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan "*

4. Misi Keempat :

*" Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan "*

5. Misi Kelima :

*" Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan "*

6. Misi Keenam :

*" Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah "*

7. Misi Ketujuh :

*" Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu "*

### C. Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan masalah dan tantangan yang dihadapi Kota Dumai, maka disusun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

**Misi Pertama :** *" Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar "*

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

#### 1. Urusan Pekerjaan Umum

- a) Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting
- b) Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase
- c) Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
- d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum
- e) Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
- f) Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
- g) Normalisasi sungai dan jaringan drainase
- h) Meningkatkan luas daerah resapan air
- i) Menyediakan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an

2. Urusan Perhubungan
  - a) Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi
  - b) Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi
  - c) Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
  - d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
  - e) Meningkatkan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
3. Urusan Perumahan
  - a) Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
4. Urusan Lingkungan Hidup
  - a) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan air limbah domestik
  - b) Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang
  - c) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a) Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan
  - b) Meningkatkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN

**Misi Kedua : “ Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing”**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pendidikan
  - a) Penyediaan TK pembina untuk setiap kecamatan.
  - b) Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP khususnya sekolah negeri dan penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
  - c) Memfasilitasi pendidik untuk meningkatkan kualifikasinya
  - d) Mengembangkan sekolah yang terakreditasi dan berstandar nasional
2. Urusan Tenaga Kerja
  - a) Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
3. Urusan Pendidikan/Menangani Perpustakaan Daerah
  - a) Mengembangkan layanan perpustakaan sampai ke tingkat kelurahan.
4. Urusan Kesehatan
  - a) Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat
  - b) Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar
  - c) Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan

- d) Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat
  - e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan
  - f) Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan
  - g) Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat dan memelihara mutu institusi pelayanan kesehatan pemerintah melalui paradigma sehat dengan promotif, preventif dan rehabilitatif.
  - h) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif
5. Urusan Sosial
- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial terhadap PMKS
  - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan social
6. Urusan Pemberdayaan Perempuan
- a) Memberikan pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
  - b) Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
  - c) Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah
  - d) Mewujudkan kota Dumai sebagai kota layak anak
  - e) Meningkatkan sosialisasi manfaat keluarga berencana

**Misi Ketiga : " Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan "**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a) Meningkatkan kinerja koperasi aktif sebagai sumber pendanaan UMKM
  - b) Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan
  - c) Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan
  - d) Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar
  - e) Pemanfaatan dan pengembangan potensi subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Dumai
2. Urusan Sosial
- a) Meningkatkan kualitas data jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral
  - b) Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan
  - c) Meningkatkan akses dan bantuan usaha bagi keluarga miskin
  - d) Memberdayakan kelompok usaha keluarga miskin

- e) Mengembangkan kegiatan usaha produktif masyarakat miskin
- f) Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan dasar
- g) Meningkatkan lifeskill keluarga miskin

**Misi Keempat : “Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partivipatif dan transparan “**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Umum
  - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan public
  - b) Penyelesaian tapal batas administrasi kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai serta perbatasan dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan hilir
  - c) Memantapkan pelayanan publik yang prima.
  - d) Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal
  - e) Meningkatkan sistem pelayanan publik ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya.
  - f) Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada setiap Kecamatan
  - g) Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
  - h) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - i) Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah
  - j) Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan
  - k) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
  - l) Meningkatkan kualitas penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
  - a) Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan
3. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - a) Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Kota Dumai
  - b) Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana alam lainnya.
  - c) Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya
  - d) Meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat

4. Urusan Kepegawaian
  - a) Menyediakan acuan kerja dan pedoman teknis dalam sistem kerja profesional untuk setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah
  - b) Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
  - c) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi manajemen kepegawaian
  - d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi dan kinerja
5. Urusan Perencanaan Pembangunan
  - a) Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
  - b) Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable
  - c) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah
  - d) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan
6. Urusan Kearsipan
  - a) Menerapkan tata kelola arsip daerah sesuai peraturan/Undang-undang kearsipan.
  - b) Peningkatan konektivitas jaringan teknologi informasi dalam layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a) Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan
  - b) Meningkatkan peran dan kualitas Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

**Misi Kelima: “Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan”**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pertanian
  - a) Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan
  - b) Ekstensifikasi/Intensifikasi pertanian dan sektor perikanan
  - c) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan
  - d) Menyediakan sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian
  - e) Memperkuat/meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesmavet, pelayanan, pembinaan, pengawasan pangan dan suveylance penyakit zoonosis

2. Urusan Perikanan dan Kelautan
  - a) Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil produksi
  - b) Meningkatkan mutu produk dan jumlah keragaman
- c) Urusan Kehutanan
  - a) Merehabilitasi lahan kritis, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

**Misi Keenam : "Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah"**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Perdagangan
  - a) Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani pasar lokal dan regional
  - b) Penyediaan dan peningkatkan fasilitas pergudangan
  - c) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangandan jasa
  - d) Memperluas networking pelaku usaha perdagangan dan jasa
2. Urusan Perindustrian
  - a) Mewujudkan kerjasama dalam pengembangan kawasan industry
  - b) Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
  - c) Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri
  - d) Penataan kawasan industri
  - e) Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
  - f) Meningkatkan daya Saing Industri Kecil dan Menengah
3. Urusan Penanaman Modal
  - a) Memantapkan kualitas pelayanan perizinan
  - b) Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
  - c) Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
4. Urusan Tenaga Kerja
  - a) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global
  - b) Mengintegrasikan Hubungan Harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
  - c) Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja

**Misi Ketujuh : "Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu"**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - a) Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur
  - b) Mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan
  - c) Meningkatkan pembinaan kualitas pembangunan sosial keagamaan
2. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
  - a) Pengembangan seni dan tradisi budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
  - b) Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar tradisional untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan
  - c) Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan budaya
  - d) Menyusun masterplan kepariwisataan
  - e) Pembenahan pusat informasi kepariwisataan dengan berbasis IT
  - f) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan
3. Urusan Pemuda dan Olahraga
  - a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
  - b) peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
  - c) Pembangunan Gedung Kepemudaan
  - d) Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
  - e) Pembangunan GOR
  - f) Revitalisasi sarana olahraga
  - g) Peningkatkan pembinaan kepada organisasi keolahragaan

**D. Prioritas Belanja Daerah.**

Dalam proses penetapan prioritas belanja daerah Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota Dumai mempedomani muatan RPJMD Kota Dumai tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016 :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Pemerataan kualitas pendidikan formal dan informal bagi seluruh masyarakat.
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Dumai.
4. Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta peluang kerja bagi masyarakat kota dumai.
5. Peningkatan bidang sosial, keagamaan, pariwisata, olahraga dan budaya lokal serta kesetaraan gender.
6. Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.
7. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Pengembangan potensi daerah dalam rangka memperkuat struktur perekonomian masyarakat.



# **LKPJ 2016**

## **BAB 3**

**Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2017**

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar, kepada Daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga, Pasal 25, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Pendapatan asli Daerah ( PAD) ;
  - b. Dana Perimbangan ;
  - c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Dumai berusaha meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Langkah - langkah intensifikasi yang telah dilaksanakan, antara lain :

- a) Melaksanakan sosialisasi / penyuluhan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membuat himbauan melalui media elektronik ( TV, moving sign, billboard ) maupun melakukan pemanggilan atau peringatan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya secara rutin.
- b) Menurunkan Tim untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi guna untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam upaya untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang berlaku.
- c) Melakukan penertiban kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah secara rutin / berkala, dengan melibatkan Unit Kerja atau Instansi terkait.
- d) Melakukan rapat untuk mengevaluasi target dan realisasi penerimaan daerah dari berbagai jenis-jenis penerimaan, baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin / berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali, yang diikuti oleh seluruh unsur pimpinan SKPD pengelola PAD.
- e) Melakukan pendataan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 1.196.031.219.550,29 dan terealisasi sebesar Rp 1.055.055.489.823,12 atau 88,21% dari target semula. Untuk lebih jelasnya, Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1  
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2016

NO.	URAIAN	TARGET APBD-P TAHUN 2016	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
	<b>PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)</b>	<b>1.196.031.219.550,29</b>	<b>1.055.005.489.823,13</b>	<b>88,21%</b>
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (A+B+C+D)</b>	<b>182.351.688.061,00</b>	<b>185.724.718.582,61</b>	<b>101,85%</b>
<b>A</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>71.852.300.000,00</b>	<b>69.688.574.292,00</b>	<b>96,99%</b>
1.	Pajak Hotel	2.688.975.540,00	3.175.924.601,00	118,11%
2.	Pajak Restoran	3.333.100.000,00	3.752.971.695,00	112,60%
3.	Pajak Hiburan	501.791.100,00	621.259.726,00	123,81%
4.	Pajak Reklame	1.274.761.600,00	1.528.790.766,00	119,93%
5.	Pajak Penerangan Jalan PLN	13.100.000.000,00	13.689.142.395,00	104,50%
6.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	7.590.870.000,00	8.446.827.589,00	111,28%
7.	Pajak Air Bawah Tanah	566.577.600,00	757.463.997,00	133,69%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	606.700.000,00	-	0,00%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) P2	33.650.000.000,00	34.656.081.391,00	102,99%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.674.324.160,00	2.931.054.332,00	38,19%
11.	Pajak Parkir	750.000.000,00	32.500.000,00	4,33%
12.	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	86.160.000,00	74,79%
<b>B</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>29.441.326.640,00</b>	<b>25.266.481.726,00</b>	<b>85,82%</b>
1.	Retribusi Izin Gangguan	3.442.900.000,00	3.919.961.732,00	113,86%
2.	Retribusi Pelayanan Pasar	715.000.000,00	569.443.000,00	79,64%
3.	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	793.466.640,00	782.881.795,00	98,67%
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	419.640.000,00	410.175.000,00	97,74%
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.086.090.000,00	535.797.200,00	49,33%
6.	Retribusi Jasa Usaha Terminal	13.223.780.000,00	13.529.053.000,00	102,31%
7.	Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	548.000.000,00	14.180.000,00	2,59%
8.	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	205.000.000,00	135.715.099,00	66,20%
9.	Retribusi Perizinan Tertentu	8.011.950.000,00	4.501.524.000,00	56,19%
10.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	370.000.000,00	250.612.900,00	67,73%
11.	Pemeriksaan Kualitas Air	300.000.000,00	307.640.000,00	102,55%
12.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	325.500.000,00	309.468.000,00	95,07%
<b>C</b>	<b>Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>960.686.971,00</b>	<b>908.686.971,00</b>	<b>94,59%</b>
1.	PT. Bank Riau	908.686.971,00	908.686.971,00	100%
2.	PT. Pembangunan Dumai	52.000.000,00	-	0,00%
<b>D</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>80.097.374.450,00</b>	<b>89.860.975.593,61</b>	<b>112,19%</b>
1.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	870.000,00	870.000,00	100,00%
2.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	8.310.000,00	9.811.000,00	118,06%
3.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	402.500.000,00	736.134.123,00	182,89%
4.	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	27.740.000,00	43.900.000,00	158,26%
5.	Penjualan Hasil Peternakan	22.960.000,00	22.960.000,00	100,00%
6.	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00%
7.	Jasa Giro Kas Daerah	1.285.000.000,00	1.217.528.979,50	94,75%
8.	Jasa Giro Bendahara	65.000.000,00	149.814.454,00	230,48%
8.	Penerimaan Bunga Deposito	3.906.000.000,00	4.345.345.541,03	111,25%
9.	Penerimaan Bunga Deposito	3.906.000.000,00	4.345.345.541,03	111,25%
10.	Pendapatan Denda Pajak	450.000.000,00	559.304.704,00	124,29%
11.	Pendapatan Denda Retribusi	75.000.000,00	179.018.732,00	238,69%
12.	Pendapatan dari Pengembalian Temuan	1.770.000.000,00	2.920.970.907,00	165,03%
13.	Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan	-	34.400.000,00	100,00%
14.	Pendapatan lain-lain	-	3.314.029.184,00	100,00%
15.	Fasilitas Umum	110.000.000,00	79.200.000,00	72%

NO.	URAIAN	TARGET APBD-P TAHUN 2016	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
16.	Pendapatan BLUD RSUD Kota Dumai	60.000.000.000,00	64.179.488.460,77	106,97%
17.	BLUD Puskesmas	11.959.794.450,00	11.317.601.560,58	94,63%
<b>II.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN (A+B+C)</b>	<b>807.530.689.837,12</b>	<b>689.119.140.681,00</b>	<b>85,34%</b>
<b>A.</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>278.594.786.337,12</b>	<b>188.564.181.908,00</b>	<b>67,68%</b>
1.	Bagi Hasil Pajak	60.226.536.025,00	44.500.051.885,00	73,89%
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	218.368.250.312,12	144.064.130.023,00	65,97%
<b>B.</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>406.116.504.000,00</b>	<b>406.116.504.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>C.</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>122.819.399.500,00</b>	<b>94.438.454.773,00</b>	<b>76,89%</b>
<b>III.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (A+B+C)</b>	<b>206.148.841.652,17</b>	<b>180.161.630.559,51</b>	<b>87,39%</b>
<b>A.</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya</b>	<b>91.012.397.181,17</b>	<b>85.088.317.014,44</b>	<b>93,49%</b>
1.	Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB )	14.851.766.787,47	15.993.873.926,91	107,69%
	• Perhitungan PKB Tw.IV (Desember) Tahun 2016	4.150.762.026,37	8.650.938.692,73	208,42%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.156.063.854,74	14.392.376.544,31	101,67%
	• Perhitungan BBNKB Tw.IV (Desember) Tahun 2016	2.008.933.287,00	1.017.769.769,97	50,66%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	33.484.193.802,77	30.019.570.498,16	89,65%
	• Perhitungan PBBKB Tw.IV (Desember) Tahun 2016	11.738.018.710,00	3.189.632.383,57	27,17%
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	648.443.010,82	632.841.829,44	97,59%
	• Perhitungan AP Tw.IV (Desember) Tahun 2016	3.895.777,00	65.213.379,79	1673,95%
5.	DBH Pajak Rokok	7.500.000.000,00	9.722.599.862,52	129,63%
	• Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Tw.IV Tahun 2016	4.150.762.026,37	8.650.938.692,73	208,42%
<b>B.</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya</b>	<b>115.136.444.471,00</b>	<b>95.073.313.545,00</b>	<b>82,57%</b>
1.	Alokasi Pendidikan	49.451.291.640,00	44.984.888.900,00	90,97%
3.	Alokasi Kesehatan	40.803.360.000,00	37.077.874.645,07	90,87%
4.	Alokasi Pekerjaan Umum	24.881.792.831,00	13.010.550.000,00	52,29%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)</b>	<b>1.196.031.219.550,29</b>	<b>1.054.258.664.075,39</b>	<b>88,15%</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 (data un audit)

Berdasarkan uraian *Tabel 3.1* diatas sebagaimana tersebut diatas, rinciannya adalah sebagai berikut :

#### I. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp.182.351.688.061,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 185.724.718.582,61 atau 101,85% dari target semula. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah sebagai berikut :

##### a) Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp.71.852.300.000,- terealisasi sebesar Rp 69.688.574.292,- atau 96,99% dari target semula. Rincian dari pencapaian penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 2.688.975.540,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp.3.175.924.601,- atau 118,11% dari target semula. Faktor – faktor yang mempengaruhi

tercapainya target penerimaan ini antara lain :

- Naiknya tingkat hunian hotel (*Room Accoupancy*), yang mengakibatkan omzet/ penerimaan hotel meningkat, sehingga besaran jumlah Pajak Hotel yang dibayarkan oleh Pihak Hotel meningkat.
  - Dan Adanya Pemeriksaan Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 3.333.100.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 3.752.971.695,- atau 112,60% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini antara lain ;
- Hal ini disebabkan karena adanya obyek Pajak Restoran yang baru, dan tingkat penerimaan omset Restoran meningkat.
- 3) Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 501.791.100,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 621.259.726,- atau 123,81% dari target semula. Faktor tercapainya target penerimaan ini antara lain :
- Naiknya penerimaan omset Pajak hiburan
- 4) Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 1.274.761.600,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 1.528.790.766,- atau 119,93 % dari target semula, hal ini disebabkan karena :
- Tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha.
  - Penagihan dilakukan secara terus menerus sehingga mengurangi jumlah tunggakan.
- 5) Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp 13.100.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 13.689.142.395,- atau 104,50 % dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini , antara lain pembayaran PPJ PLN yang dilakukan oleh Pihak PT. (Persero) PLN Cab. Dumai dilakukan tepat waktu, hal ini disebabkan karena kebijakan yang dilakukan oleh Pihak PT. (Persero) PLN Pusat, bahwa sejak tahun 2012, Pihak PLN telah menerapkan aplikasi tata usaha langganan terpusat yang bernama AP2T, dimana database sudah terpusat untuk seluruh Indonesia, semua pembayaran PPJ telah terpusat dan langsung di transfer ke Kab./Kota di Indonesia, sehingga semua tagihan PPJ, pembayarannya atau penyalurannya ke Kas Umum Daerah dapat dilakukan tepat waktu.
- 6) Pajak Penerangan Jalan Non PLN ditargetkan sebesar Rp 7.590.870.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 8.446.827.589,- atau 111,28% dari target semula. Faktor pendukung tercapainya target penerimaan ini kerena meningkatnya jumlah pemakaian tenaga listrik Non PLN oleh Perusahaan.
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp. 606.700.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari target semula. Faktor penghambat yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan ini adalah sebagai berikut :

Adanya Surat Edaran dari Dirjend Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No, 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya **melarang** Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sampai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Mineral dan Batubara, dengan adanya surat edaran ini, maka Pemko Dumai belum bisa menerbitkan izin baru terhadap pengusaha Galian C, yang berimbas pada rendahnya penerimaan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini.

- 8) Pajak Air Bawah Tanah ditargetkan sebesar Rp 566.577.600,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 757.463.997,- atau 133,69% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini antara lain :
- Adanya pemantauan secara langsung kelapangan terhadap pemilik usaha penjualan Air.
  - Penyuluhan dilakukan secara langsung kepada wajib pajak;
  - Tim penagihan secara terus menerus melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.
  - Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya.
- 9) Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 32.500.000,- atau 4,33% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini karena belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
- 10) Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp 115.200.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 86.160.000,- atau 74,79% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak capainya target penerimaan ini antara lain :
- Menurunnya jumlah produksi sarang burung walet.
  - Turunnya harga sarang burung walet di pasaran.
  - Pengusaha sarang burung walet yang mengurus perpanjangan izinnya tidak sampai 50 % sedangkan yang 50 % nya lagi tidak memperpanjang izinnya
- 11) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp 33.650.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 34.656.081.391,- atau 102,99% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi ercapainya target penerimaan adalah karena kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB.
- 12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp 7.674.324.160,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 2.931.054.332,- atau 38,19% dari

target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan adalah karena rendahnya tingkat transaksi jual beli tanah di Tahun 2016.

b) Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp 29.441.326.640,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 25.266.481.726,- atau 85,82% dari target semula. Adapun rincian lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Izin Gangguan ditargetkan sebesar Rp 3.442.900.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 3.919.961.732,- atau 113,86% dari target semula. Faktor pendorong tercapainya target penerimaan ini ditunjang oleh jumlah personil dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas serta meningkatnya kesadaran wajib retribusi.
2. Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp 715.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 569.443.000,- atau 79,64% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah karena:
  - Kantor Pelayanan Pasar tidak memiliki kewenangan di pasar swasta
  - Pasar binaan pemerintah seperti Pasar kelakap Tujuh dalam kondisi belum aktif
3. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Daerah ditargetkan sebesar Rp 793.466.640,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 782.881.795,- atau 98,67% dari target semula.
  - a. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Alat-Alat Berat ditargetkan sebesar Rp 300.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 211.600.000,- atau 70,53% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah karena:
    - Banyaknya alat berat yang dipakai untuk kegiatan sosial masyarakat dan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target penyewaan alat berat.
    - Adanya kerusakan pada beberapa unit alat berat yang mengakibatkan alat berat tersebut tidak bisa beroperasi secara maksimal (perlu nya tambahan alat berat baru)
  - b. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Gedung/ Ruangan/ Aula dan Asrama, ditargetkan sebesar Rp 74.778.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 80.550.000,- atau 107,72%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:
    - Tidak tercapainya target Sewa Gedung/ Ruangan/ Aula dan Asrama yang dikelola oleh PT. Pembangunan Dumai ditargetkan sebesar Rp 23.178.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 0,- atau 0,00%

- Tercapainya target Sewa Gedung/ Ruangan/ Aula dan Asrama yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai ditargetkan sebesar Rp 51.600.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 80.550.000,- atau 156,10%. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena naiknya tingkat hunian mess Pemko Dumai di pekanbaru
- c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Pelayanan Bandar Udara ditargetkan sebesar Rp 374.288.640,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 476.331.795,- atau 127,26% dari target semula.
- d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp 30.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 13.200.000,- atau 44,00% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain :
  - Pemotongan ternak belum seluruhnya dilakukan di Rumah Potong Hewan di Bagan Besar.
  - Harga sapi yang masih tinggi
- e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Workshop Konveksi ditargetkan sebesar Rp 14.400.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.200.000,- atau 8,33% dari target semula Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:
  - Belum adanya minat IKM Konveksi untuk menyewa workshop konveksi dikarenakan:
    - Terbatasnya modal usaha
    - Mahalnya upah tenaga kerja sehingga menyulitkan IKM untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang konveksi
    - Letak UPT BLI yang cukup jauh dari pusat kota
    - Sebagian alat rusak
- 4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp 419.640.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 410.175.000,- atau 97.74% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain :
  - Retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan pembayarannya dilakukan sekali setahun, sehingga masyarakat/ toko akan membayar retribusi menjelang akhir tahun.
  - Beberapa obyek retribusi tidak bersedia membayar retribusi karena sampahnya dikelola atau dibuang sendiri.
  - Belum diterapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2012.

5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp 1.086.090.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 535.797.200,- atau 49,33% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan antar lain disebabkan:
- Masyarakat luas belum ada kesadaran untuk andil dalam melakukan uji emisi kendaraan penumpang yang tidak dijasakan dan sepeda motor.
  - Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus Uji KIR.
  - Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Dumai belum mempunyai kerjasama yang kongkrit seperti penundaan perpanjangan STNK apabila wajib pajak belum melakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraannya.
  - Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khususnya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan yang tidak dijasakan.
  - Kondisi Peralatan Uji yang tidak baik sehingga menyulitkan untuk melakukan implementasi Emisi Gas Buang Kendaraan dengan cara jemput bola ke pemilik kendaraan.
6. Retribusi Jasa Usaha Terminal ditargetkan sebesar Rp 13.223.780.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 13.529.053.000,- atau 102,31% dari target semula. Faktor pendorong tidak tercapainya target penerimaan ini adalah sebagai berikut :
- Pada Terminal Penumpang, ditargetkan sebesar Rp 129.210.000,- terealisasi sebesar Rp 79.220.000,- atau 61,31%. Hal ini disebabkan karena belum semua agen bus maupun travel, baik itu Bus AKAP, AKDP dan travel antar kota maupun travel antar provinsi yang masuk ke dalam terminal penumpang, sehingga armadanya belum optimal masuk terminal, yang mengakibatkan penerimaan Retribusi Terminal Penumpang menurun.
  - Pada Terminal Barang, dari Rp 13.000.000.000,- yang ditargetkan, terealisasi sebesar Rp 13.395.953.000,- atau 103,05%. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target adalah meningkatnya kendaraan CPO, BBM dan Gas ke Terminal.
  - Retribusi Pemakaian Tempat Usaha Terminal Penumpang dari Rp 36.720.000,- yang ditargetkan, terealisasi sebesar Rp 27.600.000,- atau 75,16% dan Retribusi Pemakaian Tempat Usaha Terminal Barang dari Rp 39.600.000,- yang ditargetkan, terealisasi sebesar Rp 26.280.000,- atau 66,36%. Faktor penghambat tidak tercapainya adalah menurunkan tingkat kunjungan tempat usaha kantin terminal penumpang.
  - Retribusi Terminal Oplet, dari Rp 18.250.000,- yang ditargetkan, terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0% , hal ini disebabkan belum semua oplet yang ada di Kota Dumai, masuk ke Dalam

Terminal Oplet yang ada, sehingga Penerimaan dari Sektor Retribusi Angkutan Kota/Oplet, menurun.

7. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp 548.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 14.180.000,- atau 2,59% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena :
  - Tempat Khusus Parkir RSUD tidak mencapai target
  - Tempat Khusus Parkir UPT AKAP / Penumpang tidak mencapai target
  - Tempat Khusus Parkir Bukit Gelanggang tidak tercapai target
8. Retribusi Jasa Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp 205.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 135.715.099,- atau 66,20% dari target semula. Retribusi Jasa Kepelabuhan ini meliputi :
  - a. Jasa Tiket Penumpang (Perusahaan Pelayaran) target sebesar Rp 120.000.000,- realisasi sebesar Rp 118.545.400,- atau 98,79%
  - b. Jasa Dermaga target sebesar Rp 85.000.000,- realisasi sebesar Rp 15.611.699,- atau 18,37%

Faktor pendorong tidak tercapainya target penerimaan ini adalah :

- Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat menggunakan transportasi penyebrangan (roro)
  - Dinas Perhubungan telah membuat kontrak dengan CV. Mundam sejahtera dalam pengelolaan dermaga untuk meminta rekomendasi izin dari KSOP, namun tidak mendapat izin tersebut.
  - Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 bahwa jasa labuh disetor ke kas negara melalui KSOP
9. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp 8.011.950.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 4.501.524.000,- atau 56,19% dari target semula.
    - a. Retribusi Izin Trayek ditargetkan sebesar Rp 2.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 940.000,- atau 47% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah menurunnya tingkat pengurusan izin angkutan kota.
    - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan sebesar Rp 8.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 4.488.034.000,- atau 56,10% dari target semula. Faktor pendorong tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan :
      - Adanya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal 24 ayat 4, yang mana Pemerintah atau Pemerintah daerah tidak memberikan/menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang sebelum RTRW ditetapkan, namun Pemerintah Kota Dumai menerbitkan surat izin mendirikan bangunan sementara pada triwulan ke IV.

- c. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ditargetkan sebesar Rp 9.950.000,- realisasi pencapaiannya Rp 12.550.000,- atau sebesar 126,13%. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp 370.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 250.612.900,- atau 67,73% dari target semula.
- a. Retribusi Pabrik Es Balok ditargetkan sebesar Rp 310.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 215.160.000,- atau 69,41% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah alat mengalami kerusakan dan karena berkurangnya aktivitas nelayan dan pedagang-pedagang akibat kondisi perkeonomian yang dipengaruhi kenaikan harga-harga yang berimbas menurunnya jumlah produksi Es Balok
- b. Retribusi Bibit Ikan, Benih Ikan ditargetkan sebesar Rp 60.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 35.452.900,- atau 59,09% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah akibat perubahan musim sehingga pembibitan/ benih ikan tidak berhasil.
11. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air ditargetkan sebesar Rp 300.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 307.640.000,- atau 102,55% dari target semula. Faktor pendorong tercapainya target penerimaan ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- c) Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp 960.686.971,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 908.686.971,- atau 94,59% dari target semula. Perincian lebih lanjut realisasi dari Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah :
1. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank Riau ditargetkan sebesar Rp 908.686.971,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 908.686.971,- atau 100% dari target semula.
  2. PT. Pembangunan Dumai ditargetkan sebesar Rp. 52.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari target semula.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp 80.097.374.450,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 89.860.975.593,61 atau 112,19% dari target semula.
- A. Dana Perimbangan
- Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 807.530.689.837.12,- dan realisasi pencapaian

sebesar Rp 689.119.140.681,- atau 85.34 % pada Pendapatan Daerah 2016. Penerimaan ini terdiri dari :

a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp.278.594.786.337,12 dan realisasi pencapaian sebesar Rp 188.564.181.908,- atau 67,08% dari target semula. Dana ini terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp 60.226.536.025,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 44.500.051.885,- atau 73,89% dari target semula.
- 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam ditargetkan sebesar Rp.218.368.250.312,12 dan realisasi pencapaian sebesar Rp 144.064.130.023,- atau 65,97% dari target semula.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp 406.116.504.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 406.116.504.000,- atau 100,00% dari target semula.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp 122.819.399.500,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 94.438.454.773,- atau 76,89% dari target semula.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat adalah :

- Tidak tersalurnya Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat sesuai yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 66 tahun 2016.

**B. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp 206.148.841.652,17 terealisasi sebesar Rp 180.161.630.559,51 atau 87,39%. Penerimaan ini terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintahan lainnya

Dana ini ditargetkan sebesar Rp 91.012.397.181,17 dan realisasi pencapaian sebesar Rp 85.088.317.014,44 atau 93,49%. Adapun realisasi tersebut terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp 14.851.766.787,47 dan realisasi sebesar Rp 15.993.873.926,91 atau 107,69%. Dan Perhitungan PKB Tw. IV (Desember) Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 2.470.319.925,- dan realisasi sebesar Rp.1.403.500.127,04 atau 56,81%.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp.14.156.063.854,74 dan realisasi sebesar Rp 14.392.376.544,31 atau 101,67%. Dan Perhitungan BBNKB Tw.

IV (Desember) Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 2.008.933.287,- dan realisasi sebesar Rp.1.017.769.769,97 atau 50,66%.

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sebesar Rp 33.484.193.802,77 dan realisasi sebesar Rp 30.019.570.498,16 atau 89,65%. Dan Perhitungan PBBKB Tw. IV (Desember) Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 11.738.018.710,- dan realisasi sebesar Rp 3.189.632.383,57 atau 27,17%.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ditargetkan sebesar Rp 648.443.010,82 dan realisasi pencapaian sebesar Rp 632.841.829,44 atau 97,59%. Dan Perhitungan AP Tw. IV (Desember) Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 3.895.777,- dan realisasi sebesar Rp 65.213.379,79 atau 1673,95%.
- 5) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok ditargetkan sebesar Rp 7.500.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 9.722.599.862,52 atau 129,63%. Dan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Tw. IV Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 4.150.762.026,37 dan realisasi sebesar Rp 8.650.938.692,73 atau 208,42%.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah tidak disalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Triwulan IV Desember Tahun 2016.

d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp.115.136.444.471,- dan realisasi sebesar Rp 95.073.313.545,07 atau 82,57% yang terdiri dari :

- 1) Pendidikan, ditargetkan sebesar Rp 49.451.291.640,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 44.984.888.900,- atau 90,97%
- 2) Kesehatan, ditargetkan sebesar Rp 40.803.360.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 37.077.874.645,07 atau 90,87%
- 3) Pekerjaan Umum, ditargetkan sebesar Rp 24.881.792.831,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 13.010.550.000,- atau 52,29%

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi adalah dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan oleh SKPD Teknis dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2016.

## **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Situasi perekonomian saat ini masih dalam kondisi yang kurang menguntungkan, dimana berbagai krisis masih tetap berlangsung menimbulkan dampak terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Disisi lain perekonomian yang menurun tadi menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Adapun permasalahan yang ada, antara lain :

- a. Letak dan tofografi Wilayah Kota Dumai serta lokasi potensi berjauhan atau berpencar-pencar, sehingga menyulitkan dalam hal pendataan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Kemampuan masyarakat terhadap pembayaran Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah, sebagai akumulasi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- c. Terbatasnya jasa pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah, sehingga menyulitkan bagi petugas untuk menagih Retribusi Daerah.
- d. Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan PBB sering pindah alamat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Kota Dumai serta status kepemilikan obyek yang tidak jelas, sehingga keakuratan data dan penyampaian Surat Ketetapan serta penagihan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sering mengalami kesulitan.
- e. Pengisian SPOP PBB maupun mengenai data subyek dan obyek Pajak Daerah dan Retribusi daerah belum sepenuhnya jujur dan benar, sehingga Surat Ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut.
- f. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar PBB dan Pajak/Retribusi Daerah dirasa masih kurang dan sering atau cenderung menghindar terhadap kewajibannya.
- g. Adanya berbagai jenis pungutan yang illegal, sehingga memberatkan bagi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun **solusi** yang diusulkan yaitu :

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :
  - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensPendapatan Daerah;
  - 2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :
    - Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
    - Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
  - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan system pelayanan minimal.
- c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar

Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia:

- d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.
- e. Ekstensifikasi pendapatan daerah berdasarkan potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai, disamping mengkaji peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam pemungutan pendapatan daerah agar target yang ditetapkan dicapai dengan optimal.

## **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Kebijakan Umum Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Disamping itu juga untuk menerapkan kesepakatan antara DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Daerah Kota Dumai terhadap prioritas yang perlu dicapai dan ditingkatkan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 yang kemudian dibahas kembali dengan penyesuaian terhadap isu strategis yang berkembang, kemudian untuk dapat menjadi kegiatan dengan urutan prioritas, maka harus ditetapkan Strategis dan Prioritas Belanja Daerah. Strategis dan Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diperlukan dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam mencapai arah dan Kebijakan Umum APBD. Mengingat kapasitas sumber daya yang dimiliki masih terbatas, sehingga diperlukan adanya penentuan strategi dan pemilihan prioritas dalam upaya pencapaian arah kebijakan yang dit

#### **a. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.259.200.809.590,60 dengan realisasi sebesar Rp.1.115.007.184.300,61 atau 88,55 %. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2016 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Tabel 3. 2  
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2016

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
2	Belanja	1.259.200.809.590,60	1.114.972.852.847,61	- 144.227.956.742,99	88,55
2.1	Belanja Tidak Langsung	532.896.050.352,00	490.261.650.988,00	- 42.634.399.364,00	92,00
2.1.1	Belanja Pegawai	524.780.782.352,00	482.812.209.388,00	- 41.950.997.694,00	92,01
2.1.4	Belanja Hibah	5.370.000.000,00	5.370.000.000,00	0,00	100
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	2.245.268.000,00	2.055.441.600,00	- 189.826.400,00	91,55
2.1.8	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	24.000.000,00	- 476.000.000,00	4,8
2.2	Belanja Langsung	726.304.759.238,60	624.711.201.859,61	- 101.593.557.378,99	86,01
2.2.1	Belanja Pegawai	158.574.817.179,00	157.879.160.174,00	- 695.657.005,00	99,56
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	309.558.833.531,92	266.716.007.290,99	- 42.842.826.240,93	86,17
2.2.3	Belanja Modal	258.171.108.527,68	200.116.034.394,62	- 58.055.074.133,06	77,51

Sumber : Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 (data un audit)

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2016 tersebut terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Adapun anggaran belanja tidak langsung kota dumai pada tahun 2016 sebesar Rp. 532.896.050.352,00 dengan realisasi sebesar Rp. 490.261.650.988,00 atau 92% yang dialokasikan melalui :

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 524.780.782.352,00 dengan realisasi sebesar Rp. 482.812.209.388,00 atau 92,01 %.
- 2) Belanja Hibah sebesar Rp. 5.370.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.370.000.000,00 atau 100 %.
- 3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Rp. 2.245.268.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.055.441.600,00 atau 91,55 %.
- 4) Belanja Tak Terduga Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi sebesar 24.000.000,00 atau 4,8%.

2) Belanja Langsung

Adapun anggaran Belanja Langsung Kota Dumai pada tahun 2016 sebesar Rp. 726.304.759.238,60 dengan realisasi sebesar Rp. 624.711.201.859,61 atau 86,01% yang dialokasikan melalui :

- 1) Belanja Pegawai Rp. 158.574.817.179,00 dengan realisasi sebesar Rp. 157.879.160.174,00 atau 99,56%.
- 2) Belanja Barang Dan Jasa Rp. 309.558.833.531,92 dengan realisasi sebesar Rp. 266.716.007.290,99 atau 86,17 %.
- 3) Belanja Modal Rp. 258.171.108.527,68 dengan realisasi sebesar Rp. 200.116.034.394,62 atau 77,51%.

## 2. Realisasi Belanja Menurut SKPD Pemerintah Kota Dumai.

Adapun realisasi belanja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2016, baik jenis Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dapat terlihat pada Tabel 3. 3 berikut ini.

Tabel 3. 3  
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPD  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2016.

NO	NAMA SKPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Dinas Pendidikan			
	- Belanja Tidak Langsung	279.343.834.462,00	247.317.566.996,00	88,54%
	- Belanja Langsung	101.512.165.640,00	90.741.223.819,00	89,39%
2	Dinas Kesehatan			
	- Belanja Tidak Langsung	34.124.139.400,00	32.956.139.438,00	96,58%
	- Belanja Langsung	47.556.971.756,54	42.687.787.775,00	89,76%
3	Dinas Perhubungan			
	- Belanja Tidak Langsung	10.822.422.982,00	10.256.560.821,00	94,77%
	- Belanja Langsung	21.915.805.000,00	21.153.577.032,00	96,52%
4	Dinas Pekerjaan Umum			
	- Belanja Tidak Langsung	8.275.720.950,00	7.918.750.135,00	95,69%
	- Belanja Langsung	160.421.223.349,62	118.445.854.841,62	73,83%
5	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan			
	- Belanja Tidak Langsung	3.636.095.340,00	3.468.980.657,00	95,40%
	- Belanja Langsung	30.062.350.000,00	27.959.145.879,00	93,00%
6	Dinas Pendapatan			
	- Belanja Tidak Langsung	10.429.645.371,00	10.014.704.962,00	96,02%
	- Belanja Langsung	11.838.815.382,00	10.621.148.632,00	89,71%
7	Dinas Sosial			
	- Belanja Tidak Langsung	3.019.398.740,00	2.902.354.685,00	96,56%
	- Belanja Langsung	6.316.769.000,00	6.177.845.424,00	97,80%
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	- Belanja Tidak Langsung	2.771.357.660,00	2.637.812.089,00	95,18%
	- Belanja Langsung	6.011.300.000,00	5.337.522.666,00	88,79%
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	- Belanja Tidak Langsung	4.401.044.040,00	4.234.984.440,00	96,23%
	- Belanja Langsung	4.141.280.000,00	4.114.520.360,00	99,35%
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga			
	- Belanja Tidak Langsung	3.520.616.050,00	3.388.134.678,00	96,24%
	- Belanja Langsung	6.662.540.000,00	6.492.521.854,00	97,44%
11	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan			
	- Belanja Tidak Langsung	8.268.488.730,00	7.964.136.359,00	96,32%
	- Belanja Langsung	6.906.690.000,00	5.732.926.331,00	83,01%
12	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan			
	- Belanja Tidak Langsung	5.354.571.350,00	5.137.353.822,00	95,94%
	- Belanja Langsung	6.394.560.000,00	6.297.496.389,00	98,48%
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	- Belanja Tidak Langsung	4.252.252.470,00	4.039.131.766,00	94,99%
	- Belanja Langsung	3.630.705.000,00	3.531.415.510,00	97,27%
14	Dinas Koperasi dan UKM dan Pemberdayaan Masyarakat			
	- Belanja Tidak Langsung	3.371.644.720,00	3.230.283.025,00	95,81%
	- Belanja Langsung	3.984.500.000,00	3.733.376.134,00	93,70%
15	Inspektorat			
	- Belanja Tidak Langsung	4.594.272.100,00	4.449.223.091,00	96,84%
	- Belanja Langsung	3.833.800.000,00	3.480.088.856,00	90,77%
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	3.981.920.390,00	3.789.911.036,00	95,18%
	- Belanja Langsung	10.301.179.000,00	9.072.430.161,00	88,07%
17	Badan Kepegawaian dan Diklat			
	- Belanja Tidak Langsung	3.525.207.550,00	3.412.109.863,00	96,79%

NO	NAMA SKPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
		5.285.233.000,00	4.717.755.577,00	89,26%
	- Belanja Langsung			
18	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	3.517.228.150,00	3.370.239.569,00	95,01%
	- Belanja Langsung	3.206.160.000,00	3.021.909.854,00	94,29%
19	<b>Badan KB, Pemb Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	3.046.511.820,00	2.933.586.179,00	96,29%
	- Belanja Langsung	8.202.411.250,00	7.650.442.425,00	93,27%
20	<b>Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	4.169.449.880,00	3.685.225.757,00	88,39%
	- Belanja Langsung	4.693.280.000,00	4.461.612.070,00	95,06%
21	<b>Sekretariat DPRD</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	3.906.938.590,00	3.789.822.514,00	97,00%
	- Belanja Langsung	23.571.850.000,00	18.477.691.395,00	78,39%
22	<b>Rumsh Sakit Umum Daerah (RSUD)</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	26.882.974.250,00	26.169.116.943,00	97,34%
	- Belanja Langsung	79.274.656.000,00	58.650.354.777,00	73,98%
23	<b>Ktr. Satuan Polisi Pamong Praja</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	3.783.477.060,00	3.624.722.536,00	95,80%
	- Belanja Langsung	3.249.400.000,00	2.935.580.781,00	90,34%
24	<b>Ktr. Lingkungan Hidup</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	1.612.364.060,00	1.527.867.606,00	94,76%
	- Belanja Langsung	3.384.400.000,00	2.921.476.151,00	86,32%
25	<b>Ktr. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	1.044.389.590,00	991.234.220,00	94,91%
	- Belanja Langsung	3.819.200.000,00	3.621.587.171,00	94,83%
26	<b>Ktr. Pelayanan Pasar</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	1.365.255.400,00	1.286.038.143,00	94,20%
	- Belanja Langsung	2.490.400.000,00	2.430.548.037,00	97,60%
27	<b>Ktr. Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	1.579.375.520,00	1.473.452.647,00	93,29%
	- Belanja Langsung	3.765.500.000,00	3.026.005.176,00	80,36%
28	<b>Sekretariat Daerah</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	31.786.381.800,00	30.250.839.320,00	95,17%
	- Belanja Langsung	60.161.710.000,00	45.449.885.698,00	75,55%
29	<b>Camat Dumai Barat</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	4.673.893.930,00	4.485.054.621,00	96,59%
	- Belanja Langsung	2.759.520.000,00	2.733.559.774,00	99,06%
30	<b>Camat Dumai Timur</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	5.318.299.400,00	5.134.231.978,00	96,54%
	- Belanja Langsung	3.954.025.000,00	3.908.499.920,00	98,85%
31	<b>Camat Bukit Kapur</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	5.642.137.900,00	5.447.017.343,00	96,54%
	- Belanja Langsung	2.692.140.000,00	2.608.145.904,00	96,88%
32	<b>Camat Medang Kampai</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	4.952.789.400,00	4.781.549.115,00	96,54%
	- Belanja Langsung	2.108.040.000,00	2.025.391.083,00	96,08%
33	<b>Camat Dumai Kota</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	5.833.737.970,00	5.656.339.371,00	96,96%
	- Belanja Langsung	3.272.800.000,00	3.221.222.203,00	98,42%
34	<b>Camat Dumai Selatan</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	5.566.563.130,00	5.364.212.946,00	96,36%
	- Belanja Langsung	3.156.280.000,00	3.123.078.080,00	98,95%
35	<b>Camat Sungai Sembilan</b>			
	- Belanja Tidak Langsung	5.190.784.550,00	5.023.408.067,00	96,78%
	- Belanja Langsung	2.990.680.000,00	2.955.282.148,00	98,82%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 (data un audit)

Keterangan Tabel 3. 3 diatas : Data Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2016 posisi *Un Audit*.



# LKPJ 2016

## BAB 4

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2017

## **BAB IV**

# **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

## **TAHUN 2016**

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2016 menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Maka berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun Urusan Wajib beserta organisasi yang melaksanakannya adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pendidikan, oleh Dinas Pendidikan, Kantor Perpustakaan, Arsip, Pengolahan Data dan Elektronik dan Sekretariat Daerah;
2. Urusan Wajib Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan dan RSUD;
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, oleh Dinas Pekerjaan Umum;
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat, oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan;
5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup, oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup dan Kecamatan.
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah;
7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kecamatan.
8. Urusan Wajib Perhubungan oleh, Dinas Perhubungan;
9. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
10. Urusan Wajib Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan oleh, Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Urusan Wajib Sosial oleh, Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah Kota Dumai;
12. Urusan Wajib Tenaga Kerja oleh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah oleh, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat;
14. Urusan Wajib Kebudayaan dan Pemuda Olahraga oleh, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga;

15. Urusan Wajib Pemerintahan Umum oleh, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Sekretariat Dewan, Dinas Pendapatan, Inspektorat, Badan Administrasi, Kepegawaian dan Diklat, Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Kecamatan;
16. Urusan Wajib Kepegawaian oleh, Badan Administrasi, Kepegawaian dan Diklat dan Sekretariat Daerah;
17. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri oleh, Kantor Kesbangpolinmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah dan Kecamatan;
18. Urusan Wajib Kearsipan oleh, Kantor Perpustakaan, Arsip, Pengolahan Data dan Elektronik;
19. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika oleh, Kantor Perpustakaan, Arsip, Pengolahan Data dan Elektronik dan Sekretariat Daerah;
20. Urusan Wajib Pertanahan dan Penanaman Modal oleh, Sekretariat Daerah Kota Dumai;  
Sedangkan Urusan Pilihan beserta organisasi yang melaksanakannya adalah sebagai berikut :
  1. Urusan Pilihan Energi Sumberdaya Mineral oleh, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, dan Sekretariat Daerah Kota Dumai ;
  2. Urusan Pilihan Transmigrasi oleh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai;
  3. Urusan Pilihan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Dumai;
  4. Urusan Pilihan Pertanian oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Sekretariat Daerah Kota Dumai;
  5. Urusan Pilihan Kehutanan oleh, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai;
  6. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Sekretariat Daerah Kota Dumai;
  7. Urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Kantor Pelayanan Pasar serta Sekretariat Daerah Kota Dumai;
  8. Urusan Pilihan Perindustrian oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kota Dumai;

## A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

### 1. Urusan Wajib Pendidikan

#### DINAS PENDIDIKAN

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib pendidikan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian kinerja 2016	Realisasi sampai tahun 2016	Capaian Kinerja
Angka melek huruf	%	99,43	99,52	>100%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100	>100	100%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100	>100	100%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,97	99,54	98,58%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,26	80,46	94,37%
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah:				
- SD/MI	(per 1000 siswa)	0,277	0,320	115,52%
- SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0,370	0,293	79,18%
Rasio guru/murid per kelas rata-rata				
- SD/MI	(per siswa)	1:17	1:17,9	>100%
-SLTP	(per siswa)	1:16	1:17,5	>100%

Dinas Pendidikan Kota Dumai

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2016 disampaikan sebagai berikut :

#### a. Angka Melek Huruf

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Angka melek huruf maksud adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bias baca tulis. target capaian kondisi akhir 2015 adalah 99,43% sedangkan realisasi 2016 adalah 99,52% yang berarti capaian telah melebihi target atau lebih besar dari 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

#### b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi kasar atau APK SD/MI/Paket A yang menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun. Capaian indikator ini sampai tahun 2015 sudah lebih besar dari 100% begitu juga realisasi 2016 lebih dari 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

**c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B**

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi kasar atau APK SMP/MTs/Paket B yang menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun. Capaian indikator ini sampai tahun 2015 sudah lebih besar dari 100% begitu juga realisasi 2016 lebih dari 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

**d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni ( APM ) SD/MI/Paket A yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SD/MI/Paket A yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian indikator ini sampai tahun 2015 adalah 100,97% sedangkan realisasi tahun 2016 adalah 98,58% yang berarti capaian belum memenuhi target yaitu sebesar 98,58%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

**e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

Target dari indikator sasaran ini yaitu yaitu angka partisipasi Murni ( APM ) SMP/MTs/Paket B yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP/MTs/Paket B yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian indikator ini sampai tahun 2015 adalah 100,97% sedangkan realisasi tahun 2016 adalah 98,58% yang berarti capaian belum memenuhi target yaitu sebesar 98,58%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

**f. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah: - SD/MI**

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah dengan penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI dengan target akhir RPJM yaitu 0,277 dan pada tahun 2016 terealisasi 0,320 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 115,52%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

**g. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah: - SMP/MTs**

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah terhadap penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs dengan target akhir RPJM yaitu 0,370 dan pada tahun 2016 terealisasi 0,293 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 79,18% .

**h. Rasio guru/murid per kelas rata-rata ( SD/MI)**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terpenuhinya kebutuhan guru/murid perkelas pada jenjang SD/MI dengan target akhir RPJM yaitu 1:17 dan pada tahun 2016 terealisasi 1:17,9 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu >100%.

**i. Rasio guru/murid per kelas rata-rata ( SLTP)**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terpenuhinya kebutuhan guru/murid perkelas pada jenjang SMP/MTs dengan target akhir RPJM yaitu 1:16 dan pada tahun 2016 terealisasi 1:17,5 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu >100%.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak baik dari Dinas Pendidikan Kota Dumai dan Sekolah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, dan indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP disebabkan oleh banyaknya penduduk yang bersekolah pada jenjang SD memiliki usia >7 tahun dan banyaknya penduduk yang melanjutkan sekolah diluar daerah.

Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 380.856.000.102,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 279.343.834.462,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 101.512.165.650,- Data alokasi dana dan realisasi anggaran dapat dilihat pada table dibawah:

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

**1. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Program pendidikan anak usia dini dengan anggaran sebesar Rp. 3.011.394.440,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.364.586.230,00 atau 78,52%.

**a) Pembangunan Gedung Kantor**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 856.101.640,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus seribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan target kinerja pembangunan gedung sekolah 3 paket, penyerapan anggaran Rp. 514.795.000,- (lima ratus empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 60,13%.

b) Penambahan Ruang Kelas Sekolah;

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) dengan target kinerja pembangunan ruang kelas baru 3 paket, penyerapan anggaran Rp. 504.276.000,- (lima ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau 99,86%..

c) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir;

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan target kinerja di bangunnya 4 pagar TK dan semenisasi halaman 1 tk, realisasi penyerapan anggaran Rp. 159.560.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau 99,73%.

d) Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary;

Jumlah anggaran yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan target kinerja terbangunnya wc sekolah sebanyak 1 unit dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 44.780.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratur delapan puluh ribu rupiah) atau 99,51%.

e) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan target kinerja tersedianya alat bermain peserta didik sebanyak 3 lembaga dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 134.659.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau 40,68%.

f) Pengadaan Meubiler Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan target kinerja meubiler yang diadakan 0 set dan realisasi penyerapan anggaran Rp.0,- (nol rupiah) atau 0%.

g) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dengan target kinerja meningkatnya kemampuan manejerial dan kepemimpinan pengelolaan TK dan realisasi penyerapan anggaran Rp.0,- (nol rupiah) atau 0.00%.

h) Pengembangan Pendidik Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 60.535.000,- (enam puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan target kinerja Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti kegiatan K3 PAUD sebanyak 65 orang dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.445.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 81,68%.

i) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 473.444.800,- (empat puluh tujuh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan target kinerja penyediaan biaya operasional TK sebanyak 4 sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 462.209.233,- (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 97,63%.

j) Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 244.594.000,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan target kinerja meningkatnya kompetensi guru PAUD sebanyak 150 orang dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 211.910.000,- (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atau 86,64%.

k) Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 128.585.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan target jumlah kepala sekolah yang mengikuti kegiatan koordinasi sebanyak 150 orang dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 116.422.997,- (seratus enam belas juta empat ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atau 90,54 %.

l) Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 197.134.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan target terlaksananya program anak usia dini dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 166.528.200,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delan ribu dua ratus rupiah) atau 84,47%.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan anggaran sebesar Rp. 44.027.442.185,00 dan realisasi sebesar Rp. 37.767.571.747,00 atau 85,78%.

a) Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.341.700.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan target kinerja terlaksannya pembangunan gedung dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 6.973.529.998,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) atau 94,99%.

b) Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 8.765.320.000,- (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan target kinerja meningkatnya daya tampung pendidikan dasar dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 7.382.957.900,- (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) atau 84,23%.

c) Penambahan ruang guru sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan target kinerja tercukupinya kebutuhan ruang majelis guru dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 203.900.000,- (dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau 95,28%.

d) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.168.480.000,- (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan target kinerja tercukupinya kebutuhan ruan paktik bagi siswa dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 890.257.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau 76,19%.

e) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.134.000.000,- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan target kinerja tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 268.820.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 23,71%.

f) Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.528.920.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan target kinerja terbangunnya perpustakaan sekolah dasar Sembilan tahun dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 457.265.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam pulu lima ribu rupiah) atau 29,91%.

g) Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.866.400.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah) dengan target kinerja dibangunnya sarana sanitasi di sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.718.220.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau 92,06%.

h) **Pengadaan Meubiler Sekolah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 899.740.000,- (rupiah) dengan target kinerja tercukupinya kebutuhan meubiler sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 652.586.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau 72,53%.

i) **Pengadaan Perlengkapan Sekolah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.704.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus empat juta rupiah) dengan tercukupinya kebutuhan perlengkapan sekolah dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.497.601.350,- (lima miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus seribu tigaratus lima puluh rupiah) atau 71,36%.

j) **Rehabilitas Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.703.750.000,- (satu miliar tujuh ratus tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan target kinerja telaksananya rehabilitasi ruang kelas dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.248.155.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau 73,26%.

k) **Pelatihan Penyusunan Kurikulum**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 173.197.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan target kinerja meningkatkan kualitas dan kompetensi guru khususnya dalam pembuatan kurikulum di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 168.697.700,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau 97,40%.

l) **Penyediaan Bantuan Operasional sekolah BOS Jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTS serta Pesantren Salafiah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3.424.599.250,- (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan target kinerja terpenuhinya indeks kebutuhan siswa pertahun yang di subsidi dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.360.757.020,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) atau 98,14%.

m) **Penyelenggaraan Paket A Setara SD**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.420.000,- (Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan target kinerja berkurangnya persentase masyarakat belum taman SD/Setara di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.410.000,- (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atau 59,00%.

n) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan target kinerja berkurangnya persentase masyarakat belum taman SMP/Setara di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp 37.180.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) atau 96,57%.

o) Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 79.913.700,- (tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan target kinerja Tercapainya pembukuan standar pelayanan minimal (SPM) di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 59.033.200,- (lima puluh Sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau 73,87%.

p) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 503.025.000,- (Lima ratus tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan target kinerja Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 475.140.200,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) atau 94,46%.

q) Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 489.896.400,- (Empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan target kinerja terlaksananya hari pendidikan nasional dan penyusunan profil pendidikan mengikuti kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 485.251.400,- (Empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau 99,05%.

r) Penyediaan Beasiswa Transisi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.11.445.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan Jumlah pembuatan SPJ Transisi dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.445.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 100%.

s) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 54.629.450,- (Lima puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan target kinerja Dokumen Hasil Monitoring Aset Dinas Pendidikan dan realisasi penyerapan anggaran Rp 54.629.450,- (Lima puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau 100%.

t) Penyediaan Dukungan Operasional SMP Negeri Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.937.954.885,- (Lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan target terbayarnya dukungan operasional siswa dan realisasi penyerapan anggaran Rp 5.887.593.781,- (Lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau 99,15%.

u) Penyelenggaraan Ujian Nasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 978.800.800,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah) dengan target kinerja tersedianya peserta UN dan US SD/MI, SMP/MTS Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp 919.677.148,- (Sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau 93,86%.

3. Program Pendidikan Menengah

Program pendidikan menengah dengan anggaran sebesar Rp. 23.109.608.825,00 dan realisasi sebesar Rp. 21.467.146.096,00 atau 92,89%.

a) Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 107.000.000,- (Seratus tujuh juta rupiah) dengan target kinerja terpenuhinya kebutuhan sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau 6,54%.

b) Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.115.500.000,- (Dua milyar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan target kinerja Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.783.903.000,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau 84,33%.

c) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 657.500.000,- (Enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan target Jumlah laboratorium/ruang praktek yang dibangun sebanyak 11 unit dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 656.104.000,- (Enam ratus lima puluh enam juta seratus empat ribu rupiah) atau 99,79%.

d) Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 257.950.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan target

kinerja Jumlah sarana sanitasi (WC) dan air bersih dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 256.470.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 99,43%.

e) **Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.719.111.500,- (Dua belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan target Kinerja Jumlah alat peraga yang disediakan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.790.509.500,- (Sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 92,70%.

f) **Pengadaan Meubiler Sekolah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 543.000.000,- (Lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan target kinerja Jumlah meubiler guru dan siswa yang tersedia dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 541.296.800,- (Lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau 99,69%.

g) **Pengadaan Perlengkapan Sekolah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 261.150.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan target tersedianya perlengkapan sekolah dan penyerapan anggaran Rp. 255.802.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah) atau 97,95%.

h) **Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 273.970.500,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi dan penyerapan anggaran Rp. 273.284.900,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) atau 99,75%.

i) **Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 23.450.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan target kinerja Jumlah kesebelasan yang mengikuti liga sepak bola dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 23.450.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%.

j) **Penyediaan Bantuan Operasional Mutu (BOMM)**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dengan target kinerja Penerapan Sistem manajemen mutu ISO.9001.2008 dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0,00%.

k) **Penyelenggaraan Paket C Setara SMU**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 63.350.000,-

(seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan target Jumlah siswa yang mengikuti paket C dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.100.000,- (Empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) atau 77,51%.

- l) Pembinaan kelembagaan sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 301.164.000,- (Tiga ratus satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan target Terpantaunya perkembangan program pendidikan dan kondisi sekolah realisasi penyerapan anggaran Rp. 300.051.350,- (Tiga ratus juta lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 99,63%.

- m) Penyediaan Dukungan Operasional SMA dan SMK Negeri di Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.336.724.475,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan target terpenuhinya kebutuhan operasional Sekolah 12 bulan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.272.088.636,- (Empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau 98,51%.

- n) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/ MA/ SMK

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 464.527.400,- (Empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan target kinerja Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran Rp 373.892.960,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 80,49%.

- o) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 366.359.850,- (Tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan target kinerja Jumlah siswa yang mengikuti kompetensi dan realisasi penyerapan anggaran Rp 329.127.750,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 89,84%.

- p) Penyelenggaraan Ujian Nasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 618.851.100,- (Enam ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) dengan target kinerja terlaksananya kegiatan UN dan US SMA/MA/SMK Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 555.065.200,- (Lima ratus lima puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau 89,69%.

4. Program Pendidikan Luar Biasa

Program pendidikan luar biasa dengan besaran anggaran sebesar Rp. 238.975.412,00 dan realisasi sebesar Rp. 225.736.059,00 atau 94,46%.

a) Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 62.050.000,- (Enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan dengan target terlaksananya lomba PTK PAUD NI dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 60.094.000,- (Enam puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) atau 96,85%.

b) Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 176.925.412,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan dengan target tersedianya biaya operasional sekolah yang efisien dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 165.642.059,- (Seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) atau 54,93%.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran sebesar Rp. 21.247.761.130,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.522.599.700,00 atau 91,88%.

a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 467.995.010,- (Empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sepuluh rupiah) dengan target kinerja mutu pendidikan meningkat dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 438.729.200,- (Empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau 93,75%.

b) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 313.765.950,- (Tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan target kinerja jumlah guru yang mengikuti dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 93.539.450,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau 29,81%.

c) Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 632.892.200,- (Enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan target kinerja terlatihnya guru kurikulum dan terlatihnya guru labor dan pengelola labor dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 334.345.700,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau 52,83%.

d) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 317.260.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan target kinerja meningkatnya kreativitas guru dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 102.992.000,- (Seratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau 32,46%.

e) Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 18.772.660.000,- (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan target kinerja pendidik yang profesional dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 17.830.595.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 84,70%.

f) Pengembangan Sistem Perencanaan dan pengendalian Program Profesi pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 549.552.200,- (Lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan target kinerja Guru Pengawas Kepala Sekolah dan pengawas sekolah yang berprestasi dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 547.078.200,- (Lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau 99,55%.

g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 193.635.770,- (Seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan target kinerja Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan pangkatnya dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 175.320.150,- (Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) atau 90,54%.

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidik dengan besaran anggaran sebesar Rp. 3.923.901.853,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.588.428.013,00 atau 91,45%.

a) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 80.050.000,- (Delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan target kinerja satuan pendidikan yang disurvei dan jumlah laporan hasil survei dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 75.700.000,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 94,57%.

b) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 915.093.000,- (Sembilan ratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan target kinerja disusunnya RENSTRA pendidikan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 816.694.000,- (Delapan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau 89,25%.

c) Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 210.256.400,- (Dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan target kinerja laporan monitoring yang tersedia dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 133.499.700,- (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) atau 63,49%.

d) Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 342.573.500,- (Tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan target kinerja terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 310.943.497,- (Tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 90,77%

e) Pembinaan Komite Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 88.831.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan target kinerja satuan pendidikan yang dinilai kondisi kebersihan lingkungannya dan realisasi anggaran Rp. 83.030.600,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) atau 93,47%.

f) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.244.277.943,- (Satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan target kinerja data siswa yang di input dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.164.949.332,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau 93,62%.

g) Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 357.579.400,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan target kinerja jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi NUPTK dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 350.441.400,- (Tiga ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau 98,00%.

h) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 685.240.610,- (Enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan target kinerja terdapatnya sarana prasarana pendidikan di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 653.169.484,- (Enam ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) atau 95,32%.

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

a. DINAS KESEHATAN

Pelaksanaan program di bidang kesehatan selama tahun 2016 dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
Menurunnya Mortalitas (angka kematian)

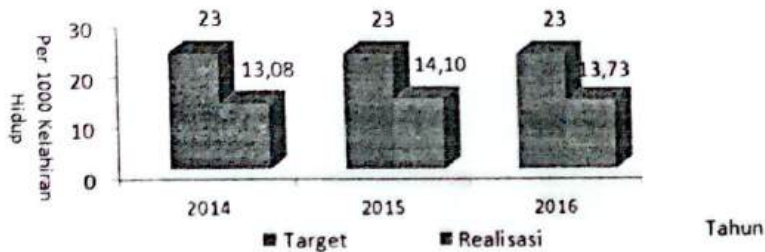
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 23	13,73	100%
2.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 32	16,88	100%
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	125	109,32	100%
4.	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70,06	70,25	100%

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 1 yakni menurunnya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2016 adalah sebesar 100%.

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 113 kasus dari 8.233 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 13,73 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 dimana angka kematian bayi sebesar 14,10 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2016 yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2014 sampai dengan 2016 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.1 berikut ini :

**Grafik 4.1**  
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai  
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2016



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 26 kasus, disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 20 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.2 berikut ini :



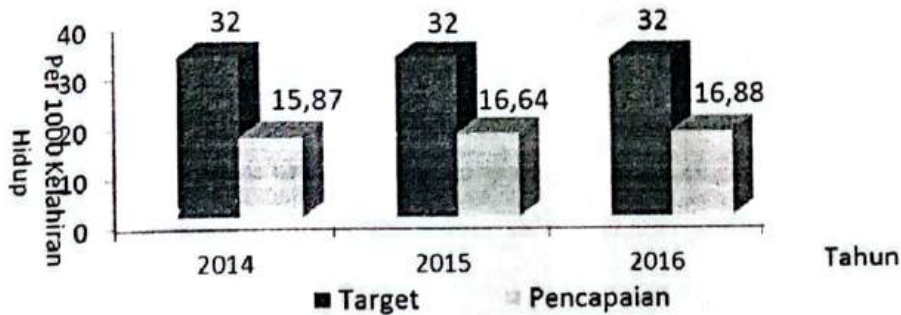
Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.

**b. Angka Kematian Balita**

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 139 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2016 di Kota Dumai sebesar 16,88 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 dimana angka kematian bayi sebesar 16,64 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2016 yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian

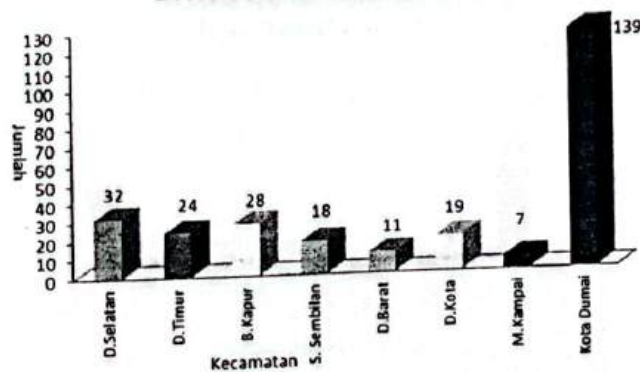
Balita dan Tahun 2014 sampai dengan 2016 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.3 berikut ini :

**Grafik 4.3**  
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai  
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2016



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 32 kasus, disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 28 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.4 berikut ini :

**Grafik 4.4**  
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan  
Di Kota Dumai Tahun 2016



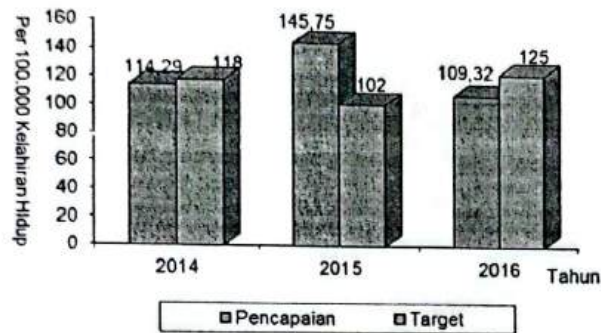
Penyebab kematian balita masih didominasi oleh kasus kejang demam, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.

#### c. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 9 kasus dari 8.233 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2016 di Kota Dumai sebesar 109,32 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015, di mana angka kematian ibu sebesar 145,75 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada sedikit penurunan angka kematian ibu pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target

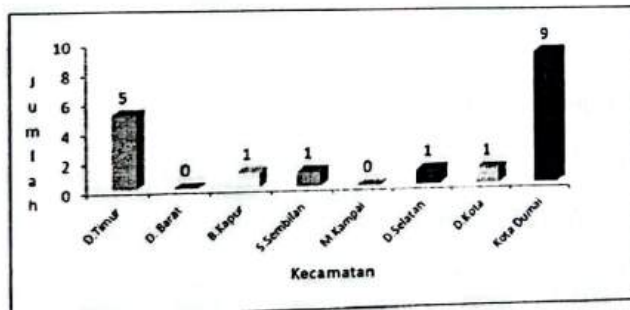
indikator Kota Dumai tahun 2016 yakni 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini masih dibawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2014 sampai dengan 2016 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.5 berikut ini :

**Grafik 4.5**  
Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai  
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2016



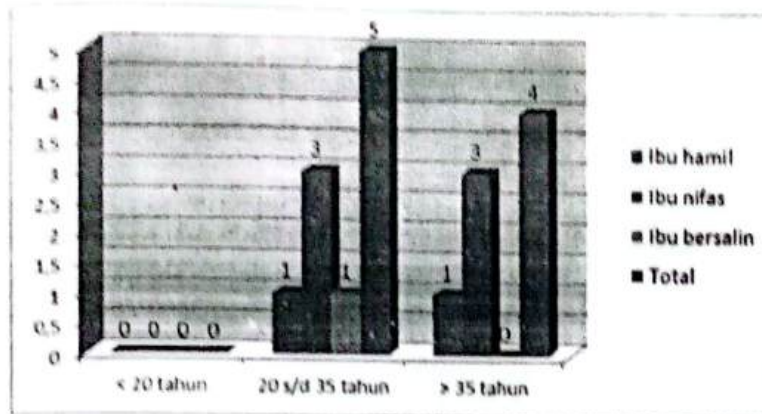
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 5 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.6 berikut ini :

**Grafik 4.6**  
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan  
Di Kota Dumai Tahun 2016



Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena perdarahan sebanyak 4 kasus disusul dengan pre eklamsi berat sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 5 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terbanyak pada kelompok ibu nifas sebanyak 6 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 4.7**  
**Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu**  
**Dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2016**

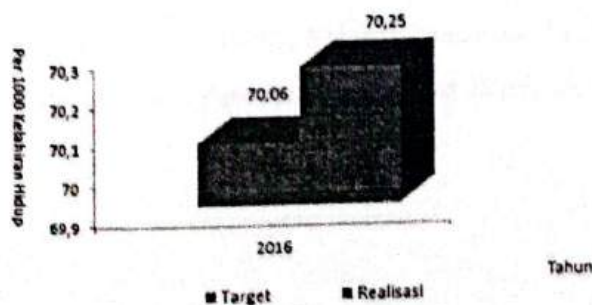


**d. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir**

Mulai tahun 2016 karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan menggunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2016 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 70,25 tahun (diasumsikan sama dengan tahun 2015 karena data terbaru dari BPS belum ada). Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 yakni sebesar 70,05 tahun terlihat ada sedikit peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2016 dapat di lihat pada grafik 4.8berikut ini :

**Grafik 4.8**  
**Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai**  
**Tahun 2016**



Tabel 4.3  
 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru  
 Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai  
 Dari Tahun 2010 sampai dengan 2016

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1	2010	69,81	70,15	69,93
2	2011	70,01	70,32	69,95
3	2012	70,20	70,49	70,02
4	2013	70,40	70,67	70,04
5	2014	70,59	70,76	70,05
6	2015	70,70*	70,93	70,25
7	2016	70,70*	70,93	70,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2016  
 \* UN, World Population Prospects the 2012 revision

Tabel 4.4  
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	1	0,06	100%
2.	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	88,38	100%
3.	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0,72	100%
4.	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	60	91,58	47,37%

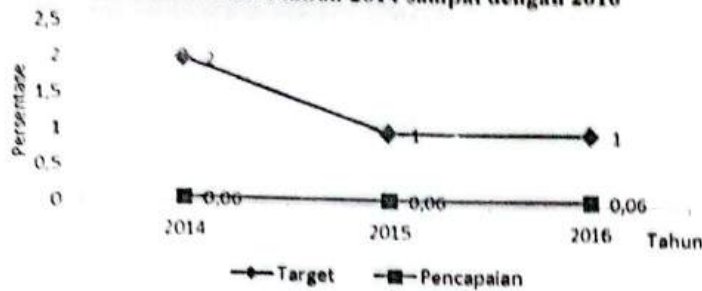
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 2 yakni menurunnya Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2016 adalah sebesar 86,84%.

#### e. Angka Kesakitan Malaria

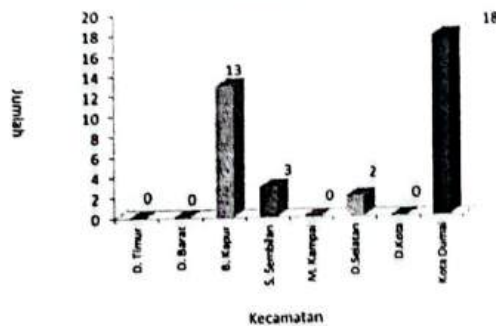
Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 2.906 kasus malaria klinis. Dari 2.906 kasus yang ada terdapat 18 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,06 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 di mana *Annual Parasite Incidence*(API) sebesar 0,06 per 1.000 penduduk, terlihat pencapaiannya statis. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2016 yakni per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (AMI) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari grafik 4.9 dibawah ini:

**Grafik 4.9**  
**Pencapaian Angka Kesakitan Malaria**  
**Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2016**



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terbanyak ditemukan di Kecamatan Bukit Kapur yakni sebanyak 13 kasus (65%). Hal tersebut disebabkan tingginya mobilitas penduduk baik warga lokal maupun warga pendatang dari luar Kota Dumai dan pembukaan lahan perkebunan yang berpotensi berkembangnya nyamuk malaria. Hal ini cukup mengejutkan mengingat daerah yang selama ini dikenal dengan daerah high endemis Malaria adalah Kecamatan Sungai Sembilan. Dengan faktor resiko tersebut maka satu wilayah Kecamatan Bukit Kapur menjadi daerah high endemis Malaria. Kecamatan Sungai Sembilan merupakan kecamatan terbanyak kedua ditemukannya kasus Malaria positif yakni sebanyak 3kasus, seperti terlihat pada grafik 4.10 berikut ini :

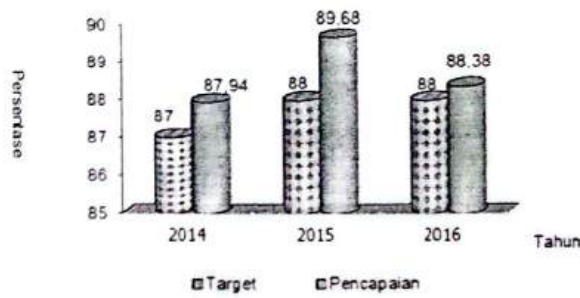
**Grafik 4.10**  
**Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan**  
**Di Kota Dumai Tahun 2016**



**f. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +**

Pada tahun 2016 dari total 284 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 251 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 88,38%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 sebesar 89,68%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2016 sudah mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan dapat dilihat dari grafik 4.11 berikut ini :

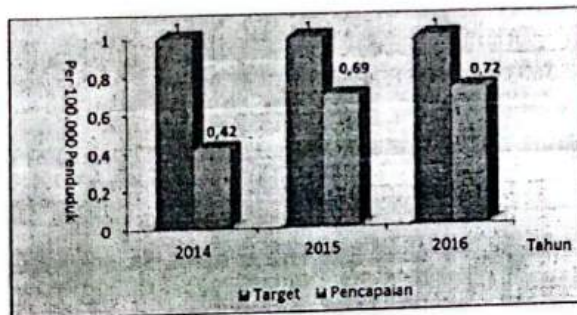
**Grafik 4.11**  
**Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2016**



**g. Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko**

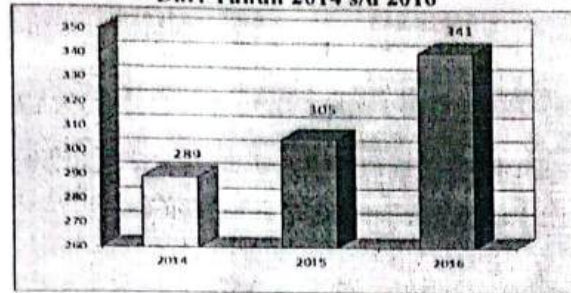
Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 341 kasus yang terdiri dari 305 kasus lama dan 36 kasus baru yang ditemukan tahun 2016. Dari 341 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 107 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 234 orang. Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2016 adalah sebesar 0,72% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 32.719 orang).

**Grafik 4.12**  
**Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2016**



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0,69%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2016 sebesar < 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

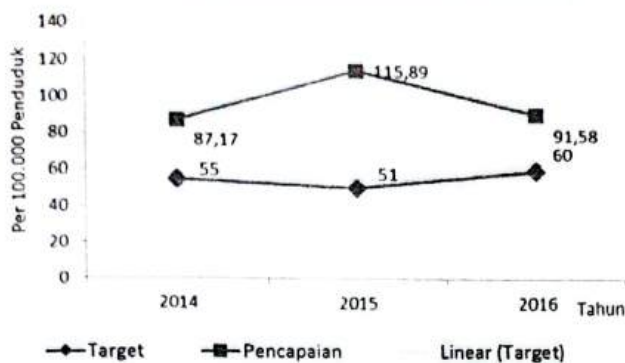
Grafik 4.13  
Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai  
Dari Tahun 2014 s/d 2016



#### h. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

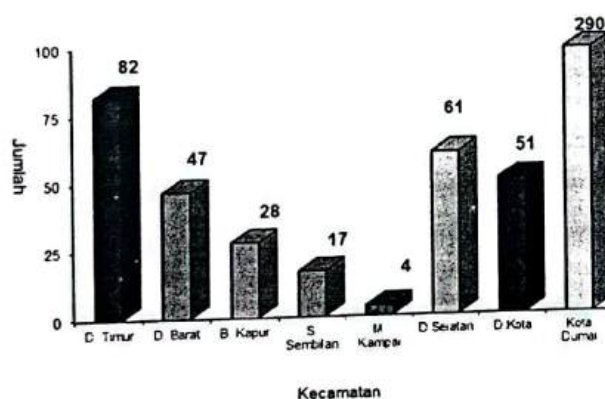
Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2016 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 290 kasus atau IR = 91,58 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 2 orang atau CFR = 0,69%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 367 kasus atau IR = 115,89 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 1 kasus atau CFR = 0,54%, maka ada sedikit penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 60 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut melebihi target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang baik). Untuk itu masih diperlukan kerja keras dalam upaya menurunkan angka kesakitan DBD di Kota Dumai pada tahun mendatang. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti  $\pm$  80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

**Grafik 4.14**  
**Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2016**



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 82 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 61 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.15 berikut ini :

**Grafik 4.15**  
**Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2016**



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M<sup>2</sup> dan dilakukan di 100 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

Tabel 4.5  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
Meningkatnya Status Gizi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	-	0,01	100%
2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	-	0,41	100%

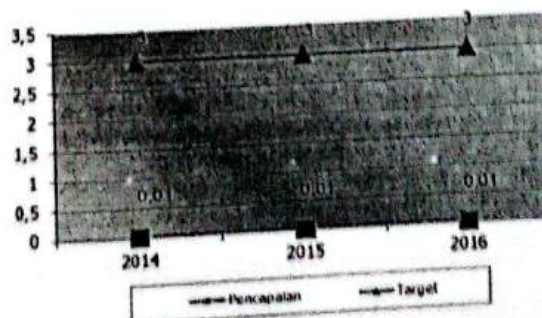
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 3 yakni meningkatnya status gizi pada tahun 2016 adalah sebesar 100%.

i. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan ( $BB/TB \leq 3$  standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2013 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2015, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2015, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2016 ditemukan 3 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2016 adalah 0,01%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 5 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2016 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 4.16  
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2016

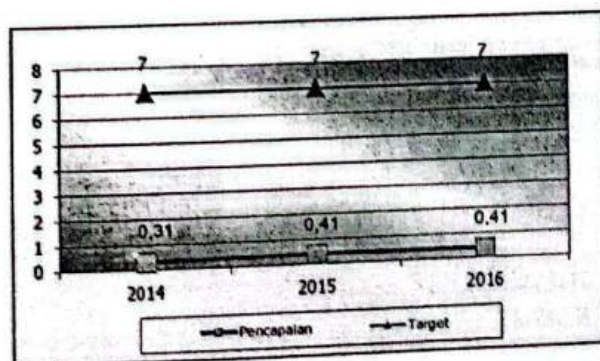


Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

**j. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang**

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Selama tahun 2016 kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 152 kasus dari 37.247 balita yang ditimbang, sehingga persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 0,41%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 126 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,41%, terlihat ada peningkatan kasus balita dengan gizi kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2016 yakni sebesar 7%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

**Grafik 4.17**  
**Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang**  
**Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2016**



Melalui pelaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yakni pelacakan kasus balita dengan gizi kurang selama tahun 2016 ditemukan 207 kasus balita gizi kurang dan balita BGM. Setelah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu yaitu sebanyak 80 gram selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita,

pada akhir tahun 2016 jumlah kasus balita gizi kurang dan balita BGM berkurang menjadi 38 kasus balita gizi kurang. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi.

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 94.457.531.016,98,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 34.124.139.400,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.60.333.391.616,98,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 32.956.139.438,- atau terserap 96,58 % dan belanja langsung terserap Rp. 54.684.304.954,- atau 90,64 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.375.814.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.284.012.117 atau sebesar 96,14% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp 2.375.814.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 2.284.012.117 atau sebesar 96,14%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp28.567.593.593,54 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 24.092.547.764 atau sebesar 84,34% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.18.722.183.506,54 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp15.593.080.083 atau sebesar 83,29% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan JKN di puskesmas dan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan dengan realisasi sebesar 100%.

b) Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp3.939.712.266

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp3.572.921.277 atau sebesar 90,69% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya, dengan realisasi semuanya sebanyak 100%.

c) Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp28.620.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp28.070.000 atau sebesar 98,08% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan lomba posyandu teladan sebanyak 194 posyandu dan pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk 150 kasus, dengan realisasi semuanya 100%.

d) Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.083.641.321 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp405.635.861 atau sebesar 37,43% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.6**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
penanggulangan masalah kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Pelaksanaan pertemuan AMP	kali	2	2	100%
Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi	Kasus	30	30	100%
Pelaksanaan pertemuan pengembangan diri dan peningkatan kinerja petugas kesehatan	Angkatan	1	1	100%
Penyediaan rumah tunggu kelahiran	RKT	1	1	100%
Jumlah bidan yang mengikuti pelatihan APN	Orang	15	15	100%

Dapat dilihat dari **Tabel 4.6** diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk pelaksanaan pertemuan AMP, pelacaknya kematian ibu dan bayi, pelaksanaan pertemuan pengembangan diri dan peningkatan kinerja petugas kesehatan, penyediaan rumah tunggu kelahiran dan jumlah bidan yang mengikuti pelatihan APN semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

e) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan khusus

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp55.400.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 49.200.000 atau sebesar 88,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.7**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
Pelayanan kesehatan khusus

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera	puskesmas	10	10	100%
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa	puskesmas	10	10	100%
Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan	sekolah	256	256	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari *Tabel 4. 7* diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program kesehatan indera, jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa, jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan, capaian cakupannya sudah 100% dari realisasi target kinerja.

f) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp4.595.036.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp4.301.661.943 atau sebesar 93,62% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.8**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
Pelayanan kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas	Kali	2	2	100%
Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas	Bulan	12	12	100%
Jumlah puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas	Puskesmas	10	8	80%
Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal	anak	200	0	0%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.8 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas, Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas, Jumlah puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas, semua cakupannya sudah 100% dari realisasi target kinerja sedangkan Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal realisasi 0 %.

g) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp143.000.000. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp141.978.600 atau sebesar 99,29% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.9**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
Pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS,rad,lab yang dibina	Sarana	18	18	100%
Pelaksanaan sistem pelaporan SIMRS	Triwulan	4	4	100%
Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dokter spesialis di puskesmas	kali	1	1	100%
Pelaksanaan Up date kepesertaan jaminan kesehatan kota dumai	kali	2	2	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari table 4.9 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS, Rad, Lab yang dibina, pelaksanaan sistem pelaporan SIMRS, pelaksanaan pelayanan kesehatan dokter spesialis ke puskesmas, dan pelaksanaan Up data kepesertaan jaminan kesehatan kota dumai semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp71.758.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp71.758.000 atau sebesar 100% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp71.758.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp71.758.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.10**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
Pengawasan keamanan pangan dan bahaya berbahaya

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah apotik yang diawasi dan di bina	Sarana	28	28	100%
Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina	Sarana	30	30	100%
Jumlah toko makanan dan minuman yang diawasi dan dibina	Sarana	30	30	100%
Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina	Sarana	50	50	100%
Jumlah pengawasan dan pembinaan obat ke puskesmas	puskesmas	10	10	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.10 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah apotik yang diawasi dan di bina, jumlah toko obat yang diawasi dan dibina, jumlah IRTP yang diawasi dan dibina, jumlah toko makanan-minuman yang diawasi dan dibina dan jumlah pengawasan dan pembinaan obat ke puskesmas semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 682.290.750 Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 681.250.250 atau sebesar 99,85% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp175.760.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp175.760.000 atau sebesar 100% dari anggaran.

**Tabel 4.11**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
Promosi dan Informasi sadar hidup sehat

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif	Kelurahan	20	20	100%
Jumlah pelaksanaan promkes dengan menggunakan media cetak (buletin koran)	kali	15	15	100%
Terlaksananya promosi kesehatan menggunakan media elektronik (televisi)	Kali	4	4	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.11 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah

pembinaan kelurahan siaga aktif, jumlah pelaksanaan promkes dengan menggunakan media cetak (buletin koran), dan terlaksananya promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (televise) semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b) Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp306.177.250 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp305.968.250 atau sebesar 99,93% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pembinaan PHBS tatanan sekolah	Sekolah	18	18	100%
Jumlah penyuluhan Napza dan penyakit menular lainnya	Sekolah	45	45	100%
Jumlah penilaian PHBS Tatanan rumah tangga	kelurahan	10	10	100%
Jumlah pelatihan dokter kecil	Kali	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.12 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pembinaan PHBS tatanan sekolah, jumlah penyuluhan Napza dan penyakit menular lainnya , Jumlah penilaian PHBS tatanan rumah tangga dan jumlah pelatihan dokter kecil semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

c) Kegiatan peringatan hari kesehatan nasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 150.900.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 150.125.000 atau sebesar 99,49% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional sebanyak 1 kegiatan dengan realisasi sebesar 100%.

d) Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp49.453.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 49.397.000 atau sebesar 99,89% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tempat praktek tenaga kesehatan 4 kali, jumlah pelaksanaan pendataan tenaga kesehatan yang teregistrasi 3 kali dan jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis ketenagaan, realisasi sebesar 100%.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp186.944.000 Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp186.903.000 atau sebesar 99,98% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a) Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp97.616.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp97.616.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.13**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Pemberian tambahan makanan dan vitamin**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah vitamin A untuk bayi, balita dan ibu nifas	kapsul	13.448	0	0%
Jumlah balita yang mendapat vitamin	Balita	500	500	100%
Jumlah PMT balita gizi kurang/buruk	Balita	40	40	100%
Pelaksanaan data bumil KEK dan PMT bumil KEK	orang	25	25	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.13 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah vitamin A untuk bayi, balita, dan ibu nifas, jumlah balita yang mendapat vitamin, jumlah PMT balita gizi kurang/buruk dan pelaksanaan data bumil KEK dan PMT bumil KEK semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b) Kegiatan penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp89.328.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp89.287.000 atau sebesar 99.95% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.14**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Penanggulangan Kurang energi protein (KEP)**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Pengadaan stiker P2BS dan SKDN	lembar	2.850	2.850	100%
Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium	Kelurahan	33	33	100%
Pengadaan MP-ASI balita 6-24 bulan	Anak	20	20	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari table 4.14 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk Pengadaan stiker P2BS dan SKDN, Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium dan Pengadaan MP-ASI balita 6-24 bulan, semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp608.863.000 Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp608.363.000 atau sebesar 99,92% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini:

a) Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp608.863.000 dengan

realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp608.363.000 atau sebesar 99,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

Tabel 4.15  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
Kajian Pengembangan lingkungan sehat

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%

Dapat dilihat dari tabel 4.15 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan, dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan, dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan, dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan, dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

#### 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp2.970.841.650. Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 2.928.886.886 atau sebesar 98,59% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

##### a) Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp528.824.050 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 520.490.648 atau sebesar 98,42% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan fogging fokus sebanyak 283 semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

##### b) Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 60.640.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60.640.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran untuk jumlah ketersediaan insektisida DBD semuanya mencapai cakupan 100 % dari realisasi target kinerja.

##### c) Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp63.655.200 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp63.655.200 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah vaksin anti rabies yang tersedia

sebanyak 49 keur, terlaksananya pengambilan vaksin rutin ke Dinas Kesehatan Propinsi 12 bulan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

d) Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp87.806.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp87.796.600 atau sebesar 99,99% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah sebanyak 110 SD dari target 110 SD, pelaksanaan *catch up campaign* campak SD di 110 SD dari target 110 SD dengan realisasi sebesar 100%.

e) Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.159.457.900 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.135.787.600 atau sebesar 97,96% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.16**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Terlaksananya larvasidasi massal	Kali	2	2	100%
Pelaksanaan PE DBD larvasidasi selektif	Kasus	325	325	100%
Pelaksanaan penemuan BTA(+) TB paru	Kasus	250	250	100%
Penyediaan lavarsida	Kg	1.500	1.500	100%
Pelaksanaan Transmition Assesment Survey (TAS)	Sekolah	15	15	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.16 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk terlaksananya larvasidasi massal, Pelaksanaan PE DBD larvasidasi selektif, Pelaksanaan penemuan BTA(+) TB Paru, penyediaan lavarsida, pelaksanaan survey TAS di sekolah, semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

f) Kegiatan peningkatan imunisasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp818.237.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp809.461.838 atau sebesar 98,93% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pembinaan peningkatan cakupan imunisasi, pelaksanaan PIN, pelaksanaan pengelolaan rantai penyimpanan vaksin dan monitoring vaksin bOPV dengan realisasi sebesar 100%.

g) Kegiatan peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp252.221.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp251.055.000 atau sebesar 99,54% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.17  
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
 Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Indikator dan tolok ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji	Jemaah	300	250	83,33%
Pelaksanaan vaksinasi meningitis jemaah calon haji	Jemaah	300	250	83,33%
Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB	Kali	3	3	80%
Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu	Bulan	12	12	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji, pelaksanaan vaksinasi meningitis jemaah calon haji, dan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB, Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp13.586.832.795,44 Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp12.802.161.679 atau sebesar 94,22% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a) Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp87.884.600 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp87.678.000 atau sebesar 99,76% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.18  
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016  
 Standar pelayanan kesehatan

Indikator dan tolok ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan, jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, dan jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b) Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp60.993.600 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp59.972.500 atau sebesar 98,33% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.19**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Evaluasi standar pelayanan kesehatan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2016 yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) T.A 2017 yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan	Kali	3	3	100%
Jumlah dokumen DHA yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2016 yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) T.A 2016 yang dihasilkan, jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dan jumlah dokumen DHA yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

c) Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp551.692.375 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp548.699.000 atau sebesar 99.46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.20**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan	Kali	1	1	100%
Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan	Kali	2	1	100%
Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	Puskesmas	10	10	100%
Jumlah rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	RS	3	3	100%

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan, jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan, jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan, jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan, jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan dan jumlah rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

d) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp109.842.360 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp109.295.000 atau 99.50% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.21**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan	Dokumen	4	4	100%
Jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dan jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

e) Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp2.081.440.342 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.810.410.100 atau sebesar 86.98% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja

f) Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp889.421.022,92 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp873.756.576 atau sebesar 98.24% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

g) Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.207.679.893,76 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.156.482.069 atau sebesar 95.76% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

h) Kegiatan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp 1.711.199.838,34 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.768.951.462 atau sebesar 98,36% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 103,37% dari realisasi target kinerja.

i) Kegiatan BLUD Puskesmas Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp777.784.630,70 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp745.349.088 atau sebesar 95,83% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

j) Kegiatan BLUD Puskesmas Bumi Ayu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.225.798.466,71 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.040.912.927 atau sebesar 84,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

k) Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Timah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 483.497.391,17 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp478.281.462 atau sebesar 98,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

l) Kegiatan BLUD Puskesmas Jaya Mukti

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp2.136.468.447,43 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.036.788.880 atau sebesar 95,33% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

m) Kegiatan BLUD Puskesmas Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp752.921.586,15 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp749.597.415 atau sebesar 99,56% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

n) Kegiatan BLUD Bukit Kayu Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.510.208.241,26 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.335.987.200 atau sebesar 88,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp8.172.776.000. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp8.006.399.800 atau sebesar 97,96% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a) Kegiatan pembangunan puskesmas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.003.610.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.902.893.000 atau sebesar 97,48% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah puskesmas yang dibangun 3 unit dengan realisasi 100%

b) Kegiatan rehap sedang/berat puskesmas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp3.790.447.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.755.306.500 atau sebesar 99,07% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah rehabilitasi puskesmas sebanyak 3 puskesmas dengan 100%

c) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp150.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp148.682.000 atau sebesar 99,12% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan rehabilitasi pustu/poskeskel sebanyak 1 unit dengan realisasi sebesar 100%.

d) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp228.719.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp199.518.300 atau sebesar 87,23% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah puskesmas yang dibina sebanyak 2kali dengan realisasi sebesar 100%.

10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp75.985.000. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 75.985.000 atau sebesar 100% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini:

a) Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp28.620.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 28.620.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan evaluasi SDIDTK di 10 puskesmas dan pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak dengan realisasi sebesar 100%.

b) Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp47.365.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 47.365.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak 1 kali dan pelaksanaan pelatihan SHK (Skrining Hipotyroid Kongenital) semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

II. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp101.687.000 Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp101.687.000 atau sebesar 100% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini:

a) Kegiatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp101.687.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp101.687.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.22**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016**  
**Pelayanan Kesehatan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Pelaksanaan lomba senam lansia	Kali	1	1	100%
Pelaksanaan bimbingan teknis program lansia	Kali	2	2	100%
Pelaksanaan pertemuan ilmiah kesehatan lansia	Kali	1	1	100%
Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pengelola program	Kali	1	1	100%

*Dinas Kesehatan Kota Dumai*

Dapat dilihat dari *Tabel 4. 22* diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk Pelaksanaan lomba senam lansia, Pelaksanaan bimbingan teknis program lansia, Pelaksanaan pertemuan ilmiah kesehatan lansia, serta Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pengelola program dengan realisasi semuanya sebesar 100%.

**b. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib pendidikan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 23  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RSUD Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja Sasaran	Target Capaian kondisi Akhir 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian (%)
Persentase Pemakaian Tempat Tidur di RSUD (BOR)	75%	75,87%	100%
ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	3 Hari	3,79 Hari	100%
TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD di Kota Dumai	1,37 Hari	1,54 Hari	100%
BTO, Frekuensi Pemakaian tempat tidur	78 Hari	57,41 Hari	73%
GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	31%	37,06%	100%
NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	20%	17,56%	88%

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2016 dengan rincian sebagaiberikut :

### 1. Persentase Pemakaian Tempat Tidur di RSUD (BOR)

Target awal dari kondisi sasaran ini dalam renstra rumah sakit yaitu diresmikannya pemakaian gedung Ruang Rawat Inap kelas I,II dan III. Yang telah terjadi penambahan tempat tidur sebanyak 50 tempat tidur yang dioperasikan sementara hanya lantai satu. Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit, Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Kelas I, II dan III lanjutan. Dengan terbangunnya gedung ini telah dapat menambah jumlah tempat tidur pasien. Angka persentase tempat tidur yang digunakan di RSUD Kota Dumai selama tahun 2016 yaitu 75,87. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas perawatan Rumah sakit oleh masyarakat telah ideal. Adapun standar ideal BOR menurut depkes 2005 adalah 60-85%.

### 2. ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang dirawat di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian Rata-rata lamanya seorang pasien dirawat di Rumah sakit (hari) menjadi 3,79 hari dengan capaian 100% selama tahun 2016. Hal ini terjadi karena panjangnya antrian bagi pasien yang akan masuk ruang rawat inap, sehingga bagi pasien yang dirawat yang dinyatakan sembuh oleh dokter secepatnya dipulangkan.

### 3. TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD di Kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang dirawat di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu antara

waktu sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien, sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya yaitu 1,54 hari dengan capaian 100% selama tahun 2016. Hal ini terjadi karena panjangnya antrian pasien yang akan menempati ruangan perawatan. Angka ini masih dalam batas normal dikarenakan masih tingginya jumlah pasien yang datang dari kabupaten tetangga yaitu bengkalis dan rokan hilir, dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional.

#### **4. BTO, Frekuensi Pemakaian tempat tidur**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang dirawat di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian tingkat penggunaan sebuah tempat tidur selama tahun 2016 adalah 57,41 kali sedangkan batas ideal BTO adalah 40-50 kali/pasien. Hal ini menunjukkan bahwa BTO RSUD Kota Dumai Kurang efisiensi artinya dari angka tersebut terlihat bahwa perlu penambahan tempat tidur di RSUD Kota Dumai.

#### **5. GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dimana angka kematian umum untuk setiap penderita keluar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai sebesar 37,06% dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien yang keluar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien masih dalam batas normal. Hal ini sesuai dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.

#### **6. NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Indikator kinerja sasaran ini menunjukkan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar di RSUD Kota Dumai selama tahun 2016 adalah sebesar 17,56% dengan capaian 88%. Sedangkan nilai batas ideal NDR adalah kurang dari 25 orang dari setiap 1000 penderita keluar.hal ini menunjukkan bahwa angka NDR di RSUD Kota Dumai berada dalam batas normal. Dan ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai masih baik.

Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 106.157.630.250,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 26.882.974.250,-

sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 79.274.656.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 26.169.116.943,- atau terserap 97,34% dan belanja langsung terserap Rp. 58.650.354.777,- atau 73,98%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp.950.638.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.106.132.000,- atau 11,16% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.950.638.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.106.132.000,- atau 11,16%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu hasil terlayannya masyarakat miskin dan kurang mampu. Persentase menunjukkan tidak terealisasi secara penuh dikarenakan penanggungungan kegiatan tersebut masih dibebankan di Dinas Kesehatan, sementara RSUD disarankan untuk tetap menganggarkan agar kegiatan tersebut tetap berjalan apabila di Dinas Kesehatan mengalami defisit anggaran di bidang peningkatan pelayanan kesehatan.

2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a) Evaluasi dan Pengembangan Standar Kesehatan.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.420.676.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.32.702.500,- atau 7,7%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksananya akreditasi RSUD hasil terlaksananya akreditasi RSUD. Tidak terealisasi dikarenakan dana tersebut bersumber DAK yang tidak bisa digunakan karena pilihan kegiatan tersebut sesuai dengan sistem menu dipusat yang telah mengalami perubahan setelah kegiatan ini disetujui.

3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - paru.

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.52.805.317.793,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.35.541.458.682,- atau 67,31 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembangunan Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.10.479.610.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.7.947.349.316,- atau 75,84%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan

pembangunan RSUD Kota Dumai hadir yang diinginkan adalah terlaksananya pembangunan rumah sakit. Kurangnya penyerapan anggaran dikarenakan PAD Kota Dumai mengalami penurunan mengakibatkan tidak terealisasi sebagian kegiatan yang akan dilimpahkan pada anggaran pendapatan pada tahun 2017.

b) Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.35.892.244.866,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.21.504.395.261,- atau 59,91%. Adapun dengan hasil peningkatan pelayanan rumah sakit. Kurangnya penyerapan anggaran di karenakan PAD Kota Dumai mengalami penurunan mengakibatkan tidak terealisasi sebagian kegiatan yang akan dilimpahkan pada anggaran pendapatan belanja pada tahun 2017.

c) Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.805.435.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.2.488.972.155,- atau 88,72 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyediaan obat-obat rumah sakit, hasil untuk terpenuhinya kebutuhan obat-obat rumah sakit.

d) Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lainnya)

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.196.498.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.195.067.000,- atau 99,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit sebanyak 1 kegiatan.

e) Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.828.021.927,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.814.468.700,- atau 99,52%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pengadaan bahan-bahan logistic rumah sakit sebanyak 2 kegiatan.

f) Pengadaan Bahan-bahan Logistik keperawatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.603.508.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.591.206.250,- atau 97,96 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pengadaan logistik keperawatan RSUD.

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - paru.

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.830.053.402,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.3.385.112.335,- atau 88,38% yang dialokasikan melalui kegiatan-

kegiatan dibawah ini :

a) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.3.530.053.402,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.3.085.754.000,- atau 87,41 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit.

b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.299.358.335,- atau 99,79%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat RSUD Kota Dumai.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.8.752.795.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.8.315.292.100,- atau 95,00% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.8.752.795.000 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.8.315.292.100,- atau 95,00%. Adapun indikator kinerja keluaran, terbayarnya insentif pelayanan kesehatan.

6. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.60.000.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.69.196.310.975,- atau 115 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.60.000.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.69.196.310.975,- atau 115 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan RSUD Kota Dumai.

### 3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib pekerjaan umum, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel. 4. 24 Pencapaian Indikator Sasaran Renstra terhadap RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Mewujudkan Infrastruktur jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	%	1,48	1,22	82,56
2	Mengembangkan sistem drainase dan pengendalian banjir	Prosentase Daerah Pemukiman yang Bebas Banjir dan Kekurangan Air Bersih	%	2	1,51	75,53
3	Mewujudkan Infrastruktur Jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	2	1,07	53,46
4	Tersedianya lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	Prosentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang bersih dan sehat	%	2	1,49	74,43
5	Tersedianya lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase demi Kelancaran Air	%	2	1,96	98,20
6	Mengembangkan sistem drainase dan sistem pengendalian banjir	Prosentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	19	17,76	93,46
7	Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan Pengujian	Persentase Fasilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat Mendukung Kuantitas dan Kualitas pembangunan Infrastruktur ke PU-an	%	15	14,13	94,18

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, sebagai berikut ;

1. Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun

Keberhasilan pencapaian indikator ini di dukung oleh :

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan :

- ❖ Untuk membangun jalan dan jembatan baru (jalan dan jembatan yang tidak ada menjadi ada);
- ❖ Untuk meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada.

b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi / memelihara jalan dan jembatan dalam Kota Dumai.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini bertujuan untuk :

- ❖ Mengadakan alat-alat berat
- ❖ Mengadakan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
- ❖ Memelihara alat-alat berat
- ❖ Memelihara alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

Pembangunan Jalan di Kota Dumai pada Tahun 2016 difokuskan kepada (APBD Kota Dumai)

:

- a. Pembetonan JL. Siak (Ready Mix)
- b. Pembetonan JL. Bunga Tanjung (Ready Mix)
- c. Pembetonan JL. Husni Thamrin Gang Gambir

Pembangunan Jalan di Kota Dumai pada Tahun 2016 difokuskan kepada (DAK) :

- a. Peningkatan JL. H.R Soebrantas
- b. Hot Mix JL. Garuda Menuju Gurun Panjang (Lanjutan DAK IPD)

Tabel 4. 25 Perbandingan Panjang Jalan yang dibangun dari Tahun 2012 – 2016

Tahun	Panjang Jalan Yang Dibangun (M)	Keterangan
2012	47.514,50	
2013	70.000	
2014	67.568	
2015	40.000	
2016	16.107,85	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Keberhasilan indikator di atas, guna meningkatkan pembangunan transportasi dengan prioritas pada upaya peningkatan sarana dan prasarana untuk ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas terutama pada pusat permukiman, perdagangan, kawasan terisolir, daerah wisata dan industri dengan memperhatikan faktor keselamatan, keamanan dan pemerataan pelayanan umum keseluruh wilayah. Capaian indikator dilakukan melalui 3 (tiga) program, dengan 8 (delapan) kegiatan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian sasaran tersebut.

2. Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih  
Keberhasilan pencapaian indikator ini di dukung oleh :

c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini bertujuan untuk :

- ❖ Melaksanakan normalisasi saluran sungai;
- ❖ Merehabilitasi / memelihara saluran sungai;
- ❖ Membangun jaringan distribusi, sambungan rumah serta; penyambungan pipa untuk SPAM.

Pembangunan Normalisasi di Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 difokuskan kepada :

- ❖ Normalisasi Parit di Kel. Bukit Kayu Kapur
- ❖ Normalisasi Parit di Kel. Bukit Timah
- ❖ Normalisasi Parit di Kel. Basilam Baru
- ❖ Normalisasi Parit di Kel. Batu Teritip

d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi.

Pembangunan Turap di Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 difokuskan kepada :

- ❖ Pembangunan Turap Saluran JL. Rimbun Jaya (Lanjutan)

Tabel 4. 26 Perbandingan Pembangunan Turap dari Tahun 2012 – 2016

Tahun	Turap Yang Dibangun (M)	Keterangan
2012	1.031	
2013	850	
2014	850	
2015	235	
2016	120	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Capaian sasaran dilakukan melalui 1 (satu) program, dengan 2 (dua) kegiatan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian sasaran tersebut.

3. Panjang infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan  
 e. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  
 Program ini bertujuan untuk :

- ❖ Membangun jalan lingkungan (semenisasi)

Tabel 4. 27 Perbandingan Pembangunan Jalan Lingkungan (Semenisasi) dari Tahun 2012 – 2016

Tahun	Semenisasi Jalan yang Dibangun (M2)	Keterangan
2012	30.358,00	
2013	17.933,00	
2014	10.249,00	
2015	23.995,70	
2016	15.592,00	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

- f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini bertujuan untuk : Membangun jalan dan jembatan pedesaan

- g. Program Pengembangan Perumahan

Program ini bertujuan untuk membangun Rumah Sederhana Sehat.

Tabel 4. 28 Perbandingan Rumah Sederhana Sehat yang Dibangun dari Tahun 2012 – 2016

Tahun	Rumah Sederhana Sehat Yang Dibangun (Unit)	Keterangan
2012	80	
2013	113	
2014	100	
2015	65	
2016	54	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

4. Prosentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat

- a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini bertujuan untuk membangun Rumah Sederhana Sehat.

Tabel 4.29 Perbandingan Rumah Sederhana Sehat yang Dibangun dari Tahun 2012 – 2016

Tahun	Rumah Sederhana Sehat Yang Dibangun (Unit)	Keterangan
2012	80	
2013	113	
2014	100	
2015	65	
2016	54	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

5. Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air

a. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program ini bertujuan untuk :

- ❖ Melaksanakan pembangunan saluran drainase yang baru
- ❖ Memelihara saluran drainase yang sudah ada

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 difokuskan kepada :

Pembangunan Drainase Kelurahan Sukajadi

- ❖ Pembangunan Drainase JL. Almubin Gang Sepakat RT. 16
- ❖ Pembangunan Drainase Antara Gang Sidodadi dan Gang Melati RT. 02 dan RT. 01
- ❖ Pembangunan Drainase JL. Dermaga Gang Berlin RT.09
- ❖ Pembangunan Drainase Gang Gambi RT. 06

Tabel 4. 30

Perbandingan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong dari Tahun 2012 – 2016

Tahun	Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Dibangun (M)	Keterangan
2012	14.696	
2013	53.800	
2014	4.204	
2015	2.165	
2016	871	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

6. Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai

Keberhasilan pencapaian indikator ini di dukung oleh :

b. Program Pengendalian Banjir

Program ini bertujuan untuk :

- ❖ Merehabilitasi/memelihara bantaran dan tanggul sungai Kota Dumai

- ❖ Mengendalikan banjir yang sesuai dengan kondisi permasalahan
- ❖ Merencanakan pusat-pusat pengendali banjir

Capaian sasaran dilakukan melalui 1 (satu) program, dengan 3 (tiga) kegiatan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian sasaran tersebut.

7. Persentase Fasiilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an

Keberhasilan pencapaian indikator ini di dukung oleh :

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini bertujuan untuk :

- ❖ Mengadakan alat-alat berat
- ❖ Mengadakan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
- ❖ Memelihara alat-alat berat
- ❖ Memelihara alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

Kegiatan-kegiatan pada proyek Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai masih jauh dari yang diharapkan terutama masih banyaknya rekanan yang tidak dapat bekerja efektif dan seefisien mungkin mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selalu memberikan teguran- teguran dan rapat bersama dengan para kontraktor untuk mengatasi apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diatasi dengan baik, diberikan pembinaan-pembinaan secara langsung maupun tidak langsung, hal seperti ini hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi dilakukan (*Pre Construction Meeting*).

Partisipasi masyarakat diperlukan juga dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga sangat diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya pelaksanaan pekerjaan tersebut bagi masyarakat, sehingga masyarakat mendukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Pemberian Sertifikat dari Pemerintah bagi rekanan yang mempunyai kuantitas dan kualitas kerja yang bagus dalam memenuhi target “tepat waktu, mutu dan laku” sangat diperlukan guna memacu semangat para rekanan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Selanjutnya Riset dan *Quantity Control* (QC) dilapangan sangat kurang sehingga diperlukan laboratorium yang memadai untuk mendukung penelitian dan mengontrol kualitas pekerjaan dilapangan, serta konsultan pengawas yang tepat untuk dapat secara kontinue memantau langsung kegiatan dilapangan.

Manajemen proyek harus dapat digunakan secara efektif untuk membangun, mendukung dan menangani sistem kualitas suatu pelaksanaan proyek untuk menjamin keselamatan dan toleransi terhadap kerusakan konstruksi, maka sangat diperlukan adanya *Total Quality Management* (TQM). Ada 4 elemen dasar untuk mendapatkan *Total Quality Management* (TQM) ; Komitmen manajemen, kerja tim, teknis dan sistem mutu.

Memenuhi persyaratan mutu dengan waktu dan biaya yang telah ditentukan merupakan tantangan yang harus diatasi oleh pengguna dan penyedia jasa didalam penyelenggaraan proyek.

Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 168.696.944.299,62,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.275.720.950,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 160.421.223.349,62,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 7.918.750.135,- atau terserap 95,69% dan belanja langsung terserap Rp. 118.445.854.841,62,- atau 73,83%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.71.829.033.643,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.52.872.757.018,00 atau 73,61%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Pembangunan Jalan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.52.549.761.643,94 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.38.702.063.257,94 atau 73,65%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang di bangun sepanjang 16.112,68 m dengan realisasi 16.107,85 m atau 99,97%. Pekerjaan tidak mencapai 100% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang mengalami putus kontrak.

b) Pembangunan Jembatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.19.155.887.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.14.051.108.761,00 atau 73,35%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jembatan yang di bangun sebanyak 13 Unit dengan realisasi 13 Unit atau 100%.

c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.123.385.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.119.585.000,00 atau 96,92%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Monitoring Proyek sebanyak 36 buku dengan realisasi 36 buku atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.5.531.528.030,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.3.019.736.817,00 atau 54,59% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.3.287.135.580,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.431.486.977,00 atau 43,55 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Bangunan fasilitas umum/perkantoran yang di bangun sebanyak 7 Unit, dengan realisasi 7 unit atau 100 %.

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.846.601.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.786.611.100,00 atau 92,91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan sebanyak 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan atau 100 %.

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.68.765.450,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.56.819.950,00 atau 82,63%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara sebanyak 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan atau 100%.

d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.700.040.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.363.004.790,00 atau 51,85%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaran dinas yang dipelihara sebanyak 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan atau 100%.

e) Rehabilitasi Sedang / berat Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.628.986.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.381.814.000,00 atau 60,70%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 4 Unit dengan realisasi 4 Unit atau 100%.

3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.11.184.466.625,68 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.10.982.626.905,68 atau 98,20 % Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.9.454.251.305,68 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.9.651.133.305,68 atau 97,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang saluran drainase yang

dibangun sepanjang 871 m dengan realisasi 871 m atau 100%.

b) Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong - gorong

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.533.333.320,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.523.375.600,00 atau 99,68%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang saluran drainase yang dipelihara sepanjang 2000 m dengan realisasi 2000 m atau 100%.

4. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.605.581.550,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.593.293.264,00 atau 97,97% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Perencanaan Turap/ Talud/ Brojong

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.255.524.550,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.251.130.264,00 atau 98,28 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah buku perencanaan/DED Turap sebanyak 3 Buku dengan realisasi 3 Buku atau 100%.

b) Pembangunan Turap/ Talud/ Brojong

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.350.057.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.342.163.000,00 atau 97,74 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Turap yang di bangun 120 m dengan realisasi 120 m atau 100%.

5. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.16.346.688.750,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.14.966.901.700,00 atau 91,56% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.14.183.885.050,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.13.510.771.600,00 atau 95,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang di pelihara sebesar 20 km dengan realisasi 20 km atau 100%.

b) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.162.803.700,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.456.130.100,00 atau 67,33%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jembatan yang di pelihara

sebanyak 20 Unit dengan realisasi 20 Unit atau 100%.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.2.763.660.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.2.602.818.233,00 atau 94,18% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Pengadaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.428.552.250,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.417.534.700,00 atau 97,43%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peralatan Laboratorium yang di adakan sebanyak 32 unit dengan realisasi 32 unit atau 100 %.

b) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.267.690.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.260.039.000,00 atau 97,14%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peralatan Laboratorium yang di adakan sebanyak 2 unit dengan realisasi 2 unit atau 100 %.

c) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.067.417.750,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.925.244.533,00 atau 93,12%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Alat-alat berat yang di pelihara sebanyak 13 Unit dengan realisasi 13 Unit atau 100%.

7. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.12.428.103.450,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.6.598.532.327,00 atau 53,09 % Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.5.014.700.500,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.4.460.391.200,00 atau 88,95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran Sungai yang dibersihkan sepanjang 80.000 m dengan realisasi 80.000 m atau 100 %.

b) Rehabilitasi /Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.851.762.700,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 795.176.220,00 atau

93,36 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran Sungai yang dibersihkan sepanjang 1000 m dengan realisasi 1000 m atau 100 %.

c) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.800.277.250,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.709.988.982,00 atau 88,72 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Rehab/Pemeliharaan Pintu Air sebanyak 15 Unit dengan realisasi 15 Unit atau 100 %.

d) Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.5.761.363.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.632.975.925,00 atau 10,99 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pembangunan Jaringan Air Minum skala kecamatan 6 Lokasi dengan realisasi 6 Lokasi atau 100 %.

8. Program Pengendalian Banjir

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.1.577.078.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.473.900.920,00 atau 93,46% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengendalian Banjir pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.876.990.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.808.376.920,00 atau 92,18 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara sepanjang 300 m dengan realisasi 300 m atau 100 %.

b) Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.413.988.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.393.480.000,00 atau 95,05%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Buku perencanaan pengendalian banjir yang sesuai dengan kondisi permasalahan sebanyak 2 buku dengan realisasi 2 buku atau 100 %.

c) Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendalian Banjir

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.286.100.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.272.044.000,00 atau 95,09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pompa air sebanyak 2 Unit dengan realisasi 2 Unit atau 100 %.

9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.26.759.610.000,00

dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.17.269.567.478,00 atau 64,54% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.21.759.610.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.14.188.243.998,00 atau 65,20 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 16.560,81 m, dengan realisasi 15.592 m atau 94,15%. Realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak cukup waktu pekerjaan.

b) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.342.367.400,00 atau 68,47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 7 Ruas, dengan realisasi 7 Ruas atau 100%.

c) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.498.951.900,00 atau 99,79 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 7 Ruas, dengan realisasi 7 Ruas atau 100%.

d) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.242.673.150,00 atau 48,53 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 5 Ruas, dengan realisasi 5 Ruas atau 100%.

e) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.337.617.550,00 atau 67,52 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 4 Ruas, dengan realisasi 4 Ruas atau 100%.

f) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.795.598.470,00 atau 79,56 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 9 Ruas, dengan realisasi 9 Ruas atau 100%.

g) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.574.314.210,00 atau 57,43 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 6 Ruas, dengan realisasi 5,59 Ruas atau 93,33%.

h) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.289.800.800,00 atau 28,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 719 M, dengan realisasi 719 M atau 100%.

10. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.932.632.500,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.253.342.000,00 atau 27,16% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.290.890.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.253.342.000,00 atau 87,09 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Kelurahan yang di bangun sebanyak 1 kelurahan dengan realisasi 1 kelurahan atau 100 %.

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.641.742.500,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.141.883.392,00 atau 22,11%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Kelurahan yang di bangun sebanyak 1 kelurahan dengan realisasi 1 kelurahan atau 100 %.

11. Program Pengembangan Perumahan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.6.961.619.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.5.181.852.143,00 atau 74,43% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Perumahan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.6.961.619.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.5.181.852.143,00 atau 74,43% Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rumah layak huni / RSS yang di bangun sebanyak 55 unit dengan realisasi 54 unit atau 98,18 %.

#### 4. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 31  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian (dalam %)
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.920 unit	4078 unit	38,84
Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	200 Unit/Jenis	185 unit/jenis	90,24
Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	6 Terminal	5 terminal	71,43
Rasio izin trayek	8 Dokumen	46	460
Jumlah orang / barang yang terangkut umum	41.233.138 orang/barang	40.552.550 orang/barang	67,28
Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	1.573 Unit	1.573	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai

Secara umum, Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari dapat dilaksanakan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang telah diwujudkan dalam Tahun 2016 melalui pelaksanaan 6 (Enam) Indikator Sasaran.

Meskipun demikian, masih terdapat indikator kinerja sasaran belum tercapai sepenuhnya dan perlu ditingkatkan di masa yang akan datang, khususnya terkait dengan Capaian Kinerja belum dapat berhasil dilaksanakan 100 %.

Adapun Capaian Indikator Sasaran tersebut yaitu :

1. Kepemilikan KIR Angkutan Umum di dalam indikator ini ditargetkan 9.920 namun dalam realisasinya belum dapat terlaksana 100% dikarenakan tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar laik jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus uji serta sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor yang belum memadai.
2. Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan di dalam indikator ini ditargetkan 200 unit/jenis namun dalam realisasinya hanya 185 Unit/jenis yang diantaranya unit kendaraan Oplet (Angkutan Kota) dan Taxi. Belum tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan

rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan Angkutan Perkotaan dan Kurangnya Peremajaan angkutan sehingga tidak tercapainya apa yang ditargetkan.

3. Jumlah Terminal Darat, Laut dan Udara yang sesuai standar di dalam indikator ini ditargetkan 6 terminal namun dalam realisasinya baru 5 Terminal yang diantaranya Terminal Penumpang, terminal Barang, Bandar Udara Pinang Kampai, Pelabuhan Penumpang, Terminal Penumpang / Penyeberangan Ro-Ro. Belum tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan Besarnya data yang diolah sehingga merealisasikannya butuh dana dan waktu yang bertahap.
4. Rasio izin trayek di dalam indikator ini ditargetkan 8 Dokumen dalam realisasinya sudah 46 Dokumen yang diantaranya izin trayek yang telah dikeluarkan Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah izin trayek angkutan perkotaan. tercapainya Indikator Kinerja dimaksud sehubungan dengan dilaksanakannya operasi penertiban dokumen angkutan penumpang dan barang dikota Dumai.
5. Jumlah Orang / Barang yang terangkut angkutan umum di dalam indikator ini ditargetkan 41.233.138 orang / barang namun dalam realisasinya baru 40.552.550 Orang / Barang yang diantaranya . Belum tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan kurangnya penataan sarana dan prasarana pendukung angkutan umum orang / barang yang kurang baik dan belum memadai.
6. Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi di dalam indikator ini ditargetkan 1.573 unit dalam realisasinya sudah 1.573 Unit yang diantaranya pengadaan rambu portable, Papan Rambu RPPJ dan Papan Nama Jalan. sudah tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan karena prioritas Dinas Perhubungan dalam meningkatkan aspek ketertiban, keteraturan, keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2016 disampaikan sebagai berikut :

**a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.226.780.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.150.680.000,- atau 98,20% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan  
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya data untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang berupa :

a. Study Pengumpulan Data Menara Telekomunikasi di Kota Dumai

Capaian dari kinerja keluaran kegiatan ini belum berhasil disebabkan Besarnya lingkup data yang diolah sehingga merealisasikannya butuh dana dan waktu yang bertahap.

b) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Sektor Perhubungan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.50.000.000,- atau 100 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) adalah Tersedianya data untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang berupa :

a. Sosialisasi Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 1 Kegiatan dari target 1 Kegiatan.

c) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 25.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar sebesar Rp. 24.580.000,- atau 96,47 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) adalah terbentuknya Tim Monitoring terhadap kegiatan dibawah pengawasan Dinas Perhubungan yang berupa :

a. Tim Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Dokumen dibawah GT. 07;

Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 1 Kegiatan dari target 1 Kegiatan.

d) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 4.101.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar sebesar Rp. 4.076.100.000,- atau 99,39 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa peningkatan pelayanan melalui penyediaan tenaga kerja honorer. Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 12 Bulan dari target 12 Bulan.

**b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.978.778.700,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.969.292.650,- atau 99,03% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.000.000,-atau 99% dari anggaran.

Adapun indikator kinerja Hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Penyediaan jasa perbaikan, kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor yang dialokasikan ke kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Alat-alat Uji Mekanis dan Kalibrasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 1 kali Kalibrasi dari target 2 kali Kalibrasi.

- b) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 878.778.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 870.292.650,- atau 99,03% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini terlaksananya kegiatan berupa Terpeliharanya rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang dialokasikan ke kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di Kota Dumai. Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 12 Bulan dari target 12 Bulan.

**c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum**

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.596.537.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.553.437.500,- atau 97,43 %. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

- a) Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.126.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.094.400.000,- atau 97,12% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa peningkatan pelayanan melalui penyediaan tenaga teknis kontrak. Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 12 Bulan dari target 12 Bulan.

- b) Kegiatan penyelenggaraan, pengendalian, dan pengamanan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 469.637.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 459.037.500,- atau 97,74% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah terselenggaranya pengendalian, pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang tertib, aman dan lancar. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa koordinasi antar instansi / lintas sektoral dalam penyelenggaraan angkutan lebaran serta angkutan natal dan tahun baru. Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan

sebesar 2 Kegiatan dari target 2 Kegiatan yaitu Angkutan Lebaran dan Angkutan Natal dan Tahun Baru.

**d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

- a) Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Tersediannya Halte untuk angkutan umum yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan Rehab Halte Sekota Dumai namun dalam pelaksanaannya fisiknya sudah mencapai 100% akan tetapi dengan adanya kekurangan Dana APBD Kota Dumai pada tahun berjalan, maka pencairan kegiatan ini ditunda.

**e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.041.858.751,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.981.960.000,- atau 97,47%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

- a) Kegiatan pengadaan rambu lalu lintas

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 453.850.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 451.088.000,- atau 99,39% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Terwujudnya rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perengkapan jalan lainnya yang memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas, yang berupa tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas.

- b) Kegiatan pengadaan marka jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.232.308.751,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.228.894.000,- atau 99,72% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Terwujudnya marka jalan dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang baik dan memadai guna terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, lancar, teratur dan terkendali keluaran kegiatan ini yaitu :

- a. Pengecatan Marka Jalan Pangeran Diponegoro

- b. Pengecatan Marka dan Pita Kejut Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Jl. Jenderal Sudirman (Simpang Soebrantas - Simpang Bumiayu)
  - c. Pengecatan Marka Zebra Cross Sekota Dumai
  - d. Pengecatan Marka Jalan Cut Nyak Dien
  - e. Pengecatan Marka Petunjuk Arah Jalan
  - f. Pita Kejut SDN 003 Kel. Mekar Sari
  - g. Pengadaan dan Pemasangan Marka Zona Aman dan Pita Pengaduh di Persimpangan Jalan Cut Nyak Dien - Jalan Nuri
  - h. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (Tempered) Lokasi Jl. Soekarno Hatta (Dana DAK)
  - i. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (Tempered) Lokasi Jl. Gatot Subroto dan Jl. Tuanku Tambusai (Dana Dak)
  - j. Lanjutan Pendestrian Jl. Raya Bukit Datuk Lama dari Arah Bundaran
  - k. Lanjutan Pembuatan Pendestrian Jl. Raya Bukit Datuk Depan Kantor Pengadilan  
Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 100 % dari target 100 %.
- c) Kegiatan operasi penertiban dan penegakan hukum
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 454.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 404.550.000,- atau 88,93% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Terwujudnya armada lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan teratur. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas dan Angkutan Umum, yaitu :
- a. Operasi Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b. Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dipersimpangan pasar dan lokasi sekolah pada pagi dan siang hari.
  - c. Operator Radio Orari.
  - d. Jaga Pos Pengendalian Lalu Lintas (Posdallalin).
  - e. TIM Implementasi Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.  
Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 7 Kegiatan dari target 5 Kegiatan.
- d) Kegiatan Pengadaan Traffic Light dan Warning Light
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 610.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 608.255.000,- atau 99,58% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Terpasangnya APILL dan LPJU yang lengkap dan memadai pada lokasi rawan kecelakaan yaitu berupa kegiatan :

- a. Pengadaan dan Pemasangan Module LED Uk. 30 Traffic Light dan lampu Pejalan Kaki di persimpang Polres Kota Dumai
- b. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Warning Light Tiang Lengkung di Kecamatan Dumai Kota
- c. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Warning Light Tiang Lurus di Kec Sungai Sembilan
- d. Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Posdallalin dan Pos Retribusi
- e. Pengadaan Delineator

Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 5 paket dari target 5 paket

- e) Kegiatan Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 290.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 289.173.000,- atau 99,71% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Median Jalan dan Pulau Jalan yang memadai yaitu berupa kegiatan :

- a. Lanjutan Rehab Median Jalan Pattimura
- b. Rehab Median Jalan Diponegoro (Depan Pasar Pulau Payung)
- c. Rehab Pulau Jalan Kota Dumai.

Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 3 paket dari target 3 paket.

## 5. URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP

### DINAS TATA KOTA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bahwa dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat didalam renstra Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai tahun 2016-2021, maka dapat disampaikan pencapaian pada anggaran tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 4. 32**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Tahun 2016**

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi tahun 2016	Capaian (dalam %)
<b>Urusan Penataan Ruang</b>			
Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,061%	4,061%	100
Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	5 Ha	5 Ha	100
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>			
Persentase penanganan sampah	60%	60%	100

Sumber : Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Sasaran tersebut yaitu :

**a. Persentase Ruang Terbuka Hijau**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terpeliharanya Taman Kota dan Tatam-taman di Pendesterian jalan protokol serta ruang terbuka hijau seperti Taman Bukit Gelanggang taman sepanjang Jalan HR. Subrantas, Jalan, Sudirman, Jalan, Sultan Sarif Kasim, Jalan Ombak/Hasanudin, Jalan Diponogoro/Sukajadi, Jalan Patimura dan jalan Sukarno Hatta. Selain itu juga terpelihara beberapa buah tugu dan gapura sebagai penghias keindahan kota yakni Tugu Simping Jalan Putri Tujuh, Tugu, Burung Selindit depan Bank Riau Kepri, Tugu Sampan Layar Mundam, Tugu Bukit Gelanggang, Tugu Periuk Beruk/Kantong Semar Simping Polres, Tepak Sirih PKK jalan Putri Tujuh dan Jalan Datuk Laksamana serta Kolam Air Mancur Taman Bukit Gelanggang.

**b. Fasilitas Lahan untuk Pemakaman Umum**

Target dari indikator sasaran ini yaitu Terpelihara Pemakaman Umum yang representatif, terdiri dari Taman Pahlawan Nasional Damai Sentosa, Pemakaman Umum Marga Sarana, dan Pemakaman Umum Jalan Budi Kemuliaan serta upaya penambahan 5 (lima) pemakaman umum yang berada di kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan dan dan Kecamatan Dumai Selatan.

Bahwa Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai secara resmi adalah Pemakaman Taman Pahlawan Damai Sentosa dan Marga Sarana sementara itu untuk lahan menambah pemakaman umum belum dapat terealisasi mengingat alokasi APBD 2016 untuk pengadaan tanah Pemakaman tidak memadai.

**c. Persentase Penanganan Sampah**

Target dari indikator sasaran ini yaitu Kebersihan Kota Meningkatkan dengan sasaran utama Pembuatan Bak Sampah dari Besi, pengadaan bak kontainer sampah, dan pembuatan plank himbauan tentang kebersihan.

Target dari sasaran diatas dapat terealisadi dengan terpasangnya 10 (sepuluh) buah plank himbauan tentang kebersihan, tersedianya 8 (delapan) buah Bak Sampah dari Besi, dan tersedianya (tiga) buah 3 (tiga) buah Bak Kontainer Sampah yang dijadikan sarana dan prasarana dalam meningkatkan penanganan sampah Kota Dumai.

Selain pengadaan sarana dan pra sarana penanganan sampah sebagaimana tersebut diatas, maka dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan penanganan sampah setiap harinya juga dilakukan peningkatan jadwal operasional yang semula dibagi dalam 4 (empat) *shift* yakni jadwal pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, maka telah ditambah 1 (satu) *shift* yakni subuh hari dan penambahan tenaga petugas kebersihan.

Anggaran Belanja Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 33.698.445.340,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.636.095.340,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 30.062.350.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.468.980.657,- atau terserap 95,40% dan belanja langsung terserap Rp. 27.959.145.879,- atau 93,00%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada tahun 2016, jumlah anggaran program ini Rp.6.678.446.505,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.619.677.000,- atau sebesar 98,40 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Pemeliharaan RTH

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.391.471.505,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.385.864.000,- dan atau sebesar 99,83 % ada pun indikator kinerja keluaran adalah Gaji, Peralatan dan aman, dengan indikator capaian realisasi 12 Bulan %

b) Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.286.975.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.233.813.000,- atau sebesar 81,48 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Terbangunnya fasilitas Pendukung pada Areal Bukit Gelanggang, dengan capaian realisasi 12 Bulan

2. Program pengelolaan areal pemakaman.

Pada tahun 2016, jumlah anggaran Rp.1.365.632.750,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.234.044.868,- atau sebesar 90,36 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.784.370.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.672.403.000,- atau 86,73 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan target capaian realisasi 12 Bulan

b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.581.262.750,-

dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 561.641.868,- atau 96.62 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Gaji dan Paralatan 12 Bulan

**3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

Pada tahun 2016, jumlah anggaran Rp.4.992.438.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.4.950.789.148,-atau sebesar 99.17 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**a) Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.992.438.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.4.950.789.148,- atau 99.17 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Sarana dan Prasarana Kebersihan dengan target capaian realisasi 12 Bulan

6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 Urusan Wajib Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 33  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi Akhir 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian (dalam %)
Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	1	1	100
Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	15%	8,9%	59
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	65%	100%	100
Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	20%	23,8%	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah Peraturan tentang Penataan Ruang Daerah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kota Dumai pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Tahun 2002 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2002 dan mengalami revisi menjadi Perda Nomor 27 tahun 2005 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai.

Mengingat adanya kesepakatan Tapal batas antara Propinsi Riau, Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, Walikota Dumai dan Bupati Bengkalis serta Pejabat dari BPN, hal ini menyebabkan kawasan Industri Pelintung Dumai mengalami pengurangan luas dari 5.039 Ha menjadi 3.829 Ha dan ditambah dengan Kawasan Cadangan Industri seluas 1.200 ha; dan pada tahun 2007 terbit Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan Kabupaten/Kota merevisi RTRW sesuai UU tersebut paling lama 3 tahun sejak UU tersebut diterbitkan.

Sejak terbitnya undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Dumai telah melakukan revisi RTRW Kota Dumai dan telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Surat Kementerian Pekerjaan Umum

Nomor : HK.01 03-Dr/328 tentang Persetujuan Substansi atas Raperda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai 2012-2032. Selanjutnya telah dilakukan pembahasan draf Raperda RTRW Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai dan telah mendapatkan persetujuan untuk menjadikan Raperda RTRW Kota Dumai menjadi Perda RTRW Kota Dumai melalui Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/DPRD/2014.

Selanjutnya Pemerintah Kota Dumai telah melengkapi dokumen persyaratan Perda RTRW Kota Dumai kepada Gubernur Riau untuk mendapatkan Evaluasi Gubernur, tetapi sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI dan belum disahkannya Perda RTRW Propinsi Riau. Meskipun demikian perencanaan pembangunan wilayah Kota Dumai telah diselaraskan dengan Rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional.

Dengan demikian selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah, melalui instrumen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Kota Dumai sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan yang ditetapkan sebanyak 1 buah, sedangkan Jumlah target dokumen peraturan dalam renstra sebanyak 1 buah, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2016 sebesar 100 %, perlu disampaikan bahwa Rancangan Perda Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan RI dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI dan belum disahkannya Perda RTRW Propinsi Riau.

Meskipun demikian perencanaan pembangunan wilayah Kota Dumai telah diselaraskan dengan Rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional.

Dengan demikian selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah, melalui instrumen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Kota Dumai sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 455.459.840,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 444.865.589,- atau 98%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 343.314.410,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 333.097.689,- atau 97,02%. Adapun indikator kinerja keluaran :

- Dokumen Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kota Dumai berdasarkan Hasil Audiensi Rapat Koordinasi BKPRD Kota Dumai dengan BKPRD Provinsi Riau dan Nasional serta mempedomi perubahan-perubahan regulasi dan kebijakan Kota Dumai.

**Kegiatan Survei dan Pemetaan**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 112.145.430,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 111.767.900,- atau 99,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Dokumen pemanfaatan ruang dalam pemenuhan data spasial dan terciptanya sistem informasi pemetaan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial dan penggunaan tanah berbasis flash macromedia Kota Dumai dengan capaian sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

Adapun yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

Rancangan Perda Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai belum mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI dan belum disahkannya Perda RTRW Propinsi Riau. Meskipun demikian perencanaan pembangunan wilayah Kota Dumai telah diselaraskan dengan Rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional.

Dengan demikian selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah, melalui instrumen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Kota Dumai sebagai pusat-pusat

kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Solusi yang bisa diambil adalah :

1. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Riau
  2. Komitmen dari kementerian kehutanan dengan diterbitkannya SK. Menhut No. 878 tahun 2014 dan SK. Menhut No. 314 tahun 2016.
  3. Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Kota Dumai telah melakukan penelarasan dengan rancangan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional serta Program-program Nasional.
2. Indikator Kinerja Sasaran : Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap total usulan stakeholder lain
- a. Kebijakan dan Kegiatan

Pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan perundangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

- Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah; menjamin terdapatnya transparansi, akuntabilitas dan kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.
- Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, *bottom-up* dan *top down* dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara garis besar kegiatan ini dimaksud agar usulan masyarakat dapat tertampung sepenuhnya di dalam APBD Kota Dumai 2016. Perbandingan antara proporsi usulan masyarakat yang diakomodir didalam APBD terhadap total Usulan stakeholder lain.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

**Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 181.670.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 171.289.400,- atau 94,29%. Adapun indikator kinerja keluaran :

- 1 Dokumen RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016 .

- 1 Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2017.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan amanat dari UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, dimana dijelaskan setelah dilaksanakan Forum SKPD pemerintah daerah wajib melaksanakan Musrenbang RKPD untuk mensinergikan dan mensinkronkan Renja hasil pembahasan Forum SKPD dengan hasil musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD pada tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Maret.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi :

- Stakeholder tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam proses perumusan kegiatan dalam anggaran daerah.
- Penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas.
- Biasanya masih berupa seremonial dan acara rutin belaka.

Regulasi yang diterbitkan hendaknya:

1. Penerapan prinsip inklusif dan *broad base participation* di semua tahapan dan peringkat proses pengambilan keputusan yang meliputi konsultasi pada peringkat kebijakan, perencanaan, alokasi sumber daya, implementasi, pemantauan, dan evaluasi;
  2. Ketersediaan dan kelengkapan analisis teknis, termasuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah antarsektor dan tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa) disertai dengan forum pembahasan yang partisipatif untuk memastikan bahwa program dan kegiatan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
  3. Mempertegas peranan, fungsi dan yurisdiksi dari masing-masing stakeholder (organisasi masyarakat sipil dan DPRD) dalam proses perencanaan dan penganggaran, terutama dalam penyiapan dan perumusan anggaran;
  4. Memastikan pemenuhan standar konsultasi publik;
  5. Mewujudkan kondisi bagi pengembangan penganggaran partisipatif.
3. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan kebijakan yang menjadi pedoman bagi satuan aparat perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dapat dianalisis melalui isi pokok

dari setiap dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja-SKPD, RKA/DPA SKPD dan APBD. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien harus ditunjang oleh sejauhmana daerah menjaga konsistensi dengan baik setiap penjabaran kebijakan ke dalam berbagai program yang relevan.

Jumlah program Renja SKPD sekota Dumai yang telah sesuai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2016 sebanyak 385 program, sedangkan Jumlah program dalam RKPD Kota Dumai sebanyak 385 Program, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2016 sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa jumlah Program dalam RKPD sama Jumlah Program dalam Renja SKPD dikarenakan menggunakan aplikasi yang saling terintegrasi dengan jumlah kegiatan sebanyak 1.487.

**b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

**a) Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 341.638.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 269.921.000,- atau 79,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**1 Dokumen rancangan awal RPJMD Kota Duma tahun 2016-2021.** dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan salah satu amanat dari UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa salah satu proses penyusunan Dokumen RPJMD adalah Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik ini merupakan salah satu proses pengkajian secara ilmiah rancangan RPJMD. Output dari Kegiatan ini adalah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2016-2021.

**b) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 196.450.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 159.083.000,- atau 80,98%.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**- 1 Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2017**

**- 1 Dokumen RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016,**

dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Berdasarkan amanat UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, bahwa

salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyusun RKPD setiap tahunnya dimana RKPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota selambat-lambatnya bulan Mei setiap tahunnya. Untuk tahun 2016, RKPD tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Walikota pada dengan Nomor 22 tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015.

c) Kegiatan Penetapan RPJMD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 177.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 166.240.999,- atau 93,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**1 Dokumen Perda tentang RPJMD, dengan capaian realisasi sebesar 100%.**

d) Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.719.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.716.000,- atau 94,04%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD dengan melibatkan 35 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 100 orang.**

e) Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 208.990.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 166.203.800,- atau 79,53%. Adapun indikator kinerja keluaran :

**Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aplikasi sebanyak 35 orang dengan capaian realisasi sebesar 100%.**

Aplikasi yang digunakan adalah e-budgeting untuk memudahkan penyusunan Rencana Penganggaran dan aplikasi e-monev yang digunakan untuk Monitoring yang berbasis web dimana setiap SKPD mempunyai admin untuk penginputan data secara online. Adapun admin SKPD sebanyak 35 orang, tidak lagi menggunakan secara manual dan terintegrasi secara online pada tahun 2015.

f) Kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 325.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 295.399.932,- atau 90,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Dumai 2016 – 2021, yang telah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan serta perbaikan catatannya, dengan capaian realisasi sebesar 100%.**

g) Kegiatan Sosialisasi RPJMD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 169.571.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 141.082.000,- atau 83,20%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RPJMD sebanyak 78 orang ,dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Sosialisasi ini diikuti oleh SKPD terkait dengan membahas secara detail substansi penting RPJMD 2016-2021 dikaitkan dengan konsistensi Renstra SKPD yang dijabarkan dalam penyusunan RKPD SKPD Kota Dumai Tahun 2017. Juga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Pembangunan Daerah memberikan masukan dan analisa bahwa sangat pentingnya konsistensi dari Renja SKPD, RKPD, KUA PPAS dan APBD dalam mewujudkan *good goverment* . Hal ini disampaikan untuk menjaga sinergisitas dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga seluruh Pimpinan SKPD harus mampu merencanakan kegiatan yang outcome dan output mendukung Indikator dalam RPJMD Kota Dumai.

c. Permasalahan dan Solusi

Adapun yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

- Konsistensi isi dokumen Perencanaan untuk yang tergolong cukup rendah, Hal ini berarti bahwa penjabaran kebijakan ke dalam berbagai program tidak mempunyai makna yang sesuai atau bertentangan.
- Penjabaran kebijakan pemerintah tidak memperhatikan tingkat konsistensi penjabarannya sampai dengan pada program-program dalam rumusan kegiatan-kegiatan indikatif.

Solusi yang bisa dicapai adalah:

- a) Pemerintah daerah harus bisa menjaga dan mempertahankan konsistensi penjabaran substansi setiap dokumen perencanaan dan kemudian antar dokumen perencanaan.
- b) Pemerintah daerah sudah harus menyediakan pedoman yang dapat digunakan oleh Pejabat dan Staf dalam rangka menilai dokumen perencanaan daerah.
- c) Pemerintah beserta jajaran SKPD se-Harusnya mampu dan tepat dalam memetakan serta mengidentifikasi isu dari kapasitas dokumen perencanaan daerah.

4. Indikator Kinerja Sasaran : Proporsi kontribusi CSR dalam Pembangunan Daerah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Sebagai kota perdagangan dan jasa dengan pertumbuhan usaha yang pesat, Kota Dumai

memiliki banyak perusahaan kecil, menengah dan besar yang dikelola oleh swasta maupun BUMN dan BUMD. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai bahwa perusahaan kecil, menengah dan besar yang terdata, baru tercatat 10 persen perusahaan yang sudah melakukan CSR baik dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan maupun infrastruktur. Diperkirakan masih banyak kegiatan CSR yang tidak tercatat yang dilakukan oleh pelaku usaha karena pelaksanaannya tidak diinformasikan kepada pemerintah kota Dumai.

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik bersama dengan para pihak (komunitas lokal, pemerintah setempat, akademisi dan perusahaan itu sendiri) yang dilakukan terpadu dengan kegiatan berkelanjutan. Dengan begitu, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan bukannya pengelola dana CSR, menjadi sangat penting karena pemerintah memiliki akses terhadap informasi mengenai kebutuhan apa saja di masyarakat yang bisa menjadi alternatif program CSR.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan efektifitas pemanfaatan *corporate social responsibility (CSR)* untuk menunjang pembangunan merupakan tema yang sangat menarik. Hal ini karena masyarakat kini telah semakin *well informed*, dan kritis serta mampu melakukan filterisasi terhadap dunia usaha yang tengah berkembang.

Jumlah laporan Perusahaan yang berkontribusi pada CSR dengan data dari BPTPM Kota Dumai tahun 2016 sebanyak 15 perusahaan, sedangkan Jumlah Perusahaan di Kota Dumai lebih dari 65 yang menjalankan program CSR, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2016 sebesar 23,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada sosialisasi tahun depan untuk meningkatkan persentase laporan CSR perusahaan yang belum transparan sehingga amanat UU tentang Tanggung Jawab Perusahaan (TJSP) di Wilayah Kota Dumai dapat ditingkatkan.

#### b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menunjang indikator kinerja utama Bappeda kota Dumai telah dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik, dengan Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 252.718.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.213.400,- atau 74,48%.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

- Forum SKPD yang dilaksanakan dengan jumlah peserta 250 orang.
- FGD CSR yang dilaksanakan dengan jumlah peserta 206 orang .

Target Capaian Output pelaksanaan Forum SKPD sebesar 82,4%

Sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tahapan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah setelah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan adalah

Forum SKPD. Forum SKPD merupakan suatu wadah yang mempertemukan antara delegasi Kecamatan dengan SKPD se-Kota Dumai untuk mensinkronisasikan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Renja SKPD. Adapun output dari Forum SKPD ini adalah Berita Acara Pelaksanaan Forum SKPD dan rencana kerja SKPD hasil pembahasan Forum SKPD.

c. Permasalahan dan Solusi

Adapun yang menjadi permasalahan:

- CSR banyak bersifat *charity*, amal, sesuai kebutuhan sesaat, kurang memberi dampak yang berkelanjutan;
- Bantuan yang bersifat sporadis;
- Belum lagi ada masalah tumpang tindih antarprogram CSR yang dilakukan antarperusahaan dengan pemerintah setempat.

Regulasi yang diterapkan :

- a) Pemerintah terus memperkuat sisi regulasi dan kelembagaan lembaga keuangan, termasuk di dalamnya lembaga perbankan dan non-perbankan;
- b) Pemerintah juga berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan investasi baik oleh pihak swasta maupun pemerintah sehingga menjadi lebih terarah seperti yang telah diagendakan di dalam RPJM;
- c) Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, diantaranya melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 14.283.099.390,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.981.920.390,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.301.179.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.789.911.036,- atau terserap 95,18% dan belanja langsung terserap Rp. 9.072.430.161,- atau 88,07 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 3.053.387.350,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.440.280.781,- atau 80%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- h) Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 252.718.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.213.400,- atau 74,48%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan dan Jumlah FGD CSR yang dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tahapan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah setelah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan adalah Forum SKPD. Forum SKPD merupakan suatu wadah yang mempertemukan antara delegasi Kecamatan dengan SKPD se-Kota Dumai untuk mengsinkronisasikan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Renja SKPD. Adapun output dari Forum SKPD ini adalah Berita Acara Pelaksanaan Forum SKPD dan rencana kerja SKPD hasil pembahasan Forum SKPD.

i) Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 341.638.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 269.921.000,- atau 79,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rancangan awal RPJMD Kota Duma tahun 2016-2021. dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan salah satu amanat dari UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa salah satu proses penyusunan Dokumen RPJMD adalah Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik ini merupakan salah satu proses pengkajian secara ilmiah rancangan RPJMD. Output dari Kegiatan ini adalah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2016-2021.

j) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 196.450.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 159.083.000,- atau 80,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah RKPD Kota Dumai Tahun 2017 dan Jumlah RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Berdasarkan amanat UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyusun RKPD setiap tahunnya dimana RKPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota selambat-lambatnya bulan Mei setiap tahunnya. Untuk tahun 2016, RKPD tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Walikota pada dengan Nomor 22 tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015.

k) Kegiatan Penetapan RPJMD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 177.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 166.240.999,- atau 93,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Perda RPJMD yang disahkan, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

l) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 181.670.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 171.289.400,- atau 94,29%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Musrenbang RKPd Kota Dumai Tahun 2016, Jumlah Musrenbang provinsi yang diikuti dan Jumlah Musrenbang nasional yang diikuti, dengan capaian realisasi sebesar 100%. Pelaksanaan Musrenbang RKPd merupakan amanat dari UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, dimana dijelaskan setelah dilaksanakan Forum SKPD pemerintah daerah wajib melaksanakan Musrenbang RKPd untuk mensinergikan dan mensinkronkan Renja hasil pembahasan Forum SKPD dengan hasil musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPd pada tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Maret.

m) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99.550.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 93.889.250,- atau 94,31%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan LAKIP yang disampaikan tepat waktu, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Laporan ini akan diserahkan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2016 bersamaan dengan seluruh Kabupaten Kota se-Riau.

n) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 103.787.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.794.000,- atau 83,63%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah LKPD Walikota yang disampaikan ke DPRD tepat waktu, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah LKPD Walikota ke DPRD tepat waktu, dengan capaian realisasi sebesar 100%. Penyerahan Dokumen dilaksanakan pada awal Maret 2016 dan di Paripurnakan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Dumai.

o) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 276.060.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 250.076.250,- atau 90,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Tersedianya dokumen Laporan Triwulan I s/d Triwulan IV dan Laporan TEPRAs setiap bulannya yang ditembuskan ke Bappeda Provinsi Riau dan Biro Pembangunan Provinsi Riau.

p) Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.719.000,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.716.000,- atau 94,04%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dengan capaian realisasi sebesar 100%. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD dengan melibatkan 35 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 100 orang

q) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 194.550.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 189.007.000,- atau 97,15%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan, dengan capaian realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan karena merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda sehingga program dan kegiatan penyusunan dokumen tersebut menjadi prioritas Bappeda. Selain dukungan data dan anggaran yang telah tersedia, terciptanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD maupun instansi terkait.

r) Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 208.990.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 166.203.800,- atau 79,53%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aplikasi, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Aplikasi yang digunakan adalah e-planning untuk memudahkan penyusunan Rencana Pembangunan dan aplikasi e-monev yang digunakan untuk Monitoring yang berbasis web dimana setiap SKPD mempunyai admin untuk penginputan data secara online. Adapun admin SKPD sebanyak 35 orang, tidak lagi menggunakan secara manual dan terintegrasi secara online pada tahun 2016.

s) Kegiatan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 188.752.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 122.850.750,- atau 65,09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen MDG's, dengan capaian realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi terhadap pencapaian tujuan program Millenium Development Goal's (MDG's) yang telah direalisasi oleh SKPD sesuai dengan Goal's atau tujuan yang telah ditentukan. adapun uraian dari kegiatan ini adalah :

1. Pembentukan Tim kelompok kerja (POKJA) Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goal's (MDG's) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015
2. Pengumpulan data program/kegiatan yang telah dihimpun dari SKPD yang mendukung program Millenium Development Goal's (MDG's).

3. Pembentukan tenaga ahli Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goal's (MDG's) Kota Dumai Tahun 2011–2015 yang bertugas menganalisis baik data primer maupun data sekunder yang telah dihimpun oleh tim Kelompok kerja maupun tim Sekretariat Evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goal's (MDG's) Kota Dumai Tahun 2011–2015 yang dibuat dalam bentuk dokumen.
4. Rapat penyusunan laporan evaluasi yang hadir oleh Tim Sekretariat, Tim POKJA dan Tenaga Ahli yang terlibat dalam penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goal's (MDG's) Kota Dumai Tahun 2011–2015 yang dimaksudkan untuk berdiskusi dan member saran dan pendapat untuk tenaga ahli dalam membuat dokumen laporan.
5. Dokumen Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goal's (MDG's) Kota Dumai Tahun 2016–2021.

t) Kegiatan Evaluasi Rencana aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ( RAD-PK ) Dumai  
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 236.230.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.514.000,- atau 19,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pelaporan RAD-PK dan Jumlah peserta sosialisasi inpres RAD-PK, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Tahun 2015, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi wajib dilaksanakan semua pemerintah daerah, termasuk Kota Dumai.

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dituangkan dalam Format 8 Kolom (F8K) meliputi transparansi di bidang perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa serta Pembentukan dan Penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Aksi tersebut yaitu:

1. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
2. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
3. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
4. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan pembantu;
5. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan

jasa;

6. Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di daerah.

Ke enam aksi tersebut dilaporkan setiap triwulan secara online melalui Sistem Pemantauan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan alamat <https://serambi.ksp.go.id>.

Untuk Kota Dumai, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan ke enam aksi tersebut dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai melalui Tim Koordinasi sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Keputusan Walikota Dumai Nomor : 160/BAPPEDA/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Dumai tahun 2015.

- u) Kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 325.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 295.399.932,- atau 90,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen KLHS RPJMD Kota Dumai 2016 – 2021, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

- v) Kegiatan Sosialisasi RPJMD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 169.571.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 141.082.000,- atau 83,20%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RPJMD, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

## 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 293.525.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.792.854,- atau 67,04%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.220.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.220.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan aksi daerah pangan gizi, dengan capaian realisasi sebesar 100%

- b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 183.468.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.3635.854,- atau 67,39%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan koordinasi dengan Mitra Kerja Sub Bidang Pertanian sebagai salah satu bahan acuan penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2016.

c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 104.837.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 67.937.000,- atau 64,80%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan Monev, dengan capaian realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi Mitra Kerja lingkup Bidang Ekonomi terkait pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2016.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 557.840.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 394.877.200,- atau 71%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Perencanaan Sosial Budaya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 238.920.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 176.655.200,- atau 73,94%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan koordinasi ke SKPD dilingkup Pemerintah Kota Dumai yang tercakup dalam bidang sosial budaya dan koordinasi keluar daerah baik Provinsi Riau, Pusat maupun daerah lainnya dalam rangka konsultasi terkait perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya.

b) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Sdm

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 222.390.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 136.792.000,- atau 61,51%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen dari hasil monev, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 96.530.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.430.000,- atau 84,36%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen dari hasil monev, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan pengumpulan data-data hasil monitoring dan evaluasi oleh tim monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit dan kegiatan pembangunan yang mencakup pada SKPD di Bidang Sosial Budaya, pada kegiatan monitoring dan evaluasi ini dibentuk tim monitoring yang turun kelapangan untuk melihat kondisi fisik semua kegiatan SKPD dilingkup bidang Sosial budaya dengan 2 (dua) kali pengamatan di lapangan yaitu untuk melihat pencapaian pada Triwulan III dan Triwulan IV yang kemudian diolah oleh anggota tim yang telah ditugaskan sebelum dituangkan kedalam bentuk dokumen. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

#### 4. Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 455.459.840,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 444.865.589,- atau 98%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### a) Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 343.314.410,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 333.097.689,- atau 97,02%. Adapun indikator kinerja keluaran Adalah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi BKPRD dan dokumen perencanaan pasca penetapan perda RTRW Kota Dumai, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini juga meng-*update* dokumen muatan teknis RTRW dan mereview Raperda RTRW Kota Dumai yang mnegikuti perubahan-perubahan regulasi dan kebijakan di Kota dan dokumen-dokumen pendukung seperti Dumai Dalam Angka dan lainnya.

##### b) Kegiatan Survei dan Pemetaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 112.145.430,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 111.767.900,- atau 99,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Peningkatan muatan survey oleh tenaga ahli pendamping yang aktif dalam pemanfaatan ruang dalam pemenuhan data spasial dan terciptanya sistem informasi pemetaan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial berbasis flash macromedia Kota Dumai, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan Up dating peta penggunaan lahan di Kota Dumai dengan Peta Citra terbaru tahun 2016 dan udating peta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang kemudian di *convert* kedalam sistem informasi pemetaan digital.

#### 5. Program Pengembangan data/ informasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 309.041.000,- dengan

realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 251.688.000,- atau 81%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan data/informasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 225.891.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 174.650.000,- atau 77,32%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen informasi tentang statistik Kota Dumai,, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Salah satu tugas dan fungsi bappeda sebagai perencana adalah memiliki data yang valid dan dapat diandalkan. Penyusunan profil daerah merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan data-data dan informasi pembangunan daerah yang akan dijadikan sebagai referensi dan alat analisa untuk menyusun kebijakan pembangunan daerah dan selanjutnya akan diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan.

b) Kegiatan Penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 83.150.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.038.000,- atau 92,65%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah buletin penelitian pada Litbang Bappeda, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

6. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 26.259.370,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.103.585,- atau 99%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan data/informasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 26.259.370,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.103.585,- atau 99,41%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Koordinasi dalam rangka Rencana Tata Ruang Perbatasan dan Program Kawasan Strategis Nasional (KSN), dengan capaian realisasi sebesar 100%.

7. Program Pengembangan Perumahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 406.636.730,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 403.486.900,- atau 99%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan data/informasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 406.636.750,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 403.486.900,- atau 99,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pendampingan oleh Tenaga Ahli dalam pelaksanaan RKP-KP. Penyusunan Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, dan Penyusunan DED 4 Kawasan Prioritas, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Pada APBD Perubahan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian PU Dirjen. Cipta Karya kegiatan ini berubah sasaran outputnya yaitu merupakan penyusunan dokumen Profil Kawasan Kumuh Kota Dumai, penyusunan dokumen RKP-KP sekaligus melakukan revisi SK Kawasan Kumuh Kota Dumai Tahun 2015 yang menghasilkan 10 Kawasan Kumuh yang tersebar di 14 Kelurahan dengan luasan lebih kurang 127Ha melalui Pokja RKP-KP dan tenaga ahli pendamping. Selain itu kegiatan ini juga sebagai wadah koordinasi antara Pokja RKP-KP Kota Dumai dengan tim P2KP yang ada di Kota Dumai untuk mensinergikan data-data terkait infrastruktur kawasan kumuh.

#### 8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 238.299.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.883.698,- atau 91%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan data/informasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### a) Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 238.299.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.883.698,- atau 91,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan TKPK, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Dumai.

#### 9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 644.690.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 611.506.245,- atau 95%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan data/informasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### a) Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 64.565.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 64.565.400,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi masalah transportasi Kota Dumai,

dengan capaian realisasi sebesar 100%.

b) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 301.597.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 293.145.986,- atau 97,20%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen MPS, RAD-AMPL dan Sanitasi, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan penyusunan dokumen Program Sanitasi Kota Dumai yang digunakan sebagai acuan dalam penanganan sanitasi di Kota Dumai menuju penuntasan 100% akses air minum 0% kawasan Kumuh dan 100% sanitasi layak Tahun 2019. Selanjutnya penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL).

c) Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 199.270.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 174.587.359,- atau 87,61%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan perencanaan pusat-pusat industri, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan koordinasi dengan Mitra Kerja Sub Bidang Perekonomian sebagai salah satu bahan acuan penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2016.

d) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 79.257.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 79.207.500,- atau 99,94%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen monitoring, dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD PU seperti Pembangunan Jalan dan Jembatan, Drainase, Semenisasi jalan lingkungan, box culvert, duiker, rehab gedung kantor dan lain-lain, sedangkan pada Dinas Tata Kota monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah realisasi pelaksanaan Pemasangan Jaringan Listrik, Pemasangan Penerangan Lampu Jalan Umum dan Pemeliharaan Jaringan maupun Bola Lampu. Bidang Kebersihan dan Persampahan monev yang dilakukan pengadaan bak sampah, container dan rehabilitasi ruang terbuka hijau. Monitoring dan evaluasi juga pada sasaran sarana dan prasarana infrastruktur yang terdapat pada Dinas Perhubungan. Kegiatan ini menghasilkan keluaran berupa dokumen hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan-pekerjaan infrastruktur SKPD yang dibawah kordinasi

bidan Fisik sarana dan prasarana wilayah Bappeda Kota Dumai berdasarkan DPA tahun anggaran 2016.

## 7. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

### KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

**Tabel 4. 34**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Lingkungan Hidup  
Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian (%)
Kualitas Udara	70%	70%	100%
Kualitas Air Sungai	70%	70%	100%
Kualitas Air Laut	70%	70%	100%

*Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai*

Adapun Indikator Kinerja Kantor Lingkungan Hidup tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Kualitas Udara.

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Kantor Lingkungan Hidup yaitu teridentifikasinya kualitas mutu udara Kota Dumai dengan kegiatan pengujian polusi udara ambien, anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar 75.000.000,- dengan capaian kondisi akhir 2016 sebesar 70%, dan telah terealisasi dengan baik sebesar Rp. 73.967.000,- atau sebesar 98%. Realisasi kegiatan pada tahun 2016 sebesar 70% sehingga capaian kegiatan pada tahun 2016 sebesar 100% , telah mencapai target yang diinginkan yaitu Terjaganya status mutu udara Kota Dumai dengan melaksanakan pengujian udara ambien.

#### b. Kualitas Air Sungai.

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Kantor Lingkungan Hidup yaitu tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air. Dengan capaian kondisi akhir 2016 sebesar 70%, dan realisasi kegiatan pada tahun 2016 sebesar 70% sehingga capaian kegiatan pada tahun 2016 sebesar 100%, terdiri dari 15 analisis sample kualitas air sungai.

#### c. Kualitas Air Laut.

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Kantor Lingkungan Hidup yaitu tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air. Dengan capaian kondisi akhir 2016 sebesar 70%, dan realisasi kegiatan pada tahun 2016 sebesar 70% sehingga capaian kegiatan pada tahun 2016 sebesar 100%, terdiri dari 10 analisis sample kualitas air laut.

Tahun 2016, jumlah anggaran untuk 8 (Delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebesar Rp. 4.996.764.060,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.612.364.060,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.384.400.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.490.067.606,- atau terserap 92% dan belanja langsung terserap Rp. 2.921.445.151,- atau 86 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

#### **1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran**

Capaian program pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran yang optimal. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 885.638.760,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.872.824.966,- atau 98%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

##### **a. Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 220.445.400. dengan hasil indikator tercapainya presentase rata-rata surat yang berhasil disampaikan sebesar 85%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.445.400,- atau 99 % .

##### **b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 68.355.000. dengan hasil indikator tercapainya prosentase kinerja yang baik sebesar 85% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.652.261,- atau 88 % dengan realisasi kegiatan pembayaran rekening telfon, internet, air dan listrik pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.

##### **c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 95.500.000 dengan hasil indikator tercapainya prosentase peralatan dan perlengkapan sebesar 80% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.900.000,- atau 99 %.

##### **d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.979.200. dengan hasil indikator tercapainya prosentase transaksi keuangan yang terlaksana sebesar 75% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.979.200,- atau 100 % dengan realisasi kegiatan pembayaran transaksi keuangan pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.

##### **e. Penyediaan jasa Kebersihan kantor**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.262.150 dengan hasil indikator tercapainya prosentase ruangan kerja yang bersih dan nyaman dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 20.262.150,- atau 100 % dengan realisasi kegiatan pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor.

f. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia Rp. 86.551.050. dengan hasil indikator tercapainya prosentase penyediaan alat tulis kerja yang baik sebesar 80% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.546.050,- atau 100% dengan realisasi kegiatan penyediaan alat tulis kantor.

h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 64.823.000. Dengan hasil indikator Tercapainya prosentase dokumen yang terakomodir sebesar 85% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.823.000,- atau 100 %.

i. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11.169.000 , dengan hasil indikator tercapainya prosentase komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang terpenuhi sebesar 85% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.269.000,- atau 91 % dengan realisasi kegiatan pembelian komponen listrik.

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- , dengan hasil indikator tercapainya prosentase aparatur yang memiliki kredibilitas yang baik sebesar 80% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.480.000,- atau 69 % dengan realisasi kegiatan penyediaan surat kabar harian.

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14.700.000,- , dengan hasil indikator tercapainya kinerja pegawai yang optimal sebesar 85% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.700.000,- atau 100 %.

l. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 246.453.960. dengan hasil indikator tercapainya prosentase pegawai yang dikirim untuk koordinasi keluar daerah sebesar 85% dan realisasi keuangan Rp. 245.367.905,- atau 99 % dengan realisasi kegiatan perjalanan dinas keluar daerah.

m. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 38.400.000. dengan hasil indikator tercapainya presentase jumlah tenaga pengamanan kantor yang menerima insentif sebesar 90% dengan realisasi keuangan Rp. 38.400.000,- atau 100 % dengan

realisasi kegiatan pembayaran jasa tenaga keamanan kantor.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Capaian program pada Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah tercapainya sarana dan prasarana aparatur Kantor Lingkungan Hidup yang memadai sebesar 80% . Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 305.116.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.276.544.825,- atau 90%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

### **a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 132.700.000 dengan hasil indikator prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai sebesar 12 unit dengan realisasi kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda dua 3 unit sebesar Rp. 71.340.000,- dan pengadaan personal komputer sebesar 128.540.000, total realisasi keuangan Rp. 128.540.000.- atau 96 %.

### **b. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 172.416.000.- dengan hasil indikator tercapainya prosentase kendaraan dinas yang terawat sebesar 80% dan realisasi keuangan Rp. 148.004.825 atau 85%.

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Capaian program pada Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah tercapainya presentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 80% . Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.247.000.000 atau 99%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

### **a. Pendidikan dan pelatihan formal**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 250.000.000.- dengan hasil indikator tercapainya prosentase pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal sebesar 80% dengan realisasi keuangan Rp. 247.000.000,- atau 98 % dengan realisasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.

## **4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Capaian program pada Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah tersusunnya rencana kerja, laporan capaian kinerja dan pelaporan akhir tahun 2016 sebesar 80% . Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.600.000 atau 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

### **a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.300.000,- dengan hasil indikator penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Revisi Renstra, RKT dan Renja Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai sebesar 80% dengan realisasi keuangan Rp. 6.300.000,- atau 100 %.

**b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.300.000,- dengan hasil indikator tercapainya prosentase laporan keuangan akhir tahun yang akurat sebesar 80% dengan realisasi keuangan Rp. 7.300.000,- atau 100 % dengan realisasi kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

**c. Penyusunan rencana kinerja SKPD**

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.000.000,- dengan hasil indikator tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat dan tepat waktu dengan realisasi keuangan Rp. 17.000.000,- atau 100 % dengan realisasi kinerja penyusunan rencana kerja.

**5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,**

Capaian program pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup adalah Tercapainya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan dumai yang optimal sebesar 80% . Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.095.522.940,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 753.082.580,- atau 69%,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura**

Kegiatan ini terealisasi dengan baik dengan realisasi anggaran sebesar 221.251.740,- atau 97 % dari total anggaran Rp. 226.200.000,- atau 80% , telah mencapai target yang diinginkan yaitu terwujudnya Kota Dumai yang bersih dan teduh.

**b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup**

Kegiatan ini terealisasi dengan baik dengan realisasi anggaran sebesar 256.271.990,- atau 88 % dari total anggaran Rp. 228.750.000,- atau 85%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu jumlah pelaku usaha/perusahaan yang diawasi.

**c. Pengkajian Dampak Lingkungan**

Kegiatan ini telah terealisasi dengan anggaran sebesar 84.452.000,- atau 99%. Dari total anggaran Rp. 85.000.000,- atau 1 dokumen, Dengan hasil tersusunnya 1 dokumen kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat adanya aktifitas industri atau sebesar 100%.

**d. Koordinasi penyusunan AMDAL**

Kegiatan ini telah terealisasi dengan anggaran sebesar 36.400.000,- atau 97%. Dari total anggaran Rp. 37.300.000,- atau 80% dengan hasil indikator laporan koordinasi penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) sebesar 80%

e. Pencemaran air

Kegiatan ini telah terealisasi dengan anggaran sebesar 135.910.000,- atau 98%. Dari total anggaran Rp. 138.037.500,- dengan hasil indikator tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air sebesar 80%.

f. Pengembangan laboratorium lingkungan hidup

Kegiatan ini telah terealisasi dengan anggaran sebesar 18.796.850,- atau 5%. Dari total anggaran Rp. 320.235.440,-, dengan hasil indikator presentase pengujian parameter air dan udara sebesar 70% dan pembelian perlengkapan laboratorium habis pakai, bahan kimia untuk analisa udara ambien, dan analisa air, serta kalibrasi alat – alat laboratuorium. Ada pun belanja modal yang terealisasi pada kegiatan ini adalah : Gelas piala, botol winkler, corong pisah, gelas backer, klep, rak klep, baju kaos lengan panjang, topi lapangan, botol sample 2 Liter, botol plastik 1 Liter, sikat tabung reaksi, portable air impinger, staplex, stabilizer.

6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Capaian program pada Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam adalah Tercapainya kajian lingkungan hidup strategis kota Dumai sebesar 80%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 142.364.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.576.600,- atau 69%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kegiatan ini telah terealisasi dengan anggaran sebesar 98.576.600,- atau 69% dari total anggaran Rp. 142.364.600,- dengan hasil tercapainya kajian lingkungan hidup strategis Kota Dumai sebanyak 1 dokumen.

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Capaian program pada Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah Tercapainya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 600.157.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 568.880.180,- atau 99%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

Kegiatan ini telah terealisasi dengan baik sebesar Rp. 65.009.000,- atau sebesar 92%. Dari total anggaran Rp. 70.000.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan sekolah-sekolah yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mengikuti program adiwiyata Kota Dumai. Jumlah sekolah yang mengikuti penilaian adiwiyata adalah sebanyak 40 sekolah, Ada pun yang meraih penghargaan predikat sekolah adiwiyata pada tahun 2016 sebanyak 7

sekolah untuk tingkat provinsi yaitu : SMKN2 Dumai, SMAN BINSUS, SMPN 1 Dumai, SMPN 2 Dumai, SDN Binsus, SDN 018 Purnama, SDN 011 Tanjung Penyebel dan 5 sekolah yang meraih predikat adiwiyata tingkat kota yaitu, MAN Dumai, SMP PGRI, SDN 019 Bumi Ayu, SDN 009 Tanjung Palas, dan SMP Lancang Kuning. Dengan hasil indikator sekolah yang mengetahui dan memahami program adiwiyata.

b. Pengembangan data dan informasi lingkungan

Kegiatan ini telah terealisasi dengan baik sebesar Rp. 260.630.580,- atau sebesar 93%. Dari total anggaran Rp. 280.157.700,- dengan hasil indikator buku data dan laporan status lingkungan hidup kota dumai serta perangkat SILH sebanyak 2 dokumen + perangkat.

c. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Kegiatan ini telah terealisasi dengan baik sebesar Rp. 243.240.600,- atau sebesar 97%. Dari total anggaran Rp. 250.000.000,- dengan hasil indikator tercapainya informasi lingkungan hidup kota dumai sebesar 85%.

8. Program peningkatan pengendalian polusi

Capaian program pada Program Peningkatan pengendalian polusi adalah terlaksananya status mutu udara ambien kota dumai sebesar 85%, Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.967.000,- atau 99%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengujian polusi udara ambien

Kegiatan ini telah terealisasi dengan baik sebesar Rp. 73.967.000,- atau sebesar 98%, dari total anggaran Rp. 75.000.000,- dengan hasil indikator terjaganya status mutu udara Kota Dumai sebesar 80%.

**Prestasi Dalam Bidang Pengelolaan LH**

Prestasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dicapai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Juara Harapan II sebagai Kota Terbersih Se Provinsi Riau
- Penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup (MENLH), Tematik Asuransi Lingkungan Hidup (ALH) untuk wacana kebijakan domestik Kota Dumai Tanggal 18 September 2012.
- Peringkat I Kota Bersih Kategori Kota Sedang.
- Penghargaan Adiwiyata SMKN 1 tahun 2012 , SMAN 1 tahun 2014, SMPN 5 tahun 2014, SMAN 1 tahun 2015
- Meraih predikat adiwiyata tingkat kota yaitu, MAN Dumai, SMP PGRI, SDN 019 Bumi Ayu, SDN 009 Tanjung Palas, dan SMP Lancang Kuning.

## 8. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

*Tabel 4.35*  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi tahun 2016	Capaian (dalam %)
Kepemilikan KTP Elektronik	%	61,2	75%	72%
Kepemilikan Akta Kelahiran	%	80,2	85%	85%
Kepemilikan Akta Perkawinan	pasangan	60	155	258%
Kepemilikan KIA	%	5%	10%	200%
Kepemilikan KK	%	92%	100%	108%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Secara umum, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan program dan Kegiatan berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan, adapun pencapaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

a) Persentase kepemilikan KTP Elektronik

Persentase kepemilikan KTP Elektronik sebesar 72%, target dari indikator sasaran yaitu terkumpulnya data bio metric wajib KTP-el dengan perekaman sebanyak 274.699 dan tercetak sebanyak 134.303 dengan capaian sebesar 123%.

b) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 85%, dengan indikator yaitu semua anak yang lahir memiliki Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun, untuk tahun 2016 tercatat kelahiran sebanyak 4.012. dengan capaian sebesar 106%

c) Kepemilikan Akta Perkawinan

Kepemilikan Akta Perkawinan dengan indikator yaitu terlaksananya pencatatan perkawinan bagi masyarakat Non Muslim dengan target awal 60 pasangan pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 155 pasangan. dimana capaiannya sebesar 255%

- d) Persentas Kepemilikan KIA  
Persentas Kepemilikan KIA dengan indikator yaitu terlaksananya pencetakan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 Tahun kurang 1 hari, dari target awal sebanyak 5% pada tahun 2016 tercetak sebanyak 10.966. (10%) dengan capaian sebesar 200%
- e) Persentase kepemilikan KK  
Persentase kepemilikan KK dengan dengan indikator sasaran ini yaitu Jumlah KK yang terdata pada data base kependudukan dengan capaian 108% atau sebanyak 78.809 KK. Dimana seluruh yang terdata di system sudah memiliki KK.

Tingkat Pencapaian pada Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut :

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah anggaran Rp. 220.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 216.898.000,00 (98,37%) tingkat pencapaian i sebesar 100% berupa terkirimnya surat selama 1 (satu) tahun.

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik jumlah anggaran Rp. 374.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 302.981.760,00 81,01% output: jumlah pemakaian telepon, air dan listrik selama 1 tahun dengantingkat capaian sebesar (100%).
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah anggaran Rp. 83.151.250,00 realisasi sebesar Rp. 79.100.000,00 95,13% dengan indikator yaitu jumlah even yang di ikuti (3 even) dengan hasil yang dicapai adalah tersampainya pesan pelayanan ke masyarakat melalui pelaksanaan dumai expo dan pawai dengan capaian 100%
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah anggaran Rp. 145.568.750,00 dengan realisasi sebesar Rp.145.568.750 (100%) dengan indikator jumlah petugas kebersihan kantor (6 orang) dan hasil terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor selama 1 tahun dengan capaian 100%
- d) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor , jumlah anggaran sebesar Rp. 415.564.600,00 Realisasi Rp. 396.902.660,00 (95,51%) dengan indikator keluaran jumlah kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun dengan capaian 100%.
- e) Pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah anggaran Rp. 254.150.000,00 realisasi Rp. 247.817.150,00 (97,51%) tingkat pencapaiannya adalah berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan kepada masyarakat selama 1 tahun dengan capaian sebesar 100%
- f) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah anggaran Rp. 56.419.000,00 realisasi sebesar Rp. 56.416.000,00 (100%) dengan indikator

keluaran berupa tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 1 tahun dengan capaian 100%

g) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor jumlah anggaran Rp. 967.317.750,00 realisasi Rp. 909.562.000,00 (94,03%) dengan indikator keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (12 Item) dengan capaian 100%

h) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah anggaran Rp. 20.724.000,00 realisasi Rp. 18.280.000,00 (88,21%) dengan indikator keluaran jumlah surat kabar yang berlangganan selama 1 tahun dengan capaian sebesar 100%..

i) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, jumlah anggaran Rp. 36.000.000,00 realisasi Rp. 35.940.000,00 (99,83%) dengan indikator tersedianya makan dan minum rapat dan tamu selama 1 tahun dnga capaian 100%

j) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, jumlah anggaran Rp. 859.702.400,00 Realisasi Rp. 859.653.243,00 (99,99%) terlaksananya rapat koordinasi konsultasi ke Luar daerah selama 1 tahun dengan tingkat capaian 100%.

k) Pada kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor jumlah anggaran Rp. 122.400.000,00 realisasi Rp. 122.400.000,00 (100%) indikator keluaran jumlah tenaga keamanan kantor sebanyak 6 orang dengan hasil terwujudnya keamanan kantor selama 1 tahun dengan tingkat capaian 100%.

l) Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah anggaran Rp. 339.000.000,00 realisasi Rp. 292.525.000,00 (86,29%) indikator keluaran yaitu jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan indikator hasil berupa terlaksananya perawatan gedung kantor dengan tingkat capaian sebesar 86,37% ini dikarenakan ada 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu DED gedung kantor.

m) Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional jumlah anggaran Rp. 274.504.000,00 realisasi Rp. 249.234.199,00 (90,79%) dengan indikator keluaran jumlah kendaraan dinas yang terpelihara(3 unit) capaian 100%.

n) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah anggaran Rp.363.800.000,00 realisasi Rp. 361.765.000,00 dengan indikator keluaran yaitu jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat dengan capaian 100%

o) Pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD jumlah Anggaran Rp. 107.306.000,00 realisasi Rp. 105.235.000,00 (98,07%) dengan indikator keluaran tersusunnya laporan capaian kinerja dan Renstra.dengan capaian 100%

p) Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, jumlah anggaran Rp. 49.614.000,00 Realisasi Rp. 49.460.388,00 (99,64%) dengan indikator keluaran yaitu

tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran (tersedianya dokumen RKA, DPA dan Prognosis). dengan capaian 100%

q) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah anggaran Rp. 22.000.000,00 realisasi Rp. 22.000.000,00 (100%) dengan indikator keluaran yaitu tersusunnya pelaporan akhir tahun. dengan Capaian 100%.

Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. **Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.299.551.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 865.780.516,- atau 66,62%, yang dialokasikan melalui yaitu :

a. *Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)*

Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangun, Updating dan pemeliharaan ) jumlah anggaran Rp. 288.233.750,00 realisasi Rp. 281.500.000,00 (97,66%) dengan indikator keluaran terlaksananya perekaman KTP-el (134.303) dengan capaian 100%

b. *Kegiatan Pencetakan Kartu Identitas Anak*

Kegiatan Pencetakan Kartu Identitas Anak jumlah anggaran Rp. 1.011.317.500,00 Realisasi 584.280.516,00 (57,77%) dengan indikator terlaksananya pencetakan KIA di Kota Dumai. Sebanyak (10.966 lembar) dengan capaian 100%

9. **URUSAN WAJIB KELUARGA SEJAHTERA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Anggaran Belanja Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 11.248.923.070,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.046.511.820,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.202.411.250,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 2.933.586.179,- atau terserap 96,29 % dan belanja langsung terserap Rp. 7.650.442.425,- atau 93,27%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

### 1. Program Keluarga Berencana

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 291.077.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 231.242.300,- atau 79,44 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

#### a) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 291.077.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 231.242.300,- atau 79,44 % dari anggaran yang dialokasikan untuk Meningkatkan motivasi kelompok KB untuk mensukseskan program Keluarga Berencana. Adapun indikator keluaran dari kegiatan adalah Terbinanya kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera dengan capaian kegiatan sebesar 100% dari target pencapaian 80%.

### 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 293.253.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 277.273.000,- atau 98,80 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

#### a) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 293.253.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 277.273.000,- atau 98,80 % dari anggaran yang dialokasikan untuk Meningkatkan pengetahuan remaja dengan adanya Pusat Informasi Konseling. Adapun indikator keluaran dari kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Jambore PIK Remaja sekota Dumai dengan capaian kegiatan sebesar 100% dari target pencapaian 80%.

### 3. Program Pelayanan Kontrasepsi

Pada Tahun 2016, Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 435.331.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 432.764.000 Atau 99,55% dari anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan :

#### a) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 435.331.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 432.764.800 Atau 99,41% dari anggaran dengan realisasi target pencapaian 100% dengan tujuan Meningkatkan capaian peserta KB aktif dan KB Baru. Indikator hasil yg diharapkan dari kegiatan tersebut adalah erselenggaranya kegiatan Pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes dan terealisasi sebanyak 33.044 akseptor dengan persentase tercapainya peserta KB aktif dan KB baru 75,4%.

4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

a) Kegiatan Pelatihan Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 343.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 339.289.000,- atau 98,70 % yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas keluarga dari beberapa kelompok keluarga yang dibina. Adapun indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut agar meningkatkan pengetahuan Kader dan Sub Kader tentang program pada Badan KBPPPA Kota Dumai dengan indikator realisasi Pelatihan kader dan sub kader IMPKBPPPA dengan indikator realisasi kegiatan yaitu Terlaksananya pelatihan dan pembinaan bagi kader pendamping tribina dengan capaian kegiatan sebesar 100% dari target pencapaian sebanyak 200 orang.

5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Pada Tahun 2016, Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 210.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 207.400.000 Atau 99,55% dari anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan :

a) Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB.

Pada tahun 2016, jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 210.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 385.543.800 Atau 98,57% dari anggaran dengan realisasi target pencapaian 100% dengan tujuan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program KB. Indikator hasil yg diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alokasi dana bagi tenaga Penyuluh Lapangan KB dan terealisasi selama 12 bulan.

6. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.042.686.080,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 573.036.150,- atau 95,81% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 92.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 89.850.000,- atau 97,13% dari anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan Persentasi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang mana outputnya adalah Terlaksananya pengukuhan pengurus GOW dan peringatan hari ibu, dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 75%.

b) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan gender (vocal point gender) dan terbentuknya kelompok kerja (pokja) bidang program pengarusutamaan gender se SKPD Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 154.141.680,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 154.140.573,- atau 99,9% dari anggaran yang bertujuan untuk Meningkatnya pengetahuan tentang Analisis PUG antar lintas sektor. Indikator keluaran kegiatan ini adalah Tersosialisasinya Analisis PUG bagi perencanaan Program Pembangunan dan terbentuknya kelompok kerja (pokja) bidang program pengasutamaan gender se SKPD Dumai, dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 75%.

c) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 285.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 210.266.150,- atau 73,64 % dari anggaran yang bertujuan meningkatkan keluarga sehat sejahtera di kota Dumai. Realisasi kegiatan ini berupa terlaksananya terselenggaranya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 85%.

d) Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 510.544.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 398.327.972,- atau 78,02% dari anggaran yang bertujuan untuk Meningkatnya pemahaman perempuan dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Terlaksananya pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (UP2K) dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 90%.

7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.744.857.180,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.635.086.686,- atau 95,37% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A).

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.045.800.000, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.041.778.696,- atau 99,61 % dari anggaran yang bertujuan meningkatnya pelayanan terhadap anak dan perempuan yang berkasus dan anak dan perempuan yang berkasus mendapatkan hak-haknya. Dengan indikator keluaran realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 100%.

b) Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 350.000.000,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 342.983.600,- atau 97,99 % dari anggaran yang bertujuan agar Meningkatnya kapasitas jaringan kelembagaan perempuan dan anak. Adapun indikator keluaran berupa Terselenggaranya kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan lomba kegiatan hari ibu di Kota Dumai dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 85%.

c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengasutamaan gender dan anak.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 113.727.680,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 107.091.968,- atau 94,1 % dari anggaran yang bertujuan agar meningkatnya keakuratan Data dan Informasi yang lengkap dan akurat. Adapun indikator keluaran berupa Terpenuhinya updating keluarga yang didata di Kota Dumai, dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 100%.

d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 947.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 901.552.816,- atau 95,15 % dari anggaran yang bertujuan agar Meningkatnya pengetahuan pengembangan sekolah ramah anak dan partisipasi dalam pembangunan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Terselenggaranya pendampingan pengembangan sekolah ramah anak dan pemilihan duta anak, Terselenggaranya bimtek 2P bagi forum anak, Terselenggaranya perlombaan antar forum anak kecamatan dalam rangka HAN, Terselenggaranya puncak peringatan HAN kota Dumai tahun 2016 dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 100%.

e) Kegiatan Pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.134.569.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 132.678.000,- atau 98,59% dari anggaran yang bertujuan untuk Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang konsep gender. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Terlaksananya Pembinaan Kader KB, PP dan PA Kota Dumai dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target 80%.

f) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 153.260.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 144.287.016,- atau 94,14% dari anggaran yang bertujuan untuk Meningkatnya ketertiban dan terkoordinasinya informasi kegiatan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Tersedianya Media Informasi yang Komunikatif dan Efektif dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 85%.

8. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.196.838.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.190.576.600,- atau 98,45% dari anggaran dengan realisasi target pencapaian 100% yang dialokasikan untuk kegiatan diantaranya yaitu :

a) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.196.838.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.190.576.600,- atau 99,47% dari anggaran. yang bertujuan meningkatnya pemetaan persoalan kekerasan perempuan dan anak di Kota Dumai, dengan indikator keluaran tersusunnya profil anak Kota Dumai tahun 2016. Realisasi capaian kegiatan ini sebesar 100% dari target sebesar 100%.

10. URUSAN WAJIB SOSIAL  
DINAS SOSIAL

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/313/OTDA Tanggal 24 Januari 2011, Program nasional yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota adalah (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, (3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma (4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo (5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) (6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang disampaikan pencapaiannya pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.36  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi tahun 2016	Capaian (dalam %)
Jumlah sarana sosial	20	21	100%
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	11.720	13.407	100%
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	60	76	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk di dalam indikator kinerja sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

a) Jumlah sarana sosial

Dari jumlah target sebanyak 11 unit lembaga kesejahteraan sosial pada tahun 2016 dapat terealisasi sebanyak 11 unit lembaga kesejahteraan sosial atau 100%. Maksud dari indikator ini, adanya 11 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Dumai yang menjadi sarana sosial dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan sosial berupa 11 (sebelas) panti asuhan anak yang merupakan milik swasta. Selain 11 lembaga kesejahteraan sosial tersebut Dinas Sosial Kota Dumai turut mendukung/memfasilitasi 10 lembaga lainnya diantaranya:

- Solidaritas masyarakat peduli sosial (SMPS)
- Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI)
- Forum komunikasi anak dengan kecacatan (FKADK)
- LSM Matahati
- LSM Bahtera
- Rumah Sosial Fakir Miskin (RSFM)
- SLB Asyifa Maimanah
- Rumah Sosial Keagamaan (RSK)
- Wanita Dumai berkarya (Waduya)
- Perempuan Dumai Berbakti (Pedati).

b) PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial

Uraian dari indikator ini, dimana Pemerintah melaksanakan program raskin/rastra para penyanggah masalah kesejahteraan sosial mendapatkan bantuan berupa beras 15(lima belas) kg /bulan per RTM yang diperuntukan kepada 9.423 RTM Kota Dumai yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tigapuluh tiga) Kelurahan. Disamping itu bagi keluarga miskin pemerintah Pusat juga menjalankan program keluarga harapan (PKH) dengan dimulai tahun 2013 sampai 2016 dengan jumlah penerima bantuan keluarga penerima manfaat sebanyak 3.360 KPM dengan nilai sebesar Rp. 3.403.050.239 ,- yang digelontorkan setiap triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sangat miskin telah meningkat kesejahteraannya. Kota Dumai juga memiliki kelompok usaha bersama yang mendapat bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk 50 KUBE. Program ini merupakan program Kementerian Sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin yang mau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kota Dumai juga melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimana masyarakat miskin Kota Dumai mendapat program tersebut sebanyak 50 rumah/RTLH masing-masing Rp. 15.000.000,- atau setara dengan nilai Rp. 750.000.000,- Asuransi lanjut usia yang diperuntukkan bagi lansia miskin Kota Dumai mendapatkan bantuan langsung dari Kementerian Sosial RI sebanyak 48 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 115.200.000,-

c) Penanganan penyanggah masalah kesejahteraan sosial

Uraian dari indikator ini, pembinaan terhadap penyanggah masalah sosial ini secara komprehensif mengingat keterbatasan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan tersebut. Dengan dikirimnya anak putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)

Pekanbaru dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengkuuyuk Pekanbaru sebanyak 15 orang di tahun 2016. Pada tahun 2016 ini juga adanya pengiriman pasien gangguan jiwa yang dikirim Rumah Sakit Jiwa Propinsi Riau sebanyak 45 kasus. Penanganan dan pendampingan melalui Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC ) sebanyak 11 kasus yang ditangani langsung Pekerja Sosial, sedangkan untuk kasus anak berhadapan dengan hukum pada tahun ini sebanyak 26 kasus/orang anak yang penanganannya langsung pendampingannya dilakukan oleh pekerja sosial mulai dari tingkat kelurahan, polres dan kejaksaan.

Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9.336.167.740,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.019.398.740,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.316.769.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 2.915.654.685,- atau terserap 97,00% dan belanja langsung terserap Rp. 6.177.845.424,- atau 97,80%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2016, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 324.164.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 311.273.140,- atau 96,02% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Fasilitasi pendampingan terhadap kader program keluarga harapan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 96.682.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.932.000,- atau 98,19% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pendataan Program Keluarga Harapan.

b) Kegiatan Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 227.482.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.341.140,- atau setara dengan 95,10%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data PMKS dan PSKS dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang akurat. Tersedianya data PMKS merupakan langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.740.948.786,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.718.177.885,- atau 99,39% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

jumlah anggaran Rp. 33.740.000,- dengan realisasi Rp. 33.465.000,- atau 99,18%. Adapun jumlah yang mengikuti praktek belajar kerja bagi anak cacat, anak terlantar dan jalanan adalah sebagai berikut :

- 1) Pelatihan di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Pekanbaru 9 orang
  - 2) Pelatihan PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) Tengku Yuk Pekanbaru 6 orang
- b) Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 106.705.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 97.699.000,- atau 91,56% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya bantuan kepada korban bencana. Yang mengalami korban bencana selama tahun ini sebanyak 71 KK dengan rincian jumlah korban bencana kebakaran rumah di Kota Dumai yang ditangani sebanyak 68 KK dengan 16 kali kebakaran di Kota Dumai selama tahun 2016, sedangkan 3 KK adalah korban angin puting beliung yang terjadi 1 kali dalam setahun.

- c) Kegiatan Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 186.419.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 185.963.000,- atau 99,76% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai, dimana selama tahun ini mengirimkan 38 kasus ke Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

- d) Fasilitasi beras bagi keluarga kurang mampu dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.287.975.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.286.225.000,- Atau 99,95% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah raskin yang tersalurkan kepada masyarakat miskin. Penerima raskin Kota Dumai tahun ini sebanyak 9.423 KK dengan beras yang diterima seberat 15 kg/bulan.

- e) Kegiatan Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE) dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 51.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51.225.885,- Atau 99,66% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya usaha bagi keluarga miskin. Tujuan utama kegiatan ini adalah pendampingan terhadap kelompok penerima usaha bersama yang langsung menerima bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-/kelompok dari Kementroan Sosial RI.

Kegiatan Fasilitasi penanganan perlindungan sosial pekerja migran dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 74.709.786,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 63.600.000,- Atau 85,13% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan penanganan TKI bermasalah dan orang terlantar.

### 3. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 183.408.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 175.345.146,- atau 95,60% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jomo  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 129.012.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 124.141.999,- Atau 96,23% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelatihan khusus bagi penghuni panti asuhan/jompo yang tujuan utama kegiatan jamboree panti seKota Dumai.

b) Fasilitasi peralatan pendidikan anak panti  
Jumlah alokasi dana sebesar Rp. 54.396.000,- dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 51.203.147,- atau setara 94,13% dari anggaran. Adapun indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar anak asuh panti asuhan, berupa alat tulis untuk anak-anak panti asuhan.

4. Program Pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks. narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial)

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 154.832.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 154.626.700,- atau 99,87% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.190.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.190.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terkirimnya pecandu narkoba ke panti rehabilitasi dengan tujuan utama kegiatan ini adalah terbebasnya dan mandiriya korban pecandu narkoba.

b) Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial dengan  
Jumlah anggaran Rp. 136.642.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 136.436.700,- atau 99,85% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah gelandangan, pengemis yang dipulangkan ke tempat asalnya.

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 239.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 235.026.886,- atau 97,95% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 75.709.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.838.999,- Atau 96,21% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya kepedulian dan rasa empati masyarakat kepada kaum lansia dan kaum kurang beruntung dan tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatnya peran masyarakat serta kepedulian menangani masalah.

**b) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 164.241.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 162.187.887,- atau 98,75% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya peningkatan kinerja TKSK, PSM dan Karang Taruna Kota Dumai. Adapun penghargaan yang diperoleh dapat dilihat dengan penghargaan yang diperoleh Dinas Sosial Kota Dumai sebagai berikut :

1. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2010 Peringkat 3 an. ARNITA.
2. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2011 Peringkat 7 an. YUSI YANTI.
3. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2012 Peringkat 3 an. MURTIANINGSIH.
4. ORSOS (Organisasi Sosial) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2012 a.n Yayasan Hidayatullah
5. Peringkat 1 Karang Taruna berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2012 Kel. Teluk Makmur.
6. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2014 Peringkat 1 an. NASRI BUTAR-BUTAR.
7. ORSOS (Organisasi Sosial) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2010 Peringkat 1an. Yayasan Halimahtussa'diah Muhammadiyah.
8. Peringkat 1 Karang Taruna berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2010 Kel. Sukajadi.
9. TKSK berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2014 Peringkat 4 an. ARNITA.
10. Peringkat 1 Tk. Nasional Tahun 2014 an. SUPARJIH Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial.

## 11. URUSAN WAJIB TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib Ketenagakerjaan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 37

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi sampai tahun 2016	Capaian (dalam %)
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	112 orang	112 orang	100%
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	1.200 orang	1.200 orang	100%
Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	1 dokumen	1 dokumen	100%
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	12 kasus	12 kasus	100%
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 perusahaan	216 perusahaan	100%
Jumlah pelayanan dan penyuluhan bagi warga transmigrasi	0 KK	0 KK	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

### 1. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan

Pelatihan adalah merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia, yang lebih mengarah pada mencerdaskan masyarakat dengan memberikan keterampilan agar lebih produktivitas dan mampu memanfaatkan peluang kerja yang tersedia

Sulitnya memperoleh pekerjaan adalah disebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan bagi pencari kerja,

untuk itu Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada TA 2016 mengadakan pelatihan sebanyak 112 orang

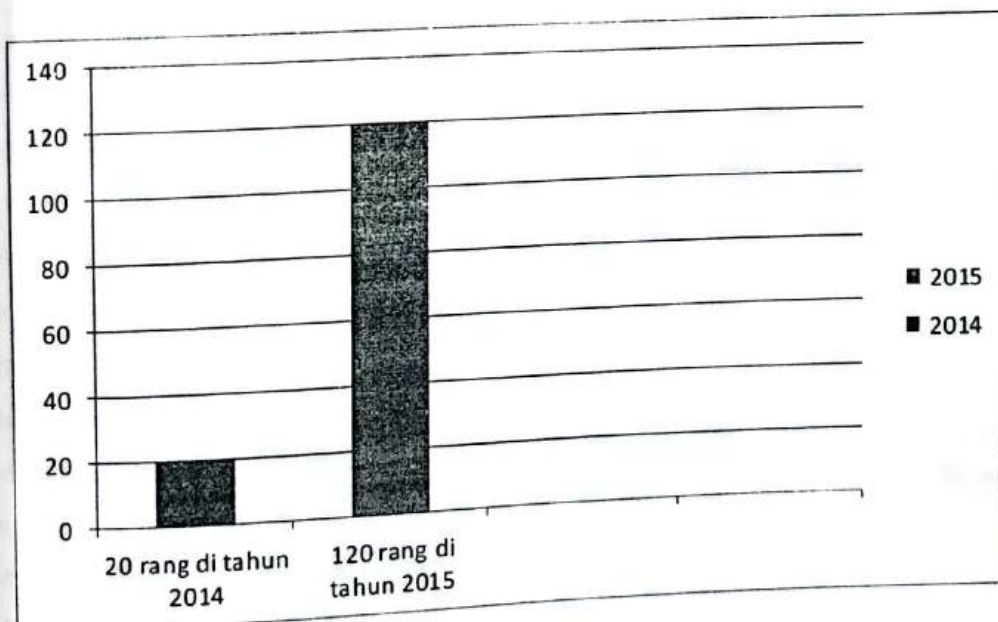
- Pelatihan Sertifikasi Welder Angkatan I sebanyak 16 org
- Pelatihan Welder Angkatan II sebanyak 16 org (yang belum dilaksanakan)
- Pelatihan Sertifikasi Boiler sebanyak 16 org (yang belum dilaksanakan)
- Pelatihan Salon dan Tata Rias sebanyak 16 org
- Pelatihan Instalasi Listrik sebanyak 16 org
- Pelatihan menjahit sebanyak 16 org
- Pelatihan Bordir sebanyak 16 org
- pelatihan kewirausahaan di tahun 2016 pelaksanaan sebanyak 4 Kelurahan, kelurahan Bintang ( 40 orang ) Kelurahan Jaya Mukti ( 20 orang) Kelurahan Tanjung Penyebel (20 orang ) Kelurahan Pangkalan Sesai ( 20 orang ) dan Dharmawanita ( 20 orang ) ,

- pelatihan kewirausahaan di Tahun 2016 adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa usaha mandiri dalam mengembangkan usaha mikro dengan sistim manajemen terpadu sebanyak 20 orang dan Terapan Teknologi Tepat Guna di kelurahan Basilam baru dan Kecamatan Bukit Kapur dengan kegiatan pengadaan air bersih sebanyak 40 org

**JUMLAH PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2014 S/D 2016**



**Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan**



- Besaran tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan  
 Saat ini ketenagakerjaan menjadi penting untuk diketahui, baik bagi tenaga kerja maupun bagi perusahaan sebagai pemberikerja.  
 Di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerjamempunyai peranan

dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Keternagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, dan sesudah masa kerja. Untuk itu perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih menjadi permasalahan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia.

**Tabel 4. 38 Perkembangan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2014 s/d 2016**

NO	Tahun	Pencari Kerja	Lowongan yang Ada	Penempatan Tenaga Kerja
1	2014	4.550	1.308	1.308
2	2015	5.218	1.053	1.053
3	2016	5.169	2.156	2.156

**b. Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja**

Mengumpulkan dan meneliti data hasil antar kerja (data pencari kerja, lowongan kerja, penempatan tenaga kerja), mengatur dan menyusun data dalam kelompok umur, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, dan sektor lapangan usaha.

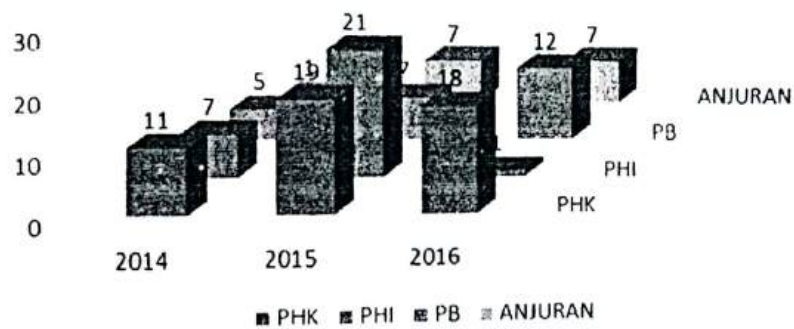
Pemberi kerja wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Informasi lowongan pekerjaan memuat Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan; Jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian, pengalaman kerja dan syarat-syarat lain yang diperlukan, Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan seleksi calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan untuk itu perlu diadakannya sosialisasi BKOL (Bursa Kerja Online) mengenai Kepmenaker 07 /MEN/IV/2008 dan Kep Dirjen Nomor : 251/DPPTK/IX/2008, KEP DIRJEN 258//DPPTK/IX/2008

**c. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)**

Semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah secara Bipartit, apabila perundingan mencapai persetujuan atau kesepakatan, maka persetujuan bersama (PB) tersebut di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan ticlak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak mencatatkan

persel isihannya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota. Salah satu persyaratan yang mutlak dalam pencatatan tersebut adalah bukti atau risalah perundingan Bipartit (Pasal 3), apabila bukti perundingan tidak ada, maka pencatatannya ditolak selanjutnya diberi waktu 30 hari untuk melakukan perundingan Bipartit, jika perundingan menghasilkan kesepakatan (damai) maka akan dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang akan dicatatkan ke PHI, jika tidak menemui kesepakatan dengan bukti/risalah perundingan yang lengkap, maka kepada para pihak ditawarkan tenaga penyelesaian perselisihan apakah melalui Konsiliator atau Arbitrase, jika para pihak tidak memilih atau justru memilik mediasi maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dalam forum mediasi.

GRAFIK KASUS PHI, PHK, PB, ANJURAN DARI TAHUN 2014 - 2015-2016



d. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

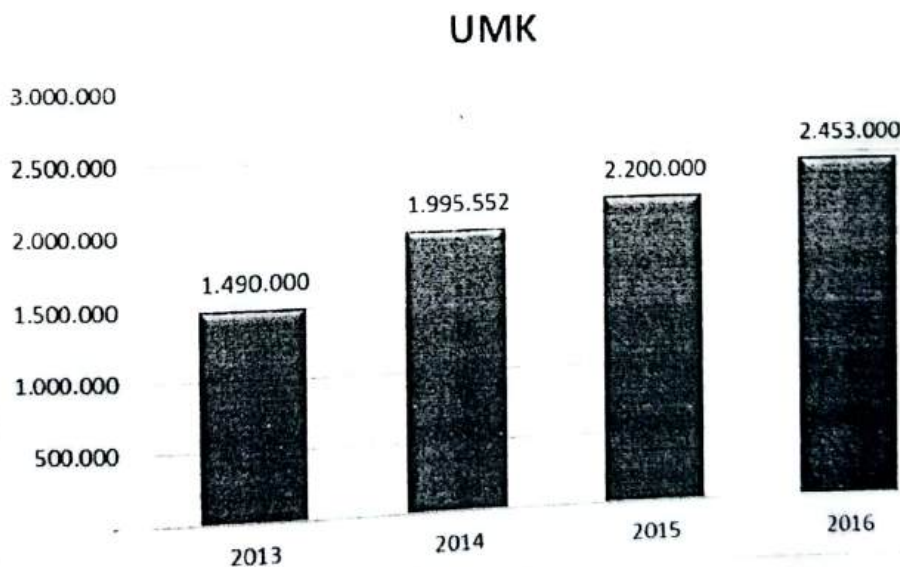
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU pengawasan perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1984 tentang pengawasan Ketenagakerjaan juga tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan dan juga UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO serta No. 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, pelaksanaan pengawasan bertujuan:

- Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif daripada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas.
- Mengumpulkan bahan-bahan keterangan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Sementara itu dari seluruh norma ketenagakerjaan tersebut diberlakukan bagi objek pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi antara lain perusahaan, pekerja, mesin, peralatan, pesawat, bahan instalasi dan lingkungan

GRAFIK. PERSENTASE KANAIKAN UPAH MINIMUM KOTA DALAM 1 TAHUN 2013-2016



- e. Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi
- Pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik, semula hanya diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Tercapainya indikator kegiatan akan mengakibatkan tercapai pula target kinerja program yang telah dirumuskan, yang selanjutnya akan berdampak terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam 2 (dua) urusan, namun di tahun anggaran 2016 program/ kegiatan yang

ada dibidang ketransmigrasian tidak dapat dilaksanakan berkenaan masa pembinaan dan pengembangan yang di anggarkan melalui Dana APBN (tugas Pembantuan ) sudah tidak ada lagi, target pembinaan dan pengembangan hanya 5 (lima) tahun pelaksanaan oleh Depnakertrans RI

Lahan transmigrasi telah dibentuk pada tahun 2008, peningkatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi. tahun 2014 adapun kegiatan yang dilaksanakan adanya pembagian lahan usaha II dikampung bayang tianjung secara manual untuk 250 KK , Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koat Dumai melaksanakan kegiatan berupa Bantuan Honor Guru Bantu untuk 5 orang dan Pengadaan Kontruksi Jembatan Ukr. 4 x 6 M.

Adapun Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dengan Jumlah 4 program dan 10 kegiatan di Tahun Anggaran 2016 dengan 2 (dua) urusana sebabagai berikut :

#### **A. Urusan Tenaga Kerja**

##### **1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.259.812.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.256.248.836,- atau 99,67%. Indikator Hasil adalah meningkatnya keterampilan Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 132 orang dan terealisasi 132 oranga atau 100%, Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

###### *1) Peningkatan Profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK*

Jumlah anggaran kegiatan yang dilaksanakan di perubahan sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 96.855.876, - atau 97% dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Peningkatan Profesionalisme tenag instruktur lembaga swasta melalui Training Of Trainer (TOT) sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%.  
.Meningkatnya pemahaman pelatihan terhadap instruktur lembaga swasta

###### *2) Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.159.812.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.159.392.960- atau 99% dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah peserta pelatihan sebanyak 112 orang dan terealisasi sebanyak 112 orang atau 100%  
Menigkatnya keterampilan Pencari Kerja seperti Pelatihan Welder angkata I,

Welder angkatan II, Pesawat Uap/ Boiler, Salon dan Tata Rias, Menjahit, Bordir, Instalasi Listrik

**2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 413.683.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 412.549.393,- atau 99,73%. Indikator hasil program adalah Besaran penyebarluasan informasi tenaga kerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%, Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kesempatan Kerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) *Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 82.036.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 81.226.293,- atau 99 % dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Data Lowongan Kerja dan Monev sebanyak 77 Perusahaan dan terealisasi sebanyak 77 Perusahaan atau 100 %. Meningkatnya Pemahaman Perusahaan dalam menerapkan UU Nomor 39 Tahun 2004

b) *Penyebarluasan Informasi Busra Tenaga Kerja*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.100.888.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp .100.886.000,- atau 100 % dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Web Sistem Online (BKOL) sebanyak 1 Web Sosialisasi BKOL (Bursa Kerja Online) mengenai Kepmenaker 07 /MEN/IV/2008 dan Kep Dirjen Nomor : 251/DPPTK/IX/2008, KEP DIRJEN 258//DPPTK/IX/2008 dengan realisasi 100%.

c) *Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 230.759.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 230.437.100,- atau 99 % dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Wirausaha Baru sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100% . Meningkatkan wirausaha melalui pengembangan kewirausahaan guna pengembangan penghidupan berkelanjutan dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan dan ekonomi kreatif untuk 20 orang (Pelatihan Hidroponik).

**3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 399.413.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 398.121.500 atau 99,68 %. Indikator hasil program adalah meningkatnya pembinaan LKS tripartit dan LKS Tripartit sebanyak 50 orang dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 12 kasus dan

teralisasi 100% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) *Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 96.572.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 95.501.500,- atau 98 % dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Panitia Pembinaan LKS Tripartit dan LKS Tripartit Baru sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang atau 100% meningkatnya hubungan LKS tripartit yang profesional

2) *Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- atau 100 % dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang diberikan sosialisasi sebanyak 100 orang Permenaker No.19 Tahun 2012 tentang outsourcing Permenaker No.29 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan dengan realisasi 100%

3) *Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 152.886.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 152.620.000,- atau 99% dari anggaran, adapun Indikator persentase memperingati bulan K3 Nasional dan hari Buruh (May Day ) dengan realisasi 100%

4. **Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 181.102.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 180.502.500 atau 99.67% indikator hasil program adalah Besar Pemeriksaan Perusahaan sebanyak 216 perusahaan yang menerapkan UU Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 atau 100% terealisasi , Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut

1) *Pelaksanaan Pengumpulan Data KHL Kota Dumai*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 35.220.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 35.220.500,- atau 100% dari anggaran, adapun Indikator Survey Komponen Kebutuhan Hidup Layak sebanyak 60 Jenis dan terealisasi sebanyak 60 Jenis atau 100% . komponen kebutuhan hidup layak untuk penetapan UMK Dumai

2) *Pembinaan Dewan Pengupahan*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 145.882.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 145.282.000 atau 99% dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah sidang/ rapat Dewan Pengupahan Dumai sebanyak 5 kali sidang/rapat dan terealisasi sebanyak 5 Kali. Penetapan UMK Dumai.

12 **URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS KOPERASI, UKM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

*Tabel 4. 39*  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2016**

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi tahun 2015	Capaian (dalam %)
Jumlah Koperasi yang aktif	138 koperasi	147 koperasi	106,52%
Jumlah UMKM Aktif yang dibina	700 UMKM	700 UMKM	100
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	236 PKK	132 PKK	56
PKK Aktif	41 PKK	41 PKK	100
Posyandu Aktif	241 Posyandu	195 Posyandu	81

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran di Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

- a) Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah Koperasi yang aktif, yang mana kondisi akhir jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 138 koperasi, dimana pada tahun 2016 realisasi sampai dengan tahun 2016 sebesar 147 koperasi, sehingga capaian sebesar 106,52%. Dalam hal ini, peningkatan koperasi aktif disebabkan dari hasil pendampingan, pembinaan dan pengawasan terjadi peningkatan koperasi, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan diketahui bahwa dari jumlah koperasi sebanyak 272 terdapat 147 koperasi aktif (54,04%) dan 125 koperasi tidak aktif (45,96 %).
- b) Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah UMKM aktif yang dibina, yang mana kondisi akhir Jumlah UMKM aktif yang dibina pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 700 UKM dimana pada tahun 2016 realisasi sampai dengan tahun 2016 sebesar 700 UKM sehingga capaian

sebesar 100%. Dalam hal ini, peningkatan jumlah usaha kecil menengah disebabkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana tahun 2016 jumlah keseluruhan usaha kecil menengah sebesar 12.497 UMKM mengalami kenaikan sebesar 700 UKM.

c) Pencapaian indikator kinerja sasaran rata-rata jumlah kelompok binaan pkk, yang mana kondisi akhir rata-rata jumlah kelompok binaan pkk pada tahun 2016 realisasinya sebanyak 236 kelompok binaan pkk, dimana pada tahun 2016 realisasinya sebanyak 132 kelompok binaan pkk, sehingga capaian sebesar 56%. Dalam hal ini rata-rata kelompok binaan PKK telah melaksanakan pembinaan-pembinaan di 7 (tujuh) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan di Kota Dumai.

d) Pencapaian indikator kinerja sasaran PKK aktif, yang mana kondisi akhir PKK aktif pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 41 PKK, dimana pada tahun 2016 realisasinya sampai dengan tahun 2016 sebanyak 41 PKK, sehingga capaian sebesar 100%.

Dalam hal ini, seluruh PKK aktif berdiri di kota Dumai melakukan pembinaan – pembinaan di 7 kecamatan dan 33 kelurahan serta PKK melaksanakan kegiatan seperti : Jambore PKK tingkat Nasional dan Kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang diadakan di Sulawesi Selatan (Manado).

e) Pencapaian indikator kinerja sasaran Posyandu aktif, yang mana kondisi akhir Posyandu aktif pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 241 posyandu, dimana pada tahun 2016 realisasi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 195 posyandu, sehingga capaian sebesar 81%.

Dalam hal ini, tercapainya posyandu aktif dikarenakan telah melakukan pelatih kader-kader posyandu yang terampil dan memiliki motivasi yang tinggi dalam pelayanan posyandu di Kota Dumai.

Anggaran Belanja Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.536.144.720,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.371.644.720,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.984.500.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.230.283.025,- atau terserap 95,81% dan belanja langsung terserap Rp. 3.733.376.134,- atau 93,70%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.359.069.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.339.280.916,00 atau 94,49% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah,

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.226.351.500,00 realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.225.225.916.00 atau 99,50%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya penyusunan regulasi pengembangan UMKM tahun 2016. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan Kebijakan tentang UMKM melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap UMKM serta melakukan pendataan UMKM di 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Dumai dengan harapan kedepan adanya inovasi baru dalam menciptakan produk-produk UMKM yang berkualitas dan mampu bersaing dipasaran.

Dimana jumlah UMKM di Kota Dumai pada tahun 2016 sejumlah 8.496 UMKM meningkat sebesar 700 UMKM atau 7.82% bila dibandingkan dengan 2015 yaitu 8.246 UMKM.

b) **Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah,**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.132.717.5000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.114055.000,00 atau 85,94%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan UMKM yang produktif disetiap Kecamatan.

2. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.226.331.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.176.120.584,00 atau 77,82% yang alokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) **Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi,**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.226.331.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.176.120.584,00 atau 77,82%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya fasilitasi Promosi UMKM pada Pameran dan Promosi Luar Daerah dengan mengikuti 2 (dua) pameran yang diikuti 10 UMKM dengan mengirim peserta pelaku UMKM untuk promosi hasil produksi produk unggulan UMKM Kota Dumai.

3. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.517.980.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.516.876.100,00 atau 99,79% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) **Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi,**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.314.328.400,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.313.909.700,00 atau 99,87%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap 70

koperasi di Kota Dumai dan 3 Koperasi berprestasi dengan realisasi 100%.

Sehubungan hal tersebut, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan diketahui bahwa dari jumlah koperasi pada tahun 2016 sebanyak 272 terdapat 147 koperasi aktif (54,04%) dan 125 koperasi tidak aktif (45,95%) jika dibanding tahun 2015 jumlah koperasi 257 terjadi kenaikan koperasi dikarenakan adanya pemahaman pengurus dan anggota koperasi tentang perkoperasian serta koperasi telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dan ada juga rencana pembubaran koperasi pada tahun 2016 sebanyak 90 koperasi.

b) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.70.228.300,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.69.852.300,00 atau 99,46%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap 30 koperasi yang produktif di Kota Dumai dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Dinas Koperasi, UKM dan PM Kota Dumai.

c) Pelatihan Penyusunan Laporan dan Neraca Koperasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.69,470,600.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah 69,250,600.00 atau 99,68%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pelatihan penyusunan Laporan dan Neraca Keuangan bagi 30 orang pengurus koperasi serta mendapat bimbingan penyusunan laporan dan neraca koperasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan / pemahaman pengurus koperasi dalam membuat laporan dan neraca keuangan koperasi.

d) Rapat Koordinasi Koperasi Se-Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.63,953,500.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.63,863,500.00 atau 99,86%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Koperasi Kota Dumai bagi 50 orang yang mengikuti, sehingga terkoordinasinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi untuk ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas koperasi di Kota Dumai.

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.450,000,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.444,049,000.00 atau 98.68% yang alokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.450,000,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.444,049,000.00 atau 98.68%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK) Kota Dumai. Kegiatan PKK ini dilaksanakan untuk peningkatan

kapasitas kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Kota Dumai melalui pembinaan-pembinaan untuk PKK yang berada di 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan.

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 222,526,200.00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.200,610,200.00 atau 90.15% yang alokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.222,526,200.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.200,610,200.00 atau 90.15%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan dan program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan terhadap 33 UEK-SP.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi telah diikutsertakan Dinas/Instansi terkait, koordinasi daerah dan pendamping kelurahan untuk UEK-SP serta melakukan Rapat Evaluasi Kinerja UEK-SP yang diikuti sebanyak 100 orang peserta.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.538,116,485,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.532,872,780,00 atau 99.02%. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.244,130,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.242,693,000.00 atau 99.41%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2016.

b) Gelar Teknologi Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.110,217,350.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.106,672,349.00 atau 96.78%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersosialisasinya informasi dan edukasi teknologi tepat guna dengan terlaksananya sosialisasi Posyantek bagi 80 orang peserta.

c) Lomba Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.183,769,135.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.183,507,431.00 atau 99.86%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya lomba kelurahan tingkat Kota Dumai

Tahun 2016 dengan realisasi 100%.

Perlombaan kelurahan dilakukan untuk menilai keberhasilan pembangunan yang ada di kelurahan yang dilakukan secara teratur, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di kelurahan maka diadakannya perlombaan kelurahan.

### 13. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan RPJMD Kota Dumai tahun 2016 - 2021 urusan wajib kebudayaan, Pemuda dan Olahraga maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

*Tabel 4. 40*  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kinerja 2016	Realisasi sampai tahun 2016	Capaian (dalam %)
Jumlah grup kesenian	40 grup	35 grup	87
Jumlah gedung kesenian	1 gedung	0 gedung	0
Jumlah klub olahraga	112 klub	0 klub	0

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga meliputi :

a) Jumlah Grup Kesenian

Partisipasi masyarakat dalam mengemban ragam budaya demi menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya yang ada di Kota Dumai. Dengan partisipasi dimaksud diharapkan seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam organisasi seni budaya dapat berinteraksi dengan budaya tempatan sehingga menimbulkan feedback antara masyarakat dan pemerintah. Capaian kinerja tahun 2016 terdapat 40 grup kesenian sedang realisasi sampai tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 35 grup kesenian yang mengikuti kegiatan seni budaya.

b) Jumlah gedung kesenian

Untuk tahun 2016 indikator kinerja sasaran jumlah gedung kesenian realisasinya 0 belum tersedianya gedung kesenian dimana kegiatan kesenian dilaksanakan dipanggung lapangan bukit gelanggang.

c) Jumlah klub olahraga

Dalam meningkatkan prestasi olahraga, perlu didukung dengan pembinaan yang terstruktur

dan berkesinambungan, terutama untuk membina mental dan memupuk bakat-bakat yang ada. Dalam rangkaian tersebut, dukungan klub-klub olahraga akan sangat membantu untuk menciptakan bibit-bibit pemuda yang berprestasi dibidang olahraga. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tercatat 112 klub olahraga. Untuk kegiatan pada tahun 2016 realisasinya 0.

Untuk mewujudkan sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah menyusun program kerja yang telah ditetapkan terdiri dari program pokok yang akan menjadi inti dari pembangunan kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016.

Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kota Dumai pada tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.183.156.050,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 270.616.050,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.662.540.000,-. Untuk realisasi belanja langsung menjadi Rp. 3.388.134.678,- atau terserap 96,24% dan belanja langsung terserap Rp. 6.495.471.854,- atau 97,49%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

#### 1. Program Pengembangan Nilai Budaya

##### a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah sebesar Rp. 177.050.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 177.050.000,- atau 100 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah festival budaya yang diselenggarakan yaitu Festival Lampu Colok. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas, menjalin persahabatan, dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas, menjalin persahabatan, kekompakan, komunikasi pemuda tempatan dan menggalang silaturahmi antar suku di Kota Dumai untuk terciptanya masyarakat yang aman dan madani. Adapun pemenangnya Juara I Kelompok Budak Melayu Cemerlang Kelurahan Mundam, Juara II Kelompok Cahaya Teluk Makmur Kelurahan Teluk Makmur, Juara III Kelompok Remaja Puak Bersatu Kelurahan Teluk Makmur, Harapan I Kelompok Al Amin Kelurahan Jayamukti, Harapan II Kelompok Remaja Mesjid Taufiqiyah Kelurahan Dumai Kota, Harapan III Kelompok Ikatan Pemuda Teratai Dumai Kelurahan Dumai Kota, Hiburan I Kelompok Lampu Colok Kelurahan Pelintung, Hiburan II Kelompok Pemuda Mesjid Kelurahan Tanjung Palas, Hiburan III Kelompok Himpunan Remaja Kreatif Dang Merdu Kelurahan Bukit Timah, Hiburan IV Kelompok Ikatan Pemuda Colok Ramadhan Kelurahan Jayamukti, Hiburan V Kelompok Remaja Mesjid Nurul Islam Kelurahan Purnama.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- a) Kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan dibidang budaya jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 718.610.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 718.010.000,- atau 99,9% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah even budaya yang diselenggarakan yaitu Panggung Seni Rakyat dalam rangka HUT Kota Dumai dan Malam Resepsi dan Kenegaraan dalam rangka HUT RI serta Pagelaran Seni dengan realisasi sebesar 100 %.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- a) Kegiatan penyelenggaraan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 199.889.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 197.740.000,- atau 98,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tim kesenian yang mengikuti malam kesenian dalam rangka Rakernas Walikota se Indonesia. Yaitu berupa kegiatan malam kesenian dalam rangka Apeksi di Kota Jambi Tahun 2016. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100%.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- a) Seleksi dan Pembinaan PASKIBRAKA  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 587.590.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 584.458.000,- atau 99,47% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta seleksi PASKIBRAKA tingkat Kota Dumai dan Tingkat Provinsi Riau. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100%.

5. Program Pembinaan dan Permasalahatan Olahraga

- a) Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 175.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 166.176.000,- Atau 94,69% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan dengan realisasi sebesar 100 %.

- b) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- Atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan pelaksanaan senam jasmani dengan realisasi sebesar 100 %.

- c) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 112.521.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 112.521.000,- Atau 100% dari

anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pertandingan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kota Dumai dan HUT Kemerdekaan RI dengan realisasi sebesar 100 %.

d) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 548.754.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 546.130.000,- Atau 100 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah cabang olahraga yang diikuti, cabang olahraga yang diikuti sebanyak 9 cabang dengan realisasi sebesar 100 %.

e) Peningkatan Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 420.107.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 414.260.270,- Atau 98,61 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta marching band yang dilatih dengan realisasi sebesar 100 %.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi waktu yang tidak memungkinkan.

## 14. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

## a. BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Wajib Pemerintahan Umum dan Urusan Wajib Penanaman Modal, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

*Tabel 4. 41*  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kinerja 2016	Realisasi sampai tahun 2016	Capaian (dalam %)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	72	75,59	105
Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp. 251.751.131.121.062,-	Rp. 257.314.633.379.132,-	102,21

Sumber : Badan Pelayanan Terpadu Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan Indikator pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

## a) Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 adalah sebesar 72, capaian pada tahun 2016 adalah sebesar 75,59 (masuk dalam kategori kinerja "BAIK") atau tercapai sebesar 105% dari target yang telah ditetapkan.

## b) Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Investasi PMA dan PMDN

Target Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun 2016 adalah Rp. 251.751.131.121.062, capaian pada tahun 2016 adalah Rp. 257.314.633.379.132,- atau sebesar 102,21% dari target yang ditetapkan. Realisasi investasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 251.751.131.121.062,-. Target pada tahun 2016 sebesar Rp. 251.751.131.121.062,-. Realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 5.563.502.258.070 dengan akumulasi Nilai Investasi PMA dan PMDN menjadi Rp. 257.314.633.379.132 . Realisasi investasi tersebut berdasarkan data LKPM dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai memperoleh Investment Award pada tahun 2016 yaitu peringkat Pertama untuk kategori Nilai Investasi Penanaman Modal Asing dan peringkat Harapan I untuk kategori Kabupaten/Kota Investasi Terbaik.

Anggaran Belanja Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.862.729.880,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.169.449.880,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.693.280.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.685.225.757,- atau terserap 88,39 % dan belanja langsung terserap Rp. 4.461.612.070,- atau 95,06 %.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 899.728.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 874.262.900,00 atau 97.17%. Indikator Kinerja Hasil Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi adalah jumlah investor berskala nasional dengan target sebanyak 129 investor tercapai sebanyak 147 investor atau 113,9 %. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Indikator kinerja keluaran yaitu tersedianya informasi potensi peluang investasi unggulan di Kota Dumai sebanyak 2 kegiatan dengan capaian 2 kegiatan atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 41.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.778.000,- atau sebesar 99,57%

b) Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Penagawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja keluaran yaitu tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Dumai sebanyak 1 dokumen dengan capaian 1 dokumen atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 38.526.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.456.000,- atau sebesar 92,03%.

Kegiatan ini merupakan pengawasan dan pembinaan agar meningkatnya kesadaran investor untuk melaporkan LKPM sesuai periode yang telah ditentukan.

c) Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Indikator kinerja keluarannya yaitu terlaksananya fasilitasi kerjasama UMKM dengan usaha besar di Kota Dumai sebanyak 1 kegiatan dengan capaian sebanyak 1 kegiatan atau 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 65.892.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.670.000,- atau sebesar 95,11%.

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Indikator kinerja keluarannya yaitu jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan Pameran/seminar/rakor/presentasi investasi daerah sebanyak 3 event dengan capaian sebanyak 3 event atau 100%. Hal ini diwujudkan dengan keikutsertaan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai dalam beberapa event pameran/expo guna mempromosikan potensi investasinya dengan menampilkan produk-produk unggulan daerah dalam upaya meningkatkan inovasi dan kreativitas guna

mengoptimalkan pengembangan pembangunan serta meningkatkan nilai investasi daerah. Adapun pameran investasi pada Tahun 2016 yang diikuti Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Dumai Expo
2. Kaltim Expo
3. Riau MEA Expo

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 753.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 734.358.900,- atau sebesar 97,48%.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk pelaksanaan program pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 328.000.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 325.520.000,00 atau 99,24%.

Indikator Kinerja Hasil Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah optimalisasi pelayanan informasi perizinan selama 12 bulan dengan capaian selama 12 bulan atau 100%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Indikator kinerja keluarannya yaitu terlaksananya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan dan website Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai selama 12 bulan (1 tahun) dengan capaian selama 12 bulan atau 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 328.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 325.520.000,- atau sebesar 99,24%. Dengan adanya sistem informasi layanan publik tersebut memudahkan pengawasan terhadap izin yang akan dan telah diterbitkan serta memberikan informasi seluas-luasnya terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Untuk pelaksanaan program pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 739.620.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 727.943.800,00 atau 98,42%. Indikator Kinerja Hasil Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu yaitu optimalisasi pelayanan administrasi perizinan sebanyak 4.500 izin dengan capaian sebanyak 4.589 izin atau 101,9%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan terpadu adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Terpadu

Indikator kinerja keluarannya yaitu terlaksananya Sosialisasi perizinan dan non perizinan sebanyak 2 kegiatan dengan capaian sebanyak 2 kegiatan atau 100% yaitu penyusunan SOP dan sosialisasi di media cetak . Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.

200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.223.800,- atau sebesar 99,61%. Upaya untuk peningkatan pengurusan perizinan di Kota Dumai telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pelayanan terpadu antara lain berupa himbauan, sosialisasi standar pelayanan di media cetak.

b) Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Kinerja keluarannya yaitu Tim Koordinasi dan Tim Teknis Perizinan sebanyak 2 Tim dengan capaian sebanyak 2 tim atau 100%. Tim ini anggotanya terdiri dari instansi terkait dalam penerbitan perizinan sehingga izin yang diterbitkan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Dengan terbentuknya tim koordinasi ini maka memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 367.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 356.950.000,- atau sebesar 97,22%.

c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator kinerja keluarannya yaitu pemantauan terhadap izin yang telah diterbitkan selama 12 bulan (1 tahun) dengan capaian selama 12 bulan atau 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 172.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 171.770.000,- atau sebesar 99,59%.

**b. SEKRETARIAT DPRD**

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

**Tabel 4.42**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi s/d tahun 2016	Capaian (dalam %)
Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD	100%	64%	64

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Dumai

Adapun penjelasan dari indikator kinerja sasaran diatas sebagai berikut:

**Tabel 4.43**  
Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran di atas

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi s/d tahun 2016	Capaian (dalam %)
Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui menjadi peraturan daerah	13 perda	4 perda	30,77
Jumlah pembahasan KUA, pengkajian, penelaahan, pembahasan KUA-PPAS, RAPBD KUA-PPAS, RAPBD-P, laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD-P, laporan realisasi semester pertama beserta prognosis dan tindakan lanjut LHP BPK RI	3 Perda	3 Perda	100
Jumlah kabupaten/ kota yang dikunjungi anggota DPRD	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	100

1. Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui menjadi peraturan daerah.  
Target dari indikator sasaran ini yaitu bertambahnya jumlah ranperda yang disetujui menjadi perda, dengan sasaran adalah peningkatan jumlah ranperda menjadi perda. Kegiatan pendukung indikator ini yaitu kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah.
2. Jumlah pembahasan KUA, pengkajian, penelaahan, pembahasan KUA-PPAS, RAPBD KUA-PPAS, RAPBD-P, laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD-P, laporan realisasi semester pertama beserta prognosis dan tindakan lanjut LHP BPK RI.  
Target dari indikator ini yaitu terlaksananya pembahasan KUA pengkajian, penelaahan, pembahasan KUA-PPAS, RAPBD KUA-PPAS, RAPBD-P, laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD-P, laporan realisasi semester pertama beserta prognosis dan tindak lanjut LHP BPK RI dengan sasaran adalah peningkatan jumlah pembahasan sesuai fungsi anggaran DPRD. Kegiatan mendukung indikator ini yaitu kegiatan pembahasan KUA Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD KUA-PPAS, RAPBD-P, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD-P, laporan realisasi semester pertama beserta prognosis dan tindak lanjut LHP BPK RI.
3. Jumlah kabupaten/ kota yang dikunjungi anggota DPRD.  
Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kunjungan kerja komisi-komisi DPRD bersama SKPD terkait yang membidangi urusan sesuai dengan mitra kerja komisi. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kunjungan kerja komisi-komisi DPRD.

Keberhasilan dari beberapa indikator diatas disebabkan adanya dukungan dan kerja sama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD Kota Dumai, sedangkan kegagalan dari indikator kinerja sasaran pada kegiatan pembahasan Ranperda disebabkan oleh rentang waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak memadai dan beberapa Ranperda yang tidak bisa dilanjutkan karena berbenturan dengan aturan.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan pada tahun 2016 disampaikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - a) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - b) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama.
  - c) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
  - d) Rapat-rapat paripurna

- e) Kegiatan reses
- f) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
- g) Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD
- h) Penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung.
- i) Pengkajian, penelaahan, Pembahasan KUA - PPAS, RAPBD KUA - PPASP, RAPBD - P, laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APB, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis.
- j) Penyediaan alat kelengkapan DPRD.

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 27.478.788.590,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.906.938.590,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.571.850.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.789.822.514,- atau terserap 97,00 % dan belanja langsung terserap Rp. 18.477.691.395,- atau 78,39%.

Penanganan Bidang Pemerintahan Umum khususnya Sekretariat DPRD Kota Dumai pada tahun 2016, dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) program yaitu;

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini pada tahun 2016 yaitu :

a) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran Rp. 112.750.000,- atau 56,38%. Adapun indikator Kinerja Keluarannya adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan dengan target 80% (34 orang) dan terealisasi sebesar 73,53% ( 21 orang) dan tingkat capaian 91,91%.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp. 10.180.682.814,- dengan Realisasi Penyerapan anggaran Sebesar Rp. 7.590.066.213,- atau 74,55%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2016 adalah sebagai Berikut :

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.467.715.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran Rp. 2.220.691.681,- atau 64,04%. Adapun indikator Kinerja Keluarannya jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui menjadi peraturan daerah dengan target 13 ranperda dan terealisasi 4 perda.

b) Hearing/ Dialog dan Koordinasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 299.525.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 32.500.000,- atau 10,85%. Adapun Indikator jumlah pertemuan atau dialog dengan stakeholders bersama DPRD Kota Dumai dengan target 5 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan atau 20% dengan alasan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

c) Rapat Alat kelengkapan Dewan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 409.595.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 333.545.000,- atau 81,43%. Adapun indikator kinerjanya adalah jumlah alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan rapat dengan target 100% dan terealisasi 100%.

d) Rapat - rapat Paripurna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.309.350.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.089.200.000,- atau 83,19% adapun target indikator kinerja keluarannya adalah jumlah rapat paripurna DPRD Kota Dumai dengan target 27 paripurna dan terealisasi 27 paripurna atau 100%.

e) Kegiatan Reses

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.781.850.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.741.050.000,- atau 97,71% adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Dumai dengan realisasinya 3 kegiatan/ masa sidang anggota DPRD.

f) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 129.030.850,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 129.030.850,- atau 100% adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah anggota DPRD yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan tingkat capaian 100% dengan alasan terlaksananya seluruh kegiatan Bimtek Pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai

g) Kunjungan Kerja Komisi - komisi DPRD

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.560.000.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.203.280.922,- atau 77,13% adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah kabupaten/kota yang dikunjungi anggota DPRD Kota Dumai dengan target 9 kabupaten/ kota dengan tingkat capaian 9 kabupaten/ kota atau 100% dengan alasan terlaksananya seluruh kunjungan kerja komisi DPRD Kota Dumai.

h) Penyampaian Aspirasi masyarakat secara Langsung

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.525.000,- atau 37,03% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyerapan aspirasi masyarakat langsung kepada DPRD dengan target 12 kegiatan dengan realisasi 3 kegiatan dengan alasan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

i) Pengkajian, penelaahan, Pembahasan KUA - PPAS, RAPBD KUA - PPASP, RAPBD - P, laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APB, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.759.891.964,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.418.742.760,- atau 55,11% adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis dan tindak lanjut LHP BPK RI dengan target 3 perda dan realisasi 3 perda atau 100%.

j) Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.397.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 397.500.000,- atau 100%. Adapun indikatornya adalah jumlah tenaga ahli, staf tenaga ahli, fraksi-fraksi, tenaga ahli fraksi DPRD Kota Dumai dengan target 8 fraksi dengan realisasi 8 orang/ fraksi atau 100% dengan alasan terlaksananya tenaga ahli untuk seluruh fraksi.

Adapun Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah :

1. Masih kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Koordinasi dan komunikasi Antara Bagian lingkungan Sekretariat DPRD masih dirasakan belum optimal sehingga berimplikasi kesulitan memperoleh data yang diperlukan.

c. DINAS PENDAPATAN DAERAH

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendapatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.44  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendapatan Kota Dumai Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Kondisi Akhir Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian (Dalam %)
<b>Sasaran : Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>					
1	Ratio Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi	98.989.908.086,00	104.215.874.140,00	94.944.628.218,00	91,10
			5,28%	4,09%	
2	Ratio Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	29.450.000.000,00	32.948.660.000,00	34.656.081.391,00	105,18
			11,88%	17,68%	

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendapatan Kota Dumai Tahun 2016 disampaikan sebagai berikut:

**1. Indikator Ratio Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi**

Ratio persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -4,09% dari target capaian kondisi akhir Tahun 2016 sebesar 5,28%. Dimana Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah yang ada di Kota Dumai. Sementara dalam perhitungan indikator kinerja 1 (pertama) yaitu Ratio Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan pajak daerah dan retribusi daerah saja dengan target sebesar Rp 104.215.874.140,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 94.944.628.218,-. Persentase pencapaian realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2016 terhadap rencana target tahun 2016 sebesar 91,10%.

Untuk Dinas Pendapatan Kota Dumai pajak daerah dan retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 74.430.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 73.479.478.224,- atau 98,72% dari target semula. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target karena:

- 1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp 7.674.324.160,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 2.931.054.332,- atau 38,19% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan adalah karena rendahnya tingkat transaksi jual beli tanah di Tahun 2016.
- 2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp. 606.700.000,- dan realisasi

pencapaiannya sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari target semula. Faktor penghambat yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan ini adalah sebagai berikut :

- Adanya Surat Edaran dari Dirjend Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No, 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya melarang Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sampai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Mineral dan Batubara, dengan adanya surat edaran ini, maka Pemko Dumai belum bisa menerbitkan izin baru terhadap pengusaha Galian C, yang berimbas pada rendahnya penerimaan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini.

Namun tercapainya target pajak daerah dan retribusi daerah di luar BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam di Dinas Pendapatan Kota Dumai didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya telah mencapai target, yaitu :

- Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai
- Pemeliharaan SIMPATDA
- Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk Kantor Pelayanan Pasar dimana Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp 715.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 569.443.000,- atau 79,64% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah karena:

- Kantor Pelayanan Pasar tidak memiliki kewenangan di pasar swasta
- Pasar binaan pemerintah seperti Pasar kelakap Tujuh dalam kondisi belum aktif

Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Alat-Alat Berat ditargetkan sebesar Rp 300.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 211.600.000,- atau 70,53% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah karena:

- Banyaknya alat berat yang dipakai untuk kegiatan sosial masyarakat dan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target penyewaan alat berat.
- Adanya kerusakan pada beberapa unit alat berat yang mengakibatkan alat berat tersebut tidak bisa beroperasi secara maksimal (perlu nya tambahan alat berat baru)

Untuk Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp 419.640.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 410.175.000,- atau 97.74% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain :

- Retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan pembayarannya dilakukan sekali setahun, sehingga masyarakat/ toko akan membayar retribusi menjelang akhir tahun
- Beberapa obyek retribusi tidak bersedia membayar retribusi karena sampahnya dikelola atau dibuang sendiri
- Belum diterapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2012

Untuk Dinas Perhubungan yang pendapatannya terdiri dari:

- 1) Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 32.500.000,- atau 4,33% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini karena belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
- 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp 1.086.090.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 535.797.200,- atau 49,33% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan antar lain disebabkan:
  - Masyarakat luas belum ada kesadaran untuk andil dalam melakukan uji emisi kendaraan penumpang yang tidak dijasakan dan sepeda motor.
  - Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus Uji KIR.
  - Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Dumai belum mempunyai kerjasama yang kongkrit seperti penundaan perpanjangan STNK apabila wajib pajak belum melakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraannya.

- Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khususnya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan yang tidak dijasakan.
  - Kondisi Peralatan Uji yang tidak baik sehingga menyulitkan untuk melakukan implementasi Emisi Gas Buang Kendaraan dengan cara jemput bola ke pemilik kendaraan.
- 3) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp 548.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 14.180.000,- atau 2,59% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena :
- Tempat Khusus Parkir RSUD tidak mencapai target
  - Tempat Khusus Parkir UPT AKAP / Penumpang tidak mencapai target
  - Tempat Khusus Parkir Bukit Gelanggang tidak tercapai target
- 4) Retribusi Jasa Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp 205.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 135.715.099,- atau 66,20% dari target semula. Retribusi Jasa Kepelabuhan ini meliputi :
- a. Jasa Tiket Penumpang (Perusahaan Pelayaran) target sebesar Rp 120.000.000,- realisasi sebesar Rp 118.545.400,- atau 98,79%
  - b. Jasa Dermaga target sebesar Rp 85.000.000,- realisasi sebesar Rp 15.611.699,- atau 18,37%
- Faktor pendorong tidak tercapainya target penerimaan ini adalah :
- Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat menggunakan transportasi penyebrangan (roro)
  - Dinas Perhubungan telah membuat kontrak dengan CV. Mundam sejahtera dalam pengelolaan dermaga untuk meminta rekomendasi izin dari KSOP, namun tidak mendapat izin tersebut.
  - Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 bahwa jasa labuh disetor ke kas negara melalui KSOP
- 5) Retribusi Izin Trayek ditargetkan sebesar Rp 2.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 940.000,- atau 47% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah menurunnya tingkat pengurusan izin angkutan kota.
- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, yang pendapatannya terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp 30.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 13.200.000,- atau 44,00% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain :

- Pemotongan ternak belum seluruhnya dilakukan di Rumah Potong Hewan di Bagan Besar.
- Harga sapi yang masih tinggi

b. Retribusi Pabrik Es Balok ditargetkan sebesar Rp 310.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 215.160.000,- atau 69,41% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah alat mengalami kerusakan dan karena berkurangnya aktivitas nelayan dan pedagang-pedagang akibat kondisi perekonomian yang dipengaruhi kenaikan harga-harga yang berimbas menurunnya jumlah produksi Es Balok

c. Retribusi Bibit Ikan, Benih Ikan ditargetkan sebesar Rp 60.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 35.452.900,- atau 59,09% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah akibat perubahan musim sehingga pembibitan/ benih ikan tidak berhasil.

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, R Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan sebesar Rp 8.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 4.488.034.000,- atau 56,10% dari target semula. Faktor pendorong tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan:

- Adanya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal 24 ayat 4, yang mana Pemerintah atau Pemerintah daerah tidak memberikan/menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang sebelum RTRW ditetapkan, namun Pemerintah Kota Dumai menerbitkan surat izin mendirikan bangunan sementara pada triwulan ke IV.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Retribusi Workshop Konveksi ditargetkan sebesar Rp 14.400.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.200.000,- atau 8,33% dari target semula Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:

- Belum adanya minat IKM Konveksi untuk menyewa workshop konveksi dikarenakan:
  - Terbatasnya modal usaha
  - Mahalnya upah tenaga kerja sehingga menyulitkan IKM untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang konveksi
  - Letak UPT BLI yang cukup jauh dari pusat kota
  - Sebagian alat rusak

## 2. Indikator Ratio Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Ratio persentase peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 17,68% dibanding target capaian kondisi akhir tahun 2016 sebesar 11,88%. Dimana perhitungan indikator kinerja 2 (kedua) yaitu Ratio Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan target sebesar Rp 32.948.660.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 34.656.081.391,-. Persentase pencapaian realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2016 terhadap rencana target tahun 2016 sebesar 105,18%. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya telah mencapai target, yaitu :

- Monitoring Penyampaian SPPT PBB
- Penyusunan Basis data OP PBB P2
- Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar
- Aplikasi Sistem Pembayaran PBB
- Sosialisasi dan Penyuluhan PBB
- Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Dumai adalah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian. Dengan Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 22.268.460.753,- dengan rincian Belanja Tidak langsung Rp 10.429.645.371,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 11.838.815.382,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp 10.014.704.962,- atau terserap 96,02% dan belanja langsung terserap Rp 10.621.148.632,- atau 89,71%.

Adapun realisasi pelaksanaan Indikator pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

a) Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  
Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 22.268.460.753,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 10.429.645.371,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.838.815.382,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 10.014.704.962,- atau terserap 96,02 % dan belanja langsung terserap Rp. 10.621.148.879,- atau 93,00 %.

Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2016 disampaikan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a) Kegiatan Pemeliharaan SIMPATDA.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 603.901.400,- dan direalisasikan sebesar Rp 580.494.400,- dengan tingkat pencapaian kegiatan 96,12%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya peningkatan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah selama 12 bulan atau sebesar 90%.

b) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 347.417.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 292.761.672,- atau 84,27%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi daerah sebanyak 100% melalui 4 (empat) media yaitu: (1) Sosialisasi secara langsung (*door to door*); (2) Media Elektronik Radio; (3) Media spanduk yang dipasang pada panggung reklame yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Dumai; dan (4) Media Massa.

c) Kegiatan Monitoring penyampaian SPPT PBB.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 539.342.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 493.127.000,- atau 91,43%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB sebanyak 3 kali monitoring dan telah dilaksanakan penyampiannya sebanyak 52.305 Objek Pajak.

d) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 137.657.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 83.397.522,- atau 60,58%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 50% dengan terlaksananya monitoring dan rapat koordinasi dan evaluasi sebanyak 2 kali dari rencana semula sebanyak 4 kali monitoring dan evaluasi. Hal ini dikarenakan Bendahara Pengeluaran tidak dapat menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan mengikuti Rencana Anggaran Kas yang telah dibuat Dinas Pendapatan Daerah.

e) Kegiatan Penagihan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 362.125.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 160.553.400,- atau 44,34%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 339,50% dengan terlaksananya pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang diperiksa dan ditagih sampai sebesar 679 WP/WR dari target semula sebanyak 200 WP/WR.

f) Kegiatan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 409.433.340,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 388.956.882,- atau 95%. Adapun nilai capaian

indikator kinerja keluaran 189.85 % dengan terlaksananya jumlah Wajib Pajak dan Retribusi yang didata sebanyak 3.797 WP/WR dari target awal sebanyak 2.000 WP/WR.

g) Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 72.096.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 72.096.000,- atau 100%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan terlaksananya rekonsiliasi perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 4 Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2016.

h) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 82.514.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 61.175.500,- atau 74,14%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 92,31% dengan terlaksananya pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas pemungut sebanyak 24 orang dari target awal sebanyak 26 orang.

i) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan PBB.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 46.653.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 38.203.500,- atau 81,89%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) kepada masyarakat Kota Dumai melalui media cetak (Koran Bumi dan Bangunan (PBB P2) kepada masyarakat Kota Dumai melalui media cetak (Koran Dumai Pos), Baleho, Banner, dan media elektronik (Dumai TV) dengan capaian sebesar 60%.

j) Kegiatan Aplikasi Sistem Pembayaran PBB

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 206.248.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 191.222.040,- atau 92,71%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan tersedianya sistem aplikasi nomor antrian pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dengan nilai capaian sebesar 90%.

k) Kegiatan Penyusunan Basis Data OP PBB - P2.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 219.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 110.133.000,- atau 50,18%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan terlaksananya kegiatan tersebut dimana keluarannya adalah Tersedianya Database PBB P2 dan Master File Peta dengan target sebanyak 2 paket.

l) Kegiatan Verifikasi Penetapan Pajak.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 284.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 281.252.466,- atau 99,03%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 85% dengan target tersedianya Data Hasil Verifikasi Penetapan Pajak sebanyak 425 WP dari target awal sebanyak 500 WP. Adapun kendala yang dihadapi adalah: waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi karena pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan setelah APBD-P 2016.

m) Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 600.427.504,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 396.641.844,- atau 66,06%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 33,33% dengan target terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan yaitu sebanyak 1 kali pemeriksaan dari rencana semula sebanyak 3 kali. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

- ~ Waktu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di pertengahan November dan mengingat tahun anggaran telah akan berakhir sedangkan tahap pemeriksaan yang akan dilalui memakan waktu karena menunggu pelaksanaan APBD-P Tahun 2016
- ~ Terbatasnya personil untuk mengikuti kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak karena terdapat beberapa penugasan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
- ~ Adanya keterbatasan untuk anggaran tertentu dalam kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah

n) Kegiatan Validasi Data Piutang PBB P2.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 99.666.570,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 84.853.900,- atau 85,14%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 8,92% dengan target terlaksananya SK Pembatalan Piutang PBB P2 yaitu sebanyak 8,03% dari target awal sebanyak 90%. Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah:

- ~ Subjek Pajak Sulit Ditemui  
Kondisi lapangan selama kegiatan berjalan, subjek sulit diidentifikasi dimana objek tanah kosong tetapi kepemilikan tanah tidak ditemukan.
- ~ Tanah Kosong tanpa bangunan yang berganti kepemilikan tidak mau menanggung beban pajak setelah peralihan hak
- ~ Keterbatasan Waktu

Kegiatan Validasi Data Piutang PBB P2 Tahun Anggaran 2016 dimulai pada bulan Oktober s.d. Desember 2016, dimana waktu pelaksanaan kegiatan untuk memverifikasi lapangan dengan jumlah Daftar Nominatif sebesar 90.420 Jumlah SPPT dan Jumlah Ketetapan sebesar Rp 5.866.560.003,- (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Rupiah) dari Daftar Nominatif membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan kalender.

~ Hasil Validasi selanjutnya belum bisa divalidasi ke SISMIOP karena menunggu hasil audit BPK

o) Kegiatan Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 127.715.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 123.810.400,- atau 96,94%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 146% dengan target terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebanyak 6.570 SKPD/SKRD dari target awal sebanyak 4.500 SKPD/SKRD.

p) Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 189.213.622,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 176.605.700,- atau 93,34%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan target terlaksananya penilaian khusus objek pajak non standar sebanyak 8 Objek Pajak.

q) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 115.090.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 107.040.000,- atau 93,01%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 80% dengan target terpenuhinya sarana promosi dan informasi sebanyak 1 paket, yaitu: Cetak Dumai Expo Tahun 2016, Baleho Dumai Expo Tahun 2016, dan Cetak Kalender Dispenda Tahun 2017

r) Kegiatan Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 60.120.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 50.702.523,- atau 84,34%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan target terlaksananya analisis dan penyempurnaan ZNT/NIR sebanyak 7 Zona.

#### d. INSPEKTORAT

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai adalah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Inspektorat Kota Dumai tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 45  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Dumai 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir tahun 2016	Realisasi s/d tahun 2016	Capaian (dalam %)
Persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti.	75%	67.32%	89.76%
Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya.	6 Dokumen	2 Dokumen	33.33%

Sumber : Inspektorat Kota Dumai

Dari 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti.

Pada tahun 2016 jumlah total rekomendasi adalah 306 temuan, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 206 temuan, sebanyak 41 temuan masih dalam proses untuk ditindaklanjuti dan 59 temuan belum di tindaklanjuti.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebesar 67,32%, masih dibawah target 75%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan nilai 89,76%, hal ini menunjukkan capain dengan nilai memuaskan.

2. Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya.

Berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD, Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Bahwa inspektorat wajib mereviu setiap tahunnya , pada tahun 2016 target 6 Dokumen sedangkan realisasi 2 Dokumen atau capaian kinerja dengan nilai 33,33 % hal ini menunjukkan capaiannya dengan nilai Kurang. Hal ini disebabkan RKPD tidak bisa dilaksanakan menunjukkan capaiannya dengan nilai Kurang. Hal ini disebabkan RKPD tidak bisa dilaksanakan reviu mengingat terbatassanya waktu karena pada saat pertemuan di provinsi telah memasuki bulan mei, adapun petunjuk teknis dan pelaksanaannya belum ada. Oleh karena RKPD tak bisa direviu maka sebagai satu rangkaian proses perencanaan, RPJMD dan Renja juga tidak bisa dilaksanakan Reviu. Untuk LKj telah dilaksanakan reviu dan terlampir pernyataan telah di reviu, tetapi tidak dilaporkan pada saat akhir tahun anggaran 2016.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai adalah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dengan Anggaran Belanja Inspektorat Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.428.072.100,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.594.272.100,- sedangkan

Belanja Langsung sebesar Rp. 3.833.800.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 4.449.223.091,- atau terserap 96,84 % dan belanja langsung terserap Rp. 3.840.088.856,- atau 90,77 %.

Adapun Penanganan bidang pemerintahan umum khususnya bidang pengawasan oleh Inspektorat Kota Dumai pada tahun 2016, dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 2.338.698.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.033.645.299,- atau 86,96%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 770.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 768.900.000,- atau 99,86%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 74 LHP dan terealisasi sebanyak 74 LHP atau 100%, dijalankan melalui Pemeriksaan Reguler sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemeriksaan diluar PKPT yang telah deprogram yakni yang bersumber dari pemeriksaan Kasus/Khusus

b) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 175.955.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 123.480.000,- atau 70,16%. Indikator kinerja keluarannya adalah dokumen yang terdiri dari target 6 Dokumen yang direviu setiap tahunnya dan terealisasi hanya 2 Dokumen atau 33,33% dikarenakan minimnya dana dan waktu untuk mengevaluasi/mereviu sudah tidak bisa lagi atau terlambat (jadwalnya sudah habis untuk direviu).

c) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 251.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 251.596.500,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak 16 laporan dan terealisasi sebanyak 16 laporan atau 100%.

100%. Tercapainya target yang telah ditetapkan.

d) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.980.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.450.000,- atau 97%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Pengawasan Reguler (Dokumen) sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau pencapaian kegiatan sebesar 100%.

e) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 194.600.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.357.250,- atau 96,79%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 2 (dua) kali dan terealisasi 2 (dua) kali atau 100%.

f) Meneliti/ Menilai Laporan Wajib LP2P

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 81.614.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.414.998,- atau 99,76%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi 100%.

g) Audit Khusus/ Tertentu

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 114.326.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.925.000,- atau 37,55%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan, yang direncanakan sebanyak 2 Laporan Hasil Pemeriksaan dan terealisasi sebanyak 1 laporan atau 50%, dikarenakan Audit khusus/Tertentu ini merupakan kegiatan apabila Kepala Daerah untuk memerintahkan Audit.

h) Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 139.396.025,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 119.995.000,- atau 86,08%. Adapun indikator kinerja keluarannya jumlah penilaian mandiri yang dilaksanakan OPD, yang direncanakan sebanyak 35 OPD dan terealisasi 35 OPD atau 100%.

i) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 110.186.975,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 101.469.142,- atau 92,09%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah penilaian mandiri yang dilaksanakan SKPD yang direncanakan sebanyak 35 OPD dan terealisasinya 35 OPD atau kegiatan tersebut telah tercapai 100%.

2. Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan melalui kegiatan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 242.470.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 230.479.149,- atau 95.05%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :

a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 205.154.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 200.154.000,- atau 97.70%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti Diklat JFA, dari yang direncanakan sebanyak 40 orang, terealisasi sebanyak 40 orang atau tingkat capaian 90%.

b) *In House Training* Aparatur Pengawasan

Pada pelaksanaan Kegiatan *In House Training* Aparatur Pengawasan dialokasikan dana sebesar Rp. 37.316.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.050.000,- atau 80%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti Diklat sebanyak 50 orang dan terealisasi 40 orang atau 80.53%.

Permasalahan Dan Solusi Yang Diharapkan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja,

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja adalah :

a) Terbatasnya jumlah personil pengawas baik Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Dumai.

b) Kualitas Sumber daya Manusia (SDM) belum memadai hal ini ditandai dengan banyaknya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Dumai yang belum mengikuti diklat - diklat terkait di bidang pengawasan.

c) Masih minimnya komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari SKPD terkait. Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran outcome dimasa yang

akan datang adalah :

a) Menambah jumlah personil Pengawas Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Dumai.

b) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan Inspektorat Kota Dumai dalam program pelatihan yang disediakan oleh Diklat BPKP, Mendagri dan Inspektorat Provinsi.

c) Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan perlu lebih diintensifkan, bersamaan dengan itu SKPD juga supaya lebih responsive terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal maupun external.

e. **BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Badan Kepegawaian dan Diklat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 46  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Diklat Dumai 2016

Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Target Capaian Kondisi Akhir 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian (%)
<b>urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>				
Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	%	85	80	94
Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	%	85	99.8	117
Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	Orang	0	0	0

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

a. **Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar.**

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Badan Kepegawaian dan Diklat yaitu tersedianya data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan di Pasal 4 ayat (1) Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; ayat (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan : a. Jenis pekerjaan; b. Sifat pekerjaan; c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu; d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan e. Peralatan yang tersedia.

Berdasarkan data Desember 2016 bahwa terdapat formasi jabatan yang lowong sebanyak 106 jabatan dari jumlah formasi jabatan sebanyak 844 jabatan sedangkan yang terisi 738 jabatan.

Selain itu, juga terdapat proses mutasi antar instansi (khususnya mutasi masuk Pemerintah Kota Dumai) yang akan berdampak pada proses penempatan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensinya dengan jumlah sebanyak 42 orang Pegawai Negeri Sipil serta adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 116 orang dari Pegawai Honorer Kategori 2 yang telah ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ada. Untuk mengakses data/informasi kepegawaian secara cepat, lengkap dan benar maka Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai telah memiliki database pegawai negeri sipil se – Kota Dumai yang akurat dan *up to date* dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

**b. Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi.**

Target dari indikator sasaran ini yaitu menurunnya proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan mengenai Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (Pasal 3) dan Larangan Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4). Dilanjutkan pada Pasal 5 : PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin; Pasal 6 : Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Adapun dalam Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan mengenai Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7) yaitu :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - pembebasan dari jabatan;
  - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Target dari indikator sasaran ini yaitu menurunnya proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi. Berikut tabel proses penegakan disiplin ASN dari tahun 2014 - 2016 :

**Tabel 4. 47**  
**Proses Penegakan Disiplin ASN Dari Tahun 2014 - 2016**

No	Jenis Teguran/Sanksi	2014	2015	2016
1	Berat	10	5	2
2	Sedang	1	-	3
3	Ringan	1	-	-
Jumlah		11	5	5

Dari tabel terlihat bahwa terdapat penurunan kasus hukuman disiplin dari Tahun 2014 sebanyak 11 kasus menjadi 5 kasus pada Tahun 2015. Sedangkan pada Tahun 2016 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan kasus hukuman disiplin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi mengalami penurunan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.810.440.550,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.525.207.550,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.285.233.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.412.109.863,- atau terserap 96,79% dan belanja langsung terserap Rp. 4.717.755.577,- atau 89,26 %.

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.810.440.550,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.525.207.550,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.285.233.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp.3.412.109.863,- atau terserap 96,79 % dan belanja langsung terserap Rp. 4.714.755.577,- atau 89,26%.

Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.831.563.925,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.288.159.097,- atau 80.81%. yang dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan dibawah ini :

a) Seleksi penerimaan calon PNS

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 254.128.725,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 242.049.725,- atau 95.25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah CPNS yang menjadi PNS sebanyak 116 Orang dengan capaian kinerja 90%

b) Penempatan PNS

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 100.335.400,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 84.370.000,- atau 84.09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah sebanyak 5 laporan, rekomendasi mutasi PNS antar instansi sebanyak 57 surat, penempatan PNS pindah masuk sebanyak 42 SK, mutasi keluar sebanyak 15 orang, pengangkatan dalam jabatan jabatan SK 2016 tapi pelaksanaan di awal tahun 2017 sebanyak 1 kali 790 orang dengan capaian 80%

c) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 231.874.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 229.344.000,- atau 98.91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah PNS Kota Dumai yang naik pangkat pada tahun 2016 sebanyak 912 orang. Pada bulan April yang diusulkan naik pangkat baik yang struktural dan fungsional sebanyak 523 namun yang terealisasi atau SK nya terbit sebanyak 494 Orang, pada bulan Oktober yang diusulkan naik pangkat baik yang struktural dan fungsional sebanyak 431 orang namun yang teralisasi atau SK nya terbit sebanyak 418 orang. Yang tidak naik pangkat terdapat beberapa penyebab diantaranya pangkat yang bersangkutan lebih tinggi dari pangkat pejabat yang menilai, dan banyak pegawai tidak melanjutkan hasil dari pemeriksaan berkas BKN untuk ditindaklanjuti berkasnya kembali, capaian kinerja 90%.

d) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 435.100.000 ,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 424.623.572,- atau 97.59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah data/informasi kepegawaian daerah sebanyak 35 SKPD yang di update dalam SIMPEG dengan capaian kinerja 90%.

e) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 49.300.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 49.000.000,- atau 99.39%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah jumlah PNS yang menerima satya lencana karya satya sebanyak 193 orang yang dilaksanakan pada bulan November 2016 dengan capaian kinerja 90%.

f) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 640.700.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 586.560.000,- atau 91.55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar sebanyak 10 orang yang terdiri atas S1 lanjutan sebanyak 3 orang, S2 umum sebanyak 6 orang, S2 Dokter Spesialis sebanyak 1 orang dengan capaian kinerja 90%.

g) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 91.714.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 89.171.000,- atau 97,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklatpim I dan III sebanyak 3 orang namun yang terlaksana hanya pengiriman peserta diklatpim III sebanyak 2 orang yang dikirim ke Medan dan waktu pelaksanaan dari tanggal 01 Maret s/d 16 Juni 2016 dengan capaian kinerja 67%.

h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 125.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 96.806.000,- atau 77.44%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya data Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 129 Unit Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 5 September s/d 11 September 2016 dengan jumlah tenaga honorer sebanyak 4778 Orang se Kota Dumai dengan capaian kinerja 97%.

i) Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 31.822.800,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 31.522.800,- atau 99.06%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah PNS yang diangkat sumpah sebanyak 250 Orang dengan capaian kinerja 90%.

j) Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 315.729.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 309.364.000,- atau 97.98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai selama 1 tahun dengan capaian kinerja 90%.

k) Assesment Center Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 489.350.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 107.687.500,- atau 22.01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah

Kota Dumai sebesar dengan capaian kinerja 20%.

1) Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 66.510.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 37.661.500,- atau 56,63%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah PNS yang diperkirakan Mengalami Kasus sebanyak 15 Kasus, namun yang telah selesai hanya 3 kasus dan yang lain dalam proses dengan capaian kinerja 20%.

**URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.**

**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

*Tabel 4. 48*

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2016**

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi tahun 2016	Capaian (dalam %)
Persentase peningkatan jumlah linmas dan masyarakat yang sigap dan tanggap	0	-	-
Persentase petugas linmas yang terlatih	0	-	-
Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindaklanjuti	50 %	100 %	200

Sumber : Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai

Jumlah laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindaklanjuti 120 laporan dari 120 laporan yang masuk atau realisasi 100%, dengan anggota Kominda sebanyak 33 orang, tidak berubah dari tahun 2016, karena anggota Kominda telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun realisasi pelaksanaan Indikator pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindaklanjuti, Jumlah laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindaklanjuti 120 laporan dari 120 laporan yang masuk, dengan anggota Kominda sebanyak 33 orang, tidak berubah dari tahun 2016, karena anggota Kominda telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Belanja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.863.589.590,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.

1.044.389.590,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.819.200.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 991.234.220,- atau terserap 94,91% dan belanja langsung terserap Rp. 3.621.587.171,- atau 74,46%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pada kegiatan Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat inteligen daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 589.990.000,- dari dana yang dialokasikan dapat terealisasi sebesar Rp. 575.310.000,- atau 97,51%. Indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya kegiatan komunikasi informasi inteligen daerah Kota Dumai.
- b) Kegiatan Pemantauan Kegiatan dan Aktifitas Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dialokasikan dana sebesar Rp. 152.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.300.000,- atau 92%. Indikator kinerja keluarannya adalah terpantaunya dan terkumpulnya data ormas dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
- c) Kegiatan PENGawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah dialokasi dana sebesar Rp. 286.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 250.710.000,- atau 87,49%. Indikator kinerja keluarannya adalah dengan tersedianya pusat informasi tentang kegiatan orang asing di Kota Dumai.
- d) Kegiatan Rumusan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 711.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 695.198.400,- atau 97,76%. Indikator kinerja keluarannya adalah tercapainya pemahaman anggota tentang teknis pelaporan penyampaian rencana aksi Kota Dumai.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.640.000,- atau 68,37%. Indikator kinerja keluarannya adalah terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai dengan terselenggaranya kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- b) Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan dana sebesar Rp. 60.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.225.000,- atau 39,98%. Indikator kinerja keluarannya adalah terciptanya kerukunan antar suku dan terselenggaranya kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (FPK - LKKMD) dengan baik.

3. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan sebagai berikut :

a) Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dengan alokasi dana Rp. 321.869.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 321.869.900,- atau 100%. Indikator kinerja keluarannya adalah meningkatnya pemahaman 4 pilar wawasan kebangsaan kepada masyarakat sebanyak 500 orang. Dari indikator tersebut, terelisasi sebanyak 500 orang peserta atau mencapai 100%.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini masyarakat dialokasikan dana sebesar Rp. 67.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.250.000,- atau 48,97%. Indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya rapat-rapat FKDM mencapai 100%.

b) Kegiatan pelaksanaan hari ulang tahun perlindungan masyarakat dan peringatan hari bela negara dengan alokasi dana Rp. 206.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 203.471.600,- atau 98,61%. Indikator kinerja keluarannya adalah terciptanya anggota Linmas yang cakap serta pelaksanaan siskamling yang baik.

**b. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

**Tabel 4. 49**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian (dalam %)
Jumlah Operasi Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Kali (12 Hari)	3 Kali (12 Hari)	100%
Jumlah Operasi Yustisi Penegakan Perda Kota Dumai	1 Kali (5 Hari)	1 Kali (5 Hari)	100%

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan karena adanya Kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait untuk dapat menciptakan Keamanan dan ketertiban di wilayah kota dumai. Namun Upaya tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, seperti untuk penertiban Gelandangan, Pengemis dan anak Jalanan (anak punk) yang masih banyak ditemui di persimpangan jalan yang sering kali setelah ditertibkan akan kembali lagi ke persimpangan jalan, sehingga penertiban saja dirasa masih kurang efektif, harus ada solusi lain seperti membangun rumah singgah yang di dalamnya terdapat pelatihan – pelatihan keterampilan agar mereka kelak tidak kembali ke jalanan lagi.

Anggaran Belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.032.877.060,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.783.477.060,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.249.400.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.624.722.536,- atau terserap 95,08% dan belanja langsung terserap Rp. 2.935.580.781,- atau 90,34%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 144.625.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 143.125.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98,96% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/ Polri Dan Kejaksanaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 144.625.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 143.125.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98,96% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda Yang Terjaring Operasi ke tingkat Yustisial. Kegiatan yang di laksanakan berupa Operasi Tim Yustisi selama 5 hari kegiatan dengan melakukan penindakan berupa teguran dan sanksi denda untuk disetorkan ke kas negara terhadap perkara tindak pidana ringan KTP sebanyak 174 pelanggar.

Indikator sasaran yang diharapkan berupa "Meningkatnya pola hidup masyarakat yang aman dan tertib", secara umum telah terlaksana sebagaimana yang di harapkan selama tahun 2016.

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 298.375.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 268.410.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau sebesar 89,96% yang dialokasikan melalui kegiatan - kegiatan di bawah ini :

a) Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 298.375.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 268.410.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau sebesar 89,96% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Meningkatnya Pola Hidup Masyarakat Yang Aman Dan Tertib. Kegiatan yang di laksanakan berupa Pengamanan pada Kegiatan HUT Kota Dumai, HUT RI, Penegakan Perda, Pengamanan Pasar Ramadhan Serta Pengawasan Safari Ramadhan. Indikator sasaran yang diharapkan berupa "Meningkatnya Peran Satpol PP dalam tugas Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah", secara umum telah terlaksana sebagaimana yang di harapkan selama tahun 2016.

**e. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Dalam pencapaian Indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra BPBD dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 yang diselenggarakan oleh SKPD BPBD dapat disampaikan sebagai berikut :

*Tabel 4. 50*  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dumai Tahun 2016**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Kondisi Akhir Tahun 2016	Realisasi S/D Tahun 2016	Capaian (Dalam 0%)
1.	Tingkat waktu tanggap darurat	< 15 pemukiman < 30 lahan < 60 lahan	< 30 pemukiman < 45 lahan < 75 lahan	99,14

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Adapun Realisasi Pelaksanaan Indikator pada Tahun 2016 dapat disampaikan sebagai berikut :

a) Indikator Kinerja Tingkat Waktu Tanggap Darurat dengan kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dengan jumlah dana Rp. 446.778.000 dan terealisasi sebesar Rp. 442.925.000 atau 99,14% dengan indikator kinerja keluarga tingkat waktu tanggap darurat dengan target capaian kinerja 30 menit.

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 6.753.388.150,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.547.228.150,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.206.160.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.370.239.569,- atau terserap 95,01% dan belanja langsung terserap Rp. 3.023.209.854,- atau 94,29%.

Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 736.518.320,- dengan

realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 680.795.000,- atau 92,43%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Pencegahan Dini Tahun 2016 ada 4 Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam.

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 113.695.320,- dengan realisasi penyerapan Rp.94.171.400, atau 82,83% %.

b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam.

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 524.530.000,- dengan realisasi penyerapan Rp524.150.000, atau 99,93% %.

c) Kegiatan Identifikasi Potensi dan Dampak Bencana.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.620.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.620.000,- atau 100%.

d) Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 90.673.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 54.854.000,- atau 60,50%.

## 2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Kebakaran

a) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20.660.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.660.000,-atau 100%.

b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 285.490.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 284.700.000,-atau 99,72%.

c) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 141.060.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 141.050.000,-atau 99,99%.

d) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 446.778.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 442.925.000,-atau 99,14%.

## 3. Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana

a) Fasilitas Operasional Tim Realisasi Cepat Penanggulangan Bencana.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 294.040.000. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 271.045.000,- atau 91,56%.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

a) Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana,

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 144.749.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 139.418.000 atau 96,32%,-.

16. URUSAN WAJIB KEARSIPAN, PENDIDIKAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik dan RPJMD kota Dumai Tahun 2016 - 2021, Urusan Wajib Kearsipan, Komunikasi dan Informasi serta Perpustakaan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 51  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik  
Dumai Tahun 2016

No	Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Target 2016	Realisasi tahun 2016	capaian (dalam %)
1	Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	20.000 pengunjung	10%	24,51%	245,10
2	Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE	100% (41 SKPD/ Kantor/sarana publik)	41 SKPD	44 SKPD	107
3	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	1 Website	1 website	1 Website	100

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Kota Dumai

- a) Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat  
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pada akhir tahun 2015 mencapai target 20.000 pengunjung/ pemustaka, dan realisasi kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebesar 24.902 pengunjung/ pemustaka atau naik 24, 51% dengan realisasi 245,10%, yang terdiri dari kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah kota dumai, perpustakaan keliling, perpustakaan masyarakat dan kelurahan serta perpustakaan tugu reformasi/ lancang kuning.
- b) Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE  
Pada akhir tahun 2015, jumlah SKPD/Kantor Pemerintah Kota Dumai yang terkoneksi jaringan IT dengan Kantor PADE sebanyak 43 SKPD/Kantor, untuk jumlah Sub Domain dan Email SKPD/Kantor/Instansi jumlah 30 SKPD sedangkan realisasi tahun 2016 mencapai target 44 SKPD/Kantor atau sekitar 107%.
- c) Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah  
Jumlah website pemerintah kota dumai sebanyak 1 website ([www.dumaikota.go.id](http://www.dumaikota.go.id)) dengan target kunjungan 75.000 target 12 bulan dan terlaksana 12 bulan atau 100 persen dengan target kunjungan 75.000 pengunjung. Untuk data realisasi dapat dilihat pada home website tersebut dengan jumlah

291.769 pengunjung/ pengakses. Adapun jumlah berita/ dokumen/ informasi daerah yang dikelola pada tahun 2016 sebanyak 68 berita/ dokumen/ informasi.

Anggaran Belanja Kantor Perpustakaan Arsip dan Data Elektronik Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.344.875.520,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.579.375.520,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.765.500.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 1.473.452.647,- atau terserap 93,29% dan belanja langsung terserap Rp. 3.026.005.176,- atau 80,36%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan urusan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

4. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan berfungsi sebagai wadah penyedia informasi dan tempat pembelajaran sepanjang hayat serta sebagai pusat informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan, memperluas dan mengembangkan wawasan masyarakat Kota Dumai.

Alokasi anggaran Belanja Langsung yang digunakan untuk urusan Perpustakaan adalah sebesar Rp. 273.458.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 247.240.229,- atau sebesar 90% yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;

- a) Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar;

Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 19.519.000,- sedangkan jumlah penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.594.000,- atau 85%. Adapun Indikator Kinerja keluaran (*Out put*) dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan yaitu 3 kegiatan (Lomba) dan terealisasi 100%. Sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah sama dengan diatas yaitu jumlah kunjungan masyarakat/pemustaka ke Perpustakaan umum daerah Kota Dumai dan Perpustakaan Umum Daerah Kota Dumai dan Perpustakaan Binaan lainnya dengan target 20.000 pengunjung/ pemustaka dan terelisasi 24.902 pengunjung / pemustaka atau sekitar 124,5%.

- b) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah;

Dengan anggaran sebesar Rp. 75.660.000,- dan terealisasi Rp. 75.498.000,- atau 99,7% .

Adapun *Out put* dari penggunaan anggaran ini adalah Terlaksananya kegiatan pembinaan perpustakaan masyarakat/ kelurahan (1 kegiatan) atau 100% dan *Out Come* dari kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina dengan target 20 perpustakaan, terealisasi sebanyak 15 perpustakaan kelurahan/ masyarakat, atau sekitar 75%.

c) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 178.279.000,- dan terealisasi Rp. 155.148.229,- atau sebesar 87%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan/lomba yang dilaksanakan dan terealisasi 100%. Sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah sama dengan kegiatan diatas yaitu jumlah kunjungan masyarakat/pemustaka ke perpustakaan umum daerah Kota Dumai dan Perpustakaan Binaan lainnya dengan target 20.000 pengunjung/ pemustaka dan terelisasi 24.902 pengunjung / pemustaka.

#### Urusan Kearsipan

Arsip memiliki arti penting dan strategis karena merupakan pusat informasi, pusat ingatan, bahan bukti resmi dan sejarah penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan Indonesia yang diatur dalam Undang - undang No. 07 tahun 1971 tentang ketentuan - ketentuan pokok kearsipan dan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 tahun 2009.

Untuk melaksanakan kegiatannya, di alokasikan anggaran sebesar Rp. 99.658.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.517.000,- atau sebesar 93,8%,-. Adapun anggaran yang real untuk membiayai program dan kegiatan arsip adalah sebagai berikut :

##### 1. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan;

Pada tahun anggaran 2016 untuk program ini jumlah anggaran sebesar Rp. 69.380.000,- dan jumlah realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 67.124.500,- atau sebesar 96,7% dari anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

##### a) Pengumpulan Data;

Jumlah alokasi anggaran sebesar 35.971.000 dengan relisasi terealisasi 34.425.000,- atau 95,4%, dengan Indikator Kinerja keluaran (Out put) dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pengumpulan data arsip kota dumai dengan target kinerja keluaran yaitu 1 (satu) kegiatan dengan target 5 Instansi/Kantor/SKPD dengan realisasi 100%. Sedangkan hasil kegiatan dengan target 5 Instansi/Kantor/SKPD dengan realisasi 100%. (Out come) dari kegiatan ini adalah Jumlah penambahan dok/Arsip kota Dumai yang terkumpulkan dengan target 40 eks/dok dan realisasi kinerja sebanyak 0 (nol) dokumen, karena tidak satupun SKPD/Kantor yang dikunjungi menyerahkan dokumen arsip yang ada di SKPD/Kantor tersebut.

##### b) Pengklasifikasian Data;

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.409.000,- dan terealisasi Rp. 32.800.000 atau berkisar 98%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pengklasifikasian yang dilaksanakan yaitu satu kali kegiatan dan terlaksana 100%, sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah jumlah kantor/ SKPD/ Instansi pemerintah daerah yang diklasifikasi yaitu dengan target 5 SKPD/ Kantor, terealisasi 100%.

2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah;

Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 17.266.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.364.000,- atau sekitar 83%. Adapun kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

a) Penduplikasian dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika;

Jumlah anggaran sebesar Rp.17.266.000,- dan realisasi anggaran Rp. 14.364.000,- atau sebesar 93%. Indikator kinerja keluaran (*Output*) dari kegiatan ini adalah Jumlah arsip yang di duplikasikan dalam bentuk informatika sebanyak 1590 lbr, dan terealisasi sekitar 100%. Sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah Presentase keselamatan arsip daerah yang di duplikasikan dengan target 80% dan diperkirakan terealisasi 100% dari target tersebut.

3. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan;

a) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip;

Untuk kegiatan ini Pagu Anggaran yang tersedia Rp. 13.012.900,- dan terealisasi Rp. 12.028.500,- atau sebesar 92,4%. *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah/ jenis arsip dan 250 vhs dan 1.510 dokumen terealisasi 100%. Sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah Presentase peningkatan fasilitas pemeliharaan dokumen arsip yang diperkirakan 80%, perkiraan realisasi dari ketersediaan fasilitas/ peralatan dan perlengkapan untuk pemeliharaan dan perawatan arsip sebesar 80%, artinya terealisasi 100%. Karena semakin bertambahnya alat-alat untuk pemeliharaan/ perawatan dokumen/ arsip yang tersimpan sehingga keselamatan arsip yang tersimpan juga meningkat.

Arsip merupakan dokumen outentik dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi alat bukti pertanggung jawaban setiap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, untuk itu sangat perlu disimpan, dijaga dan dirawat/dipelihara sesuai Standar Peraturan Arsip yang berlaku secara Nasional (UU Kearsipan No. 43 Tahun 2009).

Urusan Pendayagunaan Data dan Pemberdayaan Informasi (Komunikasi dan Informatika); Pelaksanaan kegiatan pada urusan Pendayagunaan data dan Pemberdayaan informasi berdasarkan Undang - undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp. 942.459.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 904.489.764,- atau sebesar 95,9% Dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

Untuk program ini alokasi anggaran sebesar Rp. 187.503.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 176.879.500 atau sebesar 99%.

Adapun alokasi anggaran ini untuk mendanai kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;  
 Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 187.503.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 176.879.500,- atau sebesar 99%, dengan Indikator Kinerja Hasil (Output) yaitu Jumlah periode pemeliharaan jaringan dan jumlah kantor/ SKPD yang terhubung jaringan TIK dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%. Sedangkan Indikator kinerja hasil/ outcome dari kegiatan ini adalah jumlah SKPD/instansi/kantor Pemerintah Daerah yang terkoneksi jaringan TIK dengan kantor PADE dengan target 2016 sebanyak 43 SKPD/Kantor dan terealisasi 100 %.

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 754.956.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 727.615.264,- atau 96,3%, untuk mendanai kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

a) Penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintah daerah;

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 754.956.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 727.615.264,-. Atau 96,3%. Adapun Kinerja Keluaran (*Out put*) dari kegiatan ini adalah Terkelolanya *website* Pemerintah kota Dumai ([www.dumaikota.go.id](http://www.dumaikota.go.id)) dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%. Sedangkan *Out come* dari kegiatan ini adalah jumlah kunjungan publik ke *website* pemerintah daerah ([www.dumaikota.go.id](http://www.dumaikota.go.id)) dalam periode 12 bulan/1 tahun dengan target kunjungan 75.000 pengunjung. Untuk data realisasinya dapat dilihat pada tampilan (*home*) *website* tersebut dengan jumlah 291.769 pengunjung/pengakses. Adapun jumlah berita/dokumen/informasi daerah yang dikelola pada tahun 2016 sebanyak 68 berita/dokumen/informasi.

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM, PENDIDIKAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, SOSIAL, KEPEGAWAIAN, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERTANAHAN SERTA PENANAMAN MODAL.**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Dalam pencapaian indicator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Sekretariat Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

*Tabel 4. 52*

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2016**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Kondisi Akhir 2016	Realisasi S/D Tahun 2016	Capaian (dalam %)
Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	2 Kasus	2 Kasus	100%
Kriteria Penilaian LPPD	Peringkat 8	Masih Penilaian	-
Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	18 Media	18 Media	100%
	4 Radio	4	100%
	- TV	-	-

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2016 dapat disampaikan adalah, sebagai berikut:

- 1) Capaian indikator kinerja sasaran jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan/penyelesaian konflik tanah masyarakat yaitu 2 kasus dengan capaian kondisi akhir tahun 2016 adalah 2 kasus dan terealisasi sebanyak 2 kasus yang telah diselesaikan yaitu terselesaikannya permasalahan tanah antara PT. Oleokimia Sejahtera dengan Masyarakat Lubuk Gaung dan tanah hibah PT. Patraniaga ke Pemko Dumai telah diselesaikan atau dengan capaian persentase sebesar 100%.
- 2) Capaian indikator kinerja sasaran kriteria penilaian LPPD Tahun 2014 adalah peringkat 9 Regional/Provinsi Riau, dengan capaian kondisi akhir adalah peringkat 9 dan terealisasi pada peringkat 9 dengan capaian persentase sebesar 100% dan pada tahun anggaran 2016 ini masih menunggu penilaian laporan dari LPPD tahun 2015.
- 3) Capaian indikator kinerja sasaran jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah publikasi 18 mediadengan capaian kondisi akhir tahun 2016 adalah 18 media dengan realisasi 18 media atau dengan capaian persentase 100%, untuk radio dengan target 4 radio dengan capaian

kondisi akhir tahun 2016 adalah 4 radio dan terealisasi 4 radio atau dengan capaian persentase 100% sedangkan target capaian untuk publikasi TV belum terealisasi dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran tahun 2016 untuk publikasi di TV.

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.91.948.091.800,- dengan rincian sebagai berikut, yaitu: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.31.786.381.800,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.60.161.710.000,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp.30.250.839.320,- atau dengan persentase sebesar 95,17% dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp.45.453.255.698,- atau dengan persentase sebesar 75,55%.

Adapun program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

### AGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.155.825.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.148.981.900,- atau 95.61%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah buku LPPD dan I-LPPD dari target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu LPPD dan I-LPPD dengan capaian persentase 100%.
2. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai
  - a) Kegiatan Pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan se Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.52.723.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0, adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ranperwa PATEN dengan tingkat capaian sebesar 0% dan kegiatan ini tidak terlaksana karena waktu singkat pada pengesahan APBD perubahan tahun 2016.
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
  - a) Kegiatan Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik (Parpol).

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.108.701.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.85.732.251,- atau 78,87%, adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bantuan keuangan untuk partai politik dari target 12 Parpol dan realisasi 12 parpol dengan capaian persentase 100%.
4. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah
  - a) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik perbatasan antar daerah  
Jumlah anggaran yang tersedia Rp.184.986.450,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.179.444.050,- atau 97,00%, adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya penegasan batas daerah dan terciptanya daerah aman dan kondusif

dengan persentase 85% dan realisasi 83% atau capaian persentase sebesar 97,65%.

5. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

a) Kegiatan Penyusunan buku monografi Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.57.252.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.55.252.050,- atau 96,57%, adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah buku monografi Kota Dumai dari target 1 buku monografi dan realisasi 1 buku monografi dengan capaian persentase 100%.

b) Kegiatan Penyusunan data rupa- rupa bumi

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.156.451.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.117.545.400,- atau 75,13%, adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen nama-nama rupa bumi di 7 kecamatan dan realisasi 7 kecamatan dengan capaian persentase 100%.

**BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.144.382.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.768.750,- atau 60,10%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah data penerima hibah/bansos yaitu 1 dokumen yang memuat laporan hasil monitoring/survey lapangan objek yang mengajukan/menerima hibah/bansos tahun 2016 dan terealisasi 1 dokumen atau dengan capaian persentase 100%.

b) Kegiatan Fasilitasi peningkatan koordinasi hibah/bansos

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.468.479.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 448.005.780,- atau 95,63%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah verifikasi permohonan hibah/bansos oleh SKPD selama 6 (enam) bulan, dan jumlah sosialisasi hibah/bansos bagi aparatur/organisasi yaitu 1 even dan terealisasi 1 even dengan capaian persentase 100%.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Kegiatan Pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kota dan tingkat provinsi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.938.820.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 889.346.595,- atau 94,73 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah event MTQ Tingkat Provinsi Riau dan realisasi 1 even dengan capaian kinerja 100% serta keikutsertaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Kota Dumai yaitu 80% dan realisasi 80% dengan capaian persentase 100%.

- b) Kegiatan Pembinaan kehidupan beragama  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 425.199.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 394.389.547,- atau 92,75 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya Jumlah pengurus mesjid/musola yang mengikuti pelatihan dan kompetensi bagi 200 orang imam dan khatib, dari target 200 imam/khatib dan realisasi 100% dengan capaian persentase 100%.
- c) Kegiatan Peningkatan pelayanan dan pembinaan haji Kota Dumai  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 969.395.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 821.076.268,- atau 84,70 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan dan pembinaan bagi calon jemaah haji Kota Dumai yang dimulai dari proses manasik haji, pemberangkatan ke embarkasi Batam hingga pulang ke Dumai, realisasi kegiatan persentase 100%.
- d) Kegiatan Peringatan, penyambutan dan perayaan hari - hari besar keagamaan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 669.725.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 554.492.900,- atau 82,79 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peringatan, perayaan, penghormatan 8 (delapan) hari besar agama Islam dan realisasi 8 hari besar agama Islam dengan capainpersentase 100%.
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi
- a) Kegiatan Penyusunan data base dan sistem informasi bantuan sosial dan hibah  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.750.000,- atau 25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah updating/terverifikasi data penerima hibah/bansos tahun 2016 sehingga penyaluran hibah/bansos dapat tepat sasaran dan akuntabel dan realisasi 0,15% dengan capain persentase 0,15%.

#### BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- a) Kegiatan Sertifikasi tanah asset Pemerintah Kota Dumai  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.457.586.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.432.181.492,- atau 94,45%. Adapun indikator kinerja keluaran terbitnya sertifikat tanah asset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 15 persil dan realisasi 15 persil dengan capaian persentase 100%.
- b) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM bidang pertanahan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.221.713.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.219.069.100,- atau 98,81%.Adapun

indikator kinerja keluaran jumlah aparatur Pemko Dumai yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebanyak 8 orang dan realisasi 8 orang dengan capaian persentase 100%.

**Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan**

a) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.264.799.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.261.261.510,- atau 98,66%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah realisasi data penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 2 dasus dan realisasi 2 kasus dengan capaian persentase 100%.

**BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFOKOM**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

a) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan inisebesar Rp.178.200.000,- dan realisasinya sebesar Rp.161.165.000,- atau sebesar 90,44%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah media yang berlangganan sebanyak 11 media dan realisasi 11 media dengan capaian persentase 100%.

b) Kegiatan Penyediaan dokumen kegiatan Pemerintah Kota Dumai  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.203.774.860,- dan realisasinya sebesar Rp.173.528.303,- atau sebesar 85,16%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah dokumen kegiatan Pemko Dumai yaitu 3 dokumen foto, pidato dan kliping Koran dan realisasi 3 dokumen dengan capaian persentase 100%.

**2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

a) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.149.670.000,- dan realisasinya sebesar Rp.138.970.000,- atau sebesar 92,85%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi audio visual Pemerintah Kota Dumai yang efektif dan realisasi 100% dengan capaian persentase 100%..

**3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

a) Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.93.788.140,- dan realisasinya sebesar Rp.85.004.680,- atau sebesar 90,63%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah peserta keandalan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi sebanyak 100 peserta dan realisasi 100 peserta dengan capaian persentase 100%.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

- a) Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.598.300.000,- dan realisasinya sebesar Rp.596.500.000,- atau sebesar 99,70%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah adanya informasi yang komunikatif sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu baleho, kalender, buku kerja dan *paper bag* dan realisasi 4 dokumen dengan capaian persentase 100%.
- b) Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.119.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.1.113.00.000,- atau sebesar 99,46%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah 4 (empat) publikasi/ media yaitu himbauan, galeri, radio, advertorial dan realisasi 4 media dengan capaian persentase 100%.
- c) Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.106.376.000,- dan realisasinya sebesar Rp.94.495.100,- atau sebesar 88,83%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 3 (tiga) pertemuan dan realisasi 3 (tiga) pertemuan dengan capaian persentase 100%.
- d) Fasilitasi Dan Pembinaan Media Peliput Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 344.551.000,- dan realisasinya sebesar Rp 341.447.500,- atau sebesar 99,10%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah tersedianya sarana media peliput yang beretika dan handal di bidang Komunikasi dan Informasi dalam bentuk 1 (satu) tabloid dan realisasi 1 tabloit dengan capaian persentase 100%.
- e) Kegiatan Peringatan hari- hari besar  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.194.740.000,- dan realisasinya sebesar Rp.194.740.000,- atau sebesar 100%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah jumlah even yaitu hari jadi Kota Dumai dan HUT RI adalah 2 (dua) even dan realisasi 2 even dengan capaian persentase 100%.

**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN**

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - a) Kegiatan Rekrutmen calon direksi dan dewan pengawas/dewan komisaris BUMD Kota Dumai  
 Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.225.190,000,- dengan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 ,- atau 0%. Indikator kinerja keluarannya adalah penyeleksian, pemilihan dan pelantikan Direksi dan Dewan Pengawasan/Dewan Komisaris BUMD Kota

Dumai. Kegiatan ini belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan putusan RUPS pada BUMD Kota Dumai bahwa rekrutmen untuk calon Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD Kota Dumai pada tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

a) Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.236,663.650,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.231,347.218,- atau 97,75% dari anggaran. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah pameran/event expo HUT Kota Dumai adalah 1 event dan realisasi 1 event pameran Dumai Expo dengan capaian persentase 100%.

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.219,146.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.217.549.729,- atau 99,27% dari anggaran. Adapun indikator keluaran adalah adanya rapat dan koordinasi pengendalian inflasi daerah adalah 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian persentase sebesar 100%.

4. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan reward kegiatan raskin

Jumlah anggaran yang tersedi dalam pelaksanaan ini sebesar Rp.225.190.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.947.660,- atau 87,46%dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyaluran raskin/rastra dengan baik ke RTS/PM adalah 9.423 RTS-PM dan realisasi 9.423 RTS-PM serta pemberian reward bagi pengelola terbaik raskin/rastra adalah 6 kelurahan dan realisasi 6 kelurahan dengan capaian persentase sebesar 100%.

## BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.87.906.000,- atau 87,91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021 dan realisasi 1 dokumen renstra sekda dengan capaian persentase 100%.

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a) Kegiatan Pelaksanaan pengawasan secara berkala

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.100.299.000,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.95.285.432,- atau 95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah 2 dokumen yaitu LAKIP/LKjIP 2015 dan Renja 2017 dan realisasi 2 dokumen yaitu LAKIP dan Renja dengan capaian persentase sebesar 100%.

b) Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.646.146.034,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.597.940.064,- atau 92,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase layanan pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan target persentase 70% dan realisasi 70% atau capaian persentase sebesar 100%.

c) Kegiatan Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.646.146.034,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.597.940.064,- atau 92,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan persentase 90% dari target dan realisasi 90% layanan elektronik atau capaian persentase sebesar 100%.

3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a) Kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 110.980.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.96.860.000,- atau 87,28%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang persaingan usaha yang sehat adalah 100 peserta dan realisasi 100 peserta dengan capaian persentase sebesar 100%.

## BAGIAN ADMINISTRASI SDA

1. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

a) Kegiatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.192.700.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.182.690.760,- atau sebesar 94,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen/laporan hasil inspeksi, pengawasan dan pendataan perorangan dan atau perusahaan yang melakukan pengambilan serta pemanfaatan air bawah tanah, permukaan dan air laut di Kota Dumai dari target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan capaian persentase sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

a) Kegiatan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.120.00.000,- dan realisasi penyerapan

anggarnya sebesar Rp.111.531.000,- atau sebesar 89,10%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen data informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian/perkebunan adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen data informasi hasil produksi pertanian/perkebunan dengan capaian persentase sebesar 100%.

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

a) Kegiatan Koordinasi peningkatan dan pengembangan produksi pertanian/perkebunan  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.100.00.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.92.009.000,- atau sebesar 92,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen data informasi dibidang pertanian/perkebunan adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan capaian persentase sebesar 100%.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan

a) Kegiatan Pengawasan/inspeksi keselamatan ketenaga listrikan  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.155.00.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.146.469.000,- atau sebesar 94,50%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengawasan/inspeksi keselamatan ketenagalistrikan dari target 1 kecamatan dan realisasi 1 kecamatan dengan capaian persentase sebesar 100%.

## BAGIAN HUKUM DAN HAM

1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.131.550.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 735.356.323,- atau 64,99% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 270.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.186.522.702,- atau 69,08%. Adapun indikator keluarannya adalah jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disetujui (dalam bentuk lembaran daerah dan berita daerah) adalah 12 Ranperda dan realisasi 12 perda sesuai target dengan capaian persentase sebesar 100%. Dan pada anggaran bagian Hukum dan HAM melebihi target dari 8 ranperda menjadi 12 ranperda yang diusulkan dan terealisasi 12 Perda yang disyahkan oleh DPRD Kota Dumai sehingga melebihi target adalah, sebagai berikut:

- 1) Perda tentang Bangunan Gedung.
- 2) Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Dumai.
- 3) Perda tentang Perlindungan Anak.
- 4) Perda tentang Perlindungan Perempuan & Anak Korban Kekerasan.
- 5) Perda tentang Pemberian Insentif & Kemudahan Penanaman Modal di Kota Dumai.

- 6) Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016.
- 7) Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- 8) Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.
- 9) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016.
- 10) Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapa Tahun anggaran 2016.
- 11) Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 12) Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

b) Kegiatan Publikasi peraturan perundang- undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 110.180.000,- dengan realisasi jumlah besar Rp.4.820.000,- atau 4,37 %. Adapun indikator keluarannya meningkatnya pengetahuan hukum (kesadaran hukum) bagi masyarakat/siswa dengan target 80% tapi capaian kinerja 4% dikarenakan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi

a) Kegiatan Digitalisasi Perda dan pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan buku- buku perpustakaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 338.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 241.331.000,- atau 71,25%. Adapun indikator keluarannya adalah jumlah produk hukum bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai yaitu Buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pembuatan Naskah Akademis dengan target persentase 80% dan realisasi 80% dengan capaian persentase sebesar 100%.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a) Kegiatan Bantuan hukum dan pelayanan hukum Pemerintah Kota Dumai

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.412.670.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.302.682.530,- atau 73,35 % yang dialokasikan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut :Adapun indikator keluarannya bantuan hukum bagi aparatur PNS di Pemko Dumai dan perangkat daerah yang tersangkut perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara yaitu 6 (enam) perkara dan terealisasi 6 (enam) perkara dengan capaian persentase 100%.

## BAGIAN ORGANISASI

### 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

#### a) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 136.817.750,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 128.912.700,- atau sebesar 94,22%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta 40 Orang PNS mengikuti bimtek sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dari target 40 orang dan realisasi 40 peserta bimtek sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 tahun 2014 dengan capaian persentase 100%.

### 2. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan

#### a) Kegiatan Kajian Peraturan Perundang- Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang- Undangan.

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.531.182.250,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.473.263.550,- atau sebesar 89,10%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah 3 dokumen yaitu perda, perwako dan naskah akademik dan dengan realisasi adalah 3 dokumen sebagai berikut: Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, Perwako Dumai nomor 8 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SKPD) dan Naskah Akademik tentang penataan kelembagaan dengan capaian persentase 100%.

## BAGIAN KEUANGAN

### 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### a) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.526.635.500,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.252.875.093,- atau sebesar 48,02%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah laporan keuangan semesteran 2016 dan realisasi 1 laporan keuangan semesteran 2016 dengan capaian persentase 100%.

#### b) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.145.979.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.88.642.050,- atau sebesar 60,72%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan akhir keuangan Kota Dumai dan Sekretariat Daerah dan realisasi adalah 2 laporan, yaitu laporan akhir keuangan Kota Dumai dan laporan

- akhir keuangan Sekretariat Daerah dengan capaian persentase 100%.
- c) Kegiatan Penyusunan dan pelaporan kas daerah  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.65.321.875,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.51.876.900,- atau sebesar 79,42%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya pelaporan kas daerah dengan persentase 65% dan realisasi persentase 65% dengan capaian persentase 100%.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Kegiatan Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.66.080.537,- atau sebesar 44,05%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen peraturan KDH yaitu 1 dokumen kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan realisasi 1 dokumen kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan capaian persentase 100%.
- b. Kegiatan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.201.877.650,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.1.056.067.539,- atau sebesar 87,87%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan realisasi 1 dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan capaian persentase 100%.
- c. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.170.809.325,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.19.962.150,- atau sebesar 11,69%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan realisasi 1 dokumen rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan capaian persentase 100%.
- d. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.962.567.875,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.551.906.540,- atau sebesar 79,69%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan realisasi 1 dokumen Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan capaian persentase 100%.
- e. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.124.675.420,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.86.239.000,- atau sebesar 69,17%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan

APBD dan realisasi 1 dokumen peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD dengan capaian persentase 100%.

- f. Kegiatan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.683.603.250,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.605.794.164,- atau sebesar 88,62%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan realisasi 1 Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan capaian persentase 100%.

- g. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.123.014.500,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.59.225.000,- atau sebesar 48,14%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan realisasi 1 Perwa Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan capaian persentase 100%.

- h. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.262.216.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.129.198.426,- atau sebesar 49,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah adalah 24 orang dan realisasi 24 Orang bimbingan teknis/diklat dengan capaian persentase 100%.

- i. Kegiatan Konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.346.601.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.345.428.473,- atau sebesar 99,66%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase terlaksananya konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah adalah 90% dan realisasi 90% dengan capaian persentase 100%.

- j. Kegiatan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.457.482.480,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.294.839.230,- atau sebesar 46,45%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah 1 paket dan realisasi 1 paket sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan capaian persentase 100%.

- k. Kegiatan Penyusunan data administrasi keuangan daerah  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.135.575.500,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.100.191.900,- atau sebesar 73,90%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Register SP2D BL dan BTL perbulan adalah 1.500 lembar dan realisasi 1.500 lembar, Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD sebanyak 36 buku dan realisasi 36 buku dan Register SP2D per SKPD yaitu 3.500 lembar dan realisasi 3.500 lembar dengan capaian persentase 100%.
- l. Kegiatan Penyusunan standar biaya  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.159.885.050,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.81.977.025,- atau sebesar 51,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah buku standar biaya dan realisasi 1 buku standar biaya dengan capaian persentase 100%.
- m. Kegiatan Penyusunan perubahan Perda pengelolaan keuangan daerah  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.200.590.460,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.81.977.025,- atau sebesar 72,95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah perda pengelolaan keuangan daerah (35 SKPD) dan realisasi 1 perda pengelolaan keuangan daerah dengan capaian persentase 100%.
- n. Kegiatan Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.383.074.900,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.289.282.550,- atau sebesar 75,52%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah SKPD untuk rekonsiliasi laporan keuangan sebanyak 35 SKPD dan realisasi 35 SKPD rekonsiliasi laporan keuangan dengan capaian persentase 100%.

## BAGIAN UMUM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.334.251.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.274.518.800,- atau 82,13%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi 8000 surat, realisasi target 6932 surat atau capaian persentase 86%.
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.6.789.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.660.716.895,- atau 24,46 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya

sarana prasarana komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 95% dan realisasi 95% atau capaian persentase 100%.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.86.840.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.81.084.000,- atau 93,37%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi 12 bulan dengan capaian persentase 100%.

d) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.299.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.295.310.300,- atau 98.50%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya barang milik daerah dengan target 90% dan realisasi sebesar 90% yaitu 42 unit kendaraan dinas dengan capaian 100%.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.668.230.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.639.665.000,- atau 95,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor dengan target 90% dan realisasi sebesar 90% dengan tenaga kebersihan sebanyak 28 orang atau capaian 100%.

f) Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.751.690.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.598.664.550,- atau 79,64%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan dan realisasi 12 bulan dengan capaian 100%.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.285.162.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.222.811.500,- atau 78,13%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyediaan barang cetakan dan pengadaan selama 12 bulan dan realisasi 12 bulan capaian 100%.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.466.188.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.348.404.500,- atau 74,73 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan target 80% dan realisasi keluaran 80% sehingga capaian kinerja keluaran sebesar 100%.

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.093.350.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.023.330.000,- atau 93,60 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah peningkatan kinerja aparatur dengan target 90% dan realisasi sebesar 90% dengan capaian 100%.

j) Penyediaan makanan dan minuman  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.997.355.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.983.720.000,- atau 98,63 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor dengan target 90% dan realisasi sebesar 90% dengan capaian 100%.

k) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.317.432.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.4.317.201.118,- atau 99,99 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian 100%.

l) Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.770.780.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.754.669.800,- atau 97,91 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah 1 tahun terciptanya rasa aman dalam bekerja dengan target 90% dan realisasi sebesar 90% dengan capaian 100% yaitu sebanyak 20 orang.

m) Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.153.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.153.600.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya tertib administrasi dalam pekerjaan dan terdistribusinya surat menyurat dengan tepat dan cepat selama 12 bulan dan realisasi 12 bulan dengan capaian 100%.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Terdiri dari beberapa kegiatan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.145.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

- Rp.2.708.555.750,- atau 65,35%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Penunjang Kelancaran Aktifitas Kantor dengan target 100% dan realisasi 100% atau capaian persentase 100% yaitu 3 unit kendaraan roda empat dan 1 unit kendaraan roda 2.
- b) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.033.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.677.284.400,- atau 65,53%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan terhadap KDH/WKDH dengan target persentase 90% dan realisasi 90% atau capaian persentase sebesar 100%.
- c) Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.671.528.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.191.056.000,- atau 71,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya rumah jabatan walikota dan wakil walikota dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit atau capaian persentase 100%.
- d) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.825.470.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.800.404.500,- atau 96,96 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya rumah dinas dengan target persentase 90% dan realisasi 90% atau capaian persentase sebesar 100%.
- e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.089.745.650,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.913.798.000,- atau 83,85 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan target persentase 90% dan realisasi 90% atau capaian persentase sebesar 100%.
- f) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan  
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.410.240.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.159.277.539,- atau 38,83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya mobil jabatan dengan target persentase 95% dan realisasi 95% atau capaian persentase sebesar 100%.

g) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.3.523.120.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.942.482.884,- atau 55,14 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas / operasional target persentase 90% dan realisasi 90% atau capaian persentase sebesar 100% dengan realisasi 36 unit.

h) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.495.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.390.756.700,- atau 78,82%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pemeliharaan peralatan gedung kantor target persentase 90% dan realisasi 90% atau capaian persentase sebesar 100%.

i) Pemeliharaan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK dan KPU

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.924.830.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.835.881.000,- atau 90,38%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK, dan KPU target persentase 90% dan realisasi 90% atau capaian persentase sebesar 100%.

j) Peningkatan dan pemeliharaan Mess Pemko Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.463.656.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.349.521.290,- atau 75,38%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya fungsi Mess Pemda Kota Dumai di Pekanbaru dengan target persentase 80% dan realisasi 80% atau capaian persentase sebesar 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.181.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.180.220.000,- atau 99,46 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah keseragaman aparatur sebanyak dengan target sebanyak 2 orang dan realisasi 2 orang atau dengan capaian persentase 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pembinaan mental dan fisik aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.60.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.9.450.000,-

atau 13.58 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya Sumber Daya aparatur yang prima dengan target 100 orang selama 12 bulan tetapi realisasi 100 orang selama 2 bulan dikarenakan perubahan aturan pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sehingga kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur hanya dilaksanakan selama 2 bulan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- a) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.506.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.348.175.000,- atau 68,77%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terserapnya aspirasi masyarakat kota dumai dengan target 24 kali dan realisasi 24 kali atau dengan capaian realisasi 100%.

- b) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.483.404.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.720.193.400,- atau 48,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri dengan target 48 kali dan realisasi 48 kali atau dengan capaian realisasi 100%.

- c) Koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah lainnya.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.295.864.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.294.308.706,- atau 99,88 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya koordinasinya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun atau dengan capaian realisasi 100%.

- d) Penyediaan biaya rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.561.125.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.538.774.000,- atau 96,02%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan terhadap KDH / WKDH dengan realisasi 100%.

- e) Pisah sambut muspida kota dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp.506.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.347.450.000,- atau 68,65%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Meningkatnya hubungan kerja sama antar unsur muspida dengan target 6 kali dan realisasi 5 kali atau dengan capaian realisasi 83%.

f) Open house walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah kota Dumai. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.398.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.388.115.000,- atau 97,35%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali atau dengan capaian realisasi 100%.

6. Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

a) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.110.910.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.99.265.000,- atau 89,50 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya tertib administrasi arsip dengan realisasi 90%.

7. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar

a) Peringatan hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan ormas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.725.386.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.685.556.000,- atau 97,69%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional dengan target 9 kali dan realisasi 9 kali atau dengan capaian realisasi 100%.

b) Upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional, HUT Satpol PP, Hari Lingkungan Hidup, HUT Koperasi, Hari Perhubungan Nasional, HUT PMI dan BBGRM.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.176.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.170.150.000,- atau 96,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya upacara /Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional, HUT Satpol PP, Hari Lingkungan Hidup, HUT Koperasi, Hari Perhubungan Nasional, Hari Nusantara, Hari Olahraga Nasional dan BBGRM dengan target dengan target 7 kali dan realisasi 7 kali atau dengan capaian realisasi 100%.

**BAGIAN PENGELOLAAN ASET**

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Penyusunan standar satuan harga

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.128.277.275,- dan realisasi penyerapan

anggarnya sebesar Rp.117.638.075,- atau sebesar 91,70%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah buku standar harga barang dan jasa dengan realisasi 1 buku dengan capaian persentase 100%.

b) Peningkatan manajemen asset/barang daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.220.933.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.204.267.600,- atau sebesar 92,46%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah sebanyak 120 orang per angkatan dan jumlah peserta sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 sebanyak 150 orang per angkatan dan realisasi 120 orang per angkatan dan jumlah peserta sosialisasi PP Nomor 27 Tahun 2014 sebanyak 150 orang per angkatan dengan capaian persentase 100%.

c) Inventarisasi asset

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.262.410.750,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.253.451.981,- atau sebesar 96,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penelusuran selisih aset tahun 2009, 2010, 2011 dan penelusuran aset yang akan dihibahkan Pemerintah Kota Dumai serta verifikasi sarana dan prasarana dalam rangka urusan percepatan P3D dengan realisasi 90% dengan capaian persentase 90%.

d) Penghapusan barang milik daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.162.700.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.148.100.000,- atau sebesar 91,03%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penghapusan barang milik daerah di 35 SKPD yakni 9 (sembilan) unit kendaraan roda empat, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dan realisasi adalah 35 SKPD dengan capaian persentase 100%.

e) Penertiban asset

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.200.387.500,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.193.359.750,- atau sebesar 96,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penertiban asset berupa barang milik daerah di 3 SKPD yakni melakukan penertiban/penarikan kendaraan Dinas operasional milik Pemerintah Kota Dumai yang telah laku lelang BM 1139 R, Pemasangan plang aset Tanah Pemko Dumai yang terletak di Jalan Tuanku Tambusasi Kelurahan Bagan Besar, penarikan kendaraan dinas operasional milik Dinas PU yang dipinjam pakai oleh PD. Tirta Dumai Bersemai BM. 1557 R dan BM 9032 R dengan realisasi 100% di 35 SKPD dengan capaian persentase 100%.

f) Penyusunan laporan barang milik daerah tahunan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.357.276.950,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.348.090.750,- atau sebesar 97,43%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah jumlah laporan barang milik daerah tahunan yaitu 3 laporan (2 laporan: daftar barang milik daerah dan rekapitulasi daftar mutasi barang, 1 laporan: kajian akademis) dan realisasi sebanyak 3 laporan dengan capaian kinerja 100%.

g) Rekonsiliasi asset SKPD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.194.690.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.191.801.600,- atau sebesar 98,52%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi (RekonTahun 2014 dan Semester I Tahun 2015 di 35 SKPD dan realisasi 35 SKPD, capaian persentase 100%.

h) Pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD)

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.676.726.300,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.628.867.800,- atau sebesar 92,93%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah 1 paket yaitu sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD), berupa PC 2 (dua) unit, 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit UPS, printer 2 (dua) unit, server dan jaringan dan realisasi 1 paket SIM-BMD dengan capaian kinerja 100%. Dan jumlah peserta sosialisasi SIMDA-BMD adalah 120 peserta dan realisasi 120 peserta sosialisasi SIMDA-BMD dengan capaian persentase 100%.

i) Penilaian asset/ barang milik daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.105.096.225,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.102.114.475,- atau sebesar 97,16%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penilaian aset/barang milik daerah di 35 SKPD dan realisasi di 35 SKPD, dengan output sebagai berikut: hasil bongkaran gedung/bangunan SDN 010 Ratu Sima, SDN 004 dan SDN 005 Teluk Binjai, penilaian terhadap gedung/bangunan pusat kesehatan masyarakat Dumai Kota santun usaha dan kendaraan dinas operasional SKPD, jembatan kayu di Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota pada Dinas PU, penilaian terhadap kapal motor puskesmas keliling, tanah SDN 001 Bukit Nenas dan tanah jalan air Kelurahan Lubuk Gaung dan realisasi 100% capaian persentase 100%.

j) Peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola barang milik daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 178.402.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 156.304.260,- atau sebesar 87,61%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pejabat pembantu pengelola barang milik daerah yaitu 14 orang dan realisasi 14 orang pejabat pembantu pengelola barang milik daerah dengan capaian persentase 100%.

## KECAMATAN DUMAI TIMUR

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Timur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 53

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Timur Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Capaian Kinerja 2014	Capaian Kinerja 2015	Target Kondisi Akhir Tahun 2016	Realisasi sampai tahun 2016	Capaian (dalam %)
Swadaya dan gotong royong masyarakat meningkat	76%	90%	90%	97,67%	100
Menurunnya angka kriminalitas	40%	35%	35%	100 %	100
Kesadaran berbangsa dan bermasyarakat semakin meningkat	80%	90%	90%	100 %	100
Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat semakin meningkat	80%	90%	90%	99,85%	100
Kinerja Aparat Pembantu pihak Kelurahan dan Kecamatan semakin meningkat	90%	90%	90%	100 %	100
Penyerapan aspirasi masyarakat semakin meningkat	90%	90%	90%	99,75 %	100

Sumber : Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan Capaian Indikator pada Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Tercapainya Target Swadaya dan gotong royong masyarakat  
Swadaya dan gotong royong masyarakat pada akhir tahun 2016 sudah mencapai target ( 100 % ) Swadaya dan gotong royong masyarakat pada akhir tahun 2016 sudah mencapai target ( 100 % ) anggaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program swadaya gotong royong masyarakat . Adapun Anggaran Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan Rp. 309.466.812.
2. Menurunnya angka kriminalitas  
Secara umum angka kriminalitas di Kecamatan Dumai Timur cukup kondusif dengan pencapaian 286%, namun hal ini harus ditingkatkan karena tahun 2016 masih ada masyarakat yang mengalami kehilangan harta benda mereka karena kegiatan pos kamling dimasyarakat masih kurang di dukung adapun anggaran Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat sebesar Rp. 204.000.000
3. Kesadaran berbangsa dan bermasyarakat  
Kesadaran berbangsa dan bermasyarakat semakin meningkat adapun pencapaiannya sebesar 112% karena keterbatasan dana dalam pelaksanaan kegiatan ini adapun anggaran Rp.93.760.000,-
4. Tercapainya Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat semakin meningkat  
Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat semakin meningkat dan pencapaian tahun

2016 adalah 111 %, yang mana kegiatan dukungan operasional kelurahan dan kegiatan LPMK dan RT dengan anggaran sebesar Rp. 309.466.812 dan Rp. 724.800.000.

5. Tercapainya Kinerja Aparat Pembantu pihak Kelurahan dan Kecamatan semakin meningkat Kinerja Aparat Pembantu pihak Kelurahan dan Kecamatan semakin meningkat dan pencapaian tahun 2016 adalah 112 % karena kegiatan ini di dukung masyarakat dan juga didukung dengan pengadaan kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan LPMK dan RT serta Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat adapun anggaran sebesar Rp. 818.560.000,-

6. Tercapainya target Penyerapan aspirasi masyarakat Penyerapan aspirasi masyarakat untuk tahun 2016 target tercapai yaitu sebesar 111%, dengan anggaran sebesar Rp 19.780.000 adapun program ini didukung dengan banyaknya kegiatan Pembangunan, semenisasi jalan dan gang yang dilaksanakan di kecamatan dumai timur yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Timur pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.397.569.198,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.142.554.770,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.255.014.428,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 4.997.268.041,- atau terserap 97,18% dan belanja langsung terserap Rp. 3.201.945.882,- atau 98,37 %.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 dikecamatan Dumai Timur sampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.260.941.690,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.244.547.768,- atau 98,70 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 79.600.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 79.599.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedia kebutuhan Matrai dan Benda pos lainnya selama 1 tahun sebanyak 1.961 lembar dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 102.258.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 86.865.078,- atau 84,95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya informasi, sarana komunikasi listrik dan air selama 12 bulan.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 55.500.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 55.500.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran

adalah kelancaran pelayanan Tersedia kebutuhan Peralatan dan perlengkapan seperti Tenda, Stand Pameran dan Alat Musik.

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 361.200.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 361.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah lingkungan kantor tempat bekerja bersih dan tersedianya bahan pembersih dan peralatan kebersihan selama 12 bulan sebanyak 23 macam .

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 12.892.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 12.892.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedia dana untuk servise peralatan kerja sebanyak 5 item dan penggantian suku cadang sehingga terwujud pelayanan prima pada masyarakat.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 79.685.870,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 79.685.870,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan.

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 32.308.601,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.32.308.601,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 7.150.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.150.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor selama 12 bulan.

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 7.500.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.500.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya surat kabar (bahan bacaan) dan buku peraturan perundang - undangan untuk peningkatan wawasan dan pola pikir aparatur selama 12 bulan.

j) Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 97.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 97.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran Tersedianya makanan & minuman harian bagi 52 pegawai dan jamuan rapat selama 12 bulan.

k) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 221.847.219,- dengan

realisasi penyerapan sebesar Rp. 220.847.219,- atau 99,85 %.. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya program dan kegiatan terkoordinir ke luar daerah selama 12 bulan.

1) Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 204.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 204.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya lingkungan fisik tempat kerja aman selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 589.920.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran: sebesar Rp 568.854.340,- atau 96,43 % yang dialokasikan melalui kegiatan - kegiatan dibawah ini :

a) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 199.320.000,- atau 99,66%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terpenuhinya sarana dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 25.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terpenuhinya sarana perlengkapan kantor , Komputer , Printer, proyektor ,meja , AC , Kursi Tamu Gorden Kantor dan Kamera.

c) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 125.120.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 114.194.340,- atau 91,27 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 12 bulan.

d) Pengadaan Kendaraan Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 239.800.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 230.340.000,- atau 96,06 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kendaraan dinas operasional Kecamatan Dumai Timur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 39.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 39.080.000,- atau 99,95 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 54.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 54.000.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 15.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja sebanyak 4 dokumen.

b) Penyusunan Pelaporan Prognosis

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 17.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 17.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 22.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 22.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran.

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 408.736.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 408.736.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan pembersihan parit dan pengangkutan sampah masyarakat selama 12 bulan.

6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 398.800.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 395.600.000,- atau 99,70 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 20.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya perlombaan kelurahan terbaik dalam bidang administrasi, lingkungan serta disiplin pegawai.

b) Pembinaan POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) di Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 376.800.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 375.600.000,- atau 99,68 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pelaksanaan pelayanan kesehatan balita dan lansia di Kecamatan Dumai Timur.

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 93.760.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 93.760.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) **Pembinaan Kehidupan Beragama**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 93.760.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 93.760.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan Dumai Timur.

**Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan**

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 316.850.080,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 309.466.812,- atau 97,67 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) **Dukungan Operasional Kelurahan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 316.850.080,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 309.466.812,- atau 97,67. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Lancarnya kegiatan administrasi/operasional perkantoran di kelurahan.

9. **Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 724.800.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 724.800.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 724.800.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 724.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan LPMK dan RT se Kecamatan Dumai Timur.

10. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.780.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 19.780.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 19.780.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 19.780.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi, aspiratif dan akomodatif.

11. **Program Peningkatan Kinerja Lembaga**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.995.000,- atau 99.99 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 49.995.000,- atau 99.99 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pelaksanaan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.

**Permasalahan dan Solusi**

Tahun 2016 Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Dumai Timur untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.954.025.000,-. Jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) program dan 8 (dua puluh delapan) kegiatan di Kecamatan Dumai Timur. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai program dan kegiatan kecamatan.

Mencermati hal tersebut diatas, mengingat terbatasnya anggaran Kecamatan Dumai Timur, untuk memecahkan masalah dan solusinya sangat dibutuhkan adanya tambahan dana dari APBD Kota Dumai untuk Kecamatan Dumai Timur agar optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Dumai Timur kedepannya lebih baik lagi dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

**Kondisi Sarana dan Prasarana**

Belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan pembangunan di Kecamatan Dumai Timur belum tersedianya system data dan informasi yang akurat. Mengakibatkan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan. Belum tersedianya sarana dan prasarana menunjang untuk menciptakan lingkungan bersih di Kecamatan Dumai Timur yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan. Khususnya untuk jalan dan gang sempit tidak bisa dilewati mobil/truk sampah.

**c. KECAMATAN DUMAI SELATAN**

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut

*Tabel 4. 54*  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2016**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Kondisi Akhir 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan	3 Kel	3 Kel	100%
Persentase kualitas sumber daya lembaga masyarakat	100%	100%	100%
Persentase PKK aktif	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Sebagaimana yang tersebut dalam tabel diatas, indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut adalah untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai dengan Rencana Strategis dan RPJMD diatas.

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik.  
Target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Keberhasilan dari capaian indikator ini dikarenakan Kecamatan Dumai Selatan berupaya untuk meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana

...kantor dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan maupun dikelurahan melalui program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Dumai dan Renstra Kecamatan Dumai Selatan. Program yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud adalah sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :

- a. pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b. pengadaan peralatan gedung kantor;
- c. pengadaan mebeuler;
- d. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- e. dan rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor.

Keseluruhan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik pada Tahun Anggaran 2016 dan diharapkan akan mampu sebagai pemicu dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Dumai Selatan.

### Cakupan Pelayanan Persampahan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan

Target indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah berjumlah 3 kelurahan. Realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, yang artinya Kecamatan Dumai Selatan mampu untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Dumai dan Renstra Kecamatan Dumai Selatan. Program yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud adalah "pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan".

Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang persampahan, pada tahun 2013 Kecamatan Dumai Selatan telah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kebersihan kepada masyarakat. Untuk kegiatan pengelolaan persampahan ini hanya dikhususkan kepada 3 (tiga) Kelurahan yakni Kelurahan Ratu Sima, Kelurahan Bumi Ayu dan Kelurahan Bukit Datuk dengan petugas kebersihan masing-masing kelurahan sebanyak 4 (empat) orang. Untuk mendukung operasional kegiatan ini telah disiapkan 1 (satu) unit kendaraan roda tiga untuk 3 (tiga) kelurahan tersebut. Segala pembiayaan yang menyangkut kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kota Dumai melalui DPA Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2016. Dari kegiatan yang dilaksanakan ini telah mampu mengurangi beban persampahan pada setiap rumah tangga khususnya pada 3 (tiga) kelurahan tersebut. Pola yang dilaksanakan adalah dengan menjemput sampah rumah tangga dengan menggunakan kendaraan roda tiga dalam jangka waktu tertentu untuk selanjutnya diteruskan ke tempat pembuangan akhir.

3. Persentase Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat Target dari indicator kinerja sasaran ini adalah sebesar 100% pada tahun 2016. Untuk mencapai sasaran ini Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan 2 (dua) program pada tahun 2016, yakni :

Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT dengan kegiatan pembinaan RT dan LPMK se-Kecamatan Dumai Selatan;

Pada program kegiatan ini, Kecamatan Dumai Selatan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya lembaga LPMK dan RT dengan melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta memberikan stimulus berupa bantuan honorarium terhadap Pengurus LPMK dan RT se-Kecamatan Dumai Selatan dalam rangka penyelarasan program-program pembangunan di wilayah kecamatan.

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan yakni :

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan ;

Pada kegiatan ini Kecamatan Dumai Selatan berkomitmen untuk menjamin pelayanan kesehatan dasar khususnya terhadap balita dan usila melalui pelayanan Posyandu. Saat ini terhadap 38 Posyandu yang ada di Kecamatan Dumai Selatan dan tersebar pada 5 (lima) kelurahan. Pada Tahun 2016 kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

Untuk mengukur dan menilai sejauh mana kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan telah menjalankan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2016 yang lalu Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja unit pelayanan public. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penilaian perlombaan kelurahan se-Kecamatan Dumai Selatan yang terdiri dari lomba kelurahan dan lomba gotong royong masyarakat. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menetapkan Kelurahan Bukit Datuk mewakili Kecamatan Dumai Selatan dalam lomba kelurahan dan Kelurahan Mekar Sari dalam lomba gotong royong masyarakat pada tingkat Kota Dumai

#### Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam program-program pembangunan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa PKK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam memotivasi dan menggerakkan keluarga dalam memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki untuk menunjang peningkatan kesejahteraan keluarga.

TP.PKK Kecamatan Dumai Selatan selama ini aktif dalam menjalankan program-program pokok PKK bersama dengan TP.PKK Kelurahan. Hal ini terlihat dari berbagai perlombaan dan penilaian yang dilaksanakan baik pada tingkat kota maupun tingkat provinsi, TP.PKK turut member andil dan sumbangsih dalam penilaian tersebut. Selain itu TP.PKK Kecamatan bersama TP.PKK Kelurahan juga secara rutin melaksanakan pertemuan untuk membahas program-program yang akan dan telah dilaksanakan.

Budget Renstra untuk indicator kinerja sasaran ini adalah 100% dan realisasi juga sebesar 100%. Tercapainya target ini disebabkan Kecamatan Dumai Selatan berhasil menggerakkan dan memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan PKK. Keberhasilan ini tidak hanya dicapai pada tingkat Kecamatan akan tetapi juga pada tingkat kelurahan.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.442.137.202,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.188.351.500,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.253.785.702,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 5.070.377.261,- atau terserap 97,73 % dan belanja langsung terserap Rp. 3.203.470.696,- atau 98,45 %.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 906.420.248,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 898.112.285,- atau 99.08% yang dialokasikan melalui kegiatan - kegiatan dibawah ini :

**a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 88.800.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 88.794.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan materai, perangko, dan benda pos lainnya dengan realisasi 100%

**b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 41.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 37.700.657,- atau 91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa telepon, listrik, internet dan faksimile realisasi 100%

**c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 47.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 47.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana kantor dengan realisasi 100%

**d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.697.000,- atau 79%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah perpanjangan usia pakai aktif tetap bergerak kecamatan dumai selatan (stnk) sebanyak 11 (sebelas) unit dengan realisasi 100%.

**e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 126.539.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 126.539.000,- atau 100%. Adapun indikator

Kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

b) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- atau 99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan dengan realisasi 100%

c) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 63.982.208,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 63.979.700,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan dengan persentase 100%.

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 30.900.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 9.937.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 9.841.500,- atau 99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan dengan persentase 100%.

f) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.161.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.161.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.744.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.844.000,- atau 75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan bacaan koran/surat kabar kecamatan dengan realisasi 100%.

h) Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 67.620.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 66.042.900,- atau 98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersediaan makanan dan minuman rapat kegiatan selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 237.136.540,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 236.912.528,- atau 99,91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya Perjalanan Dinas selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

Penyediaan Jasa Tenaga Kemanan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 163.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 163.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya jasa tenaga keamanan kantor selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 176.426.200,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 166.390.073,- atau 94,31% yang dialokasikan melalui kegiatan - kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 19.871.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 19.078.000,- atau 96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor dengan realisasi 100%.

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 26.690.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 24.790.000,- atau 93%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan gedung kantor dengan realisasi 100%.

c) Pengadaan Meubeler

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.494.200,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.470.000,- atau 99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pengadaan mebeuler kantor dengan realisasi 100%.

d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 63.370.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.198.073,- atau 95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas dengan realisasi 100%.

e) Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 61.714.000,- atau 99,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya ruang arsip Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 100%.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan  
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 52.150.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 51.739.600,- atau 99.21% yang dialokasikan melalui kegiatan - kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 12.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 13.685.500,- atau 99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersediannya dokumen lakip, rencana kerja, Renstra dan DPA Kecamatan dengan realisasi 100%.

b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.990.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 16.975.300,- atau 99,91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan prognosis tahun 2016 dengan realisasi 100%.

c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 22.410.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 22.078.800,- atau 99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun realisasi 100%.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 300.908.150,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 297.653.500,- atau 99% yang dialokasikan melalui kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersediannya Prasarana dan Sarana Persampahan dengan realisasi 100%.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat  
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 347.940.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 347.697.400,- atau 99.92% yang dialokasikan melalui kegiatan - kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan  
Jumlah Anggaran dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 301.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 301.758.800,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan dengan realisasi 100%.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.140.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 45.921.400,- atau 99,53%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penilaian perlombaan se-Kelurahan Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 100%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  
Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 137.288.525,- dan realisasi penyerapan

Anggaran sebesar Rp. 136.818.200,- atau 99,66% yang dialokasikan melalui kegiatan Pembinaan Kehidupan beragama. Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 137.288.525,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 136.818.200,- atau 99,66% Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi 100%.

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan  
Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 337.122.877,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 323.414.672,- atau 96% yang dialokasikan melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan untuk pelayanan kelurahan dengan realisasi 100%.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT  
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 784.385.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 784.285.850,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan Pembinaan LPMK dan RT se-Kecamatan Dumai Selatan. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT se-Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 100%.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 31.550.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 31.490.000,- atau 99,81% yang dialokasikan melalui kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 100%.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan  
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 82.129.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 81.634.500,- atau 99% yang dialokasikan melalui kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan kegiatan PKK kecamatan dengan realisasi 100%

**Prestasi Dan Penghargaan**

Kecamatan Dumai Selatan telah mengikuti beberapa perlombaan dan seleksi baik tingkat Kota maupun tingkat Provinsi. Uraian prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Selatan selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 55**  
**Capaian Indikator Kinerja Keluaran Kecamatan Dumai Selatan**  
**Kota Dumai Tahun 2016**

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
1	Juara Favorit Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Dumai Tahun 2016	Kecamatan Dumai Selatan	Kota Dumai	Pemko Dumai
2	Juara I Penilaian Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Provinsi Riau Tahun 2016	Kelurahan Bukit Datuk	Provinsi riau	Pemprov Riau
3	Juara I Lomba PKK KB	Kelurahan	Provinsi riau	

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
	KES Tingkat Provinsi Riau Tahun 2016	Bukit Datuk		Pemprov Riau
4	Juara II RASKIN AWARD 2016	Kelurahan Bukit Datuk	Kota Dumai	Pemko Dumai
5	Juara II perlombaan kelurahan tingkat Kota Dumai Tahun 2016	Kelurahan Bukit Datuk	Kota Dumai	Pemko Dumai
6	Juara II Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2016	Kelurahan Bukit Timah	Provinsi riau	Pemprov Riau
7	Juara II Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Terbaik Tingkat Kota Dumai Tahun 2016	Kelurahan Mekar Sari	Kota Dumai	Pemko Dumai

Sumber : Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

## KECAMATAN DUMAI KOTA

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Dumai Kota RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 56  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Keamatan Dumai Kota Tahun 2016

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2014	Capaian Kinerja Tahun 2015	Target Capaian Kondisi Akhir Tahun 2016	Realisasi Sampai Tahun 2016	Capaian (Dalam %)
1	2	3	4	5	6
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	94 %	96 %	100 %	96 %	96 %
Cakupan pelayanan persampahan lingkungan kecamatan dan kelurahan	90 %	92 %	100 %	99 %	99 %
Persentase pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan yang terakomodir	-	-	-	-	-
Kelengkapan atribut pegawai	-	-	-	-	-
Kualitas data pendukung perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	94 %	100 %	96 %	96 %
Persentase kualitas sumber daya lembaga masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase badan keswadayaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara	100 %	100 %	100 %	99 %	99 %

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran di atas pada Tahun 2016, untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana berikut ini :

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2016 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2016 hampir maksimal (96%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2016 adalah 96%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik

...sisi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan ... yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap ... pada prosedur dan aturan yang berlaku.

...pelayanan persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan ... Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2016 yang diakumulasi dari awal tahun rencana ... hampir maksimal (99%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2016 adalah ... Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian ... Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2016 ini Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas ... dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas ... persampahan diwilayah kerja Kecamatan khususnya pada 5 (lima) Kelurahan. Kecamatan Dumai Kota mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang ... yang tersebar pada 5 (lima) Kelurahan. Cakupan pelayanan persampahan adalah lingkungan perumahan. Pelaksanaan ini dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang ... melalui penganggaran pada Kecamatan.

...persentase pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan yang terakomodir

...Pelaksanaan program dan kegiatan pada capaian indikator kinerja sasaran ini direncanakan pada Tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021, khususnya untuk pembangunan infrastruktur kelurahan.

...Kelengkapan atribut pegawai

...Pelaksanaan program dan kegiatan pada capaian indikator kinerja sasaran ini direncanakan pada Tahun 2017 sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021. khususnya pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian hari-hari tertentu untuk ASN pada Kecamatan Dumai Kota.

...Kualitas data pendukung perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

...Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2016 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2016 hampir maksimal (96%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2016 adalah 100%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya dan perlu penyempurnaan, baik dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan RPJMD, RKPD, Renja, Renstra, Laporan Kinerja/LKj (LAKIP), RKA/DPA murni maupun perubahan dan sistem kerja profesional aparatur kecamatan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ini.

...Persentase kualitas sumber daya lembaga masyarakat

...Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2016 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2016 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2016 adalah 100%. Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2016 diadakan Rapat

koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara tepat sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan keluarga pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Pada tahun 2016 ini Kecamatan Dumai Kota meraih peringkat ketiga dalam penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota, yaitu Kelurahan Laksamana. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program RASKIN dalam pendistribusian beras miskin (raskin) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Kota khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin Kecamatan Dumai Kota sampai tahun 2016 adalah :

a) Kelurahan Laksamana	233 KK
b) Kelurahan Dumai Kota	204 KK
c) Kelurahan Bintan	181 KK
d) Kelurahan Sukajadi	187 KK
e) Kelurahan Rimba Sekampung	282 KK

Jumlah penerima beras raskin sampai tahun 2016 ini adalah 1.087 KK, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras 15 kg/KK.

Persentase badan keswadayaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2016 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2016 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2016 adalah 100%. Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Dumai Kota dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya. Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai. Dilihat dari awal tahun Rencana Strategis tahun 2016 ini pada Kecamatan Dumai Kota, belum

perannya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang dan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan.

terhadap pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2016 yang diakumulasi dari awal tahun rencana target hampir maksimal (99%), sementara pencapaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2016 adalah 99%. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap SITKAMTIBMAS, masyarakat dilingkungan Kecamatan Dumai Kota sudah berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan lingkungan tempat tinggalnya melalui peningkatan program siskamling, pemberdayaan masyarakat maupun penggunaan jasa Satpam. Setiap Lurah di Kecamatan Dumai Kota mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan penyelesaian masalah sosial di setiap kelurahan. Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT. Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Dumai Kota akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian dilingkungan Kecamatan Dumai Kota. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Dumai Kota akan aman dan terkendali.

Dilihat pada tabel pencapaian indikator di atas, jika disandingkan pencapaian kinerja tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pada indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik, pencapaian kinerja tahun 2014 (94%), tahun 2015 (96%) dan tahun 2016 (96%) mengalami peningkatan;
2. Pada indikator Cakupan Pelayanan Persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan, pencapaian kinerja tahun 2014 (90%), tahun 2015 (92%) dan tahun 2016 (99%) mengalami peningkatan;
3. Pada indikator Kualitas Data Pendukung Perencanaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja tahun 2014 (100%), tahun 2015 (94%) dan tahun 2016 (96%) mengalami penurunan;
4. Pada indikator Persentase Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat, pencapaian kinerja tahun 2014 (100%), tahun 2015 (100%) dan tahun 2016 (100%) persentase tetap;
5. Pada indikator Persentase Badan Keswadayaan Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan, pencapaian kinerja tahun 2014 (100%), tahun 2015 (100%) dan tahun 2016 (100%) persentase tetap;
6. Pada indikator Cakupan Pembinaan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, pencapaian kinerja tahun 2014 (100%), tahun 2015 (100%) dan tahun 2016 (99%) mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan.
- 7.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Kota pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.106.537.970,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.833.737.970,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 3.272.800.000,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi Rp 5.656.339.371,- atau terserap 96,96 % dan Belanja Langsung Rp 3.221.222.203,- atau terserap 94,2 %. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

#### Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 928.929.626,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 902.914.883,- atau 97,20 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

##### Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp 3.150.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 3.150.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah materai dan benda pos lainnya dalam 1 (satu) tahun sebanyak 600 lembar dan terealisasi semuanya atau 100 %.

##### Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 95.010.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 84.900.844,- atau 89,36 %. Indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pemakaian telepon, air, listrik dan speedy dalam 1 (satu) tahun selama 12 bulan dan realisasi kerjanya 100 %. Pembayaran telepon, listrik dan speedy melalui KOPPEGTEL setempat berdasarkan pemakaian/kebutuhan kantor setiap bulannya.

##### Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 72.250.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 67.250.000,- atau 93,08 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

##### Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 178.693.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 178.535.000,- atau 99,91 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan realisasi kinerja 100 %.

##### Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 56.860.425,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 56.614.800,- atau 99,57 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

**Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 30.255.320,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 29.987.500,- atau 99,11 %.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4.005.120,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.828.200,- atau 95,58 %.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 20.232.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 19.630.000,- atau 97,02 %.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah terbayarnya jumlah koran/majalah dalam 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

**Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 40.555.000,- atau 81,11 %.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

**Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 213.273.761,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 213.263.539,- atau 100 %.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

**Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 163.200.000,- atau 100 %.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga keamanan kantor sebanyak 8 (delapan) orang dengan realisasi kinerja 100 %.

**Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 42.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 42.000.000,- atau 100 %.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 2 (dua) orang dengan realisasi kinerja 100 %.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 183.145.800,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 170.861.798,- atau 93,29 % yang dialokasikan melalui kegiatan - kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 13.452.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 12.375.000,- atau 91,99 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 (tiga) unit selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 30.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 30.096.000,- atau 99,00 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya sejumlah peralatan gedung kantor 6 (unit) selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

c) Pengadaan Mebeleur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 52.903.800,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 52.195.000,- atau 98,66 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya akan mebeleur kantor sebanyak 14 buah/set selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 47.810.798,- atau 84,34 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua sebanyak 8 unit selama 1 (satu) tahun dengan realisasi dengan realisasi kinerja 100 %.

e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 29.700.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 28.385.000,- atau 95,57 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terawatnya peralatan gedung kantor selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 56.260.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 53.944.750,- atau 95,88 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 19.100.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 19.100.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja (LKj/LAKIP, Renja, Renstra, DPA Murni dan DPA Perubahan) sebanyak 4 (empat) dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.
- b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 17.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 16.343.000,- atau 96,14 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terealisasinya laporan prognosis tahun 2016 sebanyak 2 (dua) laporan dengan realisasi kinerja 100 %.
- c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 20.160.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 18.501.750,- atau 91,77 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) laporan dengan realisasi kinerja 100 %.

#### Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 484.727.424,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 481.503.740,- atau 99,33 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 484.727.424,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 481.503.740,- atau 99,33 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 22 orang realisasi kinerja 100 %.

#### Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 365.902.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 364.697.500,- atau 99,67 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan  
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 346.090.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 344.885.000,- atau 99,65 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 19.812.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 19.812.500,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penilaian perlombaan Kelurahan se-Kecamatan Dumai Kota sebanyak 5 (lima) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 87.175.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 86.812.000,- atau 99,58 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 87.175.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 86.812.000,- atau 99,58 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi kinerja 100 %.

c. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 302.325.250,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 298.279.732,- atau 98,66 % yang dialokasikan melalui kegiatan:

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 302.325.250,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 298.279.732,- atau 98,66 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya operasional kelurahan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 778.204.400,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 776.104.400,- atau 99,73 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 778.204.400,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 776.104.400,- atau 99,73 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT Kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 36.130.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 36.130.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  
 Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 36.130.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 36.130.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2016 dengan realisasi kinerja 100%..

0. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan  
 Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.973.400,- atau 99,95 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan  
 Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.973.400,- atau 99,95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan kegiatan PKK selama 1 (satu) tahun 4 Pokja dengan realisasi kinerja 100%.

**Estasi dan Penghargaan**

Kecamatan Dumai Kota adalah salah satu kecamatan pemekaran yang luas wilayahnya ± 7 km<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) Kelurahan meliputi :

- 1) Kelurahan Rimba Sekampung
- 1) Kelurahan Sukajadi
- 1) Kelurahan Dumai Kota
- 1) Kelurahan Bintan
- 1) Kelurahan Laksamana

Letak yang strategis di jantung Kota Dumai membuat Kecamatan Dumai Kota menjadi *meter* pelayanan kepada masyarakat. Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Kota pada 2015 s/d 2016 adalah :

**Tabel 4. 57**  
 Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Kota

NO	URAIAN PRESTASI	PEMENANG	TINGKAT LOMBA	PENYELENGGARA
1	2	3	4	5
<b>TAHUN 2015</b>				
1	Juara I Lomba Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	Sumiati Kelurahan Rimba Sekampung	Nasional/ Jakarta	Tim Penggerak PKK Pusat
2	Juara I Lomba Pelaksana Terbaik Tertib Adm. Pkk	Kelurahan Rimba Sekampung	Kota Dumai	Tim Penggerak PKK Kota Dumai
3	Juara I Lomba Kader Kelompok BKR	Ami Sumiati (BKR Mayang Mengurai) Kelurahan Rimba Sekampung	Kota Dumai	Badan KB, PP dan PA

NO	URAIAN PRESTASI	PEMENANG	TINGKAT LOMBA	PENYELENGGARA
4	Juara I Jambore Kader PKK	Sumiati Kelurahan Rimba Sekampung	Kota Dumai	Tim Penggerak PKK Kota Dumai
5	Juara II Pelaksanaan Terbaik Pemanfaatan Hasil Toga	Kelurahan Bintan	Kota Dumai	Tim Penggerak PKK Kota Dumai
6	Juara II Lomba Kelurahan	Kelurahan Rimba Sekampung	Kota Dumai	Dinas Koperasi, UKM dan PM
7	Juara III BBGRM (Lomba Pelaksanaan GORO Masyarakat)	Kelurahan Laksamana	Kota Dumai	Dinas Koperasi, UKM dan PM
8	Juara III Poskamling	Poskamling RT 13 Kelurahan Sukajadi	Kota Dumai	Kantor Kesbang Pollinmas
9	Kelurahan Pertama Mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Kelurahan Dumai Kota	Kota Dumai	Walikota Dumai
<b>TAHUN 2016</b>				
1	Juara III Lomba Kelurahan	Kelurahan Laksamana	Kota Dumai	Dinas Koperasi, UKM dan PM
2	Juara III BBGRM (Lomba Pelaksanaan GORO Masyarakat)	Kelurahan Bintan	Kota Dumai	Dinas Koperasi, UKM dan PM
3	Juara Harapan I Pengelolaan Raskin (Raskin Award)	Kelurahan Bintan	Kota Dumai	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

**Permasalahan**

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi Kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.

Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di Kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.

Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegatif/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.

Penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan, dan harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan teknis  
 Memberikan kewenangan yang luas kepada Kecamatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**kendala / Hambatan**

Tahun 2016, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Dumai Kota setelah perubahan sebesar Rp. 3.272.800.000,- jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 28 (dua puluh delapan) Kegiatan di Kecamatan Dumai Kota, dan sebagian besar anggaran atau 82,2 % merupakan biaya beban tetap/Belanja Langsung digunakan untuk membayar insentif RT/LPMK, Kader Posyandu, Tenaga Persampahan, Keamanan dan Kebersihan Kantor. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan di Kecamatan Pemekaran khususnya.

**KECAMATAN DUMAI BARAT**

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Barat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan Pemerintahan Umum, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

*Tabel 4. 58*  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Barat s/d Tahun 2016**

Indikator kinerja sasaran	Capaian kinerja 2014	Capaian kinerja 2015	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi Sampai Tahun 2016	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran yang baik	95%	95%	95%	98,19%	98,19%
Persentase penanganan sampah	95%	95%	95%	99,61%	100%
Kualitas data pendukung perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	95%	95%	95%	100%	100%
Cakupan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara	90%	90%	95%	100%	100%
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	95%	95%	95%		

Sumber : Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 4.58 diatas dalam pencapaian sasaran terdapat beberapa capaian kinerja tersebut yang sama dengan target atau sudah mencapai target dan melewati capaian target capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat uraian dibawah ini :

1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik, yang dalam kegiatan terdapat 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan yaitu Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor, Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, Pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan, dimana tingkat capaian sudah memenuhi target capaian atau 98,19%. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 menyesuaikan indikator 2016 dimana tingkat capaian 2014 sudah memenuhi target capaian atau 96,35% dan tahun 2015 juga sudah memenuhi target capaian atau 91,40%, namun terjadi penurunan dibanding tahun 2014 hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, tapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan atau mencapai 98,19%.

2) Persentase penanganan sampah yang dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, yang tingkat capaiannya realisasi 99,61% . dan memenuhi target capaian kinerja. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 menyesuaikan indikator 2016 dimana tingkat capaian 2014 sudah memenuhi target capaian atau 99,99% dan tahun 2015 juga sudah memenuhi target capaian atau 99,30%, namun terjadi penurunan dibanding tahun 2014 hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, tapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan atau mencapai 99,61%. Namun rata-rata sudah diatas target atau 95%.

3) Kualitas data pendukung perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang mana dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang mana tingkat capaiannya Realisasinya 100%. Yang mengakibatkan berlebihnya capaian target kinerja. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 menyesuaikan indikator 2016 dimana tingkat capaian 2014 sudah memenuhi target capaian atau 100% dan tahun 2015 juga sudah memenuhi target capaian atau 96,48%, namun terjadi penurunan dibanding tahun 2014 hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, tapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan atau mencapai 100%. Namun rata-rata sudah diatas target atau 90%.

4) Cakupan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan kehidupan beragama yang mana tingkat

capaian realisasinya 100% . yang mengakibatkan berlebihnya target capaian kinerja. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 menyesuaikan indikator 2016 dimana tingkat capaian 2014 sudah memenuhi target capaian atau 100% dan tahun 2015 juga sudah memenuhi target capaian atau 100%, dan tahun 2016 target capaian juga mencapai 100%. Jadi rata-rata sudah diatas target atau 90%.

5) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat yang mana dalam kegiatan ini terdapat 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan yaitu Pembinaan pos pelayanan terpadu, Penilaian kinerja unit pelayanan publik, Pembinaan LPMK dan RT, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Pembinaan PKK Kecamatan yang mana tingkat capaian realisasinya 100%. Yang mengakibatkan berlebihnya target capaian kinerja. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 menyesuaikan indikator 2016 dimana tingkat capaian 2014 sudah memenuhi target capaian atau 100% dan tahun 2015 juga sudah memenuhi target capaian atau 99,83%, namun terjadi penurunan dibanding tahun 2014 hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, tapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan atau mencapai 100%. Namun rata-rata sudah diatas target atau 95%.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Barat pada Tahun 2016 di APBD Murni sebesar Rp. 2.275.705.685,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.611.705.685,- sedangkan Belanja Langsung Rp. 2.664.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 7.433.413.930,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.673.893.930,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.759.520.000,-. Untuk Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.485.054.621,- atau terserap 95,95% dan Belanja Langsung terserap Rp. 2.733.559.774,- atau 99,06%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini di APBD murni sebesar Rp. 867.189.050,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 932.709.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 925.957.055,- atau 99,28% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.230.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 2.020.000,- atau 90,58%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya kebutuhan materai untuk Kantor Camat Dumai Barat selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 52.862.775,- atau 88,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa telepon, listrik, internet dan air untuk Kantor Camat Dumai Barat selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%. Menurunnya realisasi target outputnya dikarenakan tingginya penetapan target sedangkan realisasinya dibayar sesuai kebutuhan, sehingga mengakibatkan menurunnya capaian kinerja.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.61000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 61.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk Kantor Camat Dumai Barat selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%. Sudah sesuai target, sehingga mengakibatkan tercapainya capaian kinerja

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 134.127.200,- Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 153.327.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 153.327.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan untuk kecamatan dan kelurahan sebanyak 8 (delapan) orang dan bahan pembersih selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.710.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 59.710.600,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 54.262.582,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 54.262.500,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 49.308.668,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 29.008.640,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 29.008.600,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 15.220.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 15.220.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya Koran/ majalah selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

i) **Penyediaan Makanan dan Minuman**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 70.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 70.250.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya kegiatan perkantoran selama 1 (satu) tahun realisasi 100%.

j) **Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD murni sebesar Rp. 150.000.000,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 170.300.028,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 170.295.980,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Bertambahnya pengetahuan pegawai dalam mengikuti rapat koordinasi konsultasi keluar daerah selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

k) **Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 100.800.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 122.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 122.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa tenaga keamanan kantor Camat dan Kantor Lurah sebanyak 6 (enam) orang dengan realisasi 100%.

l) **Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 110.880.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 135.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 135.600.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 6 orang selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini di APBD murni sebesar Rp. 133.000.000,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 134.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 132.261.120,- atau 98,56% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.300.000,- atau 98,60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan dumai Barat dengan realisasi 100%.

b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 53.200.000,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 54.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 53.161.120,- atau 97,72%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya tenaga sopir sebanyak 1 (satu) orang dan terpeliharanya kendaraan dinas Kantor Camat dengan realisasi 100%.

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 29.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 29.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan gedung kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 51.135.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 51.135.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.135.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 12.135.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersusunnya dokumen laporan kinerja selama 1 (satu) tahun realisasi 100%.

b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 17.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersusunnya laporan prognosis Tahun 2016 dengan realisasi 100%.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 22.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Kecamatan Dumai Barat dengan realisasi 100%.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 262.307.100,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 291.107.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 289.968.600,- atau 99,61% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 262.307.100,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 291.107.100,-

dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 289.968.600,- atau 99,61%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya tenaga kebersihan sehingga tercipta lingkungan yang bersih di 3 (tiga) kelurahan dengan realisasi 100%.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 263.605.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 263.605.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 241.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 241.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan sebanyak 115 kader posyandu balita dan sebanyak 35 kader posyandu usila di 31 (tiga puluh satu) posyandu dengan realisasi 100%.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 21.805.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 21.805.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya penilaian perlombaan se – kelurahan Kecamatan Dumai Barat dengan realisasi 100%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 91.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 91.750.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 91.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 91.750.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terwujudnya penyelenggaraan STQ di Kecamatan Dumai Barat dengan realisasi 100%.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 305.210.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 289.079.149,- atau 94,71% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Dukungan Operasional Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 305.210.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 289.079.149,- atau 94,71%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya kegiatan operasional dikelurahan/ Tersedianya kebutuhan kelurahan sebanyak 4 kelurahan dengan realisasi 100%.

**Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT**

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 584.137.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 584.137.850,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan:

**a) Pembinaan LPMK dan RT**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 584.137.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 584.137.850,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan RT dan LPMK untuk mewujudkan peningkatan kinerja RT dan LPMK sebanyak 69 orang RT dan 4 orang LPMK dengan realisasi 100%.

**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

Pada Tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 44.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 44.300.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

**a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 44.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 44.300.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2016 dengan realisasi 100%.

**Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan**

Pada Tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 61.366.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 61.366.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

**a) Pembinaan PKK Kecamatan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 61.366.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 61.366.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersusunnya laporan kegiatan PKK di kecamatan Dumai Barat Dengan realisasi 100%.

**Prestasi dan Penghargaan**

Prestasi/ Penghargaan yang diraih selama 1 (satu) tahun terakhir (2016), Kecamatan Dumai Barat telah mengikuti beberapa perlombaan dan seleksi baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi. Uraian prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Barat diantaranya adalah :

**Tabel 4. 59**  
**Prestasi dan Penghargaan Yang di raih Kurun Waktu Tahun 2016**

No	Uraian Prestasi	Pemenang	Tingkat Lomba	Penyelenggara
1.	Juara Umum MTQ	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai	Kesra
2.	Juara I Bina Keluarga Lansia (BKL)	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai	BKB PPA Kota Dumai
3.	Juara II Lomba Pengukuhan antar Kader PKK	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
4.	Juara II Lomba Bina Keluarga Lansia	Kec. Dumai Barat	Provinsi Riau	BKB PPA Provinsi

No	Uraian Prestasi	Pemenang	Tingkat Lomba	Penyelenggara
5.	(BKL) Lomba Kelompok Juara III Lomba Pidato antar ketua TP PKK Kecamatan	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai	Pisau PKK Kota Dumai

Sumber : Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

**Problematika dan Solusi**

Pada Tahun 2016, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kecamatan Dumai Barat sebesar Rp. 2.664.000.000,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 59.520.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.733.559.774,- atau sebesar 99,06%, jumlah mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan di Kecamatan Dumai Barat. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai program dan kegiatan di Kecamatan induk Khususnya.

Mencermati hal di atas, mengingat terbatasnya APBD Kecamatan Dumai Barat, maka sangat dibutuhkan adanya tambahan dana dari APBD Kota Dumai, untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Dumai Barat ke depannya.

**Kondisi Sarana dan Prasarana**

Belum optimalnya peran musrembang dalam penataan dan penggunaan ruang serta sarana dan prasarana gedung kantor belum memadai sebagai penunjang pemberi layanan kepada masyarakat serta kurangnya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk menciptakan lingkungan bersih di Kecamatan Dumai Barat yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, khususnya untuk jalan dan gang tidak bisa dilewati mobil/ truk sampah serta lingkungan yang sering berubah.

**KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggarannya 2016 sebagai berikut :

*Tabel 4. 60*  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Medang Kampai Tahun 2016**

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir	Realisasi Tahun 2016	Capaian (dalam %)
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	85%	82,18%	90,83%
Persentase penanganan persampahan	95%	94,79%	91%
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	85%	100%	98,4%
Kualitas data pendukung perencanaan dan penyelenggara pemerintah	85%	100%	100%
Kualitas suberdaya lembaga masyarakat	90%	100%	98,77%
Cakupan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara	96%	100%	97,5%

Sumber : Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas dalam pencapaian sasaran terdapat beberapa capaian kinerja tersebut sama dengan target atau sudah mencapai target dan melewati capaian target capaian kinerja tahun dapat dilihat uraian dibawah ini :

1) Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan disiplin aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Program peningkatan pelayanan Kelurahan dapat dilihat dalam analisis anggaran berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, sebagai pejabaran lebih lanjut perbandingan program pada tahun 2014-2016 terdapat program kegiatan sebanyak 4 (empat) Program pada indikator kinerja sasaran. Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan disiplin aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Program peningkatan pelayanan Kelurahan Pada tahun 2014 Target anggaran lebih kecil dibandingkan target anggaran pada tahun 2015 lebih besar dan pada tahun 2016 target anggarannya lebih besar dibandingkan target anggaran pada tahun sebelumnya.

Persentase realisasi pada Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan disiplin aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Program peningkatan pelayanan Kelurahan pada tahun 2016 yang terealisasi dengan target sebesar 82,18%.

Meskipun demikian, capaian kinerja menunjukkan kualifikasi baik karena secara umum pelaksanaan Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan disiplin aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Program peningkatan pelayanan Kelurahan dapat dilaksanakan secara maksimal karena ada yang bersifat rutin.

2) Persentase Penanganan Persampahan

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dapat dilihat dalam analisis anggaran berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, sebagai pejabaran lebih lanjut perbandingan program pada tahun 2014-2016 terdapat program kegiatan sebanyak 1 ( satu ) Program pada indikator kinerja sasaran. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan pada tahun 2014 target anggaran lebih kecil dibandingkan target anggaran tahun 2015. Namun persentase realisasi pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan pada tahun 2016 dengan realisasi 99,79% dengan target capaian 95%. sudah mencapai target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik) meskipun demikian, capaian kinerja menunjukkan kualifikasi baik karena secara umum

pelaksanaan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dapat dilaksanakan secara maksimal.

3) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik dan prasarana aparatur dapat dilihat dalam analisis anggaran berikut ini.

Dimana tingkat capaian Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sudah memenuhi target capaian atau 100%. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 menyesuaikan indikator 2016 dimana tingkat capaian 2014 lebih kecil dengan target capaian atau 70% dan tahun 2015 juga sudah memenuhi target capaian atau 80%, pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan target 85% dan realisasi anggaran mencapai 100%. Capaian Kinerja ini memenuhi target yang diinginkan.

4) Kualitas data pendukung perencanaan dan penyelenggara pemerintah daerah

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian program penyebarluasan informasi pemerintahan daerah, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dapat dilihat dalam analisis anggaran berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, sebagai pejabaran lebih lanjut perbandingan program pada tahun 2014-2016 terdapat program penyebarluasan informasi pemerintahan daerah, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh pada indikator kinerja sasaran. Pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pada tahun 2014 Target anggaran lebih kecil dibandingkan target anggaran pada tahun 2015 lebih besar dan Program penyebarluasan informasi pemerintahan daerah serta Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh belum terlaksana. Namun sebaliknya persentase realisasi pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa pada tahun 2016 dengan realisasi penyerapan anggaran 100%. adapun indikator kinerja keluarannya adalah Usulan Rencana Musrenbang Tahun 2016 yang terealisasi dengan Target Sebesar 100%. Capaian Kinerja ini tidak memenuhi target yang diinginkan karena banyaknya Usulan yang tidak terakomodir oleh SKPD teknis kegiatan tersebut. Untuk itu kiranya SKPD Teknis terkait kedepannya lebih memperhatikan usulan dari kegiatan yang telah diprioritaskan pada Musrenbang tingkat kecamatan Medang Kampai.

5) Kualitas Sumberdaya Lembaga Masyarakat

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat, Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan Program peningkatan kinerja LPMK dan RT dapat dilihat dalam analisis anggaran berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, sebagai pejabaran lebih lanjut perbandingan program pada tahun 2014-2016 terdapat program kegiatan sebanyak 3 (tiga) Program pada indikator kinerja sasaran. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat, Pada tahun 2014 Target anggaran lebih kecil dibandingkan target anggaran pada tahun 2015 lebih besar dan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2014 target anggarannya lebih kecil dibandingkan target anggaran pada tahun 2015 lebih besar dan Program peningkatan kinerja LPMK dan RT pada tahun 2014 target anggarannya lebih kecil dibandingkan target anggaran pada tahun 2015 lebih besar.

Namun sebaliknya persentase realisasi pada program peningkatan kinerja lembaga masyarakat pada tahun 2016 yang terealisasi dengan target sebesar 83,48% dan persentase realisasi pada Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2016 yang terealisasi dengan target sebesar 100% mencapai target dan persentase realisasi pada peningkatan kinerja LPMK dan RT pada tahun 2016 yang terealisasi dengan capaian target sebesar 99,38% capaian.

Meskipun demikian, capaian kinerja menunjukkan kualifikasi baik karena secara umum pelaksanaan Program program peningkatan kinerja lembaga masyarakat, Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan Program peningkatan kinerja LPMK dan RT dapat dilaksanakan secara maksimal.

6) Cakupan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian Program pengembangan wawasan kebangsaan dan Program pelaksanaan penghormatan hari-hari besar dapat dilihat dalam analisis anggaran berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, sebagai pejabaran lebih lanjut perbandingan program pada tahun 2014-2016 terdapat program kegiatan sebanyak 2 ( Dua ) Program pada indikator kinerja sasaran. Program Pengembangan wawasan kebangsaan Pada tahun 2014 target anggaran sama dengan target anggaran pada tahun 2015 lebih besar dan Program Pelaksanaan Penghormatan hari-hari besar tidak dapat terlaksana beberapa tahun ini. Namun sebaliknya persentase realisasi pada program pengembangan wawasan kebangsaan pada tahun 2016 yang terealisasi dengan target sebesar 100%, lebih besar dibandingkan realisasi yang dicapai pada tahun lainnya dan persentase realisasi pada program penghormatan hari-hari besar masih dibawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang baik) selama beberapa tahun. Meskipun demikian, capaian kinerja menunjukkan kualifikasi baik karena secara umum pelaksanaan program pengembangan wawasan kebangsaan dapat dilaksanakan secara maksimal, adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terwujudnya penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan Tahun 2016. Capaian Kinerja ini memenuhi target yang diinginkan.

Anggaran Belanja Kecamatan Medang Kampai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.060.829.400,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.952.789.400,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.108.040.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi 96,08%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator Hasil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah cakupan pelayanan sampah skala Kecamatan dengan capaian 65%. Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 37.071.600,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 35.139.600,- atau 94,79%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 37.071.600,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 35.139.600,- atau 94,79%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya pelayanan persampahan pada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Indikator Hasil Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah persentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan dengan capaian 85%. Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 240.876.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 240.876.000,- atau 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 217.100.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 217.100.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usia di kecamatan dan honorarium tenaga kader posyandu sebanyak 26 posyandu selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 23.776.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 23.776.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penilaian/ perlombaan Kelurahan se Kecamatan Medang Kampai dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator Hasil Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dengan capaian 80%. Jumlah anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 73.945.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 73.945.000,- atau 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 73.945.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 73.945.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang keagamaan maka capaian kinerja sebesar 100%.

#### Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Indikator Hasil Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan adalah Rata-rata prosentase terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dengan capaian 85%. Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 249.995.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 196.219.297,- atau 78,49%.

##### a) Dukungan Operasional Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 249.995.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 196.219.297,- atau 78,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya pelayanan yang prima pada masyarakat maka capaian kinerja sebesar 100%.

#### 5. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Indikator Hasil Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT adalah persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat Kecamatan dengan capaian 85%. Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 323.012.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 321.012.000,- atau 99,38%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### a) Pembinaan LPMK dan RT se kota Dumai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 323.012.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 321.012.000,- atau 99,38%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya honorarium LPMK dan RT se Kecamatan medang kampai selama 12 bulan dan terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurusan LPMK dan RT sebanyak 74 orang maka capaian kinerja sebesar 100%.

**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

Indikator Hasil Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa adalah persentase usulan program/kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD dengan capaian 85%. Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 70.160.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 70.160.000,- atau 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
  - Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 70.160.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 70.160.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang berbasis partisipasi, aspiratif dan akomodatif pembangunan tahun 2016 maka capaian kinerja sebesar 100%.

**Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan**

Indikator Hasil Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan adalah Jumlah kelembagaan organisasi perempuan di tingkat Kecamatan dengan capaian 70%. Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 51.138.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 42.688.595,- atau 83,48%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Pembinaan PKK Kecamatan
  - Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 51.138.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 42.688.595,- atau 83,48%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Permasalahan Dan Solusi**

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Medang Kampai Tahun 2016 sebesar Rp. 2.108.040.000,- berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai digunakan untuk mengakomodir 10 (sepuluh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Anggaran tersebut jika dibandingkan dengan beban kerja Kecamatan Medang Kampai masih belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh kecamatan agar pelayanan pada masyarakat dapat optimal.

Mencermati hal di atas, mengingat terbatasnya APBD Kecamatan Medang Kampai, maka sangat dibutuhkan adanya tambahan anggaran dari APBD Kota Dumai, untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medang Kampai ke depannya.

### Sarana Dan Prasarana

Belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang serta belum adanya sistem dan data informasi yang akurat. Selain itu masih banyaknya infrastruktur jalan dan fase yang perlu perbaikan

## KECAMATAN BUKIT KAPUR

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Bukit Kapur RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan capaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 61  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi tahun 2016	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	60 %	60 %	100%
Kualitas data pendukung perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	60 %	60 %	100%
Kualitas sumber daya lembaga masyarat	60 %	60 %	100%
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	60 %	60 %	100%

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing - masing kinerja tersebut. Nilai capaian Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2016 dapat dilihat dari rencana tingkat capaian pada rencana kinerja tahunan terhadap realisasi kinerja capaian sasaran. Adapun rincian capaian sasaran tahun 2016 sebagaimana berikut ini :

1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik  
Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan pelayanan kelurahan
- d. Program peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Realisasi Anggaran :

- a. Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran ini sebesar Rp.1.015.580.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.943.791.555,- atau 92,9%
- b. Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.80.000.000,- atau 100%

c. Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan pelayanan kelurahan ini sebesar Rp.321.472.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.309.951.949,- atau 96,3%

d. Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ini sebesar Rp.31.472.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.061.000,- atau 98,7%.

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan non pelayanan dasar sehingga arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem layanan publik.

1) Kualitas data pendukung perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian :

a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Realisasi Anggaran :

Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini sebesar Rp.48.095.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.48.095.000,- atau 100%

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas aparatur yang berkarakter melayani sehingga arah kebijakan meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian :

a. Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT

b. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

c. Program menginsentifkan penanganan pengaduan masyarakat

Realisasi Anggaran

a. Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT ini sebesar Rp.762.046.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.762.046.400,- atau 100%

b. Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%

Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program menginsentifkan pembangunan pengaduan masyarakat ini sebesar Rp.272.925.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.272.925.000,- atau 100%

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sementara strategi dari indikator diatas adalah memperkuat kelembagaan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat melayani sehingga arah kebijakan meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat pembangunan.

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat.

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian :

- a. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Realisasi Anggaran :

- a. Jumlah anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini sebesar Rp.25.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.25.700.000,- atau 100%
- b. Jumlah Anggaran Tahun 2016 yang tersedia untuk melaksanakan Program pengembangan wawasan kebangsaan ini sebesar Rp.84.575.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.84.575.000,- atau 100%

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa sehingga arah kebijakan meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat.

Anggaran Belanja Kecamatan Bukit Kapur pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.065.390.080,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.411.101.080,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.654.289.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 5.304.916.505,- atau terserap 98,04% dan belanja langsung terserap Rp. 2.588.670.012,- atau 97,53%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.015.580.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.943.791.555,- atau 93 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 100 %.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.46.723.350,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 53%.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 82%.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.156.750.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.156.750.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%.

e) Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.50.527.000,- (lima puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.50.527.000,- (lima puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau 100%.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.49.387.000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.49.387.000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau 100%.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.13.535.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.13.535.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 100%.

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.47.980.800,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau 100%.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 53%.

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.131.700.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.131.700.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 100%.

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.186.731.800,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.186.538.405,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau 100%.

Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100%.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau 100%.

b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.35.000.000,- ((tiga puluh lima juta rupiah) atau 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.48.095.000,- (empat puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp.48.095.000,- (empat puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.9.095.000,- (sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 9.095.000,- (sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 100%.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau 100%.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau 100%.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.31.472.800,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.31.472.800,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 31.472.800,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.31.472.800,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau 100%.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.84.575.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.84.575.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan kehidupan beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.84.575.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.84.575.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 100%.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.272.925.000,- (dua ratus tujuh puluh dua sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

172.925.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau 100%.

b) Penilaian kinerja unit pelayanan publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.15.525.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.15.525.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 100%.

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.321.745.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 309.951.949,- (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 96% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Dukungan Operasional Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.321.745.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 309.951.949,- (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 96%.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.762.046.400,- (tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.762.046.400,- (tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan LPMK dan RT se - Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.762.046.400,- (tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.762.046.400,- (tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 100%.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 100%.

**Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

**a) Pembinaan PKK Kecamatan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%.

**Asi Dan Penghargaan**

Kecamatan Bukit Kapur adalah salah satu kecamatan pemekaran yang luas wilayahnya ± km<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) Kelurahan meliputi :

- Kelurahan Bagan Besar
- Kelurahan Bukit Nenas
- Kelurahan Bukit Kayu Kapur
- Kelurahan Gurun Panjang
- Kelurahan Kampung Baru

Kecamatan Bukit Kapur menjadi barometer pelayanan kepada masyarakat. Prestasi yang telah di peroleh Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2014 s/d 2016 adalah :

**Tabel 4. 62**  
**Prestasi Kelurahan pada Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2016**

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
<b>Tahun 2014</b>				
1	Juara II Lomba Kelurahan Terbaik	Kelurahan Kampung Baru	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
2	Juara III Lomba Gotong Royong Terbaik	Kelurahan Kampung Baru	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
3	Juara I Lomba Uek SP Tingkat	Kelurahan Kampung Baru	Tingkat Kecamatan	Camat Bukit Kapur
<b>Tahun 2015</b>				
1	Juara III Lomba Kelurahan Terbaik	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
2	Juara Harapan II Lomba Gotong Royong Terbaik	Kelurahan Gurun Panjang	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
<b>Tahun 2016</b>				
1	Juara I Lomba Kelurahan Terbaik	Kel. Gurun Panjang	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
2	Juara III Lomba Kelurahan Terbaik	Kel. Gurun Panjang	Provinsi Riau	BPM Pembangunan Desa (Bangdes)

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

**Problematika**

Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran masyarakat serta penggerak massa dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang lambat dan aparatur yang kurang profesional, serta belum banyaknya SDM kecamatan yang diikuti dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur kecamatan.

Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi didalam menjalankan tugas, masih rendahnya kepedulian pihak swasta/ pengusaha terhadap pembangunan, serta masih rendahnya peran swasta dalam pembangunan wilayah.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya dan masih lemahnya koordinasi antar Ketua RT, masyarakat maupun unsur Kecamatan terhadap pelaksanaan Siskamling pada masing-masing RT.

Penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Bukit Kapur ditingkatkan secara optimal dalam menangani urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Kecamatan Bukit Kapur akan terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal, akan segera mengusulkan SDM kecamatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam bertugas.

Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas, peran serta aktif dari masyarakat, swasta dan pengusaha yang mendukung program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Bukit Kapur, adanya model musyawarah perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up untuk mengoptimalkan penataan dan penggunaan ruang pembangunan wilayah dan masyarakat Kecamatan Bukit Kapur.

Diadakannya koordinasi antar Ketua RT yang dikoordinir Lurah dengan masyarakat dan unsur Kecamatan agar kepedulian terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggal terpelihara dan terjaga dengan diadakannya Siskamling.

**Penutup/ Hambatan**

Tahun 2016, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bukit Kapur setelah perubahan sebesar Rp.2.692.140.000.- jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan di Kecamatan Bukit Kapur. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan di Kecamatan Bukit Kapur.

mencermati hal di atas, mengingat terbatasnya APBD Kecamatan Bukit Kapur, maka sangat diharapkan adanya tambahan dana dari APBD Kota Dumai, untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan di Kecamatan Bukit Kapur ke depannya.

### KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Sungai Sembilan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka capaian pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 63

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi s/d tahun 2016	Capaian (dalam %)
Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan serta Sosialisasi	0 Orang	0 Orang	0
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Memadai	0 orang	0 Orang	0
Honorarium Kader Posyandu dan Usila se Kecamatan Sungai Sembilan	12 Bulan	12 Bulan	100
Fasilitas Persiapan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100
Dokumen Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Menyelenggarakan MTQ / STQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Sumber : Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

Adapun pencapaian Kinerja Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Honorarium Kader Posyandu dan Usila se Kecamatan Sungai Sembilan  
 Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 280.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 280.800.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Honorarium Kader Posyandu dan Operasional Posyandu selama 12 Bulan dan terealisasi selama 12 Bulan atau 100 %. Capaian Kinerja ini memenuhi target yang diinginkan dengan terbayarnya Honorarium Kader Posyandu dan Usila serta Operasional Posyandu se Kecamatan Sungai Sembilan selam 12 Bulan.  
 Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak serta orang lanjut usia yang berada pada wilayah setempat yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan dibantu oleh petugas kesehatan dari dan oleh masyarakat setempat.
- Fasilitas Persiapan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan  
 Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.500.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Fasilitas Persiapan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Sungai

Sembilan sebanyak 5 Kelurahan dan terealisasi sebesar 100 %. Capaian Kinerja ini memenuhi target yang diinginkan dengan adanya Laporan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2016.

Tujuan utama Kegiatan ini adalah mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan Pembangunan di Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan. Didalam pelaksanaan Perlombaan Kelurahan ini juga bisa melihat sampai dimana pelaksanaan Program – program Pemerintah yang telah diberikan selama ini, baik APBN, APBD Provinsi ataupun APBD Kota sendiri.

Dokumen Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sungai Sembilan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 32.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100 %. adapun indikator kinerja keluarannya adalah Dokumen Musrenbang Tahun 2016 di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 Dokumen Usulan Musrenbang Tahun 2016 dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen Musrenbang Tahun 2016 atau 100%.

Tujuan Utama Kegiatan ini adalah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Menyelenggarakan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 78.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 78.400.000,- atau 100 %. adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terwujudnya Penyelenggaraan STQ tingkat Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan atau 100%

Tujuan Utama Kegiatan ini adalah untuk menyaring Qori dan Qoriah terbaik untuk nantinya sebagai perwakilan Kecamatan Sungai Sembilan berlomba di Tingkat Kota Dumai.

Anggaran Belanja Kecamatan Sungai Sembilan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 11.464.550,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.190.784.550,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.990.680.000,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.955.282.148,- atau terserap 96,78% dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.955.282.148,- atau terserap 97,52% dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.225.323.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.211.973.342,- atau 98,91% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 74.580.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 74.340.000,- atau 99.68%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Materai dalam satu tahun sebanyak 540 materai dan terealisasi sebanyak 500 Materai Surat atau 92.59%.

b) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 56.400.000 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 53.895.163,- atau 95.56%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pembayaran Tagihan listrik dan pembelian air selama satu tahun sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

c) **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 81.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 81.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah sewa peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

d) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 28.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 21.758.000,- atau 77.71%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pembayaran Honorarium Supir dan Perpanjangan STNK selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

e) **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 258.866.300,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 258.850.580,- atau 99.99%. Adapun indikator kinerja keluaran Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Pembelian Peralatan dan Bahan Pembersih selama 12 Bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

f) **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 14.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 14.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumput sebanyak 48 Kali dan terealisasi 48 Kali atau 100%.

g) **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.766.700,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 62.766.700,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 Bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

h) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 24.280.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 20.799.800,- atau 85,67%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.830.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 11.830.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.572.000,- atau 84,67%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan bacaan/Koran sebanyak 1800 exp dan terealisasi 1560 exp atau 86,67%.

k) Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 48.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 48.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah makan minum rapat dan tamu selama 11 bulan dan terealisasi 11 bulan atau 100%.

l) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 253.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 252.961.099,- atau 99,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 dan terealisasi 12 atau 100%.

m) Penyediaan Jasa Tenaga Kemanan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 306.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 306.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terbayarnya jasa petugas jaga malam kantor Camat sungai Sembilan 180 orang/bulan dan terealisasi 180 org/bulan atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 226.320.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 224.116.950,- atau 99,03% yang dialokasikan melalui kegiatan - kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Mebeleur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 155.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 153.806.950,- atau 99,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Kursi Plastik dan Kursi Futura sebanyak 468 Unit dan terealisasi sebanyak 468 Unit atau 100 %.

b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 44.000.000,- atau 97,78%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Rehab Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket dan terealisasi sebanyak 1 Paket atau 100%.

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 26.230.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 26.310.000,- atau 99,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terawatnya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 Mobil dan terealisasi 1 Mobil atau 100 %.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 51.980.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 51.980.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 12.980.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 12.980.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 4 Triwulan dan terealisasi 4 Triwulan atau 100 %.

b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD sebanyak 2 Laporan dan terealisasi 2 Laporan atau 100 %.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 21.784.000,- atau 99,02%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Laporan Akhir Tahun Anggaran 2016 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 35.499.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 35.452.000,- atau 99.87% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 35.499.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 35.452.000,- atau 99.87%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium petugas persampahan selama 12 Bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 302.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 302.300.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 280.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 280.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium Kader posyandu selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100 %.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 21.500.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Fasilitas Persiapan Lomba Kelurahan tingkat Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 5 Kelurahan dengan realisasi 100 %.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 78.400.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 78.400.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Kehidupan beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 78.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 78.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terwujudnya Penyelenggaraan STQ tingkat Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan atau 100 %.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 290.258.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 270.718.856,- atau 93.27% yang dialokasikan melalui kegiatan:

Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 290.258.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 270.718.856,- atau 93,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Kelurahan yang diberikan dana dukungan sebanyak 5 Kelurahan dengan realisasi 100%.

Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 698.400.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 698.400.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 698.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 698.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium RT dan LPMK se Kecamatan Sungai Sembilan selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32.200.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah 32.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen musrenbang tahun 2016 di kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 Dokumen dan Terealisasi 1 Dokumen atau 100 %.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 49.741.000,- atau 99,48% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.741.000,- atau 99,48%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah laporan kegiatan PKK selama 1 tahun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.

Tabel 4.64 Permasalahan Serta Langkah Antisipatif Skpd Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2016

Permasalahan	Kondisi yang diinginkan	Langkah Antisipatif
Terbatasnya anggaran, dimana pada tahun 2016, APBD Kota Dumai mengalami rasionalisasi anggaran,	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan di dalam	Diperlukan perencanaan yang matang dalam penganggaran, serta informasi yang seluas-

Permasalahan	Kondisi yang diinginkan	Langkah Antisipatif
Sehingga beberapa kegiatan dipilih dan dikelompokkan untuk menjadi kegiatan prioritas untuk dilaksanakan.	penganggaran harus selaras dan seimbang dengan kebutuhan organisasi. Adapun beberapa pemilahan kegiatan prioritas harus benar – benar melihat aspek sumber daya manusia, kemungkinan pelaksanaan anggaran, serta pencapaian sasaran organisasi yang telah ditargetkan di dalam rencana strategis.	luasnya, agar kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan perencanaan serta target - target dapat tercapai dengan optimal.
Perbatasannya sumber daya manusia dari segi kualitas dan efektifitas bidang pekerjaannya dan masih rendahnya tingkat pengetahuan aparatur di Kecamatan.	Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diimbangi dengan kualitas pengembangan diri, mengingat bahwa kecamatan kini telah menjadi SKPD utuh, sehingga diperlukan SDM yang berkualitas.	Pembinaan kepada SDM di Kecamatan dilakukan secara antisipatif, dengan menerapkan sistem reward and punishment di Kecamatan Sungai Sembilan. Selain itu diperlukan pembinaan secara keseluruhan dalam pemahaman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan kegiatan.

## URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

### URUSAN PILIHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN

#### S PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

pelaksanaan urusan pilihan pertanian dan kehutanan sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kehutanan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2016. Pencapaian kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai sampai dengan tahun anggaran dapat dilihat pada *Tabel 4. 65* berikut

**Tabel 4. 65**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai Tahun 2016

No	Sasaran indikator kinerja	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi s/d tahun 2016	Capaian (%)
<b>A. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat</b>				
1	Angka Kecukupan Protein	50 gr/kap/hari	50,05 gr/kap/hari	100,10%
<b>B. Meningkatnya Jumlah Produksi dan Produktifitas Pertanian</b>				
1	Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	124.553 Ton	102.834,07 Ton	82,56 %
2	Jumlah Penyuluh Terlatih	4 Orang	4 Orang	100,00%
<b>C. Meningkatkan Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</b>				
1	Luas Lahan Kritis Yang Di Rehabilitasi	71,5 Ha	12,5 Ha	17,48%

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Dumai

Dari *Tabel 4. 65* diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kinerja sampai dengan tahun 2016 tingkat pencapaiannya cukup baik dan memuaskan, bahkan ada beberapa indikator kinerja sasarnya diatas seratus persen.

Sasaran Meningkatkan Katahanan Pangan Masyarakat ini dilaksanakan melalui program pembangunan peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). Sasaran ini mempunyai

Indikator kinerja yakni ; Angka Kecukupan Protein.

Standar untuk konsumsi gizi dan protein nasional dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 52 gr/kapita/hari. Sedangkan target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2016 yakni Angka Kecukupan Protein sebesar 50 gr/kapita/hari.

Capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Protein sampai dengan tahun 2016 sangat memuaskan dan melebihi target yang telah ditetapkan yakni 50,05 gr/kapita/hari atau 100,10% dari target 50 gr/kapita/hari.

#### Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi dan Produktifitas Pertanian

Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi dan Produktifitas Pertanian mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

##### a) Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 3 program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Target indikator kinerja Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan pada tahun 2016 sebesar 124.553 Ton dengan capaian sebesar 102.834,07 Ton atau 82,56%. Indikator kinerja ini tidak tercapai 100% dikarenakan pada tahun 2016 produksi Nenas tidak tercapai maksimal, hal ini dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu.

##### b) Jumlah Penyuluh Terlatih

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui program utama, yaitu Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan. Target indikator kinerja Jumlah Penyuluh Terlatih pada tahun 2016 sebanyak 4 Orang dengan realisasi 4 orang atau 100%.

#### Sasaran Meningkatnya Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Sasaran Meningkatnya Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan mempunyai indikator kinerja Luas Lahan Yang Direhabilitasi dengan target luasan pada tahun 2016 sebesar 71,5 Ha.

Sasaran ini di dukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Capaian indikator ini hanya sebesar 12,5 Ha atau

sebesar 17,48%. Hal ini dikarenakan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdapat satu

kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan ini termasuk dalam kategori hibah/bansos sehingga

pelaksanaannya menunggu perubahan Peraturan Walikota Dumai tentang Hibah dan Bansos.

Sampai akhir tahun 2016 perubahan Peraturan Walikota Dumai tentang Hibah dan Bansos belum

ada, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

Anggaran Belanja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 16.508.844.771,4,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung

3.347.371,4,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.573.497.400,-. Untuk realisasi tidak langsung menjadi Rp. 7.636.604.473,- atau terserap 96,24% dan belanja langsung Rp. 8.275.900.928,- atau 96,53%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 di bidang dan Kehutanan disampaikan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. Rp. 323.766.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 322.551.000,00 atau 99,84% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 323.766.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 322.551.000,00 atau 99,84% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah even yang diikuti kelompok tani (Pekan Daerah KTNA Propinsi Riau) 1 Kali dengan realisasi 1 kali.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/ Perkebunan)

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 557.615.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 555.740.272,00 atau 99,66% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 98.353.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 98.268.122,00 atau 99,91% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.

b) Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 142.779.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 142.137.556,00 atau 99,55% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi 12 bulan dengan realisasi 12 bulan. Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi 2 kali dengan realisasi 2 kali.

c) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 32.685.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.299.000,00 atau 98,82%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok pengembang lahan pekarangan 4 kelompok dengan realisasi 4 kelompok.

**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 162.346.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 161.594.487,00 atau 99,54% dari anggaran.

Adapun indikator kinerja keluaran ; Berpartisipasi dalam lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya sosialisasi menu B2SA utk anggota PKK tingkat kelurahan 7 kali dengan realisasi 7 kali, Terlaksananya lomba cipta menu B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat Kota Dumai 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI 10 kali dengan realisasi 10 kali.

**Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu produk perkebunan, produk pertanian**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 121.452.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.441.107,00 atau 99,99% dari anggaran.

Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan.

**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan**

pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 228.155.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 238.155.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 229.566.750,00 atau 96,39% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

**Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 94.302.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.325.000,00 atau 97,90% dari anggaran.

Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan tanaman di KPT 12 bulan dengan realisasi 12 bulan

**Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 101.708.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 111.708.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 109.121.750,00 atau 97,68% dari anggaran.

Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan 1 kali dengan realisasi 1 kali.

**Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 32.145.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.120.000,00 atau 87,48% dari anggaran.

Adapun indikator kinerja keluaran ; terlaksananya pembangunan kebun extention center kelapa sawit melalui pemeliharaan tanaman kelapa sawit di KPT 3 Ha dengan realisasi 3 Ha.

**Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan**

pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 175.724.000,00 dengan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 167.622.760,00 atau 95,39% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 87.920.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.253.000,00 atau 98,10% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah bimtek/temu lapang/sosialisasi budidaya tanaman perkebunan 3 kali dengan realisasi 3 kali.

b) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 87.804.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.369.760,00 atau 92,67% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Luas intensifikasi tanaman perkebunan 50 Ha dengan realisasi 50 Ha, Terlaksananya pembinaan/perlindungan tanaman perkebunan 50 KK dengan realisasi 50 KK.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 783.792.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 654.797.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 642.692.289,00 atau 98,15% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 225.792.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 223.548.289,00 atau 99,01% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/magang dan sertifikasi profesi penyuluh pertanian 4 orang dengan realisasi 4 orang.

b) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 558.000.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 429.005.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 419.144.000,00 atau 97,70% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Pembangunan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) 1 Unit dengan realisasi 1 Unit. Kegiatan ini bersumber dana dari DAK (Dana Alokasi khusus) bidang kedaulatan pangansub bidang pertanian.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.617.824.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 651.482.550,00 atau 40,27% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih tanaman kehutanan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 147.225.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 145.550.000,00 atau 98,86% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan 50.000 batang dengan realisasi 50.000 batang.

b) Kegiatan Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 122.435.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 122.075.000,00 atau 99,71% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 3.000 batang dengan realisasi 3.000 batang.

c) Kegiatan Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 177.455.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 160.372.800,00 atau 90,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pemeliharaan dan penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 7.100 batang dengan realisasi 7.100 batang

d) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 183.829.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 182.979.750,00 atau 99,54% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pendampingan Kegiatan RHL 5 kegiatan dengan realisasi 5 kegiatan.

e) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 946.375.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 00,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Rakyat 90 Ha dengan realisasi 0 Ha.

Rendahnya serapan anggaran kegiatan ini disebabkan karena kegiatan ini termasuk dalam kategori hibah/bansos sehingga pelaksanaannya menunggu perubahan Peraturan Walikota Dumai tentang Hibah dan Bansos. Sampai akhir tahun 2016 perubahan Peraturan Walikota Dumai tentang Hibah dan Bansos belum ada, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

f) Kegiatan Bulan Menanam Nasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 40.505.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.505.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Penanaman Bulan Menanam Nasional 1.000 batang dengan realisasi 1.000 batang.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 713.984.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 572.612.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 567.405.200,00 atau 99,09% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 713.984.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 572.612.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 567.405.200,00 atau 99,09% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pengamatan Dini Kebakaran dan Pemadaman hutan dan lahan 14 kali dengan realisasi 14 kali

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 212.214.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 112.402.280,00 atau 52,97% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 212.214.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 112.402.280,00 atau 52,97% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan penebangan liar dan perambahan hutan 18 kali dengan realisasi 9 kali.

Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan ini karena kegiatan ini dilaksanakan dibawah bidang kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai, sesuai dengan amanat UUD nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan kehutanan merupakan urusan konkuren dan urusan bidang kehutanan terhitung 2 Okotober 2016 akan menjadi kewenangan propinsi. Oleh karena itu kegiatan hanya bisa dilaksanakan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan,

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 250.030.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 232.139.000,00 atau 92,84% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pemeliharaan Penghijauan Kawasan Terbuka

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 250.030.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 232.139.000,00 atau 92,84% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Pemeliharaan Penanaman penghijauan daerah terbuka tahun I sebanyak 19.000 batang dengan realisasi 19.000 batang. Kegiatan ini

bersumber dana dari DAK (Dana Alokasi khusus) bidang lingkungan hidup dan kehutanan sub bidang kehutanan.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,

Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.170.086.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.170.086.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.160.442.000,00 atau 94,33% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

1) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 141.372.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 141.372.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pemantauan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun 3 bulan dengan realisasi 3 bulan

2) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 28.714.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.070.000,00 atau 66,41% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Pengawasan dan Pengendalian Izin Sarang Burung Walet 12 Bulan dengan realisasi 9 Bulan.

Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan ini karena kegiatan ini awalnya ditargetkan untuk dilakukan pengawasan dan pengendalian izin sarang burung walet selama 12 Bulan dan terlaksana hanya 9 bulan. Hal ini disebabkan karena kegiatan dilaksanakan dibawah bidang kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai, sesuai dengan amanat UUD nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan kehutanan merupakan urusan konkuren dan urusan bidang kehutanan terhitung 2 Oktober 2016 akan menjadi kewenangan propinsi. Oleh karena itu kegiatan hanya bisa dilaksanakan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016.

**asi dan Penghargaan**

Prestasi atau penghargaan yang diterima Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

1. Juara I Adikarya Pangan Nasional "Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan/Petugas Veteriner"  
Tingkat Propinsi Riau (drh.ISMADI)
2. Juara III Adikarya Pangan Nasional "Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan/Penyuluh PNS"  
Tingkat Propinsi Riau (HERMAN, S.Pt)
3. Juara II BPP Terbaik Tingkat Provinsi Riau (BPP Dumai Barat/Dumai Selatan)
4. Juara I Penanaman Pohon Tingkat Kota di Propinsi Riau (tahun penanaman 2015)
5. Penghargaan Pada Acara Pekan Daerah (PEDA) Petani Nelayan Tingkat Provinsi Riau di  
Kec.Siberida Kab.Indragiri Hulu

6. Juara I Asar Terampil
7. Juara I Temu Karya
8. Juara I Okulasi Karet
9. Juara II Lomba Cipta Menu B2SA
10. Juara II Lomba Bujang dan Dara
11. Juara III Lomba Volley Ball Putri
12. Juara III Lomba Gita Nusantara
13. Kelompok tani perkebunan berprestasi penghargaan tingkat Kota Dumai
14. Juara I Kelompok Tani Sumber Jaya Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur
15. Juara II Kelompok Tani Maju Jaya Kel. Guntung Kec. Medang Kampai
16. Juara III Kelompok Tani Rawang Makmur Jaya Kel. Gurun Panjang Kel. Bukit Kapur

## URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN DAN KETERANGAN PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pertanian disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 66

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi tahun 2016	Capaian (%)
Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31	32	103%
Produksi perikanan budidaya	ton	189,93	260,90	137%
Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	ton	28	28	100%
Sertifikasi mutu produk perikanan	jenis	0	0	0
Jumlah kelompok ternak terbina	kelompok	110	110	100%
Populasi ternak unggulan (sapi dan kambing)	Satuan ternak	5.463	5.945	108%
Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	17	17	100%
Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	Kasus	35	79	225%
Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	35	0	0%
Sertifikasi mutu produk peternakan	Jenis	0	0	0

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai

Dari Tabel 4.66 diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kinerja sampai dengan tahun 2016 tingkat pencapaiannya cukup baik dan memuaskan, bahkan ada beberapa indikator kinerja sasarnya diatas seratus persen.

### a) Nilai Konsumsi ikan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 31 kg/kapita/th, hal ini melebihi dari target yaitu 32 kg/kapita/th. Pencapaian yang melebihi target ini dilakukan dengan adanya kegiatan sosialisasi makan ikan atau gemar ikan yang dilakukan oleh Forum Gemar Makan Ikan yang diketua oleh

Walikota Dumai dengan bekerjasama PKK Kota Dumai dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Program yang mencapai kelebihan target ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Hasil Olahan Perikanan. Kegiatan ini dengan melakukan pembinaan terhadap 7 kelompok pengolahan hasil perikanan, sosialisasi di 7 kecamatan Kota Dumai dan mengikuti lomba tingkat nasional setelah menang di lomba menu serba ikan untuk tingkat Provinsi Riau dan meraih juara harapan 2 tingkat nasional.

Produksi perikanan budidaya.

Target dari indikator sasaran ini yaitu 189,93 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 260,90 ton atau 137% dari target, capaian ini tidak terlepas bagaimana upaya peningkatan dengan pendampingan teknologi baik sektor air tawar maupun air payau, berupa teknologi intensif pemeliharaan udang dan peningkatan luasan kolam masyarakat.

Peningkatan produksi hasil olahan perikanan.

Target dari indikator sasaran ini yaitu 28 ton dalam satu tahun dapat tercapai 100%, hal ini karena adanya peningkatan sarana pengolahan tempat penjemuran dan mesin genset yang diberikan pusat melalui dana PUMP untuk tahun 2015. Daya jual hasil produksi juga tidak terlepas dari adanya promosi produk olahan pada pameran dumai expo dan adanya beberapa kunjungan ke instansi baik dari luar Kota Dumai maupun dari dalam, berupa kunjungan mahasiswa, pelajar tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat lanjutan (SLTA).

d) Jumlah kelompok ternak terbina

Target dari indikator sasaran ini yaitu 110 kelompok peternak dan sudah terpenuhi dalam pendampingan. Hal ini merupakan wujud dari Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada Masyarakat. Pendampingan dilakukan terhadap 600 orang peternak yang dilaksanakan oleh 10 orang tenaga pendamping dan 5 orang tenaga pendamping dari APBD tk. I. Tenaga pendamping diperkenalkan dengan calon binaannya sewaktu melakukan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi), setelah itu tenaga pendamping akan mendampingi masing-masing kelompok yang telah ditunjuk oleh dinas sesuai daerah kawasan peternak, dimana ada 7 kecamatan dengan jumlah ternak saat ini kerbau 51 ekor, sapi potong 5.038 ekor, sapi perah 23 ekor, dan kambing 5.995 ekor.

e) Populasi ternak unggulan (sapi dan kambing)

Target dari indikator sasaran ini yaitu 5.463 satuan ternak, hal ini telah tercapai 5.945 satuan ternak atau 108%, bila di terjemahkan dapat diartikan ada satuan ternak dapat dihitung 7 ekor kambing dihitung 1 satuan ternak dan 1 ekor sapi 1 satuan ternak. Mengingat hal ini maka di peroleh jumlah sapi sebesar 5.089 ekor dan 5.995 ekor kambing. Hal ini dilakukan dengan adanya kegiatan redist sapi guliran dari kelompok yang telah dibina untuk mengembangkan lagi

ke kelompok lainnya, selain peningkatan populasi terjadi juga di peroleh nilai sosiak ekonomi dengan semangat meningkatkan pendapat peternak atau peningkatan aset peternak tersebut.

Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 17 kasus. Hakekat kinerja yang ingin dicapai adalah semakin rendahnya tingkat kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan, namun ternyata hal ini tercapai sebesar 17 kasus pencemaran, pola kerja yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan Peredaran Ternak, Bahan Asal Ternak dan Pangan Asal Ternak di Perbatasan Wilayah Kota Dumai yaitu dengan menempatkanlah petugas pengawas peredaran ternak, bahan asal ternak dan pangan asal ternak pada dua lokasi pintu masuk ke Kota Dumai melalui jalur darat. Kedua lokasi tersebut adalah di Rawa Panjang dan Bukit Timah. Pola kerja dari petugas ini adalah melakukan pengamatan dan pendataan terhadap lalu lintas ternak, bahan asal ternak dan pangan asal ternak, yang selanjutnya akan diteruskan kepada kantor Dinas sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner. Petugas ini berjaga setiap hari dengan jumlah personil sebanyak dua orang pada masing-masing lokasi.

2. Pengamatan Produk Bahan Asal Ternak Dan Pangan Asal Ternak;

Kegiatan Pengamatan Produk ini dilakukan dengan cara mendatangi secara berkala pada kelompok sasaran. Di lokasi sarasantim melakukan pengamatan terhadap produk mulai dari:

- Jenis Produk yang dijual;
- Asal bahan pangan;
- Kapasitas penjualan/kuantitas penjualan per periode;
- Sumber/Distributor;
- Kualitas Produk meliputi penampakan (rusak/utuhnya kemasan), tanggal kadaluwarsa, kode produksi, sertifikasi produk (MD, PIRT dan Label halal)

Pada setiap pengamatan terhadap satu kelompok sasaran akan dituangkan dalam berita acara pengawasan. Berita acara ini memuat hal-hal yang menjadi pokok obyek pengamatan sesuai kriteria di atas. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pembinaan di bagian akhir berita acara

pengawasan selalu disertakan saran-saran perbaikan terhadap hasil pengamatan yang dibacakan langsung dihadapan pemilik/pengelola/pedagang bahan pangan di lokasi sasaran.

Sebagai tanda kesepakatan dan komitmen terhadap hasil pengamatan dan saran perbaikan dari tim pengawas maka pemilik/pengelola/pedagang bahan pangan membubuhkan tanda tangan

pada berita acara tersebut. Berita acara pengawasan dibuat rangkap 2 (dua), dimana satu sebagai pertinggal dan yang satu diserahkan kepada pemilik/pengelola/pedagang bahan pangan sebagai

bahan referensi dalam melakukan perbaikan.

### 3. Pengambilan Sampel Produk

Pengambilan sampel terhadap bahan pangan asal hewan dilakukan sesuai kebutuhan atau ditemukannya penyimpangan terhadap pengelolaan produk sehingga patut diduga terjadi perubahan kualitas terhadap produk tersebut. Penyimpangan terhadap produk antara lain :

- Kemasan rusak (bocor, penyok/kembung);
- Terjadi perubahan penampakan warna;
- Timbulnya cairan atau lendir pada produk;
- Melewati tanggal kadaluarsa;
- Terjadinya kesalahan pengelolaan produk, misal tempat menjajakan yang tidak layak, produk packing ulang dan produk curah;
- Tidak ditemukan serifikasi misal MD, PIRT, Kode Produksi ataupun label halal.

Sampel diambil dengan sepengetahuan dokter hewan berwenang, sehingga setiap kali melakukan inspeksi/pengawasan, dalam tim selalu disertakan seorang dokter hewan berwenang. Sampel yang diambil selanjutnya dikirim untuk diperiksa sesuai kebutuhan ke Balai Veteriner Bukit tinggi. Hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan sampel tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemilik/pengelola/pedagang bahan pangan yang diambil sampelnya disertai saran perbaikan terhadap hasil tersebut.

### g) Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis

Target dari indikator sasaran ini yaitu 35 kasus, target ini diharapkan juga turun namun dalam perjalanan kegiatan ini masih ditemukan tinggi yaitu 79 kasus atau 225% dari target.

Tingginya angka kasus penyakit rabies masih mendominasi kasus hewan menular strategis zoonosis terdapat 1 kasus positif rabies hasil laboratorium 70 kasus bebas rabies setelah diobservasi selama 14 hari dan 8 kasus positif rabies hewan liar.

Upaya yang dilakukan oleh instansi adalah :

1. Membentuk tim respon cepat tanggap kasus penyakit hewan (PHMSZ-Non Strategis) dengan kegiatan melakukan pemusnahan hewan tertular penyakit atau Hewan Penular Rabies (HPR).
2. Kegiatan Sosialisasi berupa kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di Aula Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tanggal 15 November 2016, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, petugas kesehatan Puskesmas dan petugas kesehatan hewan di wilayah Kota Dumai

### h) Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis

Target dari indikator sasaran ini yaitu 35 kasus, namun dalam perjalanan kegiatan yang mendukung capaian ini tidak terjadi kasus atau 0 kasus.

Anggaran Belanja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 11.749.131.350,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.571.350,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.394.560.000,-. Untuk realisasi belanja langsung menjadi Rp. 5.137.353.822,- atau terserap 94,94% dan belanja langsung terserap Rp. 1.496.389,- atau 94,48%.

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kesadaran Penegakan hukum Dalam pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Kegiatan Penyuluhan Hukum Dalam pendayagunaan Sumber Daya Laut dialokasikan dana sebesar Rp. 31.915.000,- pada APBD murni dan tidak terjadi perubahan anggaran pada APBD-P,- realisasi anggaran sebesar Rp. 31.915.000,- atau 100%.

Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut tingkat capaian program adalah meningkatnya kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut sebesar 80% dari jumlah nelayan dengan indikator capaian persentase penurunan kasus illegal fishing sebesar 40% dari tahun 2015 dan persentase tingkat kepengurusan Izin kepemilikan usaha sebesar 40% dari tahun 2015.

Indikator kinerja keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan sebanyak 4 trip. Indikator kinerja hasil (outcome) penurunan jumlah pelanggaran dari tahun 2015 sebesar 40% dan persentase peningkatan kepengurusan izin kepemilikan usaha sebesar 40%. Penilaian indikator capaian dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 67  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target capaian		Capaian kinerja
		2015	2016	2016
1	Persentase penurunan kasus illegal fishing	5 kasus	40%	20%
2.	Persentase tingkst kepengurusan izin kepemilikan izin/TDPN	30 TDPN	40%	3%

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai

Tahun 2015 tercatat sejumlah 5 unit kapal yang diberi peringatan secara lisan. Kapal tersebut juga merupakan kapal-kapal yang baru menangkap ikan di wilayah Kota Dumai, jenis pelanggaran yang disangkakan adalah pelanggaran jalur penangkapan, setelah diberi pembinaan kapal-kapal tersebut tidak mematuhi dengan tidak melanggar jalur penangkapan di wilayah Kota Dumai. Atas kepemilikan izin atau TDPN (Tanda Daftar Pencatatan Nelayan) di tahun 2015 terjadi penurunan yaitu sejumlah 30 unit.

Tahun 2016 tercatat sejumlah 1 unit kapal yang diberi peringatan secara lisan. Jenis pelanggaran yang disangkakan adalah pelanggaran jalur penangkapan, selain itu diadakannya sosialisasi dilapangan ketika dilakukan kegiatan pengawasan di laut. Atas kepemilikan izin atau

TDPN (Tanda Daftar Pencatatan Nelayan) di tahun 2016 terjadi penurunan yang drastis yaitu hanya diurus 1 unit kapal, hal ini karena adanya perubahan aturan kepengurusan ke Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai. Bila mencermati angka penurunan pada tabel diatas dapat di telaah bahwa pada tahun 2016 penurunan jumlah trip pengawasan yang sangat rendah atau kurang. Begitu juga terjadi pada indikator kedua jumlah kepengurusan izin mengalami penurunan drastis karena belum tersosialisasinya kepengurusan izin yang di keluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai.

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat melalui :

#### Kegiatan Penyuluhan Budaya Kelautan

dialokasikan dana sebesar Rp. 54.392.000,- pada APBD Murni dan pada APBD-P tidak terjadi perubahan dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 52.542.000,- atau sebesar 96,60%.

Pada Kegiatan Penyuluhan Budaya Kelautan tingkat capaian program adalah persentase peningkatan kesadaran masyarakat pesisir sebesar 80% dari jumlah nelayan. Indikator kinerja keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya upacara peringatan hari nusantara 1 kali kegiatan. Indikator kinerja hasil (outcome) terciptanya pengetahuan dan kesadaran arti penting nusantara sebesar 10%.

Kegiatan yang dilaksanakan hanya upacara bendera peringatan Hari Nusantara ke XIV dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 pada hari kamis di lapangan eks Kantor Walikota Lama.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui :

#### a) Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 77.825.000,- pada APBD murni dan terjadi perubahan pada APBD-P sebesar Rp. 71.946.200,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 71.439.600,- atau 99,30%.

Pada kegiatan ini telah terlaksana 100% karena pada kegiatan ini merupakan honorarium tenaga pendamping bidang perikanan tangkap dan pengelolaan kawasan pesisir, dan belanja operasional pembinaan untuk tenaga pendamping non PNS 36 kali kunjungan terhadap 22 KUB (Kelompok Usaha Bersama) kemudian manfaat (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan ekonomi nelayan dan kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 25%.

#### b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 333.680.000,- pada APBD murni dan terjadi perubahan pada APBD-P sebesar Rp. 536.520.000,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 536.185.000,- atau 99,94%.

Pada kegiatan ini memiliki indikator capaian keluaran terlaksananya rehabilitasi mesin pabrik es balok 10 ton yaitu mesin compressor 1 unit, kemudian BBM genset pabrik es, service/pemeliharaan beberapa mesin di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 4 unit yaitu service mesin genset (rutinitas), Pemeliharaan listrik lingkungan PPI, Service rutin mesin es balok 3 ton dan 10 ton. Pemeliharaan juga dilakukan pada PPI yaitu penimbunan sheet pile. Seluruh pekerjaan telah terlaksana 100%.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan

Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

dialokasikan dana sebesar Rp. 181.885.000,- pada APBD murni dan terjadi pengurangan pada anggaran APBD-P sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 154.745.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 154.145.000,- atau sebesar 99,61%. Melalui kegiatan ini pencapaian kegiatan terpenuhinya operasional pendampingan sebanyak 28 kelompok aktif, pengadaan alat uji kualitas air bagi pendampingan perikanan budidaya sebanyak 7 unit. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya sebanyak 226 orang/KK atau 28 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, nilai produksi air tawar pada tahun 2016 sebesar 252.04 ton dengan produksi lele, patin, nila, gurami, bawal untuk air tawar dan udang windu, vanname dan bandeng untuk budidaya air payau pada 3 kelompok sebesar 8.86 ton.

Dasar kinerja Produksi Perikanan Budidaya dengan target untuk tahun 2016 yaitu produksi perikanan budidaya sebesar 189,93 ton. Guna mencapai Produksi Perikanan Budidaya ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Memproduksi benih ikan melalui Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul.
2. Program intensifikasi tambak udang pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.
3. Meningkatkan produksi tambak percontohan yang dikelola UPT Balai Pengembangan Air Payau pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Tawar dan Payau dengan Kegiatan Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Budidaya melalui :

a) Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul,

dengan rincian : kegiatan ini sebesar Rp. 651.219.000,- pada APBD murni dan terjadi penambahan pada APBD-P sebesar Rp. 657.402.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 657.389.500,- atau 100%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran peralatan untuk pembibitan ikan sebanyak 19 item, pakan untuk operasional pembibitan ikan di Unit Pelaksana (UPT) Balai Benih Ikan (BBI) 9,9 ton, pengadaan bibit ikan air tawar sebanyak 2.225 ekor, penyediaan kapur untuk operasional pemeliharaan kolam pendederan dan kolam induk sebanyak 11 ton, kemudian juga dilakukan pembinaan atau pengawasan terhadap benih yang

dikeluarkan sebanyak 750 liter untuk satu tahun, pengadaan obat-obat dalam menjaga kesehatan lingkungan ikan sebanyak 44 unit yang terdiri dari 5 item obat-obat untuk lingkungan dan hipopisasi ikan, pengadaan pupuk untuk operasional pembibitan ikan sebanyak 14 ton, dan beberapa kegiatan dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2016 berupa rehabilitasi bak reservoir, kolam dan instalasi air sebanyak 3 unit, peralatan laboratorium BBI sebanyak 12 unit dan peralatan dukungan pembenihan ikan sebanyak 6 unit.

Realisasi fisik telah dilaksanakan 100 %, Produksi benih dicapai sebesar 527.308 ekor, terdiri dari ikan Nila sebanyak 176.058 ekor, ikan Lele sebanyak 351.250 ekor, dan pendampingan UPR (Unit Pembenihan Rakyat) sebanyak dengan produksi benih ikan lele sebanyak 4.441.000 ekor. Dari benih ikan inilah diharapkan tumbuh produksi perikanan budidaya.

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan, dialokasikan dana sebesar Rp. 280.232.500,- pada APBD murni dan terjadi penambahan anggaran APBD-P sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 311.645.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 311.015.300,- atau sebesar 99,80%. Pada Kegiatan ini capaian indikator yang diharapkan atau target indikator keluaran adalah terlaksananya pembinaan kepada kelompok sebanyak 25 kali untuk 28 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), terlaksananya rehabilitasi tambak untuk usaha tambak plastik 1 Ha. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan telah selesai 100 %, dengan produksi tambak dengan sistem intensif seluas 0,5 Ha yang dihasilkan sekitar 1,75 ton dan hasil pembinaan kelompok usaha tambak (air payau) untuk vanname sebesar 5.87 ton dan bandeng sebesar 1,24 ton. Pendampingan telah dilakukan sebanyak 53 kelompok dengan terdata 28 kelompok aktif dan 24 kelompok yang kurang aktif atau dalam setahun hanya 1 sampai 2 kali produksi telah menghasilkan produksi kolam air tawar sebesar 209,54 ton, keramba 42,50 ton.

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar adalah dengan target produksi udang vanname sebesar 1,75 ton dengan program secara intensif, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kegiatan Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya Perikanan  
Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran honorarium pemeliharaan dan operasional tambak untuk 3 orang selama 12 bulan, Operasional tambak tambak plastik untuk 1 periode, Realisasi fisik telah dilaksanakan 100 %, Produksi tambak sebesar 1,75 ton. kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.118.576.000,- pada APBD murni dan terjadi penambahan pada APBD-P sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 148.399.225,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 148.379.000,- atau 99,99%.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan adalah meningkatnya jumlah produk hasil perikanan sebesar 28 ton

Kegiatan Peningkatan keanekaragaman Produk Pengolahan Hasil Perikanan.

Dengan alokasi dan realisasi kegiatan sebesar Rp. 157.980.000,- pada APBD murni dan tidak terjadi perubahan pada APBD-P dengan realisasi sebesar Rp. 149.748.000,- atau 94,79%.

Strategi Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, dari strategi ini maka program yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai melakukan sosialisasi gemar makan ikan yang dilakukan di 7 kecamatan di Kota Dumai, juga dilakukan lomba masak serba ikan yang diadakan mulai tingkat kota dumai, tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional. Untuk lomba masak serba ikan Tim PKK Kota Dumai binaan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan telah meraih juara satu tingkat Provinsi Riau dan juara harapan 2 tingkat nasional yang diadakan di Jakarta.

Melakukan Pembinaan kelompok yang dilakukan ditiap-tiap kecamatan. Pembinaan ini bertujuan untuk membina kelompok pengolahan yang telah ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk kelompok-kelompok baru yang mulai terbentuk. Kelompok yang telah ada di Kota Dumai yaitu:

- Nilam Sari
  - Jenis usaha : Bakso Ikan dan Stik Udang,
  - Produksi/bulan : 70 Kg dan 50 kg
- Mawar
  - Jenis usaha : Kerupuk Ikan dan Udang
  - Produksi/bulan : 40 Kg dan 40 Kg
- Cemara
  - Jenis usaha : Naget Ikan
  - Produksi/bulan : 20 kg
- Teratai Presto
  - Jenis usaha : Bandeng Presto
  - Produksi/bulan : 500 Kg
- Bunga Raya
  - Jenis usaha : Kerupuk Ikan
  - Produksi/bulan : 10 Kg
- Duyung Mas
  - Jenis usaha : Ikan Kering dan Udang ebi
  - Produksi/bulan : 700 Kg dan 300 Kg
- Bunga Tanjung
  - Jenis usaha : Ikan Kering dan Udang ebi
  - Produksi/bulan : 400 Kg dan 200 Kg
- Mina Usaha
  - Jenis usaha : Ikan asap
  - Produksi/bulan : (tidak produksi)
- Dahlia
  - Jenis usaha : Bakso Ikan
  - Produksi/bulan : Tahun 2015 (belum rutin)

Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat melalui Kegiatan

a) Kegiatan Penyuluhan Budaya Kelautan

mempunyai tingkat capaian program adalah persentase peningkatan kesadaran masyarakat pesisir sebesar 80% dari jumlah nelayan. Indikator kinerja keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya upacara peringatan hari nusantara 1 kali kegiatan. Indikator kinerja hasil (outcome) terciptanya pengetahuan dan kesadaran arti penting nusantara sebesar 10%. Kegiatan yang dilaksanakan hanya upacara bendera peringatan Hari Nusantara ke XIV dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 pada hari kamis di lapangan eks Kantor Walikota Lama dan pembinaan terhadap Pokwasmas (kelompok Pengawas Masyarakat) 2 kelompok. Dialokasi dan realisasi dana sebesar Rp. 54.392.000,- pada APBD Murni dan pada APBD-P tidak terjadi perubahan dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 52.542.000,- atau sebesar 96,60%.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, menggunakan anggaran sebesar Rp. 28.780.000,- pada APBD murni dan Rp. 26.580.000,- pada APBD-P, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.118.000,- atau 83,21%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja keluaran yaitu petahan bagi 70 kk peternak. Realisasi kegiatan telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 60 kk peternak, dengan rincian telah dilatih 60 orang peternak sapi potong dan 10 orang peternak kambing tidak dilaksanakan karena kelompok calon penerima bantuan penerus manfaat tidak ada. Lokasi pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Kaji Terap Sri Pulau dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Desember 2016. Kegiatan ini menyumbang cakupan binaan bertambah menjadi 110 kelompok binaan dari 105 kelompok awal jadi bertambah sebanyak 5 kelompok baru, untuk penerima redist sapi potong dari kelompok sebelumnya melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

a) Kegiatan Pembibitan Ternak dan Perawatan Ternak.

Kegiatan ini memiliki jumlah anggaran sebesar Rp. 0,- pada APBD, namun kegiatan ini telah terealisasi Inseminasi Buatan (IB) 484 ekor dan belum mencapai target sebesar 640 ekor atau 75,62%. Hal ini terwujud dengan adanya dukungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau yang menyediakan semen untuk Inseminasi Buatan.

b) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat.

Jumlah anggaran yang tersedia pada Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 20.737.500,- pada anggaran murni dan terjadi perubahan pada APBD-P sebesar Rp. 18.618.750,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 18.618.750,- atau 100%. Kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat memiliki capaian kinerja keluaran terlaksananya seleksi calon petani calon lokasi untuk 15 kelompok. Realisasi kegiatan berupa redistribusi atau perguliran telah dilakukan sebanyak 2019 ekor sapi untuk 9 kelompok peternak, kemudian juga redistribusi.

Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada Masyarakat.

Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 226.420.000,- pada anggaran murni dan APBD-P sebesar Rp. 216.058.800,- dan realisasi kegiatan sebesar Rp. 208.486.000,- atau 96,49%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur sebagai indikator kinerja berupa jumlah peternak yang telah dibina sebanyak 600 orang. Realisasi kegiatan ini telah dilaksanakan penyuluhan oleh 10 orang tenaga pendamping peternakan dan 5 orang tenaga pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten, selain itu untuk mendukung operasional diberikan bantuan bahan bakar minyak, makan dan minum selama satu tahun atau 60 kali.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan rincian :

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

menggunakan anggaran sebesar Rp. 356.252.000,- pada APBD murni dan tidak mengalami perubahan pada APBD-P, realisasi anggaran sebesar Rp. 355.991.675,- atau 99,93%. Kegiatan ini mempunyai indikator keluaran berupa tersedianya tenaga honorarium pemeliharaan ternak, pakan ternak di Pusat Kaji Terap Sri Pulau, Bahan pengolahan susu, bahan pengolahan kompos, pemeriksaan sampel hasil produksi BKTP, dan bahan-bahan untuk pembuatan pakan fermentasi/silase. Unit Pelaksana Kaji Terap Sri Pulau selama satu tahun 2016 telah dikunjungi beberapa sekolah dan tempat magang mahasiswa jurusan peternakan yaitu 36 kunjungan dan siswa 3 kali periode.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 169.560.000,- pada APBD murni dan pada APBD-P anggaran menjadi Rp. 173.121.700,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 142.230.900,- atau 82,16%.

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dialokasikan dana sebesar Rp. 261.622.000,- pada APBD murni dan terjadi penambahan anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 288.412.000,-, kemudian realisasi anggaran sebesar Rp. 275.422.000,- atau 95,50%.

Kegiatan ini memiliki capaian indikator keluaran terlaksananya kegiatan komunikasi informasi dan edukasi penyakit ternak di masyarakat sebanyak 2 kali kegiatan, Pengadaan obat-obatan dan bahan pembantu pelayanan vaksinasi rabies sebanyak 10 item, spanduk sosialisasi penyakit ternak dan KIE sebanyak 1 buah, tersedianya brosur sosialisasi sebanyak 3 rim, tersedianya makan dan minum kegiatan KIE untuk 36 orang, alat tulis kantor untuk kegiatan KIE sebanyak 30 set.

realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dilaksanakan satu kali, kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tanggal 15 November 2016.
2. Kegiatan pengadaan obat-obat dan bahan pembantu pelayanan vaksinasi rabies dapat digambarkan berupa kegiatan respon cepat tanggap kasus penyakit hewan (PHMSZ-Non Strategis) pada 7 (tujuh) kecamatan dan hampir seluruh kecamatan terdapat kasus, sehingga diidentifikasi ada 76 kasus penyakit hewan non strategis zoonosis.

Kegiatan Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemik memiliki alokasi dana sebesar Rp. 26.517.500,- pada APBD murni dan tidak terjadi perubahan anggaran pada APBD-P, dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 26.517.500,- atau 100 %.

a. realisasi pelaksanaan meliputi : pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, berupa : vaksinasi rabies di 33 kelurahan, pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 17 item, baliho sosialisasi/promosi kesehatan hewan pada baliho Puskesmas 1 unit, petugas pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner untuk 108 orang bulan, telah terkirim 30 sampel pemeriksaan penyakit hewan, Alat dan bahan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 14 item.

b. Realisasi vaksinasi rabies antara lain Anjing sebanyak 3.005 ekor, Kucing sebanyak 4.932 ekor dan Kera sebanyak 78 ekor total nya adalah sebanyak 8.015 ekor HPR yang tervaksinasi sedangkan target 4.500 ekor HPR (Hewan Penular Rabies).

c. Realisasi kegiatan pelayanan kesehatan hewan telah dilakukan di 4 Puskesmas ada seldan terealisasi 11 jenis pelayanan yang diberikan yaitu :

- Promotif (pemberian suplemen, vitamin dan mineral)
- Preventif (Vaksinasi, Observasi HPR, Pengobatan, Pencegahan dengan Desinfektan, Insektisida/anti ektoparasit)
- Kuratif (penanganan kasus penyakit)
- Rehabilitatif (pemulihan kesehatan paska sakit)
- Pelayanan medik reproduktif
- Penanganan kasus kematian unggas mendadak
- Pemusnahan unggas tersangka flu burung
- KIR kesehatan hewan
- Penyuluhan
- Konsultasi
- Visum

# URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

## URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Rentra Dinas Perindag Kota Dumai RPMD tahun 2016- 2021 urusan pilihan dibidang industri, maka disampaikan pencapaian tahun sebagai berikut :

Tabel 4. 68  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian kinerja tahun 2016	Capaian Kondisi Akhir Tahun 2016	Capaian (%)
kontribusi sektor jasa dan perdagangan terhadap PDRB	Rupiah (juta)	4.789.145,67	5.026.523,15	4,95
perumbuhannya jaringan/kerjasasama	Unit Usaha	5	0	0
kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Rupiah (juta)	12.468.900,37	13.160.756,09	100
jumlah Industri	Kawasan	2	0	0
jumlah pengusaha industri Industri Kecil menengah dan industri kreatif	Pengusaha	893	24	2,68

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

Indikator sasaran : **Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB**

Pada tahun 2015 kontribusi sektor jasa dan perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai sebesar 4.789.145,67 (dalam Juta Rupiah) dan pada tahun 2016 menjadi 5.026.523,15 (dalam juta rupiah), dengan demikian terdapat kenaikan sebesar 237.377,48 (dalam Juta Rupiah) atau 4,95 %. Dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan melalui berbagai program / kegiatan sebagai berikut:

- Target awal dari indikator sasaran ini adalah " Tersedianya susidi kebutuhan bahan pokok masyarakat pada hari-hari besar keagamaan" untuk 9423 KK, terhadap keluarga yang berpenghasilan rendah, namun oleh keterbatasan anggaran serta peraturan yang ada belum mendukung kegiatan ini, sehingga yang dapat dilaksanakan pada tahun 2016 adalah pengawasan terhadap distribusi bahan pokok masyarakat, yaitu penyaluran dan distribusi gas Elpiji 3 Kg kepada masyarakat di 7(tujuh) kecamatan atau 228 pangkalan Gas Elpiji di Kota Dumai. Kegiatan ini selain pengendalian ketersediaan gas elpiji bagi masyarakat banyak, juga mampu menahan gejolak fluktuasi harga ditingkat yang wajar.
- Peningkatan nilai dan volume ekspor, dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor/import terhadap pelaku usaha eksportir dan inportir Kota Dumai sebanyak 50 pelaku usaha. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, maka para pelaku usaha eksportir dan inportir Kota Dumai dalam kepengurusan dokumen ekspor/import dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan cepat, sehingga akan

mendorong peningkatan volume ekspor Kota Dumai pada umumnya.

c. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan Jasa merupakan bagian dari Perlindungan konsumen dan pada tahun anggaran 2016 telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap barang beredar, dengan tujuan agar menurunnya peredaran barang-barang konsumsi kadaluarsa serta barang-barang penting lainnya yang tidak memenuhi standar di pasaran. Dan selama tahun anggaran 2016 melalui kegiatan ini telah ditemukan barang-barang kadaluarsa serta barang yang tidak memenuhi standar yang berlaku sebanyak 77 Jenis komoditi atau 23,05 %, sedangkan pada tahun 2015 target sebesar 15 % atau 50 Jenis komoditi dengan realisasi temuan sebanyak 45 Komoditi atau 13,51 %. Artinya selama tahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak 32 jenis komoditi peredaran barang konsumsi kadaluarsa dan barang penting lainnya yang tidak memenuhi standar yang berlaku. Hal ini terjadi dikarenakan masih rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha dagang.

d. Kegiatan operasional dan pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah, dilaksanakan dengan tingkat capaian 100 % dan indikator kinerja keluaran adalah tera/tera ulang terhadap alat UTTP pada pelaku usaha dan pada tahun 2016 yang dilakukan adalah dalam bentuk pengawasandan terhadap alat UTTP pada pelaku usaha sebanyak 85 unit alat UTTP . Hal ini dikarenakan untuk melakukan tera/tera ulang Dinas Peridag Kota Dumai belum dapat melaksanakannya sendiri, akan tetapi harus bekerjasama dengan UPT. Kemetrollogian Propinsi Riau, karna belum tersedianya tenaga teknis yang cukup serta peralatan uji tera. Dalam rangka persiapan agar dapat melakukan sendiri tera/tera ulang , maka pada kegiatan ini juga, dilaksanakan pengadaan 1 (satu) paket peralatan kemetrollogian standar uji tera/tera ulang alat UTTP melalui anggaran DAK tahun 2016.

Indikator Sasaran : **Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasama usaha.**

Untuk mendukung pencapaian Indikator sasaran “ Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasama usaha” dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah, dimana tingkat capaiannya 100 %, dengan indikator keluaran mengikut sertakan 3 orang petani/pengusaha dengan 3 Komoditi unggulan daerah untuk dapat berpartisipasi pada pasar lelang daerah di Pekanbaru. Kegiatan ini untuk mempertemukan antara pengusaha kecil dengan pedagang besar yang ada di Kota Pekanbaru, dengan harapan terjadinya transaksi atau terbentuknya mitra dagang antara usaha kecil dengan perusahaan besar, sehingga terbentuknya jaringan usaha yang lebih luas, namun hingga saat ini belum terjadi transaksi maupun kontak dagang antara UMKM kota Dumai dengan pedagang besar yang ada di ibukota Propinsi.

Indikator sasaran : **Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB**

Adapun kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dalam tahun 2015 sebesar 12.468.900.37 (dalam jutaan rupiah) dan tahun 2016 sebesar 13.160.756.09 (dalam

kenaikan sebesar 5,54 %. Dalam mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran dimaksud, maka dalam tahun 2016 dibidang industri dilakukan berbagai program/kegiatan sbb :

- a. Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Tingkat capaian program adalah 100 % dengan indikator kinerja keluaran adalah terlatihnya sebanyak 15 IKM pengrajin Industri konveksi. Kegiatan ini bertujuan peningkatan kualitas serta disain industri konveksi, sehingga mampu bersaing dan berkembang dengan dengan produk-produk konveksi dari daerah lainnya.
- b. Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dengan dengan tingkat capaian kegiatan 100 % dan indikator keluaran adalah terlatihnya sebanyak 50 IKM tentang tata kelola usaha kecil dan menengah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan perajin IKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya
- c. Penyediaan sarana informasi yang diakses masyarakat, yang dilaksanakan dengan tingkat capaianKegiatan 100 %, dan indicator keluaran dalam bentuk data Base IKM Kota Dumai (Up dating data) IKM Kota Dumai tahun 2016

Indikator Kinerja Sasaran : **Kawasan Industri**

Dalam rangka penataan kawasan industri Kota dumai, maka pada tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui kegiatan kebijakan keterkaitan industri hulu hilir dilaksanakan dengan tingkat capaian kegiatan 100%, dan indikator kinerja keluaran penyusunan naskah akademis dan peta kawasan industri Kota Dumai. Hal ini bertujuan sebagai langkah awal dalam penataan kawasan industri serta penyusunan regulasi dalam pengembangan kawasan industri di Kota Dumai.

Indikator Sasaran : **Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif**

- a. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi, dengan tingkat pencapaian kegiatan 100% dan indikator keluaran kegiatan berupa terlatihnya sebanyak 12 orang Industri kajinan Batik dan kerajinan tenun sebanyak 10 Pengrajin.
- b. Kegiatan Pembinaan Industri Kerajinan dan Industri Kreatif, dengan tingkat pencapaian kegiatan 100 % dengan indikator keluarannya pengembangan pasar produk kerajinan daerah melalui pameran/expo industri kerajinan diluar daerah, sebanyak 3 even expo.

Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.882.957.470,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.252.252.470,- Belanja Langsung sebesar Rp. 3.630.705.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 4.039.131.766,- atau terserap 94,99% dan belanja langsung terserap Rp. 3.531.415.510,- atau 97,27%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

- a) Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah terhadap pemamfaatan sumber daya.  
Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 114.140.000 (Seratusempat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 107.636.000 ( Seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) atau  $\pm 94,30\%$ .

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

- a) Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Telnologi Industri

Jumlah anggaran yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 280.813.800 ( Dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah ), dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.277.469.250 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta emapt ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau  $\pm 98,80 \%$

- b) Kegiatan Pembinaan Industri Kerajinan dan Industri Kreatif,

Jumlah anggaran yang dialokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 148.788.490 (Seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau  $99,19 \%$ .

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Produksi.

- a) Kegiatan Pengembangan sistim Inovasi teknologi industri.

Alokasikan anggaran sebesar Rp.117.719.000( Seratus tujuh belas juta tujuh ratus smbilan belas ribu rupiah). Dari Dana yang dialokasikan tersebut dapat terelisasikan sebesar Rp. 116.136.999 ( Seratus enam belas juta seratus tiga puh enam juta ribu semblan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau  $98,65 \%$ .

Program Penataan Struktur Industri.

- a) Kegiatan Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu Hilir.

Angaran yang tersedia sebesar Rp. 130.826.000 (Seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah ), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 127.810.999 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah ) $\pm 97,69\%$ .

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

- a) Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat.

Angaran yang tersedia sebesar Rp.59.718.000 (Lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.576.998,-(Empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau  $81,34 \%$ .

Program Peningkatan dan Penembangan Ekspor

a) Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor dan dokumen ekspor/importh jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.74.705.000( Tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah ) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 68.298.997 ( Enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) atau ± 91,42 %

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.

a) Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.

Alokasikan anggaran sebesar Rp. 121.301.800 ( Seratus dua puluh satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah ) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 108.011.792 (Seratus delapan juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau ± 89,5%.

b) Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah.

Alokasikan anggaran sebesar Rp.66.098.000 ( Enam puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) , dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 62.591.997 ( Enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau ± 94,70%.

Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

a) Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 64.512.000 ( Enam puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan angara sebesar Rp. 63.547.000( Enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) atau ± 98,51%.

b) Kegiatan Operasional Pengembangan UPT. Kemeterologian Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 492.007.000 ( Empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.482.914.095 (Empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan puluh lima rupiah ) atau ± 98,16%.

INDIKATOR PELAYANAN PASAR

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Pelayanan Pasar dan AMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan Pilihan Perdagangan, maka disampaikan pencapaian tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.69

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2016

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2016	Realisasi s/d tahun 2016	Capaian (dalam %)
Jumlah Pasar yang direhabilitasi dan bertambah sarana / prasarannya	2 Pasar	2 Pasar	100%
Jumlah Pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima dan asongan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %

Sumber : Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

Jumlah pasar yang direhabilitasi dan bertambah sarana/prasarana

Target dari indikator sasaran ini yaitu bertambahnya sarana/prasarananya pasar pemerintah yang ada yaitu Pasar Sri Mersing dan Pasar Buah Taman Lepin, dengan sasaran adalah Peningkatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar, kegiatan pendukung indikator ini yaitu kegiatan pembangunan dan pengembangan pasar dan kegiatan penambahan sarana dan prasarana pasar.

Jumlah Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan yang ada di Kota Dumai, Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan dan kegiatan pendataan pedagang kaki lima.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Kantor Pelayanan Pasar dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Anggaran Belanja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.855.655.400,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.365.255.400,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.490.400.000,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 1.286.038.143,- atau terserap 94,20% dan belanja langsung terserap Rp. 2.439.148.037,- atau 97,94%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Pada tahun 2016, jumlah anggaran Rp. 191.630.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 191.487.000,- atau sebesar 99,93 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pasar  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 148.880.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 148.790.000,- dan atau sebesar 99,57 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pasar terbangun atau bertambah sarana dan prasarananya dengan target 2 pasar dengan capaian realisasi 2 pasar, capaian realisasi 100 %
- b) Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 42.750.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.697.000,- atau sebesar 99,88 % adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintahan yang ada dengan target 2 kegiatan dengan capaian realisasi 100 %.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.

Pada tahun 2016, jumlah anggaran Rp. 99.940.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.940.000,- atau sebesar 100 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.590.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 83.590.000,- atau 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Frekuensi terlaksananya kegiatan penataan dan penertiban PKL dan asongan dengan target 4 bulan dengan capaian realisasi 100%.
- b) Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima.  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.350.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 16.350.000,- atau 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima dengan target 2 bulan dengan capaian realisasi 100 %.

## URUSAN PILIHAN PARIWISATA

### DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

capaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan RPJMD Kota Dumai tahun 2016- 2021 urusan wajib kebudayaan, Pemuda dan Olahraga maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.70

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2016

Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Kondisi Akhir 2015	Realisasi Tahun 2016	Capaian (%)
Kunjungan wisata			48
- Mancanegara	26.152	12.757	40
- Domestik	96.475	39.263	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dari 122.627 wisatawan pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 terjadi penurunan kunjungan wisatawan menjadi 52.020 wisatawan. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

Program Pengembangan Pariwisata

a) Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 688.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 683.500.000,- atau 99,35% dari anggaran. Adapun indicator kinerja keluaran jumlah penyediaan bahan promosi dan informasi kepariwisataan sebanyak 6 bahan pariwisata yaitu : cetak goodybag promosi pariwisata, cetak display banner neonbox, pembuatan display billboard pariwisata, pembuatan display flybanner, cetak kalender, cetak buku sadar wisata dan pembuatan penyusunan konsep fotografi sadar wisata dan destinasi pariwisata Kota Dumai. Dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

b) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 352.433.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 344.646.684,- atau 97,79% dari anggaran. Adapun indicator kinerja keluaran jumlah pameran yang diikuti sebanyak 2 pameran yaitu Dumai Expo dan Gebyar Wisata Nusantara (GWN) di Jakarta, dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 377.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 325.262.000,- atau 94,44% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai sebanyak 1 objek wisata yaitu berupa rehabilitasi sarana dan prasarana objek wisata Danau Bunga Tujuh, pengadaan papan nama objek wisata 10 objek dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

b) Kegiatan Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan Wisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 95.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 95.700.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indicator kinerja keluaran jumlah lahan objek wisata (hutan wisata) yang dibersihkan sebanyak 1 objek wisata yaitu berupa pembersihan lahan di hutan wisata dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

Program Pengembangan Kemitraan

a) Kegiatan Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan

Lembaga lainnya  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 105.386.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 105.170.800,- atau 99,79% dari anggaran.

Adapun indicator kinerja keluaran jumlah peserta yang mengikuti Sadar Wisata yaitu berupa latihan sadar wisata sebanyak 150 orang, dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

- b) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165.499.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 165.423.000,- atau 99,95% dari anggaran. Adapun indicator kinerja keluaran jumlah peserta yang mengikuti Lomba mancing dengan tingkat pencapaian adalah 100 %.

## **URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan:

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 13.786.865,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.191.255.143,- atau 95.68%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.636.055.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.343.860.500,- atau 88.92%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya dan terpasangnya jaringan listrik SKUTR di Kec. Dumai Timur 3 lokasi, Kec. Dumai Barat 6 lokasi, Kec. Bukit Kapur 2 lokasi, Kec. Medang Kampai 1 lokasi, Kec. Sungai Sembilan 2 lokasi dan Kec. Dumai Selatan 5 lokasi, Pemasangan KWh Meter untuk lampu jalan sekota Dumai, Pemasangan Lampu LED ARTIFICIAL TREE (lampu hias) lokasi Kota Dumai, penggantian dan perakitan panel Box KWh meter Lampu jalan.

- b) Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Lampu Jalan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.150.461.865,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.847.394.643,- atau 97.28%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya dan terbayarnya bantuan puasa dan honor petugas lapangan sebanyak 18 orang, tersedianya dan terbayarnya dana kesehatan (Jamsostek) lebaran 18 orang petugas lapangan, tersedia dan terbayarnya pajak lampu penerang jalan sebesar Rp.9.357.436.260,- , pengadaan alat listrik dan elektronik untuk penerangan jln. Subrantas, jln. raya Bukit Datuk, jln. Putri Tujuh, jln. Sudirman, jln. Merdeka, jln. Sukajadi, jln.

Pattimura, jln.Perwira/Tuanku Tambusai, jln.Ombak, jln. Sultan Syarif Kasim, jln. Kelakap  
Tujuh, jln.Datuk Laksamana, jln.Yos Sudarso, jln.Batu Bintang, jln.Budi Kemuliaan,  
jln.Tegalega, jln.Sukarno Hatta, jln.Dock Yard, jln.Tanjung Jati, jln.Sidorejo, Pengadaan alat-  
alat listrik untuk menyambut Hari Besar, Perawatan berkala system elektrikal dan mekanikal  
Air Mancur lokasi Taman Bukit Gelanggang, Perawatan berkala sistem elektrikal dan  
mekanikal Air Mancur lokasi Bundaran Ex.Meriam, Perawatan berkala sistem elektrikal dan  
mekanikal Air Mancur lokasi Bundaran Periuk Kera.



# **LKPJ 2016**

## **BAB 5**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2017

## BAB V

### PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

### TAHUN 2016

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/ atau desa pemerintah provinsi kepada Kabupaten/ Kota atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/ Kota ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemberian tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Dumai hanya menerima tugas pembantuan 1 (satu) SKPD yaitu Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Kota Dumai.

Pada tahun 2016 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai mendapat alokasi Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kelompok Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tugas pembantuan dimaksud berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Ketahanan Pangan. Adapun rincian Program dan kegiatan tugas pembantuan dimaksud adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Riau Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tahun 2016 Nomor SP-DIPA-018.04.4.099315/2016 revisi kedua tanggal 09 Juni 2016 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Riau Nomor : Kpts.407/Distannak/I/2006 tanggal 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) APBN di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah dan Sayuran Dataran Rendah Tahun Anggaran 2016. Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni ; Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan alokasi anggaran Rp. 340.237.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 339.966.250,- atau 99,92% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Sayuran Tanaman Obat
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 292.947.000,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 292.676.250,- Atau 99,91% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; (1) Tersalurnya fasilitasi bantuan saprodi pengembangan cabe dengan target 7 ha dan realisasi 7 ha (2) Tersalurnya fasilitasi bantuan saprodi pengembangan sayuran dengan target 5 ha dan realisasi 5 ha.

b) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 47.290.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.290.000,- Atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; (1) Layanan perkantoran dengan target 12 bulan layanan dan realisasi 12 bulan layanan.

Tugas Pembantuan Dari Badan Ketahanan Pangan.

Tugas pembantuan ini dengan Nomor : SP-DIPA-018.11.3.099426/2016 tanggal 07 Desember 2015, merupakan dana tugas pembantuan yang dititipkan melalui kegiatan dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau yang kegiatannya dialokasikan untuk Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau Nomor : OT.210/01/SATKER-BKPR/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Anggaran/Kegiatan Dekonsentrasi Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau di Kota Dumai. Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni ; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 309.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 298.650.000,- atau 96,40% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 177.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 166.950.000,- Atau 94,16% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu ; (1) Jumlah kawasan mandiri pangan dengan target 2 kecamatan dan realisasi 2 kecamatan.

b) Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 102.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 101.700.000,- Atau 99,22% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu ; (1) Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dengan target 4 Desa/Kelompok dan realisasi 4 Desa/Kelompok.

c) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- Atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu ; (1) Dukungan manajemen dan administrasi dengan target 12 bulan layanan dan realisasi 12 bulan layanan.



# **LKPJ 2016**

# **BAB 6**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2017

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2016

#### Kerjasama Antar Daerah

##### 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

- a) Pemerintah Provinsi Riau
- b) SMA Negeri 1 Padang Panjang
- c) Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD)
- d) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

##### 2. Dasar Hukum

- a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 15/PK/III/2011 dan Nomor 7/DISHUB/2011.
- b) Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang Nomor : 421.3/2011/268 Tanggal 05 April 2011.
- c) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) Nomor : 40/KLH/2014 Tanggal 17 Desember 2014.
- d) Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai Nomor : HK.05.01/II/1005/2016 dan Nomor 5/DINKES/2016 Tanggal 05 April 2016

##### 3. Bidang Kerjasama

- a) Pengelolaan, Pendapatan dan Pemeliharaan Pelabuhan penyeberangan Dumai.
- b) Bidang Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah menjalin kemitraan dalam bentuk Sister School.

- c) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+).
- d) Bidang Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah pelaksanaan pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat.

#### 4. Nama Kegiatan

- a) Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Provinsi Riau adalah Perjanjian Pengelolaan, Pendapatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Dumai.
- b) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah :
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kreativitas Siswa
  - Pengembangan Aktivitas dan Kreativitas Siswa
  - Pengembangan Muatan Lokal
  - Pertukaran Siswa
  - Pertukaran Guru
- c) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah :
- Persiapan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi Program REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau.
  - Integrasi strategi daerah REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau.
  - Pengembangan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan ditingkat daerah yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau.

- Pengembangan berbagai program dan kegiatan strategis untuk implementasi REDD+ secara penuh termasuk dalam rangka penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau.
  - Perubahan paradigma dan budaya kerja diseluruh elemen pemangku kepentingan terkait yang dibutuhkan untuk menyukseskan REDD+ di Provinsi Riau.
  - Pelibatan para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan REDD+.
  - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (terutama lahan gambut)
- d) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah :
- Memfasilitasi Pihak kedua dalam pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat sampai dengan penyampaian hasil seleksi kepada Pihak Kedua.
  - Melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP oleh Kepala Badan kepegawaian Negara dilakukan secara bersama-sama para pihak; dan.
  - melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan
  - menyampaikan usulan rincian kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat kepada Menpan dan rb dan Kepala BKN
  - melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan Nomor Induk Pegawai oleh Kepala BKN dilakukan secara bersama-sama
  - menetapkan kelulusan dan mengumumkan kelulusan dengan SK Gubernur/Walikota berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh Pihak Kesatu
  - menetapkan keputusan pengangkatan sebagai CPNS di Lingkungan Pemko Dumai
  - menempatkan dan mendayagunakan CPNS di Lingkungan Pemko Dumai sesuai dengan penetapan kebutuhan

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- a) Dinas Pendidikan Kota Dumai
- b) Dinas Perhubungan Kota Dumai
- c) Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai
- d) Dinas Kesehatan Kota Dumai

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
a) Dinas Pendidikan Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Dumai dibantu oleh 71 personel. Dengan kualifikasi pendidikan, S-2 sebanyak 10 orang, S-1 sebanyak 42 orang, D-III sebanyak 8 orang, D-II sebanyak 3 orang, D-I sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 6 orang, dan SMP sebanyak 1 orang. Komposisi PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada *Tabel 6. 1*.

*Tabel 6. 1*  
Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Disdik Kota Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	7
3.	Pembina	IV/a	24
4.	Penata Tk.I	III/d	4
5.	Penata	III/c	4
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	6
7.	Penata Muda	III/a	10
8.	Pengatur Tk.I	II/d	4
9.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	9
11.	Pengatur Muda	II/a	-
<b>Jumlah</b>			<b>71</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

b) Dinas Perhubungan Kota Dumai

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebanyak 119 orang. Dari jumlah pegawai tersebut diatas sebanyak 7 orang berpendidikan S2/pasca sarjana, S1/sarjana sebanyak 36 orang, D3 sebanyak 12 orang, D2 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 60 orang, SLTP 2 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada *Tabel 6. 2* Dibawah ini :

*Tabel 6. 2*  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	14
3.	Penata Tingkat I	III/d	11
4.	Penata	III/c	19
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	12
6.	Penata Muda	III/a	17
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	23
8.	Pengatur	II/c	12
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	6
10.	Pengatur Muda	II/a	1
11.	Juru Muda Tingkat I	I/d	1
<b>Jumlah</b>			<b>119</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

c) Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai

Jumlah Pegawai pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebanyak 18 orang. Dari jumlah Pegawai diatas sebanyak 1 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 12 orang

berpendidikan Sarjana (S1), 1 orang berpendidikan D3, dan 3 orang SMU serta 1 orang SD. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 6. 3 Dibawah ini :

**Tabel 6. 3**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina	IV/A	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	3
3.	Penata	III/C	2
4.	Penata Muda Tingkat I	III/B	4
5.	Penata Muda	III/A	3
6.	Pengatur TK.I	II/D	1
7.	Pengatur	II/C	2
8.	Juru	I/C	1
9.	Juru Muda Tk.I	I/B	1
<b>JUMLAH</b>			<b>18</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

#### 4) Dinas Kesehatan Kota Dumai

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan termasuk puskesmas adalah sebanyak 423 orang. Dari 423 orang pegawai tersebut, sebagian besar pegawai, yaitu 282 orang adalah tenaga fungsional, 100 orang sebagai tenaga umum, dan 41 orang memegang jabatan struktural.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 72 Dibawah ini:

**Tabel 6. 4**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai

NO.	URAIAN UNIT KERJA	GOLONGAN				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Kesehatan Kota Dumai	0	13	52	7	72
2.	Puskesmas Dumai Kota	0	9	32	2	43
3.	Puskesmas Dumai Barat	0	13	29	1	43
4.	Puskesmas Bukit Kapur	0	13	30		43
5.	Puskesmas Sungai Sembilan	0	14	24		38
6.	Puskesmas Medang Kampai	0	14	18	1	33
7.	Puskesmas Bukit Timah	0	8	18	1	27
8.	Puskesmas Bumi Ayu	0	13	25		38
9.	Puskesmas Bumi Ayu	0	11	26	1	38
10.	Puskesmas Jaya Mukti	0	7	19	1	27
11.	Puskesmas Purnama	0	6	15		21
11	Puskesmas Bukit Kayu kapur	0	6	15		21
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>273</b>	<b>14</b>	<b>423</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

7. Sumber dan Jumlah Anggaran  
Tidak terdapat penggunaan dana APBD Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Kerjasama dengan Daerah Lain.

## 8. Jangka Waktu kerjasama

- a) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Provinsi Riau adalah 5 (lima) Tahun dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016.
- b) Jangka Waktu Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan.
- c) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah 5(lima) Tahun.
- d) Jangka Waktu Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah 2(dua) Tahun.

## 9. Hasil Kerjasama

- 1) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Provinsi Riau adalah :
  - Pendapat Asli Daerah (PAD) Jasa Pas Masuk Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro.
  - Pelayanan Angkutan Penyeberangan Ro-Ro Dumai – Tanjung Kapal Rupat.
- 2) Hasil Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah untuk kemajuan bersama dalam bidang Pendidikan.
- 3) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah persiapan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi program REDD+ di Provinsi Riau.
- 4) Hasil Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah pengadnan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kebutuhan Jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat.

## 10. Permasalahan dan Solusi

Pada umumnya tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Kerjasama yang telah dilaksanakan, sehingga kerjasama yang terjalin dapat berjalan sebagaimana semestinya.

## Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

### Mitra Yang Diajak Kerjasama

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

- a) Abadi Megah Promosindo
- b) PT. Inti Griya Prima Sakti
- c) PT. Sari Dumai sejati
- d) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai
- e) PT. Pelindo (Persero)
- f) PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelindo
- g) PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera
- h) PT. Batam Bahari Sejahtera
- i) PT. Pelnas Lestari Indorna Bahari
- j) Pemerintah Provinsi Riau
- k) SMP Darma Yudha Pekanbaru
- l) PT. (Persero) PELINDO I Dumai
- m) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- n) PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero)
- o) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai
- p) PT. Pembangunan Dumai
- q) Kantor Pertanahan Kota Dumai
- r) Kantor Pertanahan Kota Dumai
- s) Perum Bulog Divisi Regional Dumai

## 2. Dasar Hukum

- a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo tentang Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur Nomor. 03/Parbudpora/2007 tanggal 30 Maret 2007.
- b) File Memorandum of Understanding (MOU) PT. Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Kota Dumai tentang Pembangunan Plasa Dumai Nomor 570/Disperindagkopin/2007/253 dan Nomor 12/IGPS-SMG/DM/IV07 tanggal 4 April 2007.
- c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai Sejati Nomor 570/Disperindagkopin/2007/786 dan Nomor 035/SDS/VIII/EXT/07 tanggal 3 Agustus 2007
- d) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai tentang Pengembangan kurikulum lalu lintas

- pada satuan pendidikan TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, dan SMA / MA / SMK Nomor 18/Disdik/2008 dan No. Pol B/979/XI/2008/Polresta Dumai tanggal 10 November 2008.
- e) Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tentang Kerjasama Jasa Kepelabuhanan di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai Nomor US.13/3/7/PI-09 dan Nomor 11/Dishub/2009 Tanggal 20 Agustus 2009.
  - f) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pembagian Jasa Labuh di Terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai Nomor 19/Dishub/2009, Nomor 015/I 10100/2009-SO, Nomor US.12/4/17/PI-09 Tanggal 24 November 2009.
  - g) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera tentang Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional Tanggal 10 Mei 2011.
  - h) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011.
  - i) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011.
  - j) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai tentang Pengelolaan, Pendapatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Dumai Kota Dumai Nomor 15/PK/III/2011 dan Nomor 7/Dishub/2011 Tanggal 23 Maret 2011.
  - k) Nota Kesepahaman antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru tentang Kemitraan Antar Sekolah Nomor 421.3/SMPN2/2011/016 dan Nomor 115/SMP-DY/MOU/2011/001 tanggal 19 Januari 2011.
  - l) MoU antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai nomor 379/PEMB/III/2002 dan US.11/1/5/P.I-2002.
  - m) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : NK-07/WPB.04/2014 dan Nomor : 20/KEU/2014.
  - n) Perjanjian Kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 0267 / DMI / 2014 dan nomor : 29 / Dishub / 2014.

- o) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Nomor : 5 / DISPENDA / 2015 dan Nomor : 001PJ / 040 / DUM / 2015.
- p) Perjanjian pengelolaan pantai marina teluk makmur antar Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai Nomor : 281/DISBUDPARPORA/2015 dan Nomor : 117/PDM-DMI/VII/2015-112.
- q) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor : 14/PERTANAHAN/2016 dan Nomor : 289/100-14.72/VIII/2016
- r) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor pertanahan Kota Dumai Nomor : 8/PERTANAHAN/2016.
- s) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai Nomor : 1/DINSOS/2016 dan Nomor : 002/BULOG/2016.

### 3. Bidang Kerjasama

- a) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah dibidang Pariwisata.
- b) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah dibidang Jasa Kontruksi.
- c) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah dibidang Infrastruktur.
- d) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah dibidang tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum di bidang lalu lintas.
- e) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa Kepelabuhanan Diwilayah Perairan Kota Dumai).
- f) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa labuh di terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai).
- g) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional).
- h) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang).
- i) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)

- j) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah di Bidang Perhubungan Darat (Pengelolaan, Pendapatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Dumai).
- k) Bidang Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah dibidang Pendidikan.
- l) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah Pengelolaan Pas Pelabuhan Dumai.
- m) Bidang kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah Pertukaran data, peraturan, bimbingan teknis/pelatihan, narasumber dan informasi lainnya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah di Wilayah Provinsi Riau.
- n) Bidang kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Penempatan dan penggunaan X-Ray Scanner pada Bandar Udara Pinang Kampai Dumai.
- o) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan kepulauan Riau Area Dumai adalah pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Kota.
- p) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah pengelolaan pantai marina teluk makmur.
- q) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai adalah Kegiatan Sertifikasi Tanah Asset Pemerintah Kota Dumai Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- r) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai adalah Kegiatan Sertifikasi Tanah Asset Pemerintah Kota Dumai Tahun anggaran 2016.
- s) Bidang Kerjasama antara Pemerintah kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah Penyaluran Beras bersubsidi Nasional untuk rumah tangga miskin/rumah tangga berpendapatan rendah di Kota Dumai Tahun Anggaran 2016.

#### 4. Nama Kegiatan

- a) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur.
- b) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah Pembangunan Gedung Plasa Dumai.

- c) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah Pembangunan Peningkatan ruas jalan Purnama-Lubuk Gaung sepanjang lebih Kurang 10,2 km, lebar 6 meter, bahu kiri kanan jalan 0,5 meter dengan muatan sumbu terbesar 8 ton kelas jalan III A serta melakukan perawatan dan perbaikan jalan tersebut diatas.
- d) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah :
- Pelatihan/Sosialisasi terhadap para tenaga pendidik yang ditunjuk di seluruh Wilayah Kota Dumai.
  - Sosialisasi pembinaan materi pendidikan tertib lalu lintas pada satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
  - Penganggaran pengadaan kebutuhan/bahan ajar dan sarana fasilitas pada tiap-tiap Sekolah berkaitan dalam pemberian materi tertib lalu lintas.
- e) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Penunjang lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai antara lain : Jasa Pergudangan, Bisnis Logistik, Distribution Centre dan lainnya serta pengembangan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang dan Ro-Ro di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai.
- f) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Pembagian dari hasil Jasa Labuh.
- g) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan.
- h) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang.
- i) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang.
- j) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Pembangunan, Operasional, Pemeliharaan dan Pendapatan Pelabuhan Penyeberangan.
- k) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah :
- Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
  - Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran

- Siswa dibawah pengawasan guru, saling bertukar tugas sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra
  - Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
  - Mempromosikan hubungan kerjasama ini di Media Lokal
- l) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah Pengelolaan Pas Pelabuhan Dumai.
- m) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah memberikan pembinaan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah/negara serta konsultasi/koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kota Dumai.
- n) Kegiatan yang dilaksanakan antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah pemasangan dan penempatan X-Ray Scanner di Bandar Udara.
- o) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah:
- Pihak pertama yakni Pemerintah Kota Dumai
- Berhak menerima PPJ yang telah dipungut oleh Pihak PLN, paling lambat tanggal 25 setiap bulan setelah bulan pungutan.
  - Keterlambatan PPJ ke kas daerah, pihak PLN akan diberi surat teguran oleh Pemerintah Kota.
  - Pihak Pemerintah Kota berhak mendapatkan rekapitulasi rekening listrik dan informasi rinciannya setiap bulan.
  - Pihak pemerintah kota berhak menerima informasi/data tunggakan pelanggan.
  - Pihak pemerintah kota wajib mensosialisasikan kepada pelanggan PLN melalui media cetak, brosur mengenai pengertian PPJ, PJU, besaran tarif PPJ.
  - Pemerintah Kota wajib melunasi rekening listrik Gedung Kantor termasuk rekening PJU kepada PLN.
- Pihak kedua yakni PLN
- PLN berhak menerima pembayaran rekening listrik pihak Pemko.
  - PLN wajib memungut PPJ dari pelanggan PLN.
  - PLN wajib menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas daerah pihak Pemko paling lambat tanggal 25 setiap bulan pemungutan.
  - Pihak PLN menyetor PPJ melalui transfer ke rekening kas daerah.

- PLN memutuks aliran listrik apabila Pihak Pemko tidak membayar tagihan listrik Kantor dan PJU.
  - Pihak PLN wajib menyampaikan surat tagihan rekening listrik kepada Pemko paling lambat tanggal 15 pada bulan berjalan.
- p) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah bahwa pihak pertama yakni Pemerintah Kota Dumai memiliki aset berupa Pantai Marina Teluk Makmur yang terletak di Kecamatan medan Kampai Kelurahan Teluk Makmur, dalam melaksanakan dan mendukung program pariwisata Kota Dumai, Pihak pertama membutuhkan bantuan Pihak kedua yakni PT. Pembangunan Dumai berupa pengelolaan Pantai marina berdasarkan sura no. 102.01/PDM-DMI/V/2015-073 perih permohonan izin untuk mengelola Pantai Puak Marina Bahari.
- q) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah kota Dumai dengan kantor pertanahan Kota Dumai adalah Pekerjaan/Kegiatan sertifikasi tanah asset Pemerintah Kota Dumai.
- r) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah kota Dumai dengan kantor pertanahan Kota Dumai adalah Pekerjaan/Kegiatan sertifikasi tanah asset Pemerintah Kota Dumai.
- s) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah pendistribusi Raskn/Rastra dari Gudang Bulog samapai ke titik distribusi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
- a) Dinas Pendidikan Kota Dumai
  - b) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai
  - c) Dinas Perhubungan Kota Dumai
  - d) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
  - e) Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai
  - f) Dinas Sosial Kota Dumai
  - g) Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
- a) Dinas Pendidikan Kota Dumai
- Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Dumai dibantu oleh 71 personel. Dengan kualifikasi pendidikan, S-2 sebanyak 10 orang, S-1 sebanyak 42 orang, D-III sebanyak 8 orang, D-II sebanyak 3 orang, D-I sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 6 orang, dan SMP sebanyak 1 orang. Komposisi PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada *Tabel 6. 5*.

Tabel 6. 5

## Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan Pada Disdik Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	7
3.	Pembina	IV/a	24
4.	Penata Tk.I	III/d	4
5.	Penata	III/c	4
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	6
7.	Penata Muda	III/a	10
8.	Pengatur Tk.I	II/d	4
9.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	9
11.	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			71

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

- b) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai  
 Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai dibantu oleh 34 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 6 orang (S2), 11 orang (S1), DIII 8 orang, dan SMA sebanyak 9 orang. Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 6. 6 dibawah ini :

Tabel 6.6

## Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	2
2.	Pembina	IV/A	5
3.	Penata Tingkat I	III/D	3
4.	Penata	III/C	7
5.	Penata Muda Tingkat I	III/B	3
6.	Penata Muda	III/A	2
7.	Pengatur Tk.I	II/D	6
8.	Pengatur	II/C	4
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	1
10.	Pengatur Muda	II/A	1
Jumlah			34

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

- c) Dinas Perhubungan Kota Dumai  
 Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebanyak 119 orang. Dari jumlah pegawai tersebut diatas sebanyak 7 orang berpendidikan S2/pasca sarjana, S1/sarjana sebanyak 36 orang, D3 sebanyak 12 orang, D2 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 60 orang, SLTP 2 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 6. 7 Dibawah ini :

Tabel 6. 7

## Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	14
4.	Penata	III/c	11

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	19
6.	Penata Muda	III/a	12
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	17
8.	Pengatur	II/c	23
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	12
10.	Pengatur Muda	II/a	6
11.	Juru Muda Tingkat I	I/d	1
<b>Jumlah</b>			<b>119</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

d) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai dibantu oleh 7 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 1 (satu) orang (S2), dan 6 (enam) orang (S1). Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada **Tabel 6. 8**.

**Tabel 6. 8**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina	IV/A	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	1
3.	Penata	III/C	2
4.	Penata Muda Tingkat I	III/B	1
5.	Penata Muda	III/A	2
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

e) Bagian Adm Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

Jumlah Pegawai pada Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 13 orang. Dari jumlah Pegawai diatas sebanyak 3 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 7 orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 orang berpendidikan SMU. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada **Tabel 6. 9**.

**Tabel 6. 9**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Bagian Administrari Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	3
3.	Penata Muda Tingkat I	III/B	4
4.	Penata Muda	III/A	3
5.	Pengatur	II/C	2
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

f) Dinas Sosial Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Dumai dibantu oleh 26 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 2 orang (S2), 11 orang (S1), DIII 3 orang, dan SMA sebanyak 10 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada **Tabel 6. 10** Dibawah ini :

**Tabel 6. 10**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan**  
**Pada Dinas Sosial Kota Dumai**

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina Tk.I	IV/B	1
3.	Pembina	IV/A	3
4.	Penata Tingkat I	III/D	10
5.	Penata	III/C	3
6.	Penata Muda Tk.I	III/B	3
7.	Pengatur Tk.I	II/D	2
8.	Pengatur	II/C	3
<b>Jumlah</b>			<b>26</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

g) Dinas Pendapatan Kota Dumai

Jumlah Karyawan/Pegawai pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Dumai adalah sebanyak 82 orang yang terdiri dari PNS. dengan 8 orang berpendidikan S(2), S1 sebanyak 22 orang, D3 sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 43 orang dan SLTP sebanyak 1 orang serta 1 orang SD. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada *Tabel 6. 11* Dibawah ini :

**Tabel 6. 11**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan**  
**Pada Dinas Pendapatan Kota Dumai**

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk. I	IV/b	0
3.	Pembina	IV/a	4
4.	Penata Tingkat I	III/d	11
5.	Penata	III/c	9
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	10
7.	Penata Muda	III/a	7
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	6
9.	Pengatur	II/c	14
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	15
11.	Pengatur Muda	II/a	3
12.	Juru Tk. I	I/d	0
13.	Juru Muda Tk.I	I/b	1
14.	Juru Muda	I/a	1
<b>Jumlah</b>			<b>82</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tidak terdapat penggunaan dana APBD Tahun 2015 dalam Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

8. Jangka Waktu kerjasama

a) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah selama 20 (dua puluh) tahun.

b) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pembangunan Plasa Dumai selesai dan diresmikan.

- c) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
- d) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah dihitung sejak tanggal penandatanganan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak serta mengacu pada aturan hukum yang berlaku.
- e) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
- f) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
- g) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
- h) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
- i) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
- j) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah selama 5 (lima) Tahun.
- k) Jangka Waktu Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah tidak terbatas.
- l) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah berlaku sampai adanya kesepakatan lain yang disetujui oleh kedua pihak.
- m) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau adalah berlaku sejak tahun anggaran 2014 dan dapat diperbaharui apabila salah satu pihak merasa perlu meninjau kembali kesepakatan bersama ini.
- n) Jangka Waktu Kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah selama 3 (tiga) Tahun.
- o) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan kepulauan Riau Area Dumai adalah 1 (satu) Tahun.
- p) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah selama 5(lima) Tahun.
- q) Jangka Waktu kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai adalah 1(satu) Tahun.

- r) Jangka Waktu kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai adalah 1(satu) Tahun.
- s) Jangka waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah selama 1(satu) Tahun.

4. Hasil (*Output*) dari Kerjasama

- a) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Sarana dan Prasarana Objek Wisata Bunga Tujuh.
- b) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah :
  - Tersedianya pusat perbelanjaan yang representatif bagi masyarakat Kota Dumai.
  - Diperolehnya kompensasi/ royalti sebagai Pendapatan Daerah Kota Dumai sebesar US\$ 6.000,- (enam ribu dolar Amerika) per Tahun selama jangka waktu kerjasama.
  - Pada akhir masa kerjasama seluruh bangunan Plasa Dumai beserta fasilitas pendukung lainnya menjadi milik Pemerintah Kota Dumai.
- c) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah Tersedianya jalan dengan kondisi yang baik yang dapat dimanfaatkan/dipergunakan oleh masyarakat.
- d) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah adanya pemahaman dan pengetahuan Perundang-undangan lalu lintas dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada Siswa/siswi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
- e) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Meningkatkan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Wilayah Kota Dumai.
- f) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Wilayah Perairan.
- g) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Peningkatan PAD dari Jasa Pelabuhan (Dermaga).
- h) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Peningkatan PAD dari Jasa Kepelabuhanan (Dermaga).
- i) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Peningkatan PAD dari Jasa Kepelabuhanan (Dermaga).
- j) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Mendorong pertumbuhan dan penguatan Ekonomi Daerah serta Memperlancar Arus Barang dan Jasa.

- k) Hasil Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah Memberikan Kesempatan kepada Guru untuk saling bertukar materi informasi tentang metode dan prakteknya dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan secara umum, memperluas kesempatan untuk saling berhubungan dengan berinteraksi dengan warga Sekolah, Pertukaran Guru dan Siswa.
- l) Hasil kerjasama antara PT. (Persero) PELINDO I Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Kontribusi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pelabuhan PT. Pelindo
- m) Hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai adalah Sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 10 Persil.
- n) Hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah Optimalisasi pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah.
- o) Hasil kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah pemasangan X-Ray Scanner di bandar Udara Pinang Kampai Dumai.
- p) Hasil Kerjasama antara Pemerintah kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah kelancaran penerimaan PAD berasal dari PPJ dan pelunasan pembayaran Rekening listrik serta pengawasan dan penertiban PJU-Swadaya.
- q) Hasil Kerjasama antara Pemerintah kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah pinjam pakai aset dan pengelolaan Pantai Marina.
- r) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai adalah Sertifikat Tanah Asset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 8(delapan) persil.
- s) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai adalah Sertifikat Tanah Asset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 6(enam) persil.
- t) Hasil kerjasama antara Pemerintah kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah pendistribusian Raskin.

#### 10. Permasalahan dan Solusi

Pada umumnya tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Kerjasama yang telah dilaksanakan, hanya saja terdapat beberapa MoU Kerjasama yang perlu ditinjau ulang kembali terutama pada Bidang Kerjasama Perhubungan Udara (Pinjam Pakai Bandar Udara Pinang Kampai). Dimana terdapat beberapa pasal/ayat pada perjanjian dimaksud sangat membebani Pemerintah Kota Dumai (seperti pembayaran PBB Bandara dibebani ke Pemerintah Kota Dumai) dan panjang Runway hanya 1.800 m x 30 m hanya bisa didarati pesawat F-100 dan sejenisnya secara terbatas. Selanjutnya Perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai tentang kegiatan sertifikasi tanah asset

Pemerintah Kota Dumai dimana kurangnya persyaratan kelengkapan administrasi dikarenakan asal perolehan dari hibah masyarakat.

## Kerjasama Dengan Luar Negeri

Untuk Tahun 2016 tidak terdapat pelaksanaan Kerjasama dengan Luar Negeri

## Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

### 1. Forum Komunikasi

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah maka Pemerintah Kota Dumai menjalin hubungan dan komunikasi melalui koordinasi yang dilakukan dengan Instansi-Instansi Vertikal yang ada maupun dengan aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan secara rutin baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidental yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dimana permasalahan tersebut membutuhkan penanganan secara integratif dari berbagai komponen yang ada. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan melalui Wadah atau Forum Komunikasi yang mana keberadaan Forum Komunikasi atau Wadah dimaksud diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan Unit Kerja atau Instansi yang tergabung atau harus diikutsertakan di dalam Forum Komunikasi tersebut.

Disamping melakukan koordinasi melalui Forum Komunikasi tersebut, melakukan koordinasi dan komunikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui kerjasama dari semua pihak kepada Instansi atau Aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Adapun Forum Komunikasi yang keberadaannya diatur menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas antara lain meliputi ;

- a) Forum MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah)
- b) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

### 2. Materi Koordinasi

#### a) Forum MUSPIDA

Adapun materi yang dibahas didalam rapat Muspida antara lain menyangkut masalah pertahanan dan keamanan ( meliputi pertahanan dan keamanan didarat, laut dan Udara), Kamtibmas, masalah tindak pidana, masalah ketertiban umum, penyakit masyarakat serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dipandang dapat menimbulkan dampak negatif

yang berskala luas yang pada gilirannya akan mengganggu ketenangan ditengah masyarakat serta menghambat dan mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah. Disamping itu pada setiap pertemuan atau Rapat Muspida juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat aktual yang menjadi perhatian baik Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Pemerintah Daerah sendiri, seperti kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan dalam rangka menyambut perayaan hari-hari besar agama, penyambutan tahun baru masehi, persiapan kunjungan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah Pusat lainnya, serta permasalahan sosial lainnya yang bersifat aktual dan mendesak

#### b) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Komunitas Intelijen Daerah merupakan Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Dalam setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh Kominda Kota Dumai memiliki agenda pertemuan antara lain ; menerima informasi (Informasi inteligen) dari seluruh anggota Kominda tentang setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya permasalahan yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun keresahan ditengah masyarakat seperti masalah narkoba, penjualan minuman keras, kegiatan prostitusi terselubung, pelanggaran peraturan perundang-undangan serta berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, kemungkinan timbulnya gejolak sosial serta dampak sosial lainnya yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan di Daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, informasi yang diterima sebagaimana disebutkan diatas akan ditindaklanjuti melalui Unit Kerja terkait guna penyelesaian lebih lanjut. Pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominda Kota Dumai adalah bersifat preventif dalam arti berupaya mendeteksi secara dini timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas Daerah.

### 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

#### a) Forum MUSPIDA

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah diatur tentang instansi yang tergabung didalam unsur Muspida yaitu

- Pemerintah Daerah (dalam hal ini Walikota Dumai);
- Komando Distrik Militer (Kodim 0303 BKLS);

- Kepolisian Resort Kota ;
- Pengadilan Negeri; dan
- Kejaksaan Negeri.

Namun demikian, mengingat masih terdapatnya Instansi atau Unit Kerja lain yang dipandang memiliki kapasitas setingkat dengan unsur Muspida, maka Forum Komunikasi Muspida di Kota Dumai juga dengan mengikutsertakan Instansi atau Unit Kerja dimaksud. Adapun Instansi atau Unit Kerja setingkat Muspida tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan Muspida Plus Kota Dumai yaitu :

- Pimpinan DPRD Kota Dumai (dalam hal ini Ketua DPRD Kota Dumai);
- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal Kota Dumai),
- Satuan Radar 232 Dumai (Dansatradar 232 Dumai);
- Detasemen Rudal 004 (Dan Den Rudal 004); dan
- Komandan Kompi Senapan A 132 Bagan Besar (Dan Kipan A 132)
- Sub Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat (Dan sub Den POM AD)

#### b) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah bahwa yang tergabung dalam unsur Kominda Kota Dumai adalah :

- Walikota Dumai beserta Unsur Muspida Kota Dumai (bertindak selaku Dewan Pembina Kominda) ;
- Wakil Walikota Dumai (Selaku Ketua Kominda) ;
- Unsur Kodim 0303 BKLS (Pasi Intel Kodim selaku Wakil Ketua I Kominda) ;
- Unsur Polresta Dumai (Kasat Intelkam Polresta selaku Wakil Ketua II Kominda) ;
- Pos Daerah/ Posda Badan Intelijen Daerah ;
- Unsur Kejaksaan Negeri Dumai (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dumai) ;
- Unsur Imigrasi Kota Dumai ;
- Unsur Bea dan Cukai Kota Dumai ;
- Unsur Satuan Radar 232 (Kasi Intel Satradar 232 Dumai) ; dan
- Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut (Kasi Intel Lanal Dumai)

#### 4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi melalui Forum Kominda telah dianggarkan dana yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun 2016 sebesar Rp. 589.990.000,-- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 575.310.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 97,51%

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal  
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Jumlah pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai berjumlah sebanyak 11 orang dengan Kualifikasi pendidikan yang terdiri dari 1 orang S2, 5 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D-III dan 4 orang berpendidikan SLTA Sederajat. Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada **Tabel 6. 13** dibawah ini :

**Tabel 6. 13**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan**  
**Pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai**

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	2
3.	Penata	III/C	3
4.	Penata Muda	III/A	1
5.	Pengatur Tk. I	II/D	1
6.	Pegatur	II/C	3
<b>Jumlah</b>		-	<b>11</b>

*Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai*

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui Forum Kominda selama Tahun 2016 sebanyak 12 kali pertemuan, dari jumlah pertemuan tersebut belum termasuk dengan koordinasi yang dilakukan melalui pertemuan non formal dan bersifat insidental.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Jalanan Kerjasama yang dibina oleh Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal di Daerah yang dilakukan melalui Forum Muspida dan Kominda maupun melalui forum lainnya jelas sangat memberikan hasil yang bersifat positif bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan untuk kemajuan Kota Dumai pada umumnya.

Koordinasi tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk saling berbagi (sharing) informasi tentang kondisi aktual yang ada, sebagai wadah untuk mencari solusi guna penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian permasalahan yang ada dapat lebih cepat dan efektif, sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama, menyamakan cara pandang dan persepsi serta saling bersinergi antara pemerintah Daerah dengan aparatur pemerintah pusat di Daerah.

Disamping itu dengan dilakukannya koordinasi maka dapat ditempuh upaya-upaya yang bersifat preventif dalam upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan yang diperkirakan akan terjadi. Terciptanya suasana Kota Dumai yang kondusif serta berhasilnya pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan lainnya adalah merupakan salah satu hasil dan

manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal yang ada di Daerah.

#### 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap koordinasi yang dilakukan akan ditindaklanjuti secara bersama sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban masing-masing Instansi/Unit kerja.

#### 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah Kota Dumai menjalin kerjasama dengan semua instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat yang ada di Daerah, baik instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat tersebut tergabung ke dalam Forum Komunikasi yang telah diatur keberadaannya menurut peraturan perundangan maupun yang tidak tergabung kedalam Forum Komunikasi dimaksud. Diantaranya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama atau koordinasi yang baik dengan aparatur Departemen Agama yang ada di Daerah melalui Kantor Departemen Agama Kota Dumai, pihak Imigrasi Kota Dumai, Bea dan cukai, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta berbagai instansi lainnya yang ada di Daerah. Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan pertemuan lainnya baik yang bersifat formal maupun informal.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, mendapatkan dukungan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai.

#### 11. Pembinaan Batas Wilayah

Penegasan Batas wilayah, baik batas antar kecamatan dan antar kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai maupun batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten lainnya (khususnya Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir) tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Dumai, karena penegasan batas wilayah akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai saat terbentuknya Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, belum diikuti dengan adanya penegasan batas wilayah yang jelas dan pasti dilapangan antara Kota Dumai sebagai Daerah Otonom yang baru dengan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Induk. Begitu juga halnya dengan penegasan batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir yang juga merupakan Daerah Otonom pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Disamping itu mengenai penegasan Batas baik antar kelurahan maupun antar kecamatan dilingkungan Pemerintah kota Dumai belum ditetapkan secara pasti dilapangan dalam arti belum dilakukan pemasangan Pilar Batas, namun demikian mulai sejak tahun 2005-2010 upaya penegasan batas tersebut sudah mulai dilaksanakan, yaitu :

## 1. Batas Wilayah Kabupaten/ Kota

### a) Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

### b) Batas wilayah kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun perangkat batas daerah di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan aspek kewenangan dalam mengelola suatu daerah berbasis keruangan meliputi pemetaan dan penegasan batas, dalam rangka tertib administrasi kewilayahan.

Tujuan dan sasarannya adalah dengan adanya perangkat batas wilayah yang tegas dalam hal ini adalah melengkapi keberadaan pilar batas Kabupaten/Kota dan pilar batas Kecamatan/Kelurahan dengan melakukan pengukuran posisi, maupun perangkat batas yang lainnya (seperti koordinat batas, serta acara penetapan batas, peta batas dll), dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi daerah untuk mengelola dan menata daerahnya dalam frame wilayah batas yang jelas

## 2. Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Tahun 2005 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat dan Lurah melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai.

Tahun 2007 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur beserta kelurahan yang ada diwilayah kecamatan tersebut melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur

Tahun 2008 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Sugai Sembilan beserta Kelurahan melakukan kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan Batu Teritib, Basilam Baru dan Kelurahan Tanjung Penyembal Koata Dumai.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pelacakan batas-batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai, membuat deskripsi batas dan peta administrasi kelurahan dan kecamatan, melakukan inspeksi terhadap peta administrasi yang selama ini dipakai serta mengadakan musyawarah kesepakatan batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai

Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah mendapatkan batas kelurahan dan kecamatan yang definitif, dan akomodatif, menyelesaikan permasalahan batas administrasi baik pada tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan serta menyiapkan dokumen batas yang dapat dipergunakan untuk rencana pemekaran wilayah maupun pembuatan Perda batas antar kelurahan dan kecamatan.

Dari tahun 2011-2016 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai khususnya pada penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis serta Kabupaten Rokan Hilir.

a) Penyelesaian Batas Daerah

Dalam pembinaan batas wilayah tersebut Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian Batas Daerah sebagai berikut :

- Batas Wilayah Kabupaten/ Kota

1) Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2011 Kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahun 2006 menimbulkan permasalahan dilapangan, sehingga Pemerintah Kota Dumai meminta peninjauan ulang kembali atas kesepakatan dimaksud dan untuk penyelesaian batas wilayah tersebut kembali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai. Dan oleh Gubernur sebagai fasilitator dalam penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah definitif antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

2) Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Dari tahun 2009-2016 kegiatan pelacakan dan penetapan batas Kecamatan dan Kelurahan belum ada ditindak-lanjuti dan terfokus pada kegiatan Batas antar Daerah Kabupaten/Kota

3. Sengketa Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota

a) Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah Lain

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa Daerah yang secara administratif dan secara geografis berbatasan secara langsung dengan Wilayah Kota Dumai adalah

Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum tidak ditemukan adanya permasalahan yang menonjol sebagai akibat belum ditegaskannya batas antara Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir tersebut. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan tidak dipengaruhi oleh permasalahan batas tersebut. Namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan batas ini dikemudian hari maka Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelesaian dan penegasan batas wilayah dimaksud.

Adapun Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km) dimana wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242, 098 meter (100, 242 Km) dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan.

- b) Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai. Dalam hal masalah batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, sampai saat ini memang belum dilaksanakan penegasan batas dilapangan secara keseluruhan. Selain itu juga belum ditemukan adanya permasalahan yang menonjol yang terjadi sebagai akibat belum adanya penegasan batas dimaksud.

Namun demikian, untuk tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan harus dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai dengan selesai.

#### 4. Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

- a) Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah lain

Untuk mewujudkan batas Daerah yang jelas dan pasti baik secara Yuridis maupun fisik dilapangan maka penegasan batas daerah harus dilakukan. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa Penegasan Batas Daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Berkaitan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai. Tim ini akan bekerjasama dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Mekanisme kerja dan tahapan yang dilakukan dalam penegasan Batas Daerah tentunya sesuai dengan yang

sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas antara lain ; penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas.

Dalam hal batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan/ditegaskan melalui pemasangan pilar batas pada tahun 2006 yang lalu. Dari jumlah 100.242,098 meter (100,242 Km) wilayah yang berbatasan telah dapat disepeleakati penyelesaiannya secara keseluruhan.

Mengenai tata batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis juga sudah dilakukan upaya-upaya dalam rangka penegasan batas secara pasti dilapangan bersama pihak Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar wilayah yang berbatasan sudah dapat dilakukan penegasan batas dilapangan. Dari jumlah yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km), telah dapat ditegaskan dilapangan sepanjang lebih kurang 45 km. Sedangkan sebagian kecil lainnya saat ini sedang dalam proses penyelesaian antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau, dan telah direkomendasikan oleh Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

b) Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penegasan batas wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Disamping itu penegasan batas tersebut diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan.

Pada Tahun 2007 sudah dapat diselesaikan atau dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kecamatan Bukit Kapur dengan Kecamatan Dumai Barat sepanjang 12, 20 Km (telah selesai secara keseluruhan/100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai timur dengan Kecamatan Medang Kampai sepanjang 13, 30 Km (telah selesai secara keseluruhan/ 100%)
- Batas antara Kecamatan Dumai Barat dengan Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 4,50 Km (masih terdapat yang belum diselesaikan sepanjang 12 Km)

Pada Tahun 2008 sudah dilakukan pelacakan batas dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kelurahan Batu Teritib dengan Basilam Baru dan Kelurahan Basilam Baru dengan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 40 Km (telah selesai secara keseluruhan/ 100%).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
- Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan batas wilayah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
- Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai dibantu oleh 10 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 1 orang (S2), 4 orang (S1), 1 orang (D3) dan SMA sebanyak 4 orang. Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada **Tabel 6.14** berikut ;

**Tabel 6.14**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan**  
**Pada Bag. Adm. Pemerintahan Umum**  
**Sekretariat Daerah Kota Dumai**

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina	IV/A	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	3
3.	Penata Muda Tingkat I	III/B	1
4.	Penata Muda	III/A	1
5.	Pengatur Tk.I	II/D	1
6.	Pengatur	II/C	1
7.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	1
8.	Pengatur Muda	II/A	1
<b>JUMLAH</b>			<b>9</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

### Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

#### 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Adapun bencana yang terjadi disepanjang tahun 2016 adalah kejadian kebakaran pada hutan dan lahan.

Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman secara cepat pada saat terjadinya musibah kebakaran oleh petugas bersama-sama dengan dukungan dari warga masyarakat dimana lokasi kebakaran itu terjadi.

#### 2. Status Bencana

Kejadian kebakaran yang terjadi pada Hutan dan lahan status kebakarannya bersifat Regional bahkan bersifat nasional.

#### 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBD Kota Dumai Tahun 2016 dengan rincian ;

a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Jumlah anggaran untuk program ini adalah sebesar 446.778.000,-- (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 442.925.000,- (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,14%

#### 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Daerah sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain adalah :

a) Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi khususnya melakukan upaya antisipasi antara lain; tidak melakukan pembakaran lahan didalam membuka/mengerjakan lahan yang dimiliki, menjaga keamanan dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan perumahan seperti mematikan kompor dan peralatan dapur/listrik pada saat tidak dibutuhkan dan lain sebagainya.

#### 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara operasional pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

#### 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah karyawan/pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai terdiri dari PNS sebanyak 40 orang, dari jumlah karyawan/pegawai diatas antara lain : Berpendidikan Sarjana (S1) 14 orang, DII sebanyak 1 orang dan SLTA 25 orang. Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan pada **Tabel 6. 15** berikut ini :

**Tabel 6. 15**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1	Penata Tingkat I	III.d	5
2	Penata	III.c	1
3	Penata Muda Tk.I	III.b	5
4	Penata Muda	III.a	5
5	Pengatur Tk. I	II.d	1
6	Pengatur	II.c	17
7	Pengatur Muda Tk. I	II.b	5
8	Pengatur Muda	II.a	1
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

#### 7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Pada Tahun 2011 Pemerintah Kota Dumai membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang mana didalam struktur Organisasinya terdapat UPT Pemadam Kebakaran yang sebelumnya merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Dumai. Dengan ditetapkannya PERDA tersebut, maka resmilah Seksi Pemadam Kebakaran berpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

#### 8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran Hutan dan Lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan.

### 3. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 butir 19, bahwa yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Propinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus dimaksud antara lain untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan Daerah.

Bertolak dari pengertian Kawasan Khusus diatas, untuk Kota Dumai sampai saat ini belum terdapat wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Khusus. Namun demikian upaya untuk menjadikan salah satu wilayah Kota Dumai menjadi Kawasan Khusus saat ini sedang dilakukan, yaitu menjadikan Kawasan Industri Dumai yang bertempat di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI), dimana keinginan Pemerintah Kota Dumai tersebut sudah disampaikan kepada Pihak Propinsi dan Pemerintah Pusat.

### H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya).  
Pada tahun 2016 tidak terdapat kejadian yang dapat menyebabkan gangguan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani  
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara operasional pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibantu oleh 48 Orang PNS dan 42 orang tenaga kerja sukarela. Dengan kualifikasi pendidikan, 2 Orang Magister (S2) 10 orang Sarjana (S1), 31 orang SMA, 3 orang SMP, dan 2 orang SD. Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada **Tabel 6. 16** berikut ;

**Tabel 6. 16**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kota Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tk. I	IV/B	1
2.	Pembina	IV/A	-
3.	Penata Tingkat I	III/D	2
4.	Penata	III/C	2
5.	Penata Muda Tingkat I	III/B	1
6.	Penata Muda	III/A	6
7.	Pengatur Tingkat I	II/D	3
8.	Pengatur	II/C	16
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	6
10.	Pengatur Muda	II/A	6
11.	Juru Tingkat I	I/D	1
12.	Juru	I/C	3
13.	Juru Muda Tingkat I	I/B	-
14.	Juru Muda	I/A	1
<b>Jumlah</b>			<b>48</b>

Sumber : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai

d. Penanggulangan dan Kendalanya

Kendala yang dialami yaitu berupa terbatasnya dana dan perlengkapan yang dimiliki.

e. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Apabila ditemukannya adanya gangguan keamanan biasanya aparat keamanan tetap diikutsertakan.

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

yang dipergunakan dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum bersumber dari dana APBD Kota Dumai Tahun 2016 dengan rincian ;

1) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dialokasikan dana sebesar Rp. 144.625.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 143.125.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98,96%.



# **LKPJ 2016**

# **BAB 7**

Pemerintah Kota Dumai  
Tahun Anggaran 2017

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2016 disampaikan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Dumai menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Akhirnya disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai untuk dapat memberikan masukan atau rekomendasi dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2016 ini untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.